

Perempuan Hindu Dalam Pasungan Tradisi

by Ni Wayan Karmini

Submission date: 12-Apr-2020 04:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 1295529512

File name: buku_perempuan.pdf (2.19M)

Word count: 65665

Character count: 427978



PEREMPUAN HINDU DALAM PASUNGAN TRADISI

DR. Dra. NI WAYAN KARMINI M. Si.



SARI KAHYANGAN INDONESIA

**PEREMPUAN HINDU BALI
DALAM PASUNGAN TRADISI**

Hak Cipta: DR. DRA. NI WAYAN KARMINI, M.SI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT)

Ni Wayan Karmini

**PEREMPUAN HINDU BALI
DALAM PASUNGAN TRADISI**

Denpasar : Sari Kahyangan Indonesia & Universitas Hindu
Indonesia,

2015, vi + 281 Hlm.; 21 x 15 cm

ISBN : 978 - 602 - 8574 - 47 - 1

1. Budaya.

1. Judul.

Desain Cover : Edi

Penata Isi : Ketut Sumadi, Sukma

Cetakan I : Februari 2015

Penerbit : Sari Kahyangan Indonesia

Alamat : Jalan Gutiswa, No.B-1 Denpasar
(0361) 463070

ANGGOTA IKAPI
No.016/BAI/12

Kata Pengantar

Om Swastyastu

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan ⁶ Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung wara anugrah-Nya, buku yang berjudul “Perempuan Hindu dalam Pasungan Tradisi” dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Emiliana Mariyah, MS, yang terhormat ⁸ Prof. Dr. I Nyoman Kutha Ratna, S.U., selaku kopromotor I dan sekretaris Program Studi ⁸ Pendidikan Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana. Yang terhormat Prof. Dr. I Made Suastika, S.U. Atas perhatian dan kesabaran beliau bertiga di tengah-tengah rutinitas kesibukannya, berkesempatan memberikan bimbingan, arahan pandangan-pandangan, petunjuk, dorongan dan semangat sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Kepada teman-teman pada program Pascasarjana (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana Angkatan 2008, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya, secara bersama-sama baik dalam keadaan suka maupun duka, saling terbuka dalam membagi ilmu, saling tegar dan tidak berputus asa, menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan selama pendidikan. Kompak di bawah arahan selaku kordinator siswa yakni Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., serta teman-teman lainnya yakni Erlinda, SSn., M.Sn., Drs. La Taena, M.Si., Drs. Nopriyasman, M.Hum., Drs. I Nyoman Lodra, M.Si., Drs. I Nengah Punia, M.Si., I GA Alit Suryawati, S.Sos, M.Si., Ni Made Arsiniwati, SST., M.Si., Drs Ida Bagus Seloka, M.Si., Dra. Luh Putu Sendratari, M.Hum., Dra. Relin D.E., M.Ag., Drs. I Ketut Setiawan, M.Hum., Drs. I Wayan Winaja, M.Si., I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. Ir Ni Wayan Sri Astiti, MP., I Gede Arya Sugiarta, S.Kar., M.Hum., Ni Made Ras Amanda Gelgel., Pande Wayan Renawati,

SH.,M.Si., Drs I Nengah Narsa, SH., M.Si., dan Drs I Putu Sudarma, M.Hum. Tidak ketinggalan pula, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Selaku Rektor Universitas Hindu Indonesia di Denpasar, Prof. Dr. Baharudin Abubakar, MS., selaku Koordinator Kopertis Wilayah VIII Denpasar, yang kesemuanya merupakan tempat penulis bernaung dan telah memberikan ijin untuk melanjutkan studi pada Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana. Segala dukungan baik moril maupun materiil, telah mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Program Pendidikan ini.

Terima kasih yang sama penulis juga sampaikan kepada pemerintah dan jajarannya, telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Kawasan Sanur yaitu Sanur Kauh, Sanur Kaja, dan Kelurahan Sanur. Dinas Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dan provinsi yang telah memberikan informasi begitu banyak tentang perempuan Hindu di Kawasan Sanur, untuk itu penulis ucapkan terima kasih sekali lagi.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, MS., Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia atas segala bantuannya;
2. Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, atas segala bantuannya;
3. Drs. I Made Sujana, M.Pd., Direktur Pendidikan Ditjen Bimas Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia;
4. Drs. I Made Sutrisna, MA., Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Ditjen Bimas Hindu;

Semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua yang terkait dengan buku ini, namun penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis harapkan agar penelitian yang dilakukan penulis dapat lebih sempurna, terima kasih.

OM Santih Santih Santih OM

Denpasar, Desember 2012

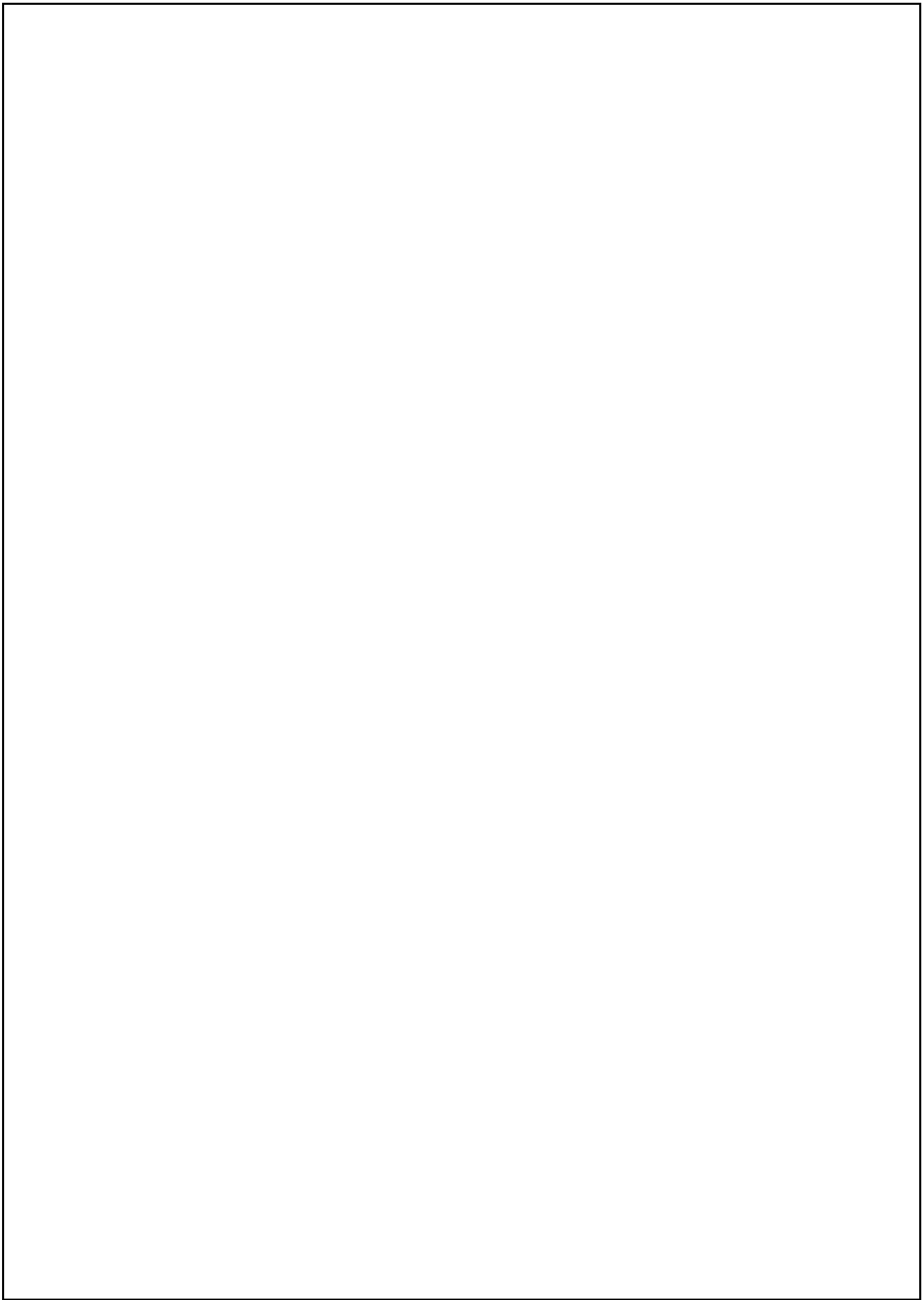
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
8 DAFTAR ISI.....	xxix
DAFTAR TABEL.....	xxxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxxv
Daftar Lampiran.....	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan.....	9
Tujuan Umum	9
Manfaat Teoritis	10
8 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN	12
Kajian Pustaka.....	12
Konsep	18
Keterpinggiran Perempuan	19
Pekerja Hotel Berbintang Lima	25
5 Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima	34
Kawasan Sanur, Denpasar Selatan	35
Landasan Teori.....	37
Teori Hegemoni	37
Teori Dekonstruksi	39
Teori Posfeminisme.....	44
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN PEKERJA PEREMPUAN HINDU PADA HOTEL BERBINTANG LIMA DI KAWASAN SANUR	58

Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	58
Letak dan Geografis	58
Sejarah Desa Kawasan Sanur.....	65
Keadaan Penduduk	70
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	71
Mata Pencaharian Penduduk	77
Kehidupan Adat dan Keagamaan	79
Sistem Pemerintahan Desa di Kawasan Sanur.....	84
Sistem Kekerabatan.....	101
Kehidupan Sosial Ekonomi.....	106
1 Gambaran Umum Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur.....	109
Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima	109
Sejarah Pariwisata di Kawasan Sanur.....	117
BAB IV BENTUK KETERPINGGIRAN PEREMPUAN HINDU PEKERJA HOTEL BERBINTANG LIMA	128
Nihilnya Perempuan Hindu Menjadi General Manajer/ Top Manajer	132
Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam Unit Serikat Pekerja	144
Pengembangan Kapasitas Diri yang terabaikan	157
↳Penerimaan Gaji dan Insentif yang Kurang Optimal.....	160
1 BAB V FAKTOR PENYEBAB KETERPINGGIRAN PEREMPUAN HINDU PEKERJA HOTEL BERBINTANG LIMA.....	178
Faktor Internal	179
Skill dan Profesionalitas	179
Keterikatan Keluarga	188
Keterikatan Adat	191
Faktor Eksternal	215
Keterbatasan Relasi	215

Ketiadaan Dukungan Kebijakan tertulis	228
Pembinaan dan Pelatihan yang Minim	237
BAB VI 1 DAMPAK DAN MAKNA KETERPINGGIRAN PEREMPUAN HINDU PEKERJA HOTEL BERBINTANG LIMA.....	244
Dampak	244
Dampak Sosial	244
Dampak Ekonomi	252
Dampak Budaya	256
Makna	266
Makna Keseimbangan Peran Domestik Publik	268
Makna Kemandirian/Kesejahteraan	287
Makna Penguatan Label Luh-Luwih	292
Temuan Peneliti (novelty)	295
Refleksi	297
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN.....	300
Simpulan	300
Saran.....	302
DAFTAR PUSTAKA.....	304
LAMPIRAN.....	314
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	314
Lampiran 2 Daftar Informan	317



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Pemanfaatan Lahan Kawasan Sanur	61
4.2	Penduduk Kawasan Sanur Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenis Kelamin Tahun 2009	72
4.3	Penduduk Kawasan Sanur Menurut Kelompok Umur Tahun 2009	73
4.4	Penduduk Kawasan Sanur Menurut Tingkat Pendidikan	74
4.5	Penduduk Kawasan Sanur Menurut Agama Tahun 2009	75
4.6	Mutasi Penduduk di Kawasan Sanur Tahun 2009	76
4.7	Tenaga Kerja Menurut Sektor/Usaha di Kawasan Pariwisata Sanur	77
4.8	Pekerja Laki dan Perempuan Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur yang Mempekerjakan Perempuan/ Karyawan	79
4.9.a	Jenis dan Jumlah Hotel serta Tenaga Kerja Pada Kawasan Sanur	109
4.9.b	Pekerja Perempuan di Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur	112
4.10	1 Posisi Perempuan Hindu pada Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur	113

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.1	Model Penelitian	47
4.1	Peta Pulau Bali	59
4.2	Peta Desa Kawasan Sanur	60

4.3	Struktur Umum Kepengurusan Desa <i>Pakraman</i>	85
4.4	Struktur Hotel Bintang Lima Ina Grand Bali Beach,Bali Hyatt,Sanur Beach	111
4.5	Gambar grafik piramida strata posisi manajer pekerja perempuan Hindu	114
5.1	Pola Hubungan dalam Lembaga Kerja Bipartet(LKB)	146
5.1.a	Gambar Aktivitas Kaum Perempuan Dalam Persiapan Upacara Adat	155
5.2	Gambar Aktivitas Kaum Perempuan Hindu di Desa Sanur	159
5.3	Upacara Ritual “Mepeed” yang Dilaksanakan oleh Perempuan Hindu Desa Pakraman Sanur	172
5.4	Aktivitas Perempuan dalam Penyambutan Pejabat di Desa Sanur Kauh	175
6.1	Kegiatan Kaum Perempuan “Ngayah” dalam Persiapan <i>Yadnya</i> Di Pura	199
6.2	Gambar Aktivitas Kaum Perempuan Hindu di Desa Sanur	226
6.3	Wawancara dengan salah satu bagian SDM Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali	231
6.4	Wawancara dengan Kepala Desa Sanur Kauh	239
6.5	Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kodya Denpasar	242
7.1	Perempuan Hindu Dalam Persiapan Upacara Agama Hindu	248
7.1.a	Grafik Piramida Terbalik	254
7.2	Gambar “ <i>Nguopin di Sanggah Keluarga</i> ”	270
7.3	“Ngayah” Dalam Persiapan Perangkat Upacara Dewa <i>Yadnya</i> di Salah satu Pura di Sanur	275

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	314
Lampiran 2 Daftar Informan.....	317

BAB I

EKSISTENSI PEREMPUAN HINDU BALI

Kegiatan kepariwisataan Bali hampir menyentuh semua ruang dan waktu kehidupan masyarakat dalam keseharian, yakni dari aktivitas sosial, kegiatan ritual, budaya, bahkan sampai pada pelaksanaan kegiatan agama (*panca yadnya*). Sehubungan dengan hal itu, wisatawan yang hendak masuk ke areal pura, yang ingin melihat aktivitas pelaksanaan upacara dipersilakan untuk memakai *anteng* (selendang) yang telah disediakan. Di samping itu, biasanya ada buku sumbangan/kotak uang sebagai pertanda bahwa setiap wisatawan yang masuk ke objek wisata diwajibkan untuk membayar sewa dengan nilai yang tidak ditentukan. Dalam kegiatan kepariwisataan seperti ini, keberadaan peran perempuan Hindu, tidak bisa dilepaskan, baik sebagai objek maupun sebagai subjek.

Jauh sebelum kegiatan kepariwisataan yang berlandaskan keanekaragaman serta keunikan budaya Hindu, orang-orang asing tertarik untuk datang ke Bali untuk melihat secara langsung apa yang banyak ditulis, dipublikasikan oleh media asing tentang perilaku raja-raja terhadap rakyat, di samping kepolosan perempuan-perempuan yang telanjang. Dalam hal ini, pencitraan muncul akibat eksistensi perlakuan raja-raja terhadap rakyatnya, orang asing, dan perempuan-perempuan Hindu. Jika ditelusuri dari sejarah pariwisata di Bali, pencitraan ini tidak lepas dari keberadaan kaum perempuan Hindu yang hidup dalam poligami (Wiana, 2001: 36). Mereka menunjukkan kesetiannya dengan melakukan *mesatya* apabila suaminya lebih dahulu meninggal. Hal ini berlaku di lingkungan keluarga raja, yaitu sebagai tanda atau menunjukkan kesetiaan dan kecintaan sebagai istri/selir raja (Picard, 2006: 36).

Pada tahun 1908, perempuan-perempuan Hindu di Bali beraktivitas sosial, seperti: mandi sambil mencuci pakaian, ke pasar atau bepergian ke mana saja, dan mereka bertelanjang dada atau memakai kain *kemben* di bawah puser. Hal ini oleh Nieuwenkamp dan Gregor Krause dicitrakan sebagai sebutan pulau dada telanjang (Picard, 2006:37).

Pada Tahun 1920, Gregor Krause, dokter kelahiran Jerman menulis dan menerbitkan sebuah buku yang membuat sensasi berita besar tentang perempuan-perempuan Hindu Bali, dilengkapi dengan foto-foto yang sangat eksotik. Buku yang secara khusus menjelaskan tentang keanekaragaman

budaya Bali dan aktivitas perempuan-perempuan Hindu pada Tahun 20-an sangat laris dan dicetak berulang-ulang. Penyebarluasan buku tentang aktivitas perempuan-perempuan Hindu dan keindahan alam Bali, secara tidak langsung ikut sebagai media promosi untuk mengundang orang asing agar datang ke Bali (Pitana, 1998: 22). Sebagaimana dijelaskan oleh Picard (2006: 38), orang-orang Barat ingin melihat secara langsung apa yang pernah dibaca dan dilihat dalam buku yang ditulis oleh Gregor Krause dan Cavarrubias.

Jaring magnet yang ditebarkan dalam buku yang ditulis oleh Gregor Krause, menyebabkan pelukis kelahiran Meksiko, Miguel Cavarrubias dan pengarang Austria Vicki Baum penasaran ingin melihat, kemudian memutuskan untuk mengunjungi Bali. Caverrubias menulis lebih awal dan secara lengkap mempropagandakan Bali. Ia menyebut Bali dengan sebutan Dewata, Bali Sorga, dan yang lainnya sehingga banyak dikenal oleh masyarakat Barat (Picard, 2006:39). Pada era Tahun 1930-an, pelukis Antonio Blanco, Wallter Spies, dan Leumayur sangat antusias untuk melukis dan mengeksplorasi keindahan bagian-bagian tubuh perempuan Hindu. Antonio Blanco berulang-ulang melukis kemolekan tubuh dan keindahan buah dada Ni Ronje. Begitu juga Leumayur menangkap gerakan-gerakan tari telanjang, dengan memusatkan pada kemontokan buah dada, termasuk juga pelukis lainnya. Kedua perempuan yang dimaksudkan di atas, selain menjadi objek atau model lukisan telanjang dada, juga dijadikan istri dengan perkawinan adat Hindu Bali.

Peristiwa budaya tentang perkawinan antara orang asing dengan perempuan Hindu Bali yang berbeda agama dan etnis terjadi antara model dengan pelukis di Bali menjadi berita besar. Hal ini menjadi sebuah wacana budaya yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Bali, peristiwa budaya ini sebagai media promosi. Daya tarik Bali sebagai daerah tujuan wisata didukung oleh faktor keindahan alam, sosial budaya, tradisi, dan Agama Hindu. Sosial budaya Bali merupakan ekspresi Agama Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Keberadaan budaya Bali dilestarikan dari zaman ke zaman oleh *Desa Pakraman* seperti dikatakan oleh Parimatha (2003:16). Akan tetapi, Picard (1993:71) mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa budaya merupakan kunci pengembangan pariwisata Bali. Konsep-konsep pemikiran yang lebih menguatkan pengembangan kepariwisataan di Bali adalah pariwisata budaya (Griya, 1998: 21). Dalam konteks yang lebih luas, Appadurai (dalam Featherstone, 1993: 204) mengatakan bahwa globalisasi sebagai pergerakan manusia (*ethnoscape*),

media (*mediascape*), ideologi (*ideoscape*), teknologi (*tekno scape*) dan pergerakan uang (*finanscape*) yang melanda dunia termasuk Bali, menyebabkan ruang partisipasi kaum perempuan makin lebar dalam segala bidang, khususnya dalam bidang pariwisata. Pembangunan kepariwisataan di daerah Bali, bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam perkembangan kepariwisataan sebagaimana dikatakan Pitana (1992:62) bahwa pariwisata sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah Bali. Untuk menunjang kehidupan masyarakat terutama dalam keluarga kaum perempuan Hindu di Bali sangat berminat bekerja meraih rezeki dalam industri pariwisata (Karmini: 2005). Namun, para pekerja perempuan Hindu masih terbatas pada kedudukan sebagai karyawan hotel, karyawan restoran, *front office*, dan *marketing*, dan sangat jarang menduduki jabatan (posisi) manajer. Selanjutnya, jika ditelusuri dari segi kemampuan, keterampilan dan jenjang pendidikan, kaum perempuan Hindu, tidak sedikit berbekal ijazah sarjana atau setara dengan S1 dan S2.

Perempuan dalam ajaran Agama Hindu, dharmanya sebagai seorang perempuan, yaitu ⁶ sebagaimana tercantum dalam kitab *Menawa Dharmasastra III.56* menyatakan bahwa kedudukan seorang perempuan/wanita ⁶ sangat terhormat. Adapun bunyi selokanya adalah sebagai berikut.

*"Yatra naryastumpujyante,
Ramante tatra dewatah,
Yatraitastu na pu jyante,
Sarwastalah kriyah"*

Artinya:

"Di mana wanita dihormati,
Di sanalah para Dewa-Dewi merasa senang,
tetapi di mana mereka tidak dihormati,
tidak ada upacara suci apa pun yang akan berpahala."

Makna kutipan di atas adalah bahwa dalam memelihara hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, perempuan/wanita mempunyai fungsi sinergis. Dalam hal ini, kesejahteraan atau kebahagiaan perempuan dalam rumah tangga dapat menjadi ukuran berpahala. Perubahan yang diakomodasi oleh perkembangan pembangunan sektor pariwisata, membelah kebekuan paham tradisional tentang perempuan Hindu Bali, kemudian membebaskan tali ikatan kaum perempuan yang berperan di sektor domestik sehingga berpeluang mengambil bagian di sektor publik, seperti menjadi seorang manager. Pandangan tradisional mengatakan bahwa kaum perempuan ditakdirkan untuk memelihara dan melahirkan anak serta melayani suami. Sebaliknya, kaum laki-laki bertugas mencari nafkah untuk menunjang kehidupan keluarganya (Triguna, 2002: 40).

Secara biologis kaum perempuan berperan melahirkan anak, mengasuh dan mendidiknya, di samping melayani kebutuhan suami. Dengan demikian, tanggung jawab perempuan Hindu sebagian besar untuk keperluan rumah tangga (domestik). Tampaknya pandangan tradisional terhadap kaum perempuan ini sudah mulai usang, tergerus oleh derasnya gelombang wacana perubahan, sosial, politik, adat, dan budaya masyarakat di Bali (Griya dan Swarsi, 2000:22). Wacana gender sebagai bentuk perubahan, sebagaimana kaum perempuan Hindu di Bali mulai menuntut persamaan hak yang sejajar dengan kaum laki-laki. Mereka ingin bekerja sebagai perempuan karier (*Brahma Vadini*). Perjuangan kaum perempuan Hindu pada saat ini tidak saja menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat (Triguna, 2000:14)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 (Pasal 1), tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa dalam menjalankan undang-undang ini tidak boleh ada diskriminasi. Dalam hal pemaknaan terhadap peraturan perundangan-undangan ini, kaum perempuan Hindu Bali terutama dalam penyeteraan peran dibenarkan karena tidak menyalahi aturan yang ada. Oleh karena dalam kenyataannya, terutama dalam pembagian pembangunan kepariwisataan, perempuan masih diberlakukan diskriminatif dalam hal pekerjaan antara kaum perempuan dengan laki-laki, terutama dalam posisi sebagai *manager*. Mengingat posisi

pekerjaan dalam bidang ini dapat menjanjikan peningkatan status sosial, politik, dan ekonomi (Griya dan Swarsi, 2000:23).

Dalam Perda No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Bali dinyatakan bahwa pariwisata yang dikembangkan berorientasi pada nilai-nilai normatif kebudayaan serta sangat menghormati lingkungan alam dan sosial. Dalam upaya mendukung program pariwisata selalu terkait usaha-usaha industri kepariwisataan, seperti kerajinan, cendera mata, jasa boga, jasa perjalanan wisata, jasa perhotelan, dan jasa restoran. Oleh karena itu, hal ini membawa konsekuensi terbukanya peluang kerja bagi perempuan Hindu, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum. Pekerjaan bidang industri pariwisata sangat diminati oleh perempuan Hindu karena bidang tersebut menjanjikan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Walaupun perempuan mendapat keuntungan ekonomis dalam industri pariwisata, keuntungan itu sering lebih kecil apabila dibandingkan dengan laki-laki. Di samping itu, sebagian besar partisipasi perempuan dalam bidang ini adalah di sektor informal (March & Taque, 1986:18).

Peran kaum perempuan dalam industri pariwisata dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal (Nurhayati, 1992: 32). Faktor tersebut merupakan karakteristik usaha dan jasa pariwisata, seperti; mengutamakan cipta, rasa, dan karsa sehingga dapat menghasilkan produk pariwisata yang berkualitas. Ketiga sifat tersebut merupakan potensi dasar yang ditawarkan oleh industri pariwisata dalam membantu menciptakan peluang kerja bagi kaum perempuan Hindu. Sifat-sifat ini sangat sesuai dengan naluri perempuan yang secara umum memiliki ketelitian dan ketelatenan. Namun, dalam realitasnya, peran perempuan Hindu Bali di sektor industri pariwisata tidak sesuai dengan apa yang telah dikorbankan, dalam hal ini seperti yang ditulis dalam sejarah perkembangan pariwisata, yang lebih mengarah pada eksploitasi perempuan Bali, yakni budaya poligami oleh kaum bangsawan Bali, budaya telanjang dada, dan menjadi model para pelukis. Semua aktivitas itu sebagai peristiwa budaya yang dijadikan media promosi Bali. Pada saat pembangunan pariwisata begitu maju dan berkembang, kaum perempuan Hindu di Bali hanya bisa menjadi tamu, posisi sebagai manajer hanya sebatas wacana dari pengusaha atau pemilik modal. Di dalam struktur Hotel Berbintang belum ada perempuan yang menjabat manajer, di ⁵enam departemen, seperti: *departement housekeeper*, *departement security*. Departement Personal (kepegawaian), *departement F&B/restoran bar (Food &*

Beverage), *departement FO (Front Office)*, dan *departement sales/marketing*. Hal ini dijadikan sebagai renungan dan kajian untuk mencari penyebab keterpinggiran perempuan Hindu di Bali, khususnya di kawasan desa Sanur. Dalam hal ini keterpinggiran perempuan hindu menduduki jabatan sebagai manajer, baik di hotel, restoran maupun biro perjalanan pariwisata.

Dalam penelitian yang mengungkapkan permasalahan kaum perempuan Hindu di Bali ini, peneliti mengedepankan topik penelitian tentang "Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar" yang menjadi fenomena sekarang ini. Gambaran umum kondisi Hotel Berbintang Lima dan kaum perempuan Hindu di Bali, tidak berbeda dengan apa yang tergambar di industri pariwisata yang ada di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Jumlah ⁵ Hotel Berbintang Lima saat ini yang ada di kawasan Sanur yaitu, Hotel Berbintang Tiga (tiga belas buah), Hotel Berbintang Empat (enam buah), dan Hotel Berbintang Lima (tiga buah), (Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2009)

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah bentuk keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar?
- 3) Apakah dampak dan makna keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar?

⁸ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta mengkaji fenomena yang berkaitan dengan ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima. Hal ini penting karena dibalik fenomena banyak aktor yang berperan dengan berbagai kepentingan, seperti perusahaan, adat-istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan sebagai berikut, ketiga tujuan ini dijabarkan di bawah ini.

- 1) Untuk mengetahui bentuk keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- 2) Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- 3) Untuk menginterpretasikan dampak dan makna keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan ⁸ manfaat praktis. Kedua manfaat ini diuraikan di bawah ini.

Secara teoretis penelitian ini mempunyai manfaat seperti di bawah ini.

- 1) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang perempuan Hindu di ranah Hotel Berbintang Lima sebagai sebuah kajian budaya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang kajian perempuan, khususnya dalam memperkaya hasil penelitian tentang perempuan dan relasi gender di Hotel Berbintang Lima.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat secara praktis, terutama bagi kaum perempuan Hindu dan pariwisata di Bali. Adapun manfaat praktis itu dicantumkan di bawah ini.

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, baik bagi perempuan Hindu yang berminat dengan pariwisata maupun yang telah bekerja di Hotel Berbintang Lima sebagai wanita karir.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan kepada adat serta sebagai bahan evaluasi terhadap *awig-awig* dan *adat* yang selama ini masih dianggap sebagai aturan yang ketat di Desa Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN

Dalam subbab ini dilakukan penelusuran terhadap beberapa pustaka, seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal ini sangat penting dilakukan karena dari penelusuran pustaka tersebut dapat diperoleh inspirasi yang dapat mempertajam konsep dan teori, serta dapat menambah wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penjelajahan pustaka juga dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan substansial penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat dibuktikan originalitasnya, kemudian pada gilirannya penelitian ini signifikan untuk dilakukan. Selanjutnya, berkaitan dengan kajian pustaka, beberapa pustaka yang telah ditelusuri dijelaskan di bawah ini.

Penelitian Ariani dan Astika (1984) yang berjudul “Peranan Wanita dalam Pembangunan Pariwisata di Desa Krobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung” membahas tentang wanita yang bekerja di sektor pertanian (usaha tani milik sendiri, buruh tani), buruh bangunan, dan industri kecil rumah tangga. Keterlibatan wanita dalam kegiatan pariwisata terbatas pada kegiatan yang menunjang sektor pariwisata. Adanya wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah menampakkan adanya pola nafkah berganda.

Hasil kajian Ariani dan Astika di atas menjelaskan bahwa peran wanita hanya terbatas pada kegiatan pariwisata. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Astika dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang perempuan (wanita) di sektor pariwisata. Perbedaannya, peneliti meneliti tentang perempuan Hindu yang termarginal (kalah) dalam posisi jabatan *manajer* di industri pariwisata khususnya di Hotel Berbintang di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, sedangkan Ariani dan Astika meneliti peran wanita dalam kegiatan pariwisata.

Tidak adanya tempat dan posisi bukan karena tidak mempunyai kemampuan dalam bersaing dan beradaptasi dengan kaum perempuan urban yang lebih dominan menduduki posisi jabatan *manajer* di hotel sehingga posisi keterpinggiran semakin kuat. Kelompok urban yang dimaksud

adalah perempuan yang tidak beragama Hindu, yaitu: Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Budha, serta Kong Hu Chu.

Terkait dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan keterpinggiran perempuan Hindu dalam industri pariwisata di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan yakni mereka termarginalkan, tidak berdaya, posisi yang kalah, pasrah, dan terasing dalam lingkungan pariwisata, khususnya dalam jabatan *manajer* di Hotel Berbintang, khususnya (hotel) di Sanur. Tulisan Astika dan Ariani menggugah dan memberikan wawasan peneliti tentang peran wanita dalam perkembangan industri pariwisata yang berperan nafkah ganda. Dengan demikian, pentingnya kajian tersebut adalah untuk membangun wawasan dan sekaligus membuktikannya sehingga diperoleh hasil yang menunjukkan originalitas penelitian ini.

Gayatri (2003) dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Perempuan Bali dalam Pelestarian Budaya dan Pengembangan Pariwisata: Studi Kasus di Kelurahan Kuta” mengemukakan bahwa peranan perempuan dalam pelestarian budaya dan aktivitas agama yang berkesinambungan, hanya dalam pekerjaan *adat* di *Desa Pakraman*. Dalam penelitiannya, masuknya pariwisata ke *Desa Pakraman Kuta*, yakni meningkatkan etnisitas di samping lebih menggairahkan upacara tersebut. Dalam hal ini perempuan melakukan peran dalam dua sisi yang berbeda sehingga sering menimbulkan konflik peran. Jika terjadi konflik, perempuan Hindu lebih mengutamakan kegiatan *adat* daripada kegiatan di sektor pariwisata.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas perempuan. Perbedaannya, peneliti meneliti tentang keterpinggiran perempuan Hindu yang termarginal di industri pariwisata. Dalam hal ini perempuan Hindu yang diposisikan kalah dalam bersaing untuk menduduki posisi jabatan *manajer* di Hotel Berbintang di kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan penelitian penulisan kajian ini sangat penting untuk mendapat acuan tentang konsep dan teori penelitian, di samping sekaligus sebagai pembuka wawasan dalam melakukan penelitian.

Lain halnya dengan penelitian Adithi (2003), yakni tentang “Perempuan Bali dalam Kontek, Pariwisata di Bidang Kewirausahaan Pariwisata: Studi Kasus di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta”. Isinya, yaitu peran ganda wanita Bali tergambar dalam keterlibatan mereka di dunia

pariwisata, khususnya dalam bidang kewirausahaan, seperti sebagai pedagang dan penjual jasa. Usaha dagang yang digeluti, seperti sebagai pedagang souvenir serta makanan dan minuman, jasa pelayanan *massage*, kepong rambut, dan pemasangan kutek. Mereka mengelola usaha masih tergantung pada suami dan anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan suami agar bisa memenuhi keperluan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Adhiti dengan penelitian yang peneliti lakukan berbeda karena peneliti memfokuskan penelitian pada perempuan Hindu yang termarginalkan di industri pariwisata, khususnya di posisi jabatan *manajer* hotel. Penelitian ini memperluas wawasan peneliti, terutama terkait dengan persepsi perempuan dalam industri jasa pariwisata di eraglobalisasi ini. Penelitian ini memberikan kontribusi serta membangun wawasan pada industri jasa pariwisata dan sekaligus membuktikan bahwa penelitian peneliti ini perlu dilakukan sehingga diperoleh hasil yang menunjukkan originalitas.

Selanjutnya penelitian Putri (2005) yang berjudul “Wanita dalam Industri Pariwisata: Studi Kasus Wanita Pengelola Pondok Wisata di Kelurahan Ubud, Gianyar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wanita bekerja sebagai pengelola pondok wisata tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi demi kelangsungan keluarga, tetapi juga didasarkan atas pertimbangan faktor budaya, sistem sosial, kemajuan teknologi, pendidikan, dan faktor lingkungan. Dalam pengelolaan usaha, mereka menggunakan modal pribadi, kemudian kekurangannya memanfaatkan jasa bank. Pengelolaan pondok wisata bersifat kekeluargaan, dalam interaksinya pengelola menerapkan patron klien terhadap karyawan dan wisatawan. Hasil yang ditemukan adalah bahwa kegiatan wanita mampu memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam kenyataan belum mampu menyaingi beban kerja wanita di sektor domestik, termasuk memberikan hak yang setara dengan laki-laki dalam membuat keputusan. Hal ini terganjal oleh adat patrilineal yang berakar pada agama Hindu.

Peran aktif wanita sebagai pengelola pondok wisata ternyata berimplikasi pada belum mampu mengubah statusnya agar setara dengan laki-laki. Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh budaya patriarki yang berlaku dalam masyarakat Bali, yang memposisikan wanita ter subordinasi oleh laki-laki. Hal ini juga didukung oleh ketidakadilan gender secara terus-menerus melalui penyosialisasian dan pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kajian ini jelas berbeda dengan penelitian

peneliti karena hanya terfokus pada jasa wanita pengelola pondok wisata yang dikelola dengan sistem kekeluargaan. Berdasarkan temuan tersebut, maka hal-hal yang belum disoroti dalam kajian ini akan dicari dalam penelitian penulis. Dengan demikian, pentingnya kajian ini dalam membangun sekaligus membuktikan, untuk memperoleh originalitas penelitian.

Di satu pihak, kajian Karmini (2006), dengan judul: “Eksistensi Wanita Hindu dalam Industri Pariwisata di Kawasan Pakraman Intaran Sanur.” Dalam kajian ini dijelaskan bahwa pola pekerjaan disegani di hotel, restoran, penjaga art shop. Selain itu, dijelaskan eksistensi wanita Hindu dalam industri pariwisata hanya untuk menambah penghasilan keluarga, keinginan untuk mandiri, aktualisasi diri, mengatasi kejenuhan rumah tangga sehari-hari. Temuan penelitiannya, yaitu jenis usaha yang tergolong informal, seperti menjaga toko cendramata merupakan alternatif pilihan yang diminati wanita Hindu di kawasan pakraman Intaran Sanur, karena kegiatan tersebut tidak terlalu mengikat dan masih bisa mengerjakan sarana banten saat sepi pembeli. Kompleksnya peran wanita berdampak pada kehidupan. Komunitas desa menuntut mereka agar dapat berpartisipasi di masyarakat melalui adaptasi sosial budaya. Kemudahan-kemudahan berupa pranata sosial diberikan oleh desa pakraman sebagai suatu institusi tradisional masyarakat Bali.

Persamaannya dengan disertasi ini, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan Hindu dan pariwisata, tentunya berbeda dalam kerangka dasar dan permasalahannya dengan apa yang ingin di kedepankan dalam penelitian ini, yaitu Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima. Bahkan dapat dikatakan penelitian ini merupakan kelanjutan dari tesis dengan cakupan lebih khusus dan mendalam ¹ tentang keterpinggiran perempuan Hindu sebagai Pekerja Hotel Berbintang Lima.

Letak kekhususannya dan sekaligus juga membedakan dengan penelitian ini adalah hanya meneliti faktor-faktor penyebab wanita Hindu bekerja di industri pariwisata dengan melihat dari bentuk, fungsi dan makna dengan teori realitas budaya. Dalam disertasi ini rumusan masalahnya tidak lagi terpaku pada bentuk, fungsi dan makna teori-teori sebagai pembedah cenderung ke teori kritis dan postmodern (Agger, 2006:8) seperti teori Hegemoni, Dekonstruksi, dan teori Posfeminisme.

Lebih lanjut, penelitian Minawati (2009) dengan judul “Keterpinggiran Komunitas Hindu dalam Pluralitas Agama di Kabupaten Karo, Sumatera Utara” membahas hal-hal yang menyangkut

keterpinggiran komunitas Hindu dalam pluralitas agama. Penelitian ini membahas keberadaan ⁸ komunitas Hindu dalam pluralitas agama di Kabupaten Karo yang terpelekan, termarginalkan, dan tidak berdaya sehingga kalah dan tidak mampu bersaing dengan agama-agama lainnya yang lebih besar, seperti Islam dan Kristen. Kekalahan ini mengakibatkan komunitas Hindu Karo hampir tidak diketahui keberadaannya. Komunitas Hindu Karo dihipotesiskan kalah di tengah-tengah kelompok komunitas lain, baik secara keberagaman, sosial ekonomi, dan politik. ⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang keterpinggiran, termarginal, terpelekan, sampai dalam posisi kalah. Perbedaannya, penelitian Rosta dikhususkan pada keterpinggiran agama Hindu di dalam pluralitas agama besar, sedangkan penelitian penulis mengkhusus pada ⁵ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, terutama keterpinggiran dalam merebut peluang posisi jabatan *manajer* di Hotel Berbintang Lima yang ada di Sanur. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini mampu membuka wawasan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan tidak menutup mata terhadap aspek-aspek lain sehingga penelitian yang akan dilakukan proses keoriginalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini mengandung beberapa konsep penting untuk dijelaskan dan didefinisikan secara tegas untuk menghindari kesalahpengertian, kesalahpahaman, dan kesalahmaknaan. Konsep-konsep tersebut adalah konsep keterpinggiran perempuan Hindu, Hotel Berbintang Lima, keterpinggiran ¹ perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima, dan kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Perempuan Hindu

Penjelasan konsep ini diawali dengan penjelasan tiap-tiap sub-konsep yang membentuk konsep di atas sebagai satu kesatuan. Tiap-tiap subkonsep tersebut adalah konsep keterpinggiran dan konsep perempuan Hindu. Kemudian, ketegasan subkonsep tersebut akan diformulasikan kembali sehingga mampu memberikan penjelasan terhadap satu kesatuan konsep keterpinggiran perempuan Hindu. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut. Keterpinggiran dalam suatu

aktivitas, kegiatan kelompok, dan individu yang tidak mendapatkan porsi yang penting (sentral) bahkan ada kecenderungan terabaikan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan peran dalam bidang organisasi atau dalam bidang pekerjaan, boleh dikatakan sebagai kemarginalan. Keberadaan peran atau posisi pekerjaan cenderung diposisikan tidak begitu penting, dalam hal ini kalau ada disyukuri, tetapi kalau tidak ada dipermasalahkan (Wiana, 2001:14)

Keterpinggiran menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, penyelidikan untuk mencari mengapa terjadi keterpinggiran. Dalam hal ini ada tekanan pada kata “keterpinggiran”, seolah-olah ada pemaknaan yang tersembunyi, terutama yang terkait dengan perempuan Hindu. Dengan demikian, menjadi hal yang sangat penting, apabila kemasan keterpinggiran dikaitkan dengan perempuan Hindu, ras, etnis, dan agama, di samping bisa dan mengganggu stabilitas, khususnya pada kaum perempuan Hindu Bali (Wiana, 2001:16).

Dalam kaitan ini keterpinggiran bisa dikatakan sebagai hal yang sudah tidak diperhatikan lagi atau jika dikaitkan sebagai jabatan, yakni identik dengan tempat dan posisi yang marginal. Keberadaan kaum perempuan dengan kontekstual keterpinggiran, akan menjadi objek gugatan, terutama yang mempertanyakan mengapa kaum perempuan Hindu terpinggirkan di kandangnya sendiri (Wiana, 2001:30).

Dalam kenyataan industri pariwisata di Bali, di posisi *manajer*, “ia” atau “mereka” yang terpinggirkan adalah orang yang dianggap kalah dalam merebut posisi (*manajer*). Kekalahan bukan semata-mata disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki, tetapi oleh sebuah kondisi atau situasi bahwa dia harus menerima kekalahan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kemampuan, maka kekalahan yang harus diterima oleh kaum perempuan Hindu, yakni tidak kalah dalam tataran keadilan, tetapi diterima dengan sebuah kepasrahan (Triguna, 2002: 32).

Dalam dunia kehidupan masa kini yang penuh dengan ketidakadilan, yakni terdapat begitu banyak korban dan posisi sisa yang harus diterima oleh kaum perempuan Hindu Bali. Hanya saja dalam paradigma keilmuan lainnya, keterpinggiran dianggap penyakit atau penyimpangan (patologi). Dalam hal ini keterpinggiran disebut dengan berbagai penamaan dalam kajian budaya. Ia sering disebut *the other* (*sang liyan* atau yang lain), setelah mengalami proses marginalisasi. Di samping itu,

juga disebut subordinal, yaitu konsep yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci dan Chakrovorty Spivak.

Dari sudut pandang kajian budaya, keterpinggiran harus dibela, diubah sehingga keterpinggiran menjadi pusat, dan akhirnya akan terdapat banyak pusat. Dengan demikian, itu tidak ada perempuan yang mau terpinggirkan, termasuk dalam komunitas perempuan Hindu di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Keterpinggiran dalam hal ini merujuk pada posisi dan keberadaan perempuan Hindu dalam industri pariwisata di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang terpinggirkan, termaginal, tidak berdaya, dalam posisi yang kalah, dan pasrah. Kekalahan ini mengakibatkan perempuan Hindu di Desa Sanur dihipotesiskan kalah di tengah-tengah kaum perempuan urban lainnya (Triguna, 2002 : 32-33). Kata "perempuan" dalam (Darma Putra, 2003 : 19), mempunyai dua pengertian: (1) sebagai 'lawan jenis laki-laki' dan 'bini'; (2) sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan menopause. Dalam kaitan ini, Krishna dan Gulsar (2005:1) mengatakan bahwa "bagi para leluhur kita, perempuan adalah *param emp*, yang artinya 'mahabijak'. Boleh dikatakan perempuan diposisikan sebagai orang yang paling bijak, suatu predikat mulia, dan semua orang menghendaknya. Dalam arti yang lain perempuan juga disebut dengan "wanita" yang berarti 'ia yang berpendidikan'. Artinya, perempuan disebut wanita jika telah memiliki kemampuan intelektual, diperoleh dengan proses atau jenjang pendidikan akademis (Triguna, 2002:36).

Dalam hal ini Manda (2003: 4) membedakan antara kata "wanita" dan "perempuan", Kata "wanita" berasal dari kata *betina* (Sansekerta) yang berarti 'tongkat'. Jadi, kata "wanita" berarti, seseorang yang harus selalu dituntun, diberitahu dengan tongkat, atau harus mengikuti ke mana arah tongkat'. Kata "perempuan" berasal dari kata "empu/mpu" yang artinya 'tuan/orang yang dihormati'. Belakangan ini kata perempuan diartikan sebagai orang yang sangat penting sekali kedudukannya dalam kehidupan manusia di dunia ini, misalnya perempuan sebagai pendukung suami dan pembina utama keluarga. Dalam kitab *Niti Sastra* disebutkan bahwa orang yang wajib dihormati adalah orang yang berada (kaya) dan perempuan yang ternama dan baik budinya. Dari pengertian tentang

perempuan, seperti tersebut di atas, yakni tersirat bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Hak-hak ini dimiliki oleh setiap manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan hakikatnya sebagai manusia. Manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan (Septari, 1997 : 202).

Perempuan menginginkan keadilan dan persamaan peran dalam segala dimensi kesehariannya, seperti keadilan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Tuntutan ini adalah wajar, mengingat di dimensi sosial dan di posisi jabatan *manajer* perempuan sering kali ter subordinasi (Triguna, 2002: 16). Padahal secara normatif negara telah menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan di segala bidang (Suriani, 2003:41).

Walaupun peran minoritas masih belum banyak berubah, tetapi dari segi prestasi, kaum perempuan sudah mampu menyamai bahkan melampaui kaum laki-laki dalam bidang pendidikan. Hal ini disebutkan dalam seloka yang tercantum dalam *Rgveda*, yakni “*Stri hi brahma babhuvitha*” (*Rgveda VII, 33,19*), yang berarti perempuan sesungguhnya adalah seorang sarjana dan pengajar. Perempuan yang mampu menempatkan dirinya menjadi guru, akhirnya akan membawa dirinya menjadi ibu bagi semua orang. Perilaku sebagai seorang guru sekaligus akan menata langkah kegiatan seorang perempuan untuk senantiasa setia pada tugas, kewajiban, dan *dharma*nya untuk mendidik dan memberi arah yang benar kepada keluarganya (Titib, 1998: 12). Kemampuan dan prestasi perempuan sudah mulai dihargai, seperti dijelaskan dalam seloka *Canakya Nitisastra*, I.17 di bawah ini.

”Perempuan dibandingkan laki-laki dua kali lebih kuat nafsu makannya,

Empat kali lebih malu,

Empat kali lebih berani,

Dan hendaknya diingat bahwa nafsu kelaminnya delapan kali lebih kuat.”

Seloka itu menggambarkan bahwa perempuan mempunyai kekuatan berpikir, berkretifitas dan mempunyai kelebihan bisa melahirkan dan mempunyai kemajuan untuk mandiri sehingga sloka ini

bertujuan agar laki-laki tidak menganggap rendah perempuan. Kehidupan paling mendasar bagi perempuan Hindu ketika dia memasuki dunia *grehasta* menjadi seorang ibu adalah wibawa yang bersinar dari dalam dirinya karena perannya menjadi ibu sekaligus guru bagi anak-anaknya. Perempuan ⁶ sesungguhnya adalah dasar kebahagiaan keluarga, seperti seloka yang tercantum dalam *Rgveda* III, 53,4 yang berbunyi “*Jayed astam maghavan sed u yonih.*” Artinya, Ya Sang Hyang Indra, ⁶ istri sebenarnya adalah wujud rumah. Dia adalah dasar kemakmuran keluarga itu. Ada dua seloka lain yang mengatakan swadarma seorang ibu dalam keluarga, yaitu seperti yang terdapat dalam simbol hidup untuk bekerja dalam pustaka suci *Bhagawadgita* III tentang *Karmayoga* yang berbunyi sebagai berikut.

*“Na karmanam anarambhan
naiskarmyam purusosnute
na ca samnyasanad eva
siddhim samadhigaccha”*

Artinya:

”Bukan dengan jalan tidak bekerja orang mencapai kebebasan dari perbuatan. Juga tidak dengan melepaskan diri dari pekerjaan orang akan mencapai kesempurnaan”

*”Niyatam kuru karma tvam
karma jyayo hy akarmanah
sarira yatra pi da te
na prasidhyed akarmanah”*

Artinya:

”Lakukanlah pekerjaan yang diberikan padamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-

apa, sehingga juga untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja’

Seloka tersebut di atas menunjukkan bahwa bekerja lebih mulia tidak melakukan apa-apa, fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Wiana (2002: 40) Berdasarkan kedua seloka di atas, jelaslah bahwa ibu sebagai pembimbing anak seyogyanya bisa bekerja sesuai dengan *karma* dan *swadharma*nya untuk kepentingan peningkatan ekonomi keluarga. Selanjutnya, (Wiana, 2002: 42) mengatakan, yang dimaksud dengan Hindu adalah salah satu agama yang dianut oleh masyarakat di Provinsi Bali. Dalam hal ini yang paling dominan (95%) dari jumlah penduduk Provinsi Bali beragama Hindu (Bali dalam Angka, 2009). Kemudian, dari uraian tentang perempuan Hindu tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perempuan Hindu adalah perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial dan budaya sebagai sosok lawan jenis laki-laki. Mereka saat ini sedang memperjuangkan keadilan dan persamaan peran dalam dimensi keseharian di bidang industri pariwisata, terutama bidang pelayanan jasa bidang akomodasi di Hotel-hotel Berbintang yang bertempat tinggal di Kawasan Sanur, Kota Denpasar (Pitana, 2000: 32). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterpinggiran perempuan Hindu dalam penelitian ini diindikasikan adalah posisi dan keberadaan Perempuan Hindu yang terpinggirkan, termarginalkan, tidak berdaya, dan kalah dengan perempuan-perempuan lain yang bukan beragama Hindu.

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan dan didefinisikan secara tegas untuk menghindari kesalahpengertian, kesalahpahaman, dan kesalahmaknaan. Konsep-konsep tersebut, yaitu konsep pekerja, hotel, dan konsep Berbintang Lima. Kemudian subkonsep tersebut akan diformulasikan kembali sehingga mampu memberikan penjelasan terhadap satu kesatuan konsep pekerja Hotel Berbintang Lima. Selanjutnya, tiap-tiap konsep tersebut dijelaskan di bawah ini.

Beberapa istilah pekerja yang digunakan untuk menyebutkan identitas pegawai, seperti pekerja, buruh atau karyawan. Istilah ‘buruh’ pada zaman Orba memiliki dua konotasi. Pertama, dianggap bernuansa politis, dan memiliki tingkat allegitas yang tinggi dari pemerintah, sehingga jarang digunakan dalam wadah organisasi pegawai, terutama di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Kedua, dikonotasikan untuk para pekerja kasar, seperti buruh pabrik dan pelabuhan.

Konotasi yang terakhir sampai sekarang masih melekat. Alergitas pemerintah Orba terhadap masalah politik ikut menciptakan paradigma baru para pekerja untuk mengeliminasi masalah politik dari aktifitas sosial ekonomi. Paradigma tersebut turut mempengaruhi penentuan nama organisasi. Istilah buruh yang dianggap berkonotasi politis berupaya dihindarkan.

Organisasi pekerja merasa nyaman jika menggunakan istilah pegawai, pekerja atau karyawan. Istilah-istilah tersebut diterapkan untuk istilah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), suatu wadah pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN, dan BUMD; istilah pekerja digunakan oleh para pegawai di perusahaan swasta, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pengganti Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI/FBSI); bahkan ada yang menggunakan istilah karyawan, seperti Persatuan Karyawan Perkebunan (PERKAPEN).

Perbedaan terjadi pula di dalam penundukan hukumnya. Para pegawai pemerintahan, BUMN, dan BUMD tunduk pada Peraturan KORPRI, bahkan ada perusahaan swasta (Gobel) menundukkan diri pada aturan ini. Peraturan KORPRI memiliki stelsel pasif dan loyalitas tunggal terhadap pemerintah, siapa pun yang menjadi pegawai negeri secara otomatis menjadi anggota KORPRI. Organisasi pekerja di perusahaan-perusahaan swasta tunduk pada Peraturan (Hukum) Perburuhan. Spirit yang sama diterapkan kepada organisasi ini, tetapi tidak seketat KORPRI. Organisasi Pekerja Swasta digabungkan dalam suatu Federasi, yakni FBSI. Pada tahun 1985, FBSI berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), bersifat monolitik atau unitaris. Selanjutnya, pada tahun 1994, SPSI berubah lagi menjadi Federasi SPSI. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mempermudah kontrol terhadap organisasi pekerja, untuk menjaga stabilitas politik Indonesia.

Pasca reformasi di Indonesia, pengertian buruh, pekerja, karyawan atau pegawai memiliki konotasi dan definisi yang sama, yakni seseorang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penyamaan definisi mempengaruhi penamaan tiap-tiap organisasi. Serikat buruh, serikat pekerja, serikat karyawan atau organisasi wadah pegawai di luar kedinasan lainnya memiliki definisi yang sama, yaitu organisasi yang memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pendefinisian tersebut ditegaskan di dalam UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) dan UU lainnya yang terkait dengan hubungan Industrial, seperti UU No. 13/2003 dan UU No. 2/2004. UU dimaksud

merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO. Namun jika terdapat perbedaan, biasanya terletak dalam sejarah terbentuknya tiap-tiap organisasi. Di dalam penjelasan UU No. 21/2000 ditegaskan, bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sehubungan dengan hal itu, SP/SB merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan SP/SB harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbedaan definisi buruh dan pekerja adalah hasil kreatifitas Orde Baru. Pekerja artinya manusia yang bekerja semacam alat/onderdil dari sebuah mesin, sedangkan buruh/labour adalah manusia yang bekerja dan diupah yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang membutuhkan kesejahteraan, kenyamanan dalam bekerja, mempunyai hak-hak, dan lain-lain. Saat ini sudah tidak relevan lagi membedakan antara SBSI dan SPSI, yang dibutuhkan saat ini adalah kesatuan kaum buruh yang sadar dan siap untuk memperjuangkan hak-haknya. Konfederasi-konfederasi buruh yang ada saat ini dapat kita lihat dalam aksi-aksi belakangan merupakan aksi yang sangat progresif karena adanya kesatuan aksi dan kesatuan tujuan. Indikator pekerja yaitu: (1) orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai dan (2) orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan pekerjaan.

⁷ Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya. Semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut maupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Pengertian hotel ini dapat disimpulkan dari beberapa definisi hotel yaitu: ⁴ a) Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil (Keputusan Menteri Parpostel No Km 94/HK 103/MPPT 1987).

b) Bangunan yang dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut: 1) jasa penginapan, 2) pelayanan makanan dan minuman, 3) pelayanan barang bawaan, 4) pencucian pakaian, 5) penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. (Endar Sri, 1996: 8) c) Sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran (Lawson, 1976: 27).

Karakteristik Hotel, perbedaan antara hotel dengan industri lainnya adalah sebagai berikut: a) Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula; b) dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan tempat hotel tersebut berada; c) menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat jasa pelayanannya dihasilkan; d) beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya; e) memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Jenis Hotel, penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan lokasi tempat hotel tersebut dibangun, hotel dikelompokkan menjadi beberapa jenis: a) City Hotel, yaitu hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut. b) Residential Hotel, yaitu hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga. c) Resort Hotel, yaitu hotel yang berlokasi di daerah pergunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama

diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi. d) Motel (Motor Hotel), yaitu hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

4
Senada dengan pendapat Tarmoezi (2000:3), berdasarkan banyaknya kamar yang disediakan, hotel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. a) Small Hotel, jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar. b) Medium Hotel, jumlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar. c) Large Hotel, jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

Berbeda dengan keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No 22/U/VI/1978 Tanggal 12 Juni 1978 (Endar Sri, 1996 : 9), klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

Secara harafiah, kata hotel dulunya berasal dari kata *hospitium* (bahasa Latin), artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata *hospitium* mengalami proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara *guest house* dengan *mansion house* (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah besar disebut dengan *hostel*. Rumah-rumah besar atau *hostel* ini disewakan kepada masyarakat umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, yang selama menginap para penginap dikoordinir oleh seorang *host*, dan tamu-tamu yang menginap harus tunduk kepada peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh *host* (*host hotel*). Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan orang-orang yang ingin mendapatkan kepuasan, tidak suka dengan aturan atau peraturan yang terlalu banyak sebagaimana dalam *hostel*, dan kata *hostel* lambat laun mengalami perubahan. Huruf “s” pada kata *hostel* tersebut menghilang atau dihilangkan orang, sehingga kemudian kata *hostel* berubah menjadi *hotel*, seperti apa yang kita kenal sekarang.

Dengan beberapa pengertian, hotel didefinisikan sebagai berikut.

Menurut Dirjen Pariwisata, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum.

Persyaratan dan kriteria Hotel *Resort* Bintang Lima, untuk membangun sebuah Hotel *Resort* khususnya Berbintang Lima harus diperhatikan persyaratan dan kriteria bangunan, lokasi, dan lingkungan. 1) Lokasi hotel mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung ke area hotel dan dekat dengan tempat wisata. 2) Hotel harus menghindari pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari suara bising, bau tidak enak, debu, asap, serangga dan binatang mengerat. 3) Hotel harus memiliki taman baik di dalam maupun di luar bangunan. 4) Hotel harus memiliki tempat parkir kendaraan tamu hotel.

Hotel Berbintang Lima harus tersedianya fasilitas olah raga dan rekreasi sebagai berikut: a) sarana kolam renang untuk orang dewasa dan anak-anak; b) tersedianya area permainan anak; c) diskotik atau *Night Club*; d) fasilitas untuk olah raga air; e) fasilitas untuk olah raga gunung seperti mendaki gunung, menunggang kuda atau berburu; f) sarana olah raga dan rekreasi lainnya, seperti tennis, bowling, golf, fitness center, sauna, billiard, jogging.

Dengan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas, dan untuk penggolongan hotel di Indonesia, pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam surat keputusan Menparpostel, bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Dari pengertian tersebut di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, hotel seharusnya adalah: 1) suatu jenis akomodasi, 2) menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada, 3) menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya, 4) disediakan bagi umum, dan 5) dikelola secara komersial, yaitu dengan memperhitungkan untung atau

ruginya, serta yang utama adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya.

⁷ Untuk dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar fasilitas yang dimiliki oleh tiap-tiap jenis dan tipe hotel, maka Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi melalui Direktorat Jenderal Pariwisata mengeluarkan suatu peraturan usaha dan penggolongan hotel. Penggolongan hotel tersebut ditandai dengan bintang, yang disusun mulai dari hotel berbintang 1 (satu) sampai dengan yang tertinggi adalah hotel dengan bintang 5 (lima).

Tujuan setiap perhotelan adalah mencari keuntungan dengan menyewakan fasilitas dan menjual pelayanan kepada para tamunya. Berdasarkan pada pengertian hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hotel dalam menjalankan usahanya selalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) menyewakan kamar, b) menjual makanan dan minuman, dan c) menyediakan pelayanan-pelayanan penunjang lain yang bersifat komersial.

Arti “bintang” dalam nama, “Hotel Berbintang” yang ada di mana-mana berdasarkan peringkat adalah panduan untuk menentukan kualitas hotel. Dalam hal tertentu jumlah bintang berarti bahwa suatu hotel pasti memiliki beberapa fitur dan mungkin ada orang lain, masih kurang menyadari bahwa dalam beberapa kasus, bintang rating dari hotel mungkin sangat baik tetapi akan sia-sia. Tergantung pada lokasi, bintang mungkin penilaian berdasarkan standar nasional, oleh sebuah hotel perjalanan atau asosiasi, atau dengan hotel itu sendiri. Namun umumnya wisatawan bisa mengharapkan fasilitas tertentu berdasarkan penilaian tertentu.

Berdasarkan paparan di atas yang dimaksud dengan Hotel Berbintang Lima dalam penelitian ini adalah mencakup seluruh kegiatan aktivitas usaha dengan ruang lingkup penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas perjalanan, akomodasi, restoran, rekreasi, hiburan, cendera mata, atraksi, serta fasilitas lainnya yang semuanya untuk wisatawan. Selanjutnya, keterkaitannya dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan Hotel Berbintang Lima, khususnya dalam bidang manajemen Hotel Berbintang Lima di wilayah kawasan Sanur, Kota Denpasar Bali, adalah keterkaitan dengan keterpinggiran posisi jabatan manajer perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima.

2.2.3 Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima

Keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar merupakan salah satu bentuk kegagalan posisinya di tingkat pemerintahan desa terkait dengan kaum perempuan Hindu yang berada di tempat industri pariwisata. Posisi ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima ini menyebabkan mereka dianggap tidak berperan, baik secara sosial (kemasyarakatan), ekonomi (pekerjaan/posisi pekerjaan) maupun politik (pergaulan).

Tidak adanya tempat dan posisi, bukan berarti mereka tidak mempunyai kemampuan dalam bersaing dan beradaptasi dengan kaum perempuan urban yang lebih dominan menduduki posisi jabatan *manajer* di hotel sehingga posisi keterpinggiran semakin kuat dalam dirinya. Kelompok-kelompok urban yang dimaksud dalam hal ini adalah perempuan yang tidak beragama Hindu, seperti Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Budha, dan Kong Hu Chu (Wiana, 2000:22).

Terkait dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima adalah keterpinggiran yang merujuk pada posisi keberadaan ⁵ perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima khususnya di kawasan Sanur, Kota Denpasar. Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima indikatornya adalah (1) nihilnya perempuan Hindu menjadi Top Manajer, (2) minimnya keterwakilan dalam lembaga serikat pekerja, (3) pengembangan skill yang terabaikan, (4) penerimaan gaji yang kurang optimal, (5) kurang pembinaan dari dinas terkait dan (6) kurang relasi.

2.2.4 Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dalam buku Ensiklopedi Nasional Indonesia (Ensiklopedi, 1998: 268) “kawasan” adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri pariwisata, berikut daerah tertentu yang terikat (terkena) peraturan khusus peraturan daerah pemukiman, penyangga daerah yang menjadi penyangga daerah lain, untuk pelestarian budaya yaitu pengembangan kawasan bisnis industri pariwisata yang berwawasan budaya.

Kawasan Sanur, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian dipandang perlu dituangkan dalam konsep, untuk memperjelas serta menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Kawasan Sanur yang dituju merupakan suatu wilayah tempat mengadakan

penelitian, yaitu dalam hal ini masyarakatnya dominan dengan aktivitas bekerja di hotel, wiraswasta, dan sebagai pedagang barang kerajinan di pantai dan di pasar-pasar tradisional kawasan Sanur (Monografi, 2009).

Kawasan Sanur merupakan bagian dari wilayah Desa *Pakraman* Intaran, Sanur, dan penyaringan yang sejak dahulu mengembangkan pariwisata. Sejak berdirinya Hotel Bali *Beach* (sekarang INA BALI *Beach*), dikembangkan pariwisata yang memberdayakan seluruh potensi yang ada seperti kesenian dipadukan dengan keindahan alam dan keramahtamahan penduduk. Ketiga aspek tersebut secara sinergis telah membentuk sebuah kekuatan yang menjadi syarat mutlak dan modal dasar dalam pembangunan pariwisata khususnya pariwisata budaya (Pitana, 2000:48). Demikian pula Desa Sanur inilah, kalau dilihat dari sejarah, wisatawan asing yang datang pertama kali ke Bali, selanjutnya menjadi terkenal ke seluruh mancanegara sampai sekarang ini (Picard, 2001:46).

Beberapa Teori

Wasutina (1995) mengatakan bahwa teori sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk mengarahkan peneliti merangkum pengetahuan dalam suatu sistem dan meramalkan fakta. Demikian pula menurut Asunarty (dalam Gama, 2002) bahwa teori merupakan suatu abstraksi intelektual yang menggabungkan pendekatan secara rasional dengan pengalaman empiris. Selain itu, teori berfungsi menjelaskan generasi empiris yang telah berlangsung dan meramalkan generasi yang belum diketahui. Begitu juga, fungsi teori adalah sebagai alat untuk mengkaji suatu permasalahan, misalnya masalah ⁵ keterpinggiran perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka teori diposisikan sebagai alat untuk mengkaji permasalahan. ⁸ Selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan beberapa teori, secara eklektik seperti teori hegemoni, dekonstruksi dan posfemenisme.

Teori Hegemoni

Hegemoni berasal dari bahasa Yunani *hegeisthai* yang berarti 'pemimpin' atau 'kepemimpinan'. Teori hegemoni dikembangkan oleh Antonio Gramsci (1891-1932), dalam tulisan

yang berjudul *Selection from Prison* (Notebooks, 1971). Kebangkitan kembali minat teoretis terhadap konsep hegemoni, seperti yang dikembangkan dalam karya tulis Gramsci, telah terjadi dalam konteks perdebatan tentang intervensi Althusser dalam teori dan filsafat Marxis.

Konsep dan problematika Hegemoni Gramsci, terletak pada bagaimana kepemimpinan moral dan filosofis dibentuk dalam suatu formasi sosial. Tiga istilah pokok mengidentifikasi bidang-bidang yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam suatu formasi sosial yang membentuk landasan bagi konseptualisasi hegemoni menurut Gramsci, yaitu perekonomian, negara, dan masyarakat sipil.

Kepemimpinan hegemoni dapat mensyaratkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan tidak hanya sesuai dengan kepentingan sempit kaum borjuis atau suatu fraksi yang dominan dan justru hal inilah yang gagal dicapai oleh kaum borjuis Italia Timur Laut tersebut. Gramsci menekankan hal ini untuk melawan perspektif sempit ekonomisme sebagai suatu sudut pandang teoretis. Namun, hal itu tidak berarti bahwa dia menutup mata terhadap kepentingan ekonomi kelompok dominan tersebut dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal ini, Gramsci (1971:161) mengatakan di bawah ini.

“Tidak diragukan lagi fakta hegemoni mensyaratkan kelompok terkemuka tersebut hendaknya membuat pengorbanan dan korporasi ekonomi. Namun, tidak diragukan juga bahwa pengorbanan dan kompromi seperti itu tidak dapat menyentuh hal yang esensial karena meskipun hegemoni bersifat etis-politis, hal tersebut juga harus bersifat ekonomis, harus selalu didasarkan pada fungsi menentukan yang dilaksanakan oleh kelompok terkemuka tersebut dalam inti yang menentukan pada aktivitas perekonomian”.

Menurut Gramsci, hegemoni berarti suatu situasi tempat sebuah blok historis dari fraksi-fraksi kelas yang berkuasa menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinatnya dengan cara mengombinasikan kekuatan dengan persetujuan sadar (*consent*). Selanjutnya, Gramsci (1976: 213-214) telah menulis seperti di bawah ini.

“Agar yang dikuasai taat pada penguasa, maka yang dikuasai hendaknya mampu menginternalisasikan nilai-nilai penguasa di samping memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Kelompok yang berkuasa hendaknya memperjuangkan legitimasi

kekuasaannya dari massa. Sebaliknya, massa dapat menerima prinsip, ide, dan norma sebagai miliknya. Hegemoni satu kelompok terhadap kelompok lain bukan berdasarkan paksaan, tetapi melalui konsensus”.

Suatu teori sosial diharapkan dapat membantu dan memberikan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang berusaha mengubah situasi politik, historis, dan budaya. Menurut pandangan Gramsci, teori sosial dapat membimbing berbagai kelompok untuk menilai tindakan mana yang dapat berhasil dan yang mana gagal dalam memunculkan tujuan-tujuan yang dimiliki suatu kelompok dalam negara dan situasi tertentu. Berdasarkan landasan teori hegemoni, dicoba untuk diuraikan bagaimana terjadinya bentuk ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi keberadaan adat dan *awig-awig* yang diberlakukan di Kawasan Sanur. Dalam hal kegiatan-kegiatan *adat*, seperti: upacara *pengabenan*, upacara *pengantenan*, *menyamebraya*, belum lagi upacara “*odalan*” di *kahyangan tiga (Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalem)* purnama *tilem*, *kajang kliwon*, dan sejenisnya yang mewajibkan kehadiran kaum perempuan. Selanjutnya, untuk menelusuri jejak-jejak terjadinya keterpinggiran perempuan Hindu dan mengkaji permasalahannya digunakan teori hegemoni. Teori ini cukup relevan dipakai untuk mempertajam analisis permasalahan bentuk keterpinggiran perempuan Hindu dalam industri pariwisata.

Teori Dekonstruksi

Istilah dekonstruksi sendiri dipinjam oleh Derrida dari Heidegger salah seorang filosof yang mempengaruhi postmodern. Heidegger sendiri mengartikan dekonstruksi sebagai ‘konstruksi’ yang berarti ‘destruksi’ yang merupakan dekonstruksi atas konsep-konsep tradisional (Lubis, 2004:104), sebagai sebuah penolakan terhadap logosentrisme atau metafisika kehadiran yang melahirkan oposisi biner (Lubis, 2004:104).

Tokoh dekonstruksi Jacques Derrida seorang tokoh filsafat Perancis keturunan Yahudi yang lahir di El-Biar (Aljazair) pada Tahun 1930. Derrida dikenal sebagai pemikir poststrukturalis yang bermula dari dekonstruksinya sendiri, yang sesungguhnya merupakan pembongkaran terhadap pandangan strukturalisme yang dikembangkan Ferdinand de Saussure, Levi-Strauss, Noam Chomsky, dan Ramon

8
Jacobson. Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun, sebagai bentuk yang sudah baku. Dalam hal ini, dekonstruksi sering diartikan sebagai pembongkaran, pelucutan, penghancuran, penolakan, dan berbagai istilah dalam kaitannya dengan penyempurnaan arti semula (Ratna, 2005:250).

Dekonstruksi berasal dari bahasa Latin, yang terdiri atas akar kata "de" dan "constructo". *Constructo* berarti 'bentuk, susunan, hal menyusun, dan hal mengatur'. 8
Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas yang telah tersusun (mapan/baku). Di samping itu dapat juga diartikan sebagai pembongkaran, pelucutan, dan penolakan dengan tujuan penyempurnaan dari struktur sebelumnya. Dalam hal ini dekonstruksi lebih memfokuskan diri pada suatu struktur yang melawan oposisi biner sehingga unsur dominasi tidak lagi mendominasi unsur lain (Ratna, 2006:226).

Dekonstruksi sendiri berasal dari kata benda "deconstruction" dan kata kerja "deconstruie" yang sebelumnya digunakan para ahli linguistik sebagai istilah teknis, yakni oleh Derrida diartikan dengan makna baru. Dalam kamus Perancis kata "dekonstruksi" diartikan 'membongkar bagian-bagian dari satu keseluruhan' (Lubis, 2004:111). Teori Dekonstruksi Jacques Derrida digunakan untuk mengkaji faktor-faktor terjadinya keterpinggiran peran perempuan Hindu sebagai akibat kekalahan dalam merebut peluang yang lebih besar. Kekalahan mengakibatkan posisi perempuan Hindu menjadi tidak penting, terpinggirkan, dan bukan pusat/sentral. Posisi ini menurut Derrida dapat dibongkar, didekonstruksi, dan dilakukan penolakan karena keterpinggiran ini tidaklah berakar permanen sehingga dapat diubah/dijadikan pusat. Dalam hal ini, peneliti yang melakukan pembongkaran terhadap faktor yang menjadi penyebab peran perempuan Hindu terpinggirkan. Nilai penting dari karya Derrida ini terletak pada kemampuannya untuk membuat jejak terhadap hal yang telah terabaikan dari konsep karena kelemahan ini merupakan satu entitas yang menjadi kesatuan, yang mengakibatkan tidak mustahil ada dan eksis (Derrida, 2002:41, Ratna, 2004:44).

Dekonstruksi berupaya mengembalikan kembali posisi yang menjadi objek ke dalam posisi yang signifikan. Dalam hal ini, dekonstruksi memberi arti pada kelompok-kelompok yang lemah, termarginalkan, posisi subordinat, dan kelompok minoritas. Dekonstruksi tidak sekadar melakukan

pembongkaran, tetapi dekonstruksi merupakan gerakan perlawanan postmodernisme terhadap pemikiran postmodernisme yang fungsional, strukturalis, dan paradigmatis.

Dalam posisi ¹ keterpinggiran, peran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di desa Kawasan Sanur yang menjadi realita saat ini dikenali melalui 'bekas' atau jejak proses sejarah yang panjang. Jejak-jejak yang tidak dikenali kemudian sebagai awal bentuk keterpinggiran yang terjadi. Derrida (2002:48) mengatakan dekonstruksi adalah proses yang terus bergerak, berubah, dinamis, dan tidak berhenti pada suatu titik. Fayyad mengatakan bahwa dekonstruksi tidak bermaksud menihilkan apa lagi menampilkan makna, tetapi proses meraihnya (dalam Kompas, 22 November 2008:14 dan Ritzer, 2005:207). Lebih dalam ditegaskan oleh Fayyad bahwa dekonstruksi menolak adanya kebenaran tunggal yang terpasung dan tidak ada lagi pusat atau hulu. Dalam konteks ini, tidak dikenali posisi binari dan pinggiran karena semua dapat bertindak sebagai pusat pinggiran.

Teori dekonstruksi dalam tulisan ini menitikberatkan pada pembongkaran/ penolakan terhadap penyebutan ¹ keterpinggiran peran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima yang dilabelkan/diberikan kepada subjek. Dalam hal ini, penolakan dekonstruksi terhadap logosentris, fonosentrisme, dan oposisi biner (Ritzzer, 2005:209). Dekonstruksi melakukan kritik terhadap heterogenitas dalam bentuk/struktur, makna tunggal, atau bersifat universal/seragam. Di sana terdapat relativisme atau skeptisme karena semua wacana bersifat cair. Dalam hal ini dampak positif dekonstruksi adalah adanya upaya menghancurkan batas-batas antara konsep dan metafor yang selama ini dipertahankan oleh strukturalis antara kebenaran dan oposisi biner (Lubis, 2004:121)

Teori dekonstruksi digunakan terutama untuk membedah masalah kedua, yaitu menguraikan kembali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Dalam hal ini dibongkarnya kembali bagaimana tatanan *adat* dan *awig-awig* yang berlaku di kawasan Sanur, termasuk manajemen hotel yang berdampak pada keterpinggiran perempuan Hindu di desa tersebut. Dalam kaitan ini selain digunakan teori hegemoni, juga didukung dengan teori-teori lainnya untuk mendapatkan temuan yang valid. Selanjutnya, menurut Derrida interpretasi tidak berhasil memecahkan persoalan makna karena interpretasi (dalam Ratna, 2005:255). Sebagaimana dimaksudkan oleh para filosof dan teknologi yang kemudian diintroduksi oleh Gadamer, tujuannya adalah untuk menemukan makna yang sebenarnya. Lebih

lanjut, Derrida mengatakan bahwa makna yang benar tidak mungkin dan tidak perlu dicapai sebab semua teks mendekonstruksikan dirinya sendiri, yakni sebagai makna-makna secara harafiah yang diartikan sebagai temuan, jaringan, dan susunan.

Dalam kaitan ini, secara mudah dan praktis tujuan dekonstruksi adalah mengajak perempuan Hindu untuk memahami kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang tertindas, manusia yang terpinggirkan (Ratna, 2005:258). Dalam kaitan ini kajian budaya menampung masalah-masalah yang dihasilkan oleh mekanisme dekonstruksi di atas, yakni dengan cara menampilkan ke dalam suatu pemahaman yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, teori dekonstruksi secara eklektik relevan digunakan untuk menganalisis lebih mendalam rumusan masalah pertama yang terkait dengan bentuk keterpinggiran peran perempuan Hindu, termasuk masalah ketiga yang terkait dengan dampak dan makna keterpinggiran peran perempuan Hindu. Oleh karena teori dekonstruksi akan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan baru tentang bentuk keterpinggiran peran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Teori Posfeminisme

Feminisme merupakan teori beragam yang mempelajari posisi perempuan dalam masyarakat untuk memajukan kepentingan-kepentingan perempuan. Menurut Brooks (2004:2) feminisme adalah sebagai berikut.

“Posfeminisme, sebagaimana dalam kasus poskolonialisme dan posmodernisme, sering digunakan untuk menandai adanya keterputusan total dengan wilayah sebelumnya yang biasanya merupakan relasi yang menindas. Dalam hal ini pos sebagaimana digunakan dalam contoh-contoh ini, seringkali secara tidak langsung menyebutkan bahwa relasi tersebut telah diatasi dan digantikan. Dan, dalam konteks ini, penekanannya adalah pada wilayah baru relasi-relasi yang bersifat temporal, politis, dan kebudayaan.”

Lebih lanjut Brooks (2004:320) di dalam bukunya menuliskan pergeseran paradigma dari feminisme ke posfeminisme, yakni dapat dilihat dalam jumlah arah yang berbeda. *Pertama*, tantangan

diajukan oleh posfeminisme kepada fondasionalisme epistemologi feminisme. *Kedua*, pergeseran posfeminisme jauh dari batasan-batasan disiplin yang spesifik. *Ketiga*, penolakan posfeminisme, yakni dibatasi oleh kendala-kendala representasi. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai pergeseran dari feminisme ke posfeminisme, ada baiknya dibaca penjelasan Teresa de Lauretis. (dalam Brooks, 2004:320) di bawah ini.

“Suatu teori Feminis bermula ketika kritik ideologi feminisme mulai menyadari dirinya sendiri dan berbalik kepada pertanyaan tubuh penulisan dan interpretasi kritisnya sendiri, asumsi-asumsi dasarnya mengenai berbagai istilah dan praktik yang mereka mungkin dan darinya mereka muncul. Ini bukan semata-mata ekspansi atau rekonfigurasi batas-batas, melainkan pergeseran kualitatif di dalam kesadaran politik dan sejarah. Pergeseran ini, menurut pendapat saya, menyatakan secara tidak langsung suatu pemindahan dan pemindahan diri; meninggalkan atau menyerahkan suatu tempat yang aman, yaitu ‘rumah’ (secara fisik, emosional, linguistik, dan epistemologi) demi tempat lain yang tak dikenal dan penuh risiko, yang tidak hanya lain secara emosional, tetapi juga secara konseptual, suatu tempat wacana yang darinya berbicara dan berpikir bersifat sementara, tak pasti, dan tak dijamin dengan sebaik-baiknya. Tetapi kepergian itu bukanlah suatu pilihan; seseorang tidak bisa hidup di sana, di tempat yang pertama” (deLauretis, 1998:138-139) “.

Teori posfeminisme Ann Brooks (2004:6) sebagaimana dinyatakan dalam bukunya bahwa posfeminisme mengekspresikan persimpangan feminisme dengan posmodernisme, posstrukturalisme, poskolonialisme, dan lainnya. Penyimpangan ini merepresentasikan suatu gerakan dinamis sehingga mampu menantang kerangka kaum modernis, patriarki, dan imperialis. Di dalam prosesnya, posfeminisme memfasilitasi konsepsi pluralistik, yang berbasis luas dalam hal penerapan feminisme, kemudian, memusatkan perhatiannya pada tuntutan budaya yang dimarginalkan, diaspora. Di sisi lain, yang dilakukan, terutama bagi suatu feminisme nonhegemonik mampu memberikan suaranya pada feminisme lokal, pribumi, dan kolonial. Menurut Ibrahim, “Posfeminisme memungkinkan ditujukan pada suara perempuan yang selama ini termarginalkan akan kembali mendapatkan tempat dalam wacana feminisme dan wacana publik. Barangkali inilah gaung kesadaran posfeminisme yang bisa

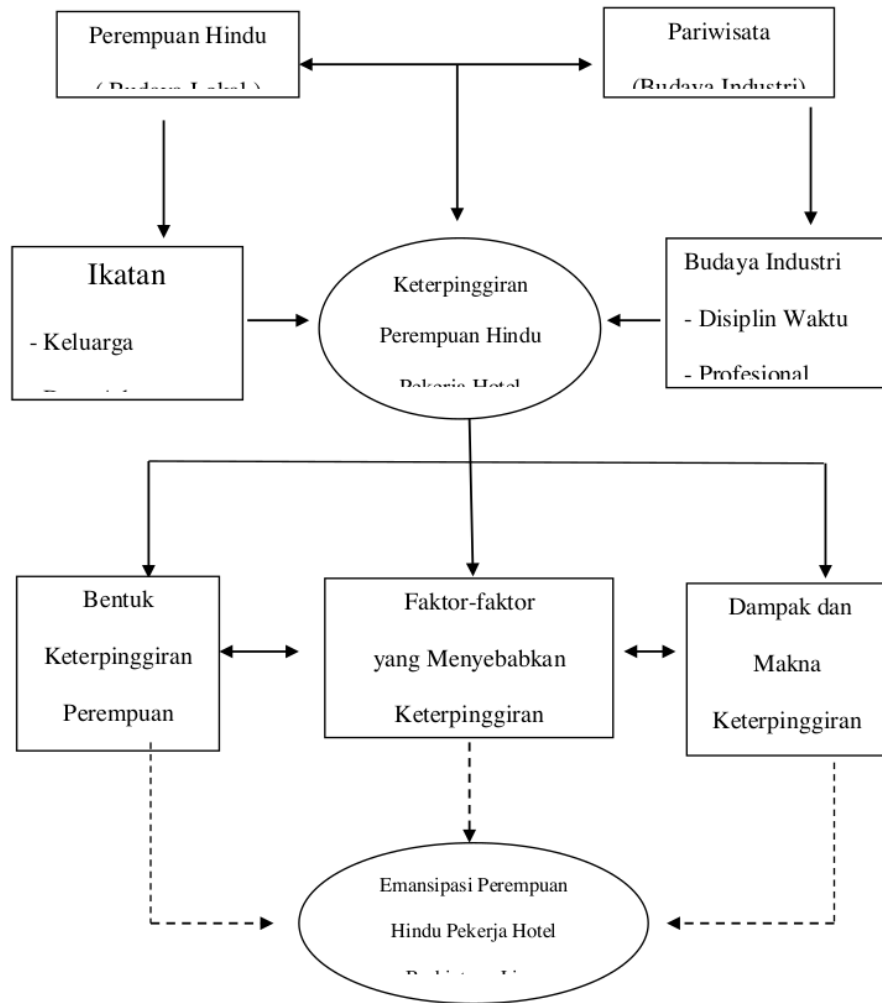
disuarakan dalam dunia yang dirindukan oleh sebagian orang sebagai dunia *postpatriarchy society*. Hal ini mungkin terdengar utopi, tetapi bukankah ketika ada keyakinan, di situ ada harapan untuk memperbaiki nasib perempuan dalam dunia yang semakin egaliser”. (Brooks, 2004: 26)

Asumsi-asumsi dasar teori posfeminisme yang telah diuraikan di atas, digunakan untuk menganalisis relasi gender, masalah dampak, dan makna. Selain itu, juga dikaji masalah satu dan dua dari topik ⁵ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Dalam hal ini penerapan teori posfeminisme memusatkan perhatiannya pada tuntutan budaya yang dimarginalkan. Dengan demikian, kaum perempuan Hindu menarik untuk dievaluasi tentang diri pribadinya, melalui proses perjuangan hak perempuan Hindu yang termarginal untuk menjadi Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Dalam hal ini apakah mampu mengangkat realitas hidup perempuan Hindu itu sendiri.

Model Penelitian

Model penelitian tidak memuat semua hal melainkan hal tertentu saja yang terjadi dalam kenyataan tersebut (Laeyendecker, 1983:68-69) sesuai dengan tujuan pembuatan model. Berkenaan dengan itu, model penelitian ini dibuat untuk memahami fenomena dan menjadi fokus penelitian sesuai dengan landasan teori yang diuraikan di atas yang dapat digambarkan ke dalam bentuk model berikut (Gambar 2,1). Lihat Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 MODEL PENELITIAN



8
Gambar 2.1 Model Penelitian

Keterangan:
 ↔ = saling pengaruhi
 → = berpengaruh
 - - - → = harapan/ideal

Tampak dalam model penelitian di atas bahwa **keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima dalam** merebut posisi jabatan sebagai manajer terkait dengan berbagai

faktor penyebab. Di satu sisi, faktor penyebabnya faktor ikatan keluarga, desa adat dan Griya/Sisya (feodal), di sisi yang lain penyebabnya adalah faktor budaya industri, yakni faktor disiplin waktu dan keprofesionalan. Kajian ini mengangkat tiga masalah pokok. (1) Bentuk ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. (3) Dampak dan makna ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Ketiga masalah yang diangkat dalam penelitian ini berhubungan, bersinergi, dan saling mempengaruhi dalam masyarakat industri pariwisata. Pemerintah, Khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan dalam memberdayakan kaum perempuan Hindu sehingga tidak ada lagi yang termarginalkan/terpinggirkan, karena kontribusi perempuan Hindu terhadap perkembangan pariwisata di Bali cukup besar. Dengan demikian, perlu kebijakan terhadap emansipasi perempuan Hindu agar bisa menduduki posisi *manajer* di Hotel Berbintang Lima.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN PEKERJA ¹ PEREMPUAN HINDU PADA HOTEL BERBINTANG LIMA DI KAWASAN SANUR

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Letak dan Geografis

Kawasan Sanur merupakan kawasan pariwisata yang menawarkan keindahan pantai yang berpasir hitam-putih yang cukup dikenal di dunia Internasional. Kawasan pariwisata Sanur terletak di sebelah Timur Kota Denpasar dan berada di wilayah Bali Selatan. Kawasan Sanur termasuk wilayah administrasi Kota Denpasar, tepatnya 6 sampai 7 km ke arah Timur dari pusat pemerintahan Kota Denpasar.

Kawasan Sanur mempunyai posisi yang sangat strategis, mudah dijangkau dari segala arah, dengan kendaraan umum dan merupakan salah satu kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kawasan wisata Sanur ini dekat dengan Bandara Ngurah Rai. Secara geografis Desa Sanur berada di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Kawasan Sanur merupakan bagian wilayah Pulau Bali, dan berada di wilayah Bali Selatan, dengan batas-batas wilayah: di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, sebelah Selatan Samudra Hindia, di sebelah Utara Kabupaten Badung, dan sebelah Barat Kabupaten Tabanan dan di posisi pusat pemerintahan Provinsi Bali (Lihat Gambar 4).



Gambar 4.1 Peta Pulau Bali

Dokumen : <http://www.denpasarkota.go.id>

Secara geografis di sebelah Utara wilayah Bali dibatasi Laut Bali, sebelah Selatan Samudra Indonesia, sebelah Barat dengan Selat Bali/Provinsi Jawa Timur dan di sebelah Timur Selat Lombok/Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayahnya mencapai 5.632 km², secara administrasi dibagi menjadi sembilan daerah, meliputi: Kabupaten Gianyar, Badung, Kelungkung, Karangasem, Bangli, Tabanan, Jembrana, Buleleng, dan Pemerintahan Kota Denpasar. Pusat pemerintahan ibu kota provinsi Bali adalah terletak di daerah Renon dan termasuk wilayah Kota Denpasar (*Profil Provinsi Republik Indonesia, 2010*).

Letak geografis kawasan wisata Sanur, didukung sarana jalan yang bagus, mudah dijangkau dengan transportasi dengan segala kapasitas ukuran. Dengan dukungan tersebut menjadikan kawasan wisata Sanur lebih cepat mengalami perkembangan seperti kawasan wisata Kuta dan Nusa Dua. Kawasan wisata Sanur juga didukung oleh aktivitas kelompok atau *sekehe-sekehe*, yang berkembang di masyarakat *adat pakraman* Sanur. Kawasan wisata Sanur, menjadi salah satu *destination* yang

cukup menarik dan ramai dikunjungi oleh para wisatawan nusantara atau manca negara. Kawasan Sanur merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar yang terletak di antara 08° 35" 31'- 08° 44" 49' Lintang Selatan dan 115° 10" 23'- 115° 16" 27' Bujur Timur. Ditinjau dari topografi keadaan medan kawasan pariwisata Sanur secara umum miring ke arah Selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 M di atas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan bisa mencapai 15%. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar peta desa kawasan Sanur Denpasar Selatan (Lihat Gambar 4.2 di bawah ini).



Gambar 4.2 Peta Desa Kawasan Sanur

Sebelumnya kawasan wisata Sanur, merupakan sebuah desa tradisional, karena penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan di laut sebagai nelayan, dan dari hasil pertanian serta perkebunan kelapa. Seperti desa-desa tradisional lainnya di Bali, Desa Sanur yang penduduknya hidup dari hasil tangkapan ikan di pantai dan hasil pertanian di sawah, merupakan satu desa adat, yang terdiri atas beberapa Banjar Dinas dan Banjar *Adat*. Sebagai wilayah desa *adat*, yang memiliki otonomi untuk mengurus adat pakraman dan memiliki daerah teritorial tersendiri, yaitu sebelah Barat dibatasi oleh Desa Renon dan Desa Sesetan, sebelah Timur dibatasi oleh Selat Badung, sebelah Utara dibatasi oleh Desa Kesiman, dan sebelah Selatan dibatasi oleh

Samudra Indonesia. Luas wilayah dan pemanfaatan lahan oleh penduduk, seperti tergambar dalam Tabel 4.1, di bawah ini.

TABEL 4.1
PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN SANUR

Pemanfaatan Lahan (Ha)	Sanur Kauh	Kelurahan Sanur	Sanur Kaja	Total
Kuburan	1	1	1	3
Perkebunan	6	-	-	6
Sawah	132	-	59	191
Tegalan	15	10	-	25
Pekarangan	203	351	170	724
Lainnya	29	40	39	118
Luas	386	402	269	1057

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka, tahun 2012

Tabel di atas, menunjukkan bahwa luas wilayah Desa Sanur secara keseluruhan yang dimanfaatkan berjumlah 1057 m². Namun seiring dengan perjalanan waktu, Desa Sanur telah banyak mengalami perubahan. Perubahan secara sosiologi tampak dalam sikap dan ideologi masyarakat. Selain itu, ada juga perubahan dalam "pelemahan". Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbukaan masyarakat Sanur dalam menerima masuknya

budaya luar (asing), teknologi, sosiologi seperti yang dikatakan oleh Appadurai (2008) sebagai tanda telah masuknya budaya modern ke ranah adat pakraman. Kawasan wisata Sanur tumbuh dan berkembang secara bertahap, dan relatif cepat dan aman. Perkembangan kawasan wisata sangat teratur, sehingga penampakan *distinction* ini, cukup tertata dan apik. Tampaknya pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata alam sangat mencerminkan konsep "*Tri Hita Karana*". Misalnya "pura" tempat persembahyangan tampak terjaga dan terpelihara dengan baik, kerimbunan pohon besar tampak lestari dan terpelihara dengan baik, sehingga suasana hotel, restoran, bungalow atau penginapan kecil lainnya yang ada di kawasan Sanur mencerminkan keasrian lingkungan. Begitu juga emperan sebagai pemisah antara jalan dengan rumah atau bangunan penduduk, dengan tembok sebagai pembatas juga tertata dengan baik. Di kawasan wisata Sanur ini seolah-olah tidak ada celah tanpa tanaman hias dan peneduh.

Mengingat perkembangan kawasan wisata Sanur yang demikian pesat, dengan tingkat hunian penduduk yang padat, secara administrasi Desa Sanur dikembangkan menjadi tiga wilayah desa. Berdasarkan surat keputusan Bupati Badung No. 167/Pem./15/166/1979 Tanggal 1 Desember 1979, Desa Sanur terbagi menjadi tiga wilayah desa/kelurahan, yaitu Desa Sanur Kauh dengan luas 386 hektar, Kelurahan Sanur dengan luas 402 hektar, dan Desa Sanur Kaja dengan luas 269 hektar.

Luas wilayah kawasan Sanur 1.057 hektar, terdiri atas tanah untuk kuburan 3 hektar, perkebunan 6 hektar, sawah 191 hektar, tegalan 25 hektar, pekarangan 724 hektar, dan lainnya 118 hektar. Di kawasan Sanur dijumpai berbagai jenis tanah berstruktur kasar yang terdiri atas lumpur lempung, lumpur lempung lelenan, lempung pasir, dan lanan. Jenis tanah seperti ini mempunyai sifat resapan air lebih baik sehingga kapasitas terbentuknya air tanah relatif tinggi. Daerah kawasan wisata pantai Sanur sangat terkenal kepariwisataannya dengan keindahan alam lingkungannya yang mempesona dan pantai berpasir putih bersih, air laut pasang surut terjadi hampir setiap hari, serta letak geografis Desa Sanur yang sangat strategis dengan posisi di Tenggara Pulau Bali. Dari Pantai Sanur Kauh dapat dipandang Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Serangan serta kawasan Nusa Dua.

Semua pemandangan ini dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berjemur di pantai sambil melihat matahari terbit pada pagi hari.

Kawasan wisata Sanur, selain memiliki keindahan pantai juga memiliki peninggalan sejarah arkeologi yaitu Pura Belanjong sebagai cagar budaya yang terkenal dengan Prasasti Belanjong. Di samping itu ada juga Pura Merta Sari, Tirta Empul, Pura Dalem Pengembak dan Pura Suka Merta. Semua pura ini keberadaannya tetap dipertahankan oleh Desa Adat Sanur. Dalam mengembangkan pariwisata di Desa *Adat* Sanur potensi alamnya sangat mendukung kawasan wisata. Di samping itu keindahan hutan bakau dan sawah-sawah yang terbentang di sebelah barat desa sering dipakai untuk *jogging* oleh para wisatawan. Kawasan wisata Sanur termasuk daerah beriklim tropis.

Yang lebih menguntungkan dalam pengembangan wisata Sanur, selain jalan, potensi adat pakraman seperti yang telah diutarakan di atas, adalah kawasan ini sangat dekat dengan Bandara Ngurah Rai, dengan kedekatan ini tentunya memudahkan untuk membuat perencanaan pengembangan daerah. Kawasan wisata Sanur sesuai dengan Perda No 3, Tahun 1974, merupakan salah satu daerah pengembangan dari paket tujuan wisata Bali Selatan. Aktivitas kegiatan kawasan wisata Sanur cukup baik sebagai pusat perhotelan, bar, restoran, dan wisata pantai.

Kawasan wisata Sanur mudah dijangkau dengan transportasi darat, karena sebagai bagian dari lintasan melingkar jalan dari Ubung, Sanur, Kuta dan Nusa Dua. Begitu pula dari Bandar Udara Ngurah Rai menuju kawasan wisata Sanur berjarak dua belas Km dan delapan Km pelabuhan Benoa. Selain itu, kawasan Sanur juga dekat dengan jalan alteri yang menghubungkan Denpasar dengan kota-kota lain di wilayah Timur Pulau Bali. Kawasan wisata Sanur merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya, yang dijiwai oleh Agama Hindu. Implikasi dari pengembangan pembangunan yang berwawaskan budaya Bali, adalah seluruh bentuk aktivitas, kegiatan serta pembangunan fisik mencerminkan nilai-nilai ajaran Agama Hindu. Landasan konsep dari pembangunan wisata Sanur terakumulasi dalam penjabaran konsep yang disebut dengan *Tri Hita Karana* (Renstra Kota Denpasar Tahun 2010). Tujuan pembangunan yang berkonsepkan *Tri Hita Karana* adalah menjaga kesinambungan budaya dan alam lingkungan yang lebih mengedepankan

keharmonisan. Konsep pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Agama Hindu tersebut untuk menumbuhkembangkan sikap, tekad, dan kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil dan merata serta meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahapan berikutnya.

Sebagai bagian dari wilayah Kota Denpasar, proses pembangunan kawasan Sanur diorientasikan kepada pembangunan yang berwawasan budaya, yakni pembangunan yang didasarkan pada tiga kebijakan. (a) Kebijakan dasar, kebudayaan Bali yang dijiwai Agama Hindu merupakan potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan di kawasan Sanur (b) Kebijakan sektoral, tetap bertumpu pada bidang ekonomi khususnya sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil, dengan tetap memperhatikan pembangunan sektor lainnya secara searah, serasi, dan seimbang guna mendukung program-program prioritas. (c) Kebijaksanaan keseimbangan, antara pembangunan di bidang ekonomi, politik, hukum serta agama, dan sosial budaya, dengan tetap berpegang pada strategi kebijakan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan (Denpasar Selayang Pandang, 2009).

Sejarah Desa Sanur

Nama Sanur sudah dikenal luas di media massa karena terkait dengan kawasan wisata di Bali. Menurut buku Selayang Pandang, istilah Sanur berasal dari kata Saha Nuhur yang berarti memohon untuk datang pada suatu tempat. Kisah tentang asal muasal Desa Sanur ada seorang petinggi agama (*bendesa*) zaman tempo dulu memohon untuk kedatangan seorang brahmana yang memiliki ilmu tinggi. Permohonan ini dikabulkan kemudian datanglah seorang *bramana* dan mencari tempat kediaman yang ditandai dengan adanya sinar yang mencuat ke langit menyerupai janur. Peristiwa Tahun 1906, merupakan hal yang paling tidak bisa terlupakan oleh masyarakat Sanur, ketika terjadi peristiwa berlabuhnya Perahu Sri Komala di Pantai Sanur yang dituduhkan sebagai pembajakan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sanur. Sebenarnya peristiwa tersebut hanyalah

sebuah rekayasa Belanda untuk menyerang Kerajaan Badung yang pada akhirnya terjadi peristiwa Puputan Badung (LKMD Sanur, 1985: 1).

Desa Sanur yang kemudian berkembang menjadi kawasan wisata memiliki tiga wilayah desa yang kemudian tumbuh menjadi Desa *Pakraman* Sanur. Di kawasan Sanur terdapat tiga desa dinas yakni Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, dan Sanur Kaja, dan tiga Desa Adat atau "*pakraman*", yakni Desa *Pakraman* Sanur, Desa *Pakraman* Intaran, dan Desa *Pakraman* Penyaringan. Keberadaan desa-desa *Pakraman* dalam sejarah masyarakat Hindu Bali diperkirakan mulai muncul pada abad XI Masehi, pada waktu Mpu Kuturan menata kehidupan beragama Hindu di Pulau Dewata ini. Secara sosiologis, desa adat itu disebut *pakraman*. Pada kehidupan masyarakatnya terkait dengan sosial spritual, yang mengayomi kehidupan dalam melaksanakan ajaran-ajaran Agama Hindu, dan secara administratif merupakan suatu unit *Hinduistik*. Desa Sanur seperti yang tertulis dalam monografi, diwadahi dalam bentuk *pakraman*, yakni dalam organisasi sosial ini tiap-tiap kelompok, banjar adat, secara sosiologi lebih mengedepankan kehidupan yang mengacu pada pelaksanaan umat dalam bingkai Agama Hindu. Di Bali desa *pakraman* ini merupakan benteng kuat untuk menahan dan memfilter budaya globalisasi yang masuk melalui industri pariwisata.

Desa *Pakraman* menurut Wiana (1995: 43) adalah sebuah asrama, tempat memberikan pelajaran Agama Hindu, oleh para Rsi ke pengikutnya atau disebutkan sebagai muridnya. Zaman Hindu merupakan model yang pernah ada di Bali, tempat para *Brahmacari*, *Grhasta* dan *Wanaprastha* ditampung dan ditata kehidupannya agar mampu melaksanakan *swadarmanya* masing-masing. Sekitar Tahun 80-an istilah Desa *Pakraman* mulai lagi dikembangkan dan diterapkan dalam organisasi sosial masyarakat Hindu di Bali.

Inti dari Desa *Pakraman* adalah untuk lebih intensipnya organisasi sosial spritual untuk melaksanakan ajaran Agama Hindu. Di kawasan Sanur terdapat tiga desa dinas yakni Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, dan Sanur Kaja. Ketiga desa tersebut telah memenuhi kriteria untuk menjadi desa *pakraman*, yaitu Desa *Pakraman* Sanur, Desa *Pakraman* Intaran, dan Desa *Pakraman* Penyaringan. Desa Sanur mewadahi sembilan *banjar adat* dan tiap-tiap *banjar adat* dipimpin oleh

seorang *kelihan adat*. Kesembilan *banjar adat* tersebut yaitu (1) *Banjar Adat Belong*, (2) *Banjar Adat Pekandelan*, (3) *Banjar Adat Batanpoh*, (4) *Banjar Adat Buruan*, (5) *Banjar Adat Tegal Asah*, (6) *Banjar Adat Wirasana*, (7) *Banjar Adat Langon*; (8) *Banjar Adat Tangtu* dan (9) *Banjar Adat Persiapan Tegel Selang*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sejarah penduduk Desa Sanur, sebelumnya hidup sebagai nelayan dan petani, banyak tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok sosial yang lazim disebut dengan "*sekehe*". *Sekehe-sekehe* ini beralihpansi dengan kehidupan ekonomi, sosial, adat dan agama dan kesenian yang ada di desa *pakraman*. Keberadaan organisasi sosial spritual seperti *sekehe tumbeg*, *sekehe semal*, dan *sekehe manyi*, eksistensinya dalam masyarakat Sanur sangat dibutuhkan dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan seperti dalam ekonomi, sosial, dan keamanan.

Sejalan dengan perkembangan Desa *Pakraman* Sanur, yang menjadi kawasan wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara, banyak terjadi perubahan. Masyarakat tidak lagi hanya berprofesi sebagai nelayan, petani tetapi telah mengubah profesinya sebagai pelayanan jasa dalam industri pariwisata. Begitu pula terjadi pada pergeseran dalam penggunaan lahan. Pohon-pohon kelapa di kebun kelapa yang ada di wilayah desa *pakraman* Sanur ditebang untuk bahan bangunan hotel atau penginapan. Lahan perkebunan dan pertanian dijadikan tempat membangun hotel, penginapan, dan warung-warung cendramata.

Begitu juga *sekehe* tampak berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Sanur. Banyak muncul *sekehe*, seperti *sekehe teruna*, *sekehe tetabuhan*, *sekehe tari* termasuk *sekehe topeng*, *sekehe barong*, *sekehe legong*, *sekehe kidung*, *sekehe kekawin*, dan *sekehe pemaksan* yang berada di pura-pura. Perkembangan *sekehe-sekhe* sejalan dengan kedinamisan hidup masyarakat di kawasan wisata Sanur.

Di tengah gelombang globalisasi, masuk melalui industri pariwisata, kegairahan masyarakat Desa Sanur, dalam beribadah atau beragama makin bergairah. Secara fisik banyak dilakukan pembenahan-pembenahan, seperti pembenahan *pura*, *pratima*, *arca* dll. Hal ini juga tidak

terlepaskan dari keberadaan "*geria*" oleh masyarakat hindu di Bali sebagai pusat pengemban dan pengembang Agama Hindu. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat di kawasan pariwisata Sanur, organisasi *sekehe* seperti telah disebutkan di atas, mengalami proses modifikasi yang disesuaikan dengan aktivitas Sanur sebagai daerah wisata. Misalnya muncul *sekaa jukung* dan berkembang sesuai dengan kebutuhan wisata yang ingin melihat atau berlayar ke tengah laut Sanur. *Sekehe jukung* juga melayani kegiatan ritual keagamaan umat Hindu. Eksistensi dan pengembangan *sekehe jukung* di Pantai Sanur secara langsung ditangani oleh yayasan pembangunan Sanur.

Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata Sanur, oleh Desa *Pakraman* Sanur dibentuk keamanan adat yang disebut dengan *pecalang*. Satuan organisasi pengamanan adat yang disebut sebagai *pecalang*, secara struktur ada di bawah organisasi adat. Semua kegiatan dan pertanggung jawabannya ke Desa *Pakraman* atau ke *Bendesa Adat*. *Pecalang* sebagai jagabaya desa *pakraman* memiliki tugas memelihara keamanan, mengantisipasi keributan yang mungkin timbul di wilayah desa *pakraman* dan *banjarnya*. *Pecalang* berperan penting dalam menjaga keamanan Desa *Pakraman* (Suparta, 2000). Selain itu, berkembang seni kerajinan merupakan yang unit usaha keluarga atau home industri. Misalnya seni merangkai karang-karang untuk souvenir, melukis, membuat patung, menganyam tikar, anyam-anyaman lainnya, dan tenun cag-cag tradisional (BPD Sanur, 1970). Secara sosiologi seperti yang sudah diuraikan dijelaskan di atas, bahwa Desa Sanur telah banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut tampak dalam penggunaan lahan, organisasi sosial, sikap, dan tatanan kehidupan masyarakat. Pada saat sekarang Sanur yang dulu sebagai daerah pantai dengan kehidupan sebagai nelayan dan petani bergelut dengan kemiskinan telah terkubur, yang tersisa semangat untuk maju sehingga Sanur sekarang menjadi desa yang maju dengan mengglobal.

Begitu pula sejarah perkembangan pariwisata Bali sangat terkait dengan Desa Sanur. Jauh sebelumnya, Desa Sanur telah dikenal memiliki potensi objek wisata melalui karya-karya seniman asing tentang objek tersebut. Propaganda melalui tema-tema lukisan tentang objek wisata Sanur cukup menjadikan Sanur dikenal di manca negara. Keindahan tema-tema membuat ketertarikan

masyarakat dunia atas Sanur, tak lepas dari kemolekan alam pantai tersebut, mulai dari bentangan pasir putih, pesona matahari terbit, hingga menjadi keindahan pemandangan dari bibir pantai.

Dari kawasan wisata Sanur, turis atau wisatawan akan bisa memandangi jauh ke arah Pulau Serangan, Nusa Penida, atau bahkan Gunung Agung (<http://warnawarnibali.wordpress.com/2005/01/19/pesona-sanur-sepanjang-masa>).

Keadaan Penduduk

Menurut catatan yang tertulis dalam buku sumber, Kecamatan Denpasar Selatan dalam angka 2009, sampai akhir tahun 2009, jumlah penduduk kawasan Sanur berjumlah 34.901 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut dengan posisi menyebar, seperti dari penduduk Desa Sanur Kauh 12.567 ribu jiwa penduduk, Kelurahan Sanur 14.389 ribu jiwa, dan penduduk Sanur Kaja 7.945 ribu jiwa. Dengan posisi penduduk seperti tersebut tampaknya penyebaran penduduk di kawasan Sanur tidak merata. Dari jumlah tersebut sebagian besar penduduk tinggal di kawasan Sanur, secara administratif masuk dalam di Kelurahan Sanur.

Berdasarkan asumsi bahwa penduduk perkotaan maksimal 2.000 jiwa per km², maka daya dukung lahan Kawasan Sanur adalah 17.4505 jiwa. Sebagaimana bagian wilayah Kota Denpasar lainnya, kawasan Sanur termasuk wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Jumlah penduduk pendatang yang tercatat cukup besar, hal ini jelas disebabkan oleh faktor kemajuan Desa Sanur yang bisa menyiapkan banyak lapangan pekerjaan. Penduduk pendatang yang biasa disebut sebagai krama pendatang, mengambil lahan informal, seperti sebagai pedagang “kaki lima”. Penduduk pendatang yang ada di Sanur, dikenakan distribusi dan segala persyaratan, sesuai dengan aturan dalam peraremman, awig-awig, sehingga keberadaannya tidak memicu persoalan sosial sebab penduduk pendatang merupakan aset untuk memajukan pembangunan industri pariwisata.

Klasifikasi keadaan penduduk Desa Sanur dapat dilihat dari jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan menurut agama dapat dilihat dalam beberapa tabel di bawah ini.

Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Keadaan penduduk Desa Sanur berdasarkan jenis kelamin seperti yang terlihat dalam Tabel 4.2 di bawah ini.

TABEL 4.2
PENDUDUK KAWASAN SANUR MENURUT DESA/KELURAHAN
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012

No	Desa/Kelurahan	L	P	Jumlah	Jumlah rumah tangga	Kepadatan
1	Sanur Kauh	6.295	6.272	12.567	4.084	3.257
2	Kelurahan Sanur	7.247	7.142	14.389	4.115	3.604
3	Sanur Kaja	3.973	3.972	7.945	4.011	2.954
JUMLAH		17.515	17.386	34.901	12.210	3.272

Sumber : Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2012.

Tabel 4.2 menunjukkan ketimpangan jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin dari ketiga desa yang masuk dalam kawasan Desa Sanur. Dari ketiga wilayah desa yang ada di kawasan Sanur, dengan jumlah penduduk 34.901 ribu jiwa, tampak wilayah Kelurahan Sanur yang paling banyak penduduknya, yaitu 3.604 jiwa per km².

Jumlah tersebut terdiri atas laki-laki 17.515 orang dan kaum perempuan 17.386 orang. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Sanur memang menjadi pusat utama pembangunan pariwisata.

Menurut jenis kelamin hanya mengalami selisih sekitar 129 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di kawasan Sanur, seperti yang tertera dalam Tabel 4.3, berikut ini.

Tabel 4.3
PENDUDUK KAWASAN SANUR MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2012

Umur (tahun)	Sanur Kauh	Kelurahan Sanur	Sanur Kaja	Total	%
0-4	1270	1492	810	3572	10.23
5-9	875	1076	654	2605	7.46
10-14	912	877	467	2256	6.46
15-19	1081	1210	646	2937	8.42
20-24	1429	1646	697	3772	10.81
25-29	1708	1994	1131	4833	13.85
30-34	1490	1649	911	4050	11.60
35-39	1043	1087	591	2721	7.80
40-44	796	724	423	1943	5.57

45-49	568	678	425	1671	4.79
50-54	438	968	230	1636	4.69
55-59	447	417	419	1283	3.68
60-64	187	252	177	616	1.72
65-69	163	160	171	494	1.42
70-74	57	84	55	196	0.56
75+	103	75	138	316	0.91
Jumlah	12567	14386	7945	34901	100.00

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2012.

Dilihat dari kelompok umur, penduduk kawasan Sanur berumur antara 25- 29 tahun sebesar 13.85%, disusul kemudian dengan kelompok umur 30-34 tahun 11.60%, 20-24 tahun 10.81% dan 0-4 tahun 10.23%. Sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 4.3, jumlah penduduk yang berusia produktif 15-24 tahun cukup dominan. Walaupun kawasan Sanur berada di daerah tujuan wisata, tetapi penduduk Sanur sebagian besar belum tamat SD (25.33%), Sekolah Dasar (19.56%) dan SMP (19.12%), dan hampir seperempatnya berpendidikan SMA (22.35%). Hanya sebagian kecil penduduk kawasan Sanur yang sudah mengenyam bangku pendidikan tinggi, yaitu Program Diploma I-III (1.62%) dan Sarjana (3.99%). Profil pendidikan penduduk kawasan Sanur dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
PENDUDUK KAWASAN SANUR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Sanur Kauh	Kelurahan Sanur	Sanur Kaja	Total	%
Belum Sekolah	623	692	640	1955	8,02
Belum Tamat SD	2198	2831	1144	6173	25,33
SD	1489	1542	1736	4767	19,56
SMP	1453	1499	1708	4660	19,12
SMA	1574	1629	2244	5447	22,35
DI-III	112	117	166	395	1,62
D4-SARJANA	272	282	419	973	3,99
Jumlah	7721	8592	8057	2437	100,00

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2012

Sesuai dengan amanat UUD 1945 kehidupan beragama merupakan hak yang hakiki bagi setiap warga negara. Kehidupan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat kawasan Sanur didasarkan pada prinsip Tri Kerukunan Umat, dengan mengedepankan saling menjaga dan tenggang rasa. Dilihat dari persentase pemeluk agama, penduduk kawasan Sanur didominasi oleh pemeluk Agama Hindu sebesar 88,82%, sedangkan Islam 8,64%, Kristen 1,23%, Katholik 0,83%, dan Budha 0,48%.

Tabel 4.5
PENDUDUK KAWASAN SANUR MENURUT AGAMA
Tahun 2009

Agama	Sanur Kauh	Kelurahan Sanur	Sanur Kaja	Total	%
Hindu	10.606	13.230	7.258	31.049	88.82
Islam	1.732	835	457	3.024	8.64
Kristen	171	167	92	430	1.23
Katholik	60	149	82	291	0.83
Budha	3	108	56	167	0.48
Jumlah	12.572	14.489	7.945	35.006	100.00

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2012.

Sanur sebagai pusat pariwisata terus berkembang sehingga banyak kesempatan kerja dan peluang usaha yang terbuka di kawasan Sanur. Oleh karena itu, banyak orang yang datang untuk mengadu nasib di kawasan Sanur. Sebagai bagian dari Kota Denpasar daerah ini menarik untuk tujuan urbanisasi baik bagi pendatang yang berasal dari luar Bali maupun pendatang dari daerah lain di Bali. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.6, jumlah penduduk yang datang ke kawasan Sanur lebih besar daripada penduduk yang pindah dari kawasan Sanur. Pada Tahun 2009, penduduk yang pindah dari kawasan sanur sebanyak 426 orang, sedangkan penduduk yang datang berjumlah 816 orang pada umumnya kedatangan penduduk pendatang di kawasan Sanur karena alasan mencari kerja, pindah kerja, mengembangkan usaha atau karena faktor keamanan tinggal di Bali

dibandingkan dengan daerah lain. Bagi penduduk pendatang yang memiliki keahlian dan kemampuan, produktivitasnya telah mampu mendorong pembangunan kawasan wisata ini, tetapi bagi penduduk pendatang, kedatangannya telah menjadi beban dan menimbulkan berbagai gejala sosial seperti meningkatnya pengangguran, kriminalitas dan kesemrawutan tata ruang perkotaan.

Tabel 4.6
MUTASI PENDUDUK DI KAWASAN SANUR
TAHUN 2012

Mutasi	Jenis Kelamin	Sanur Kauh	Kelurahan Sanur	Sanur Kaja	Total
Lahir	Laki-laki	6	6	7	19
	Perempuan	2	10	4	16
	Jumlah	8	16	11	35
Mati	Laki-laki	21	6	16	43
	Perempuan	23	3	4	30
	Jumlah	44	9	20	73
Datang	Laki-laki	159	38	216	413
	Perempuan	137	40	226	403
	Jumlah	296	78	442	816
Pindah	Laki-laki	113	65	13	191
	Perempuan	123	99	13	235
	Jumlah	236	164	26	426

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2012.

Selama ini penduduk pendatang yang berkeahlian telah tertampung dalam sektor formal perkotaan, sedangkan penduduk pendatang hanya tertampung dalam sektor informal, termasuk menjadi buruh kasar, tukang es, bakso, dan lain-lain. Sektor formal merupakan sektor yang membutuhkan persyaratan dan keahlian khusus bagi pekerja dalam instansi yang dimasukinya,

seperti pendidikan, keterampilan, modal, dan teknologi. Sektor informal adalah sektor yang bersifat terbuka, fleksibel, dan dapat dimasuki oleh siapapun tanpa persyaratan apapun (Keith Hart dalam Manning dan Effendi, 1985: 78, 138).

Mata Pencaharian Penduduk

Berkembangnya sektor wisata telah mengubah mata pencaharian penduduk lokal dari sektor pertanian ke sektor jasa pariwisata. Pada Tahun 1960-an sampai 1970-an penduduk Desa Sanur mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, pada saat sekarang mereka sebagian besar sudah memasuki sektor-sektor pekerjaan lain, termasuk di bidang pariwisata. Penduduk kawasan Sanur menurut jenis lapangan pekerjaan/usaha dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7

**TENAGA KERJA MENURUT SEKTOR/USAHA
DI KAWASAN PARIWISATA SANUR**

Jenis pekerjaan	Sanur Kauh	Kelurahan Sanur	Sanur Kaja	Total	%
Pertanian	177	89	82	348	6,23
Peternakan	277	0	29	306	5,47
Perikanan	29	71	48	146	2,61
Perkebunan	23	0	0	23	0,41
Perdagangan	207	707	336	1250	22,36
Industri Pariwisata	311	371	104	786	14,06
Listrik/air minum	16	9	7	32	0,57
Angkutan/komunikasi	54	198	191	443	7,92
Perbankan/keuangan	12	38	24	74	1,32
Pemerintahan/jasa	426	536	411	337	24,56

Lainnya	379	278	152	809	14,47
Jumlah	1911	2297	1382	5590	100,00

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka, 2012

Seperti yang terlihat dalam Tabel 4.7 mata pencahariannya sebagian kecil petani, pegawai negeri, dan ABRI. Mata pencaharian di samping sebagai sumber nafkah, juga dapat dijadikan tolak ukur pemenuhan ekonomi penduduk di desa kawasan Sanur, pembangunan kerap kali menjadi bahan sorotan karena hal ini selaras dengan pergeseran arah pembangunan akibat tekanan-tekanan pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Wawancara Gusti Kamajaya, 12 Juli 2010).

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa penduduk ketiga desa/kelurahan yang berada di kawasan Sanur telah memiliki berbagai pekerjaan. Di samping sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan (nelayan), mereka kini telah memasuki bidang-bidang pekerjaan seperti perdagangan, industri, listrik, air minum, angkutan, komunikasi, perbankan/keuangan, jasa dan pemerintahan. Mayoritas penduduk di kawasan Sanur telah bekerja di sektor pemerintahan/jasa (24.56%), sektor perdagangan (22.36%), dan sektor industri 14.06%).

Mata pencaharian penduduk di kawasan Sanur berjumlah 1,936 ribu yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang yang terkait dengan industri pariwisata sebanyak 36,42 %. Sesuai dengan data yang tercatat dalam Statistik Desa di kawasan Sanur ternyata 40 % dari jumlah penduduk adalah perempuan Hindu. Dari 584 orang perempuan Hindu sebanyak 292 orang adalah pegawai yang bergerak dalam industri pariwisata antara lain karyawan hotel, restoran dan pedagang toko cendramata. Jumlah perempuan Hindu yang bekerja dalam industri pariwisata tidak dicantumkan secara pasti dalam Eka Likita Desa Sanur. Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur yang mempekerjakan perempuan sebagai karyawan terlihat dalam Tabel 4.8 di bawah ini.

TABEL 4.8

PEKERJA LAKI DAN PEREMPUAN HOTEL BERBINTANG LIMA DI KAWASAN SANUR

No	Hotel	L	P	Total
1	Inna Grand Bali Beach	459	81	540 Orang
2	Bali Hyatt	323	64	387 Orang
3	Sanur Beach	254	62	316 Orang
	Jumlah	1036	207	1243 Orang

Sumber : Diolah Dari Data Karyawan Hotel Berbintang Lima Kawasan Pariwisata Sanur, 2012.

Tabel 4.8 tersebut di atas menunjukkan bahwa ⁵ tiga Hotel Berbintang Lima yang ada di kawasan Desa Sanur, memperkerjakan tenaga kerja sejumlah 1.243 orang. Pekerja laki-laki sebanyak 1.036 orang atau 83,00%, dan tenaga perempuan sebanyak 207 orang atau sekitar 16,65%. Dari 207 orang tenaga perempuan, yaitu perempuan Hindu sebanyak 169 orang atau sekitar 81,64%, dan non Hindu sebanyak 38 orang atau sekitar 18,36%. Angka tersebut menunjukkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak dari karyawan perempuan. Perbedaan tersebut disebabkan karena hotel memerlukan karyawan di bidang elektronik, mesin, dan pertamanan yang hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki.

Kehidupan Adat dan Keagamaan

Desa Pakraman adalah salah satu bentuk desa adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu. Umat Hindu sebagai pengusung keberadaan Desa Pakraman selalu berkeyakinan bahwa ⁶ Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahkan perlindungan dan menuntun manusia untuk menuju kebahagiaan lahir batin, seperti yang tersebut dalam Wedha "Moksatam Jagaditha Caiiti Dharma" yang artinya tujuan ajaran agama adalah untuk kesejahteraan jagat dan untuk

mencapai moksa. Oleh karena itu, umat Hindu berkeyakinan bahwa Tuhan adalah asal dan tujuan kehidupan manusia. Tuhan adalah sesembahan manusia, kepada-Nyalah manusia harus memohon agar mendapat pengayoman dan anugrah-Nya.

Berdasarkan prinsip dasar keyakinan agama Hindu tersebut, pada umumnya Desa *Pakraman* memiliki *kahyangan tiga*, yakni *pura desa*, *pura puseh*, dan *pura dalem*. Di samping sebagai salah satu identitas keberadaan Desa *Pakraman*, keberadaan *kahyangan tiga* juga merupakan proyeksi dari *Tri Kona* (*Utpeti*, *Stiti*, *Pemralina*) sebagai refleksi atas hakikat peredaran dan kedinamisan kehidupan di jagat raya ini.

Dalam kehidupan suatu keluarga luas, terdapat bermacam-macam kewajiban upacara adat yang harus dipenuhi oleh setiap KK (Kepala Keluarga). Secara umum, kewajiban upacara dalam kehidupan masyarakat Bali dapat dibedakan menjadi lima macam. (a) Upacara *manusa yadnya*, yakni upacara yang menyangkut siklus hidup manusia dari masa anak-anak sampai dewasa. (b) Upacara *pitra yadnya*, yaitu upacara yang ditujukan kepada roh-roh leluhur. Jenis upacara *pitra yadnya* ini antara lain upacara kematian dan upacara penyucian roh. (c) Upacara *dewa yadnya*, yakni pelaksanaan upacara di lingkungan pura umum dan pura keluarga. (d) Upacara *resi yadnya*, yakni upacara yang berkenaan dengan pentasbihan Pendeta Hindu (e) Upacara *bhuta yadnya*, yakni upacara yang ditujukan kepada Kala Buta atau roh-roh pengganggu kehidupan umat manusia (Bagus, 1999).

Kewajiban melaksanakan upacara tersebut ada yang merupakan kewajiban setiap KK, ada pula yang merupakan kewajiban keluarga luas. Upacara kematian dan upacara di lingkungan *banjar* harus diikuti oleh setiap KK di *Banjar* yang bersangkutan, sedangkan upacara *manusa yadnya* di lingkungan lain di luar *banjar*, merupakan jenis upacara yang bisa diwakili oleh salah satu anggota keluarga luas.

Tempat-tempat upacara bagi umat Hindu, yakni pura yang dapat ditemui di desa *Pakraman* Sanur secara umum dapat digolongkan menjadi empat kategori. Pertama, Pura Kawitan, yakni pura yang asal-usul berdasarkan garis keturunan atau keluarga (geneologis) yang terdiri atas

Sanggah/Merajan, Pura Ibu, Pura Panti, Dadia, dan Padharman. Kedua, Pura Kahyangan Desa diusung oleh semua *krama* desa setempat, yaitu *Pura Puseh*, *Pura Desa*, dan *Pura Dalem*. Ketiga, *Pura Swagina (Pakaryan)*, yakni pura yang berkaitan dengan mata pencaharian hidup pengusungnya, termasuk Pura *Subak*, Pura Melanting. Keempat, pura tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Widhi Wasa yang ada di tempat kerja atau kantor-kantor. Selain ini, ada juga Pura *Sad Kahyangan*, *Dang Kahyangan*, dan *Palinggih Panyawangan*.

Pura *Kahyangan Tiga* merupakan ciri utama keberadaan suatu desa *pakraman* di Bali. Dengan adanya Pura *Kahyangan Tiga* itulah satu kesatuan *krama pakraman* disatukan dalam sebuah rangkaian kegiatan upacara *adat* yang diselenggarakan di Pura Kahyangan ini. Di Desa *Pakraman* Sanur, upaya pemeliharaan/pengelolaan dan pengembangan Pura *Kahyangan Tiga* pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua *krama* desa yang tergabung dalam suatu desa *pakraman* setempat.

Di kawasan Sanur terdapat tiga kelompok desa *pakraman* yang memiliki *tri kahyangan* sendiri-sendiri. Setiap *sasih kedasa* tradisi piodalan di Pura Indra Giri diikuti oleh seluruh masyarakat *pakraman* di kawasan Sanur. Sebagaimana umat Hindu di desa *pakraman* lainnya, seluruh masyarakat *pakraman* di kawasan Sanur menjalani berbagai upacara ritual panca *yadnya*. Pertama, upacara Dewa *Yadnya*, yakni upacara yang merupakan korban suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan para Dewa Dewi dengan sarana berupa banten atau upakara, dapat juga berupa *punia* atau persembahan yang tulus kepada Tuhan. Upacara Dewa *Yadnya* antara lain adalah (1) *budha kliwon pagerwesi*; (2) *piodalan sang hyang saraswati*; (3) *galungan*; (4) *kuningan* yang diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, upacara *Resi Yadnya*, yaitu upacara untuk menobatkan pendeta atau pedanda laki-laki dan perempuan. Di desa *Pakraman* Sanur, upacara *Rsi Yadnya* diselenggarakan untuk menobatkan pedanda laki-laki (tiga orang) dan pedanda perempuan (dua orang) dan seorang *balian* (Iswara, 2004). Ketiga, upacara *Bhuta Yadnya* yakni upacara yang dilakukan umat Hindu di ketiga Desa *Pakraman* adalah rangkaian upacara *tumpek*, yaitu *tumpek wariga (saniscara kliwon, wuku wariga)*, *tumpek kandang/uye (saniscara kliwon, wuku uye)*, *tumpek landep (saniscara kliwon, wuku landep)*, upacara *tumpek wayang (wuku wayang)*. Selain itu,

sebagaimana umat Hindu Bali pada umumnya, setiap tahun *krama* setempat juga melaksanakan *Tawur Kesanga* yang merupakan rangkaian dari upacara Hari Raya Nyepi.

Keempat, upacara *Manusa Yadnya*, yakni upacara yang menyangkut siklus hidup manusia (*manusa yandya*) dari masa sebelum lahir, masa kanak-kanak sampai dewasa. Rangkaian upacara *Manusia yadnya* ini adalah (1) upacara *magedong-gedongan* (ketika janin masih berumur 3-4 bulan dalam kandungan ibunya); (2) upacara *Duk Sangkamareka/rare wumedal* (sebelum anak dilahirkan); (3) upacara *kepus npungsed*, yakni ketika lepasnya tali puser; (4) upacara *ngelepas haon*, yakni ketika bayi baru berumur 12 hari; (5) upacara *kambuhan*, yakni ketika bayi masih berumur 42 hari; (6) upacara *nyabutin* yang diadakan ketika bayi berumur 3 bulan; (7) upacara *otonan/pawetuan*, yakni ketika bayi sudah berumur 6 bulan; (8) upacara *ngempugin* yang diadakan ketika seorang sudah mulai keluar gigi; (9) upacara *makupag/maketus*; (10) upacara *matatah/masangih* yang dilakukan sebagai tanda seorang anak sudah dewasa dan harus belajar mandiri; upacara *matatah* ini juga merupakan simbol bahwa sang anak sudah dibebaskan dari kekuatan negatif yang disimbolkan dengan pemotongan gigi; (11) upacara *pawiwahan*, yakni upacara perkawinan; (12) upacara *mawinten* yang memohon anugrah dari Sang Hyang Aji Saraswati agar diberikan kecakapan dan kebijaksanaan.

Kelima, upacara *Pitra Yadnya*, yaitu upacara yang diselenggarakan sebagai penghormatan kepada *guru rupaka*, yakni orang tua yang telah membesarkan dan mendidik. Dengan *pitra yadnya* umat Hindu menyadari bahwa diri mereka berhutang budhi kepada orang tua dan para leluhur yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Upacara penghormatan kepada *guru rupaka/orang tua* yang telah meninggal upacaranya disebut *pitre renem*. Inti dari pada upacara *Pitra Yadnya* ini adalah penghormatan kepada *guru rupaka/orang tua*.

Sistem Pemerintahan Desa di Kawasan Sanur

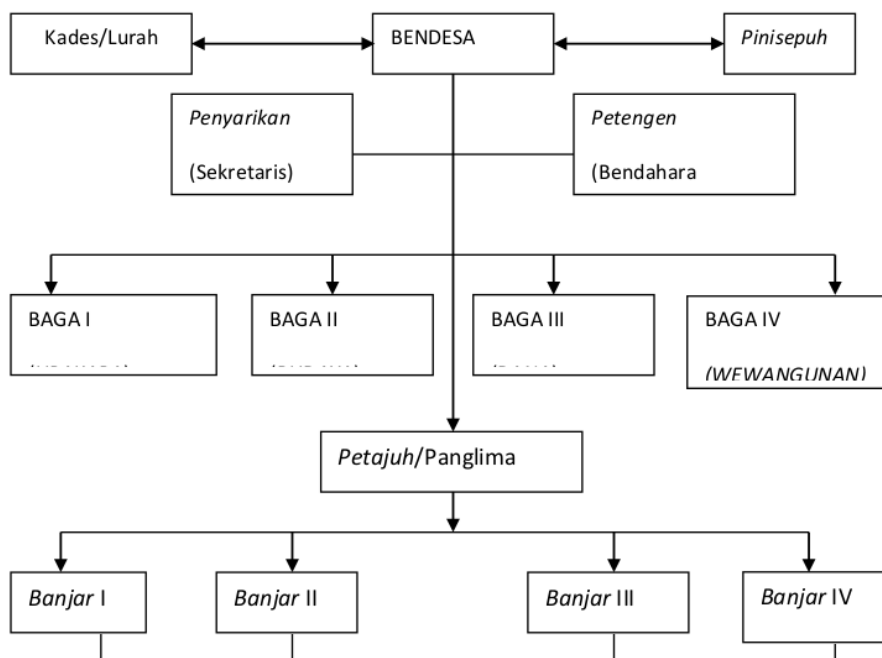
Di kawasan Sanur terdapat tiga Desa Dinas yakni Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, dan Sanur Kaja, dan tiga desa adat/*pakraman* yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Desa

Pakraman yakni Desa *Pakraman* Sanur, desa *Pakraman* Intaran, dan Desa *Pakraman* Penyaringan. Keberadaan Desa *Adat*/Desa *Pakraman* dalam sejarah masyarakat Hindu Bali diperperkirakan mulai muncul pada abad XI Masehi, pada waktu Mpu Kuturan menata kehidupan beragama Hindu di Pulau Dewata ini.

Pada mulanya Desa *Adat* itu disebut *pakraman* karena berupa suatu unit sosiologis *Hinduistik*. Desa *Pakraman* diwujudkan berdasarkan konsep Hindu dan merupakan wadah untuk pengamalan Agama Hindu dengan segala ajarannya. Desa *Pakraman* adalah sebuah asrama model zaman Bali Kuno, yakni para *brahmanarin*, *grhasta* dan *wanaprastha* ditampung dan ditata kehidupannya agar mampu melaksanakan *swadarma*. Desa *Pakraman* merupakan tempat penempatan para pemangku *adat* dan tempat pendalaman ajaran agama Hindu. Tujuan dari pembentukan *pakraman* untuk menciptakan kondisi agar semua orang dapat melaksanakan kewajiban *swadarmanya* di tiap-tiap tingkatan hidupnya (Wiana,1995: 43). Sebagai pranata sosial budaya tradisional yang mengakar dalam kehidupan masyarakat di Bali, Desa *Pakraman* dikendalikan oleh sejumlah orang yang memiliki status dan peran yang jelas. Secara hirarki sistem kepemimpinan yang menentukan keberadaan tiga Desa *Pakraman* di kawasan Sanur dapat digambarkan di bawah ini.

Gambar 4.3

STRUKTUR UMUM KEPENGURUSAN DESA PAKRAMAN



Sumber: Diolah dari Monografi Desa Sanur Kaja, Sanur Kauh, dan Kelurahan Sanur.

Bendesa adalah pimpinan tertinggi Desa *Pakraman* yang memegang dan menjalankan roda pemerintahan di tingkat Desa *Pakraman* khususnya yang berhubungan dengan masalah adat. Di beberapa Desa *Pakraman*, *Bendesa* ini memiliki wakil yang disebut *Penyade* (wakil *bendesa*) yang bertugas sebagai orang yang membantu *Bendesa* di dalam melaksanakan tugas-tugas harian *Bendesa*. *Penyade*/Wakil *Bendesa* juga berhak memimpin sangkepan desa bila *bendesa* berhalangan. Mereka yang dipilih sebagai pengurus Desa *Pakraman* pada dasarnya adalah orang yang dituakan dan dianggap memiliki kemampuan lebih bila dibandingkan dengan kemampuan rata-rata masyarakatnya. Oleh karena itu syarat menjadi *Bendesa*/Kelian antara lain adalah sebagai berikut:

(a) warga desa ngarep dan tidak cacat (tubuh/rohani); (b) memahami masalah adat istiadat di Desa

Pakraman setempat; (c) dipilih oleh warga/*krama* setempat, dengan masa bakti selama lima tahun; (d) dapat dipilih kembali yang dilandasi oleh sumpah jabatan.

1) *Penyarikan*

Penyarikan (Sekretaris) adalah orang yang bertugas dalam kaitannya dengan masalah administrasi Desa *Pakraman*.

2) *Petengen* (Bendahara)

Petengen adalah bendahara, yakni orang yang bertugas sebagai pemegang keuangan desa *pakraman*. Semua hal yang berurusan dengan masalah keuangan Desa *Pakraman* dipegang oleh *Petengen*.

3) *Pangliman/Petajuh*

Pangliman/petajuh adalah wakil *Bendesa Pakraman* yang ada di tiap-tiap Desa *Pakraman* dan *banjar adat* yang ada di lingkungan Desa *Pakraman*. *Pangliman* selain bertindak sebagai wakil *bendesa adat*, dia sekaligus ada yang berperan sebagai juru arah (*kesinoman*) yang bertugas untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kedesaan kepada masing-masing *Krama Desa / Krama Banjar*.

4) *Pinisepuh*

Pinisepuh merupakan sesepuh atau *Penglingsir* Desa *Pakraman* yang bertugas memberi masukan dan pertimbangan kepada *Bendesa* tentang berbagai hal atau masalah terutama yang menyangkut adat, budaya, agama, dan sosial-kemasyarakatan. Organisasi sosial tradisional yang bersifat permanent, yakni Desa *Pakraman* diatur dalam *awig-awig* dan *paswara* setempat. Setiap *krama* mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam organisasi yang dipimpin oleh *Bendesa* ini. Gambar IV merupakan model Desa *Pakraman* secara umum. Sesuai prinsip *desa, kala, patra*, setiap desa *pakraman* memiliki kekhasan dalam hal struktur kepengurusannya. Dalam melaksanakan roda pemerintahan tradisionalnya, *Bendesa* dibantu oleh petajuh (wakil), *Penyarikan* (juru tulis), dan *Petengen* (bendahara) yang bertanggungjawab terhadap masalah keuangan. *Bendesa Pakraman* secara koordinatif didampingi oleh Kepala Desa/Lurah dan *Pinisepuh (penglingsir)* yang terdiri atas

Pengajeng (pemuka masyarakat) serta penasehat yang terdiri dari pendeta, Pemangku *Kahyangan Tiga*, dan *Panglinsir* lainnya.

Dalam menjalankan roda kepemimpinannya, *Bendesa* dibantu oleh bidang dan seksi-seksi (*baga*), yakni *baga* I (membidangi tata/upacara), *baga* II (membidangi tata *krama* budaya), *baga* III (membidangi penggalian dana), *baga* IV (membidangi wewangunan). Selanjutnya untuk mengkoordinasikan urusan rapat dan kedinasan di tingkat *Banjar Adat*, *Bendesa* dibantu oleh *Petajuh/Pangliman*. Karena memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatur kehidupan adat dan keagamaan masyarakatnya, *Bendesa* didampingi oleh suatu majelis pleno yang disebut kerta desa, yakni para sesepuh dan para ahli adat yang berperan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada *Bendesa* dalam memutuskan suatu kebijakan di lingkungan Desa *Pakraman* yang dipimpinnya.

Sistem pemerintahan yang berlaku di Desa *Pakraman*, diputuskan melalui suatu *sangkepan krame* desa. *Sangkepan/paruman* adalah kekuasaan tertinggi yang ada di tingkat desa. Oleh karena itu, hasil *sangkepan (perarem)* merupakan keputusan tertinggi setelah peraturan yang tertera dalam *awig-awig* setempat. *Sangkepan* desa biasanya dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Salah satu bentuk aturan yang ada dalam sistem Desa *Pakraman* adalah masalah penetapan keanggotaan. Secara umum, peraturan yang menyangkut pawongan, dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* menyebutkan bahwa warga atau *krama* desa (ngarep) adalah mereka yang sudah menjadi *krama banjar* dapat secara ngarep pula. *Krama* ngarep pada tiap-tiap *banjar* adalah mereka yang sudah menjadi kepala keluarga. Mengenai bagaimana bentuk sistem pemerintahan selengkapnya dapat dilihat dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* setempat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa *krama* atau warga desa *Pakraman* dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, adalah *krama wed* atau warga asli setempat. Kedua, *krama tamu* atau warga pendatang. Umumnya yang menjadi *krama tamu* hanya terikat oleh administrasi kedinasan. Mereka tidak terikat secara langsung atas segala kegiatan upacara desa *pakraman*

setempat. Sedangkan *krama wed* adalah mereka yang menjadi warga dinas sekaligus sebagai *krama* di desa *pakraman*.

Krama wed inilah sebagai pengusung utama tradisi keagamaan Hindu yang berlaku di desa *Pakraman* setempat. Selain lembaga umat Hindu tertinggi, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga lainnya bisa digolongkan menjadi dua sifat tradisional dan modern. Lembaga tradisional juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lembaga yang terkait dengan *pakraman* dan lembaga yang terkait dengan profesi. Lembaga masyarakat modern juga dibagi menjadi dua, yaitu lembaga lembaga organisasi masa (ormas) dan lembaga merupakan swadaya masyarakat memberi pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat (Setia, 1991: 71).

Fenomena dalam kehidupan masyarakat Bali memang terdapat lembaga-lembaga tradisional yang bergerak berlandaskan jiwa Agama Hindu yang bersifat tetap dan temporer berdasarkan kepentingan masing-masing sesuai dengan tujuannya. Lembaga tradisional yang bersifat tetap yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bali adalah desa *pakraman/banjar* adat, *sekaa* teruna dan *subak*. Sedangkan organisasi tradisional yang bersifat temporer adalah *sekaa-sekaa* yang berlandaskan *swagia*, kesamaan profesi, kesenangan, dan lain-lain seperti *sekaa tumbeg*, *sekaa manyi*, *sekaa-sekaa kesenian*, dan *sekaa pesantian*.

Lembaga-lembaga yang bersifat tetap dan organisasi-organisasi tradisional temporer semuanya ditata dalam tatanan organisasi yang disebut dengan tata *krama* berdasarkan musyawarah mufakat yang disusun dalam suatu *awig-awig*, baik tertulis maupun tidak serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama di bawah pimpinan prajuru.

5) *Banjar* adat

Banjar adat merupakan organisasi sosial tradisional yang berperan penting dalam mengimplementasikan program-program yang dikembangkan oleh Yayasan Pembangunan Sanur. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986, tentang *banjar* adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa adat/desa *pakraman*. *Banjar* merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan sosial yang kuat dalam satu kesatuan wilayah tertentu, dengan

seorang atau lebih pimpinan, yang dapat bertindak baik ke dalam maupun ke luar dalam rangka kepentingan warganya.

Di kawasan pariwisata Sanur terdapat tiga desa dinas, yakni desa Dinas Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, dan Sanur Kaja, serta tiga desa Adat, yakni Desa *Pakraman* Sanur, Desa *Pakraman* Intaran, dan Desa *Pakraman* Penyaringan. Desa *Pakraman* Sanur terbagi menjadi sembilan *banjar* desa adat yang masing-masing dipimpin oleh seorang kelihan adat. Kesembilan *banjar* desa Adat tersebut (1) *Banjar* Adat Belong; (2) *Banjar* Adat Pekandelan; (3) *Banjar* Adat Batanpoh; (4) *Banjar* Adat Buruan; (5) *Banjar* Adat Tegal Asah; (6) *Banjar* Adat Wirasana; (7) *Banjar* Adat Langon; (8) *Banjar* Adat Tangtu; dan (9) *Banjar* Adat Persiapan Tegel selang.

Desa *Pakraman* penyaringan hanya merupakan *banjar* adat penyaringan, sedangkan desa *Pakraman* Intaran terdiri dari sembilan belas *banjar* adat, yaitu (1) *Banjar* Adat Langon; (2) *Banjar* Adat Singgi; (3) *Banjar* Adat Panti; (4) *Banjar* Adat Peken; (5) *Banjar* Adat Penopengan; (6) *Banjar* Adat Pekandelan; (7) *Banjar* Adat Medure; (8) *Banjar* Adat Betngandang; (9) *Banjar* Adat Belanjong; (10) *Banjar* Adat Tewel; (11) *Banjar* Adat Gulingan; (12) *Banjar* Adat Taman; (13) *Banjar* Adat Sindu Kaja; (14) *Banjar* Adat Sindu Kalod; (15) *Banjar* Adat Batu Jimbar; (16) *Banjar* Adat Semawang; (17) *Banjar* Adat Abian Timbul; (18) *Banjar* Adat Puseh Kangin; dan (19) *Banjar* Adat Puseh Kauh.

6) *Sekaa-sekaa*

Sekaa-sekaa adalah kesatuan sosial yang penting di Bali dan merupakan bagian yang lebih kecil atau mencakup bagian-bagian tertentu dari desa adat atau *banjar*. Desa sebagai kesatuan hidup masyarakat didasarkan atas kesatuan tempat tinggal dengan batas-batas yang jelas, dimana yakni pertanian, pekarangan, perumahan, dan tempat pemujaan menjadi satu kesatuan yang khas dan mengikat seluruh warga pakraman dalam kegiatan hidup sehari-hari termasuk wilayah pemujaan dalam satu kesatuan pura atau adanya pura kahyangn tiga (Sudhana Astika, 1986 : 33).

Sekaa adalah lembaga atau kelompok sosial yang lebih kecil sifatnya, ruang lingkup, dan keanggotaannya dari *banjar*, pada kasus-kasus tertentu demikian pula *sekaa* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan melampaui wilayah satu *banjar*. *Sekaa* merupakan kesatuan dari

beberapa orang anggota *banjar* yang menghimpun diri atas dasar kepentingan anggotanya, juga banyak membantu kegiatan *banjar* dan bahkan untuk beberapa hal dimanfaatkan oleh *banjar*.

Fenomena perubahan sosial di masyarakat, khususnya dalam penggunaan teknologi baru serta unsur-unsur yang berubah dalam tatanan kehidupan ikut berperan dalam perubahan *sekaa* itu. Ada beberapa *sekaa* yang hilang sama sekali, dan ada *sekaa-sekaa* yang baru muncul sesuai dengan tuntutan masyarakat akan bentuk kerjasama serta aktivitas kelompok. Banyak di antara *sekaa* tersebut lebih bersifat struktural di lingkungan *banjar* atau desa, walaupun di antaranya masih ada secara fungsional dapat menyejahterakan anggota karena digerakkan secara komersial dengan cara-cara atau manajemen modern.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah wujud interaksi dan kerjasama kelompok akan tetap ada dalam kehidupan masyarakat, apa pun namanya, karena memang dibutuhkan oleh anggotanya. Dinamika kelompok dalam proses perubahan sosial yang terjadi, seperti *sekaa-sekaa* di Bali, harus lebih bersifat fungsional, karena wujud *sekaa* secara struktural ternyata telah mengaburkan hakikat kerjasama yang ada.

Di desa *Pakraman* Sanur, banyak terdapat *sekaa-sekaa* baik yang berdasarkan aspek kehidupan ekonomi, sosial, adat dan agama, kesenian, serta penyaluran hobby/kegemaran anggotanya. Akan tetapi, ada sejumlah *sekaa* yang karena perkembangan zaman tidak lagi bisa eksis. Misalnya *sekaa* yang berorientasi dalam kehidupan aktivitas ekonomi, termasuk *sekaa tumbeg*, *sekaa semal*, dan *sekaa manyi* dan lain-lain, sudah mulai pudar bahkan hilang keberadaannya. *Sekaa-sekaa* ini sudah mulai sulit ditemukan lagi. Kenyataan ini sejalan dengan perubahan dari perkembangan masyarakat setempat yang terus berkembang ke arah kehidupan perkotaan modern. Karena kebun kelapa yang ada di wilayah desa *Pakraman* Sanur sudah mulai sempit maka *sekaa semal* yang membantu mengusir tupai sudah tidak eksis lagi seperti dulu.

Hal tersebut berbeda dengan keberadaan *sekaa* yang berkaitan dengan masalah sosial, olah raga, dan seni budaya. Beberapa *sekaa* yang nampak berkembang di tengah-tengah masyarakat desa *Pakraman* Sanur adalah sebagai berikut (1) *sekaa teruna* yang berkembang di tengah-tengah

banjar; (2) *sekaa tetabuhan* meliputi *sekaa gong*, *sekaa angklung*, *sekaa gender*, *sekaa bleganjur*, dan lain-lain; (3) *sekaa tari* termasuk *sekaa topeng*, *sekaa barong*, dan *sekaa legong*; (4) *sekaa seni pentas* termasuk *sekaa drama gong*, *sekaa janger*, *sekaa bondres*, dan *sekaa genjek*.

Sedangkan *sekaa* yang lain (5) *sekaa kidung* dan *sekaa kekawin*; (6) *sekaa pemaksan* yang berada di pura-pura; (7) *sekaa olah raga* termasuk sepak bola, bola volley, bulu tangkis, bola basket, pencak silat, tinju dan atletik; (8) serta berbagai bakat dan keterampilan yang telah tumbuh di masyarakat. Termasuk *seni tari*, *seni ukir*, *seni patung*, *seni keramik*, *seni pewayangan*, *mejejahitan*, *menyame*, *baca puisi*, dan lain sebagainya. *Sekaa-sekaa* yang berkaitan dengan aspek sosial dan seni budaya ini berkembang sejalan dengan kedinamisan hidup masyarakat setempat dewasa ini.

Patut disyukuri bahwa kegairahan hidup beragama umat Hindu juga terus dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam kaitan ini, maka *sekaa-sekaa* yang mempunyai aspek adat dan agama di tiga desa *pakraman* pada kawasan Pariwisata Sanur juga nampak bergairah, khususnya *sekaa-sekaa pesantian*, *sekaa kekawin*, *sekaa kidung*. Di setiap *banjar* nampak *sekaa* yang mendukung kegiatan adat dan agama ini tumbuh berkembang, yang melibatkan umat segala kalangan baik ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan para generasi muda *banjar* setempat.

Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat di kawasan Pariwisata Sanur, organisasi *sekaa* yang ada mengalami proses modifikasi disesuaikan dengan aktivitas masyarakat Sanur dan desa sebagai daerah wisata, yakni dengan munculnya *sekaa jukung*. *Sekaa jukung* ini berkembang sebagai respon terhadap perkembangan aktivitas di Pantai Sanur, baik untuk melayani kegiatan ritual keagamaan Umat Hindu, maupun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan wisata di sekitar Pantai Sanur. Eksistensi dan pengembangan *sekaa jukung* di Pantai Sanur secara langsung ditangani oleh Yayasan Pembangunan Sanur.

7) *Pecalang*

Dalam beberapa isi *awig-awig* desa *pakraman* setempat dan berbagai keputusan sangkepan warga *pakraman* setempat merupakan kewajiban masing-masing *krama*, baik selaku individu, keluarga maupun selaku warga *banjar/desa*. Artinya, setiap orang atau *krama* desa haruslah menaati

tata tertib dan aturan *awig-awig* yang telah mereka sepakati bersama. Namun demikian, sehubungan dengan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban ini desa *pakraman* memiliki satuan organisasi yang disebut sebagai *pecalang*.

Istilah *pecalang* berasal dari kata celang yang berarti tajam inderanya, terutama indra penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. *Pecalang* sebagai jagabaya desa *pakraman* memiliki tugas memelihara keamanan, mengantisipasi keributan yang mungkin timbul di wilayah desa *pakraman* dan *banjarnya*. *Pecalang* berperan penting dalam menjaga keamanan desa *pakraman* (Suparta, 2000).

Pecalang memiliki identitas atau atribut khusus yang memiliki kekuatan gaib bermakna simbolik yang dipercaya masyarakat Bali. Mereka sebagai jagabaya, menjaga mara bahaya di lingkungan desa. Seseorang yang dipercaya sebagai *pecalang* diterima sebagai penghormatan dan kebanggaan tersendiri karena dapat menaikkan fungsi kualitas di lingkungan *krama* dan masyarakatnya. Dalam melaksanakan *swadarmanya*, *pecalang* dituntut selalu awas dan waspada terhadap segala ancaman dan gangguan apapun baik yang datang dari dalam ataupun dari luar *banjar* atau adatnya.

Sebagai bagian dari sub organisasi di bawah desa *pakraman*, *pecalang* memiliki peran yang sangat penting. Mereka menjadi seksi keamanan yang bertugas pada berbagai kegiatan *banjar* atau desa *pakraman* seperti upacara perkawinan, piodalan, dan ngaben. Keberadaan *pecalang* sebagai seksi keamanan di Bali nampaknya sudah menjadi bagian dari kekhasan tradisi budaya masyarakat Bali yang luhur. Peran dan kiprahnya bukan hanya dikehendaki oleh masyarakat Hindu tetapi juga oleh semua golongan. Kadangkala *pecalang* juga dilibatkan dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan Umat Non Hindu dan acara-acara bersekala nasional bahkan internasional sebagai seksi keamanan.

Sesuai perkembangan zaman, peran *pecalang* juga nampak berkembang. Di desa *Pakraman* Sanur, *pecalang* menjadi motor badan usaha yang dibentuk desa *pakraman* Sanur yaitu Badan Usaha Milik Desa *Pakraman* Sanur yang lebih dikenal dengan BUNMAS. Di samping menarik retribusi

kepada para pedagang kecil/kaki lima di sekitar desa *Pakraman* Sanur, BUNMAS juga melayani jasa keamanan dan perpikiran.

8) *Subak*

Di samping desa dinas dan desa *pakraman*, lembaga tradisional masyarakat Hindu di Bali yang masih eksis adalah lembaga pengaturan air irigasi atau *subak*. Menurut Geertz (1967) dan Pitana (1992), *subak* adalah areal persawahan yang mendapatkan air dari satu sumber. Sedangkan, menurut peraturan daerah (Perda) Propinsi Bali Nomor 02/DPR/1972, tentang *subak* adalah masyarakat hukum pakraman yang bersifat sosio agraris religius, yang terdiri dari para petani yang menggarap sawah pada suatu areal persawahan yang mendapatkan air dari satu sumber bersama, memiliki satu atau lebih Pura Bedugul, serta mempunyai kebebasan, baik di dalam mengatur rumah tangganya sendiri maupun di dalam hubungannya dengan pihak luar.

Dari berbagai batasan tersebut, *subak* dapat dipandang dari segi fisik dan segi sosial. Dari segi fisik *subak* menyangkut hamparan sawah dengan segenap fasilitas irigasinya. Sedangkan, dari segi sosial *subak* merupakan organisasi petani yang otonom mempunyai beberapa ciri dasar yaitu (a) sebagai organisasi petani yang mengelola air irigasi untuk anggotanya, (b) mempunyai suatu sumber air bersama, (c) mempunyai suatu areal persawahan, (d) mempunyai otonomi, baik internal maupun eksternal.

Seperti halnya lembaga tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali, *subak* didasarkan atas filosofi *Tri Hita Karana* yang mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia akan dapat tercapai bila manusia mampu menjaga keharmonisan dalam tiga faktor yaitu parhayangan (unsur keTuhanan), pawongan (manusia), dan palemahan (unsur alam). Di seluruh wilayah Denpasar Selatan, termasuk di kawasan Sanur terdapat lima *subak*. Sebagai suatu organisasi, *subak* mempunyai unsur pimpinan yang disebut *Pakaseh*.

Subak sebagai lembaga yang bercorak *sosio religius* yang bersifat otonom mempunyai dua fungsi atau tugas, baik secara internal maupun eksternal (Pitana, 1993:23). Secara eksternal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian, sedangkan secara internal

memegang peranan penting bagi organisasi *subak* sendiri, dan kehidupan anggotanya. Ada lima tugas utama yang harus dilakukan oleh *subak* yaitu.

- 1) Pencarian dan pendistribusian air kepada segenap anggota, berdasarkan atas luas sawah dan dasar tektek. Fasilitas irigasi yang dimiliki untuk menjamin adanya pembagian air sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di samping itu, *subak* juga melakukan pemeliharaan secara berkala atas berbagai fasilitas irigasi yang dimiliki, sehingga dapat berfungsi dengan baik;

Mobilitas sumber daya dan melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap fasilitas irigasi yang dimiliki. *Subak* memerlukan sejumlah dana yang pada umumnya dihimpun oleh *subak* secara internal, termasuk dari iuran anggota *subak*.

- 2) Penanganan sengketa yang berkaitan dengan kehidupan *subak*, yang diselesaikan secara kekeluargaan, maka permasalahannya akan dibawa kerapat *subak* dan penyelesaiannya berdasarkan *awig-awig* yang ada.

- 3) Upacara agama yang berkaitan dengan *subak*. Terdapat berbagai macam upacara agama yang mengiringi kehidupan *subak* dan komunitasnya.

Sebagai ormas *subak* ternyata bukan hanya sebagai organisasi yang hanya terpaku pada kegiatan pengelolaan irigasi, namun kegiatan *subak* juga menyangkut aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini *subak* memberi pelayanan simpan pinjam uang, pengadaan sarana produksi bersama, penggalian dana bersama, upacara keagamaan, kegiatan gotong royong, pengaturan pola tanam dan waktu tanam secara serempak dan berbagai kegiatan lainnya.

Dampak lain yang ditimbulkan *subak*, di samping usaha peningkatan produksi, dan intensitas tanam, juga menyangkut aspek disiplin atau sikap mental petani, sikap menghargai air, dan sumber daya alam lainnya dan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Rasa kerja antarpetani terpelihara, nilai-nilai agama, adat dan budaya Hindu di Bali menjadi berkembang dalam kehidupan masyarakat *subak*, sehingga *subak* telah menjadi aset yang berharga bagi kehidupan pariwisata.

Selain itu, *subak* menjadi wahana yang efektif bagi pemerintah dalam melakukan inovasi pertanian. Melalui *subak*, pemerintah dapat melakukan pemungutan iuran pembangunan daerah (IPEDA). *Subak* merupakan organisasi sosial ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa *pakraman* di Bali.

Keberadaan *subak* bukan hanya dapat menunjang kehidupan sosial kemasyarakatan petani, tetapi *subak* telah berkembang menjadi organisasi sosial ekonomi yang memberikan pelayanan nyata bagi kesejahteraan anggotanya. Namun, keberadaan *subak* di wilayah Sanur dan sekitarnya terus berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat bangunan dan pemukiman lembaga *subak* setempat terpaksa hanya tinggal nama dan tidak aktif lagi, karena tidak memiliki palemahan (areal persawahan).

10) Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Keberadaan desa *pakraman* merupakan upaya desentralisasi kekuasaan di tingkat masyarakat pada lapisan paling bawah. Sebagai desa *pakraman* tradisional yang mempunyai hak otonomi, desa *pakraman* memiliki otoritas untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam lapangan kehidupan adat, keagamaan, sosial, budaya maupun lapangan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat Bali pada umumnya, desa *pakraman* membentuk unit lembaga perbankan, yakni LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Diharapkan dengan pendirian LPD ini, desa *pakraman* setempat bisa lebih memberdayakan dirinya dalam melakukan kiprah kehidupan *kramanya*.

Dalam *awig-awig* (baik tertulis maupun tidak tertulis) perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola keuangan dan harta kekayaan milik desa sehingga mampu menatap perkembangan dan kemajuan pembangunan. Di dalam *awig-awig* tertulis antara lain menyebutkan adanya *druwen* desa (milik desa) berupa tanah, pelaba pura, uang dan lain-lain, yang merupakan harta kekayaan desa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di lingkungan desa *pakraman* setempat.

LPD desa *Pakraman* Sanur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali Nomor 21/1988 dan Surat Keputusan Gubernur No.588/1991. Sampai dengan akhir tahun 2003, LPD desa *Pakraman* Sanur memiliki aset berjumlah kurang lebih 2 Milyar dengan nasabah penabung sekitar 3.000 orang, dan 400 peminjam/pengambil kredit. Tugas utama LPD adalah untuk melancarkan kegiatan perekonomian warga desa *pakraman* setempat. Fungsi LPD adalah sebagai lembaga keuangan simpan pinjam. Nasabahnya sebagaian besar adalah dari kalangan pedagang kecil, petani dan nelayan.

Nasabah adalah semua warga, baik yang menjadi anggota desa *pakraman* maupun warga di luar desa *pakraman* setempat. Bagi peminjam kredit rata-rata dikenakan biaya administrasi sebesar 2-3%, dengan bunga 2,5-3 % menurun perbulan. Besarnya pinjaman yang diberikan LPD adalah dari Rp 200.000,00 s.d. 10.000.000,00. Bagi warga setempat yang meminjam dibawah Rp. 1.000.000,- biasanya tanpa tanggungan/jaminan, sedangkan bagi yang lebih dari satu juta rupiah harus dengan jaminan. Jaminan/tanggungan yang diberikan nasabah kepada pihak LPD biasanya berupa BPKB sepeda motor atau mobil, atau surat sertifikat kepemilikan tanah dari pihak peminjam.

Bagi *krama* desa setempat memiliki beberapa kemudahan dalam mendapatkan kredit dari LPD, misalnya dikenakan potongan biaya administrasi hanya sebesar 1% bagi *krama banjar ngarep* setempat, pemberian potongan administrasi sebesar 2% bagi *krama banjar tamiu*. Sebagai lembaga perkreditan LPD sungguh berperan penting. LPD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa *pakraman*, karena memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk melayani kebutuhan pinjaman dana yang diperlukan untuk aktivitas *pakraman* dan upacara agama.

Sistem Kekerabatan

Kelompok kekerabatan adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh paling sedikit enam unsur yaitu (a) suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok; (b) suatu rasa kepribadian kelompok yang didasari semua warganya; (c) aktivitas-aktivitas berkumpul dari warga-

warga kelompok secara berulang-ulang; (d) suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok; (e) suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok; (f) suatu kelompok kekerabatan memiliki sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu (Koentjaraningrat, 1992:13).

Kelompok kekerabatan tercipta melalui suatu proses perkawinan dengan memasuki kehidupan rumah tangga itulah seseorang baru memperoleh hak dan kewajiban komunitas *pakraman* dan kekerabatannya (Bagus, 1981:286). Keanggotaan seorang laki-laki dalam *banjar* ditentukan oleh statusnya dalam perwakilan. Oleh karena dalam sejumlah *awig-awig banjar* adat/peraturan *banjar* yang ada selalu disebutkan bahwa persyaratan seorang laki-laki yang sudah menikah wajib menjadi anggota *banjar*.

Seorang perempuan dalam status perwakilan juga menjadi penentuan status suaminya terkait dengan anggota *banjar* dan desa dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali, status dan peran kaum perempuan ditentukan oleh pihak laki-laki. Di samping sebagai istri dalam rumah tangga, perempuan Bali juga sekaligus sebagai anggota *banjar/desa pakraman*. Dengan status sebagai istri, dari proses perkawinan seorang perempuan *banjar* sekaligus juga mengangkat status suaminya dalam keanggotaan/desa *pakraman*.

Dalam status sebagai istri *krama banjar ngarep* (anggota *banjar* utama), yang membedakan *krama banjar* muani (anggota *banjar* laki-laki) dan juga *krama banjar* luh (anggota *banjar* perempuan) yang masing-masing mempunyai sejumlah hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Hal ini terutama dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas adat, upacara, dan tradisi keagamaan lainnya. Anggota *banjar* memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi, sosial, serta hak-hak politiknya sebagai warga masyarakat, negara, dan bangsa. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan perempuan Bali yang hidup diperkotaan ternyata juga memberikan pengaruh pada kehidupan perempuan Bali, khususnya sebagai anggota *banjar* dan desa *pakraman*.

Dalam membandingkan pola keterikatan masyarakat Bali pada *banjar* dan desa *pakraman* antara masyarakat di daerah pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan, maka keterikatan masyarakat di pegunungan dengan desa *pakraman* lebih kuat jika dibandingkan dengan keterikatan masyarakat kondisi di perkotaan yang lebih menunjukkan pada kesatuan *banjar* adatnya.

Kondisi ini berakibat pada pola-pola pelaksanaan kegiatan *pakraman* dan upacara, serta sejumlah persyaratan khusus yang diberlakukan di lingkungan *banjar* adat di kota sehingga akhirnya berdampak pada peranan dan partisipasi perempuan yang lebih aktif jika dibandingkan dengan laki-laki dalam aktivitas adat dan upacara tersebut (Bagus, 1979).

Suatu perkawinan akan melahirkan suatu keluarga batih (*nuclear family*), dan keluarga batih inilah akan terus memelihara hubungan dengan keluarga besar (*extended family*) sebagai kelompok kerabatnya sesuai dengan garis keturunan yang dianut. Hubungan ikatan kekerabatan dalam suatu tempat pemujaan dalam klen kecil disebut *dadia* dan untuk klen besar disebut *pura paibon* atau *pura panti*. Kesatuan keluarga yang berdasarkan atas kesatuan tempat pemujaan nenek moyang disebut dengan kelompok masyarakat tunggal kawitan, tunggal pemrajan, tunggal dadia (Bagus, 1981: 289).

Bagi kelompok tunggal kawitan ini berlaku norma-norma yang ditaati oleh anggotanya. Hal ini disebut *pasidikaran*, misalnya *sembah kasembah*, *parid kaparid*, *tagen-kategen*, yakni maksudnya bahwa dalam suatu upacara keluarganya diwajibkan untuk saling menyembah, memakan sajian yang disuguhkan dari hasil upacara itu, dan apabila terjadi kematian di antara anggota keluarga, salah satu seorang dari keluarga tersebut diwajibkan menyusung jenazah ke kuburan (Agung, 2001: 55-56).

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil (*nuclear family*) yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anaknya. Hubungan sosial diantara ² anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Hubungan antara anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Sebagai bagian dari masyarakat, pada dasarnya keluarga memiliki lima fungsi utama yaitu (a) keluarga merupakan institusi yang menjamin kelangsungan

hidup manusia dari generasi ke generasi (fungsi biologis/ reproduksi). Proses perkawinan antar jenis kelamin laki-laki/perempuan) dalam keluarga tidak hanya sebagai pemenuhan fitrah biologis manusia, tetapi juga sebagai reproduksi yang sah untuk melanjutkan keturunan;

(b) keluarga sebagai inti masyarakat, sekaligus sebagai “negara kecil” di dalamnya ada peran, ada peraturan, ada kepemimpinan dan tanggung jawab, serta ditemukan proses musyawarah dalam kehidupan berdemokrasi, (c) keluarga merupakan tempat/wahana untuk perlindungan dan mengembangkan kasih sayang sesama anggotanya (fungsi apektif).

Fungsi sosial kejiwaan ini merupakan perwujudan fitrah manusia yang menginginkan ketenangan, saling mengasihi dan hidup secara damai. Dengan hubungan sosial yang inten dan hangat dalam keluarga inilah kepribadian anak dikembangkan, (d) keluarga sebagai unit ekonomi, yakni adanya sistem kehidupan ekonomi untuk menopang kelangsungan dan perkembangan keluarga. Taraf dan kualitas kehidupan keluarga banyak ditentukan oleh kondisi ekonomi ini, (e) keluarga merupakan media sosialisasi-edukasi.

Melalui proses interaksi sosial dalam keluarga, sang anak akan mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai normatif yang berlaku pada kehidupan masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya (Khairuddin, 1997).

Di desa *pakraman* Sanur, desa *pakraman* penyaringan dan desa *pakraman* intaran, kelompok kekerabatan terdiri dari berbagai klen seperti yang tercermin dengan nama-nama klen yang dipakai warga masyarakat Sanur. Sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali pada umumnya, melalui simbol-simbol yang berupa nama-nama klen itu, kelompok kekerabatan masyarakat Sanur terbagi menjadi empat wangsa, yaitu *brahmana*, *satria*, *weisia*, dan *sudra*. Ketiga kelompok yang pertama lazim disebut *tri wangsa*, sedangkan lapisan keempat disebut *jaba*.

Gelar untuk klen *brahmana* adalah *ida bagus* untuk laki-laki dan untuk perempuan *ida ayu*, gelar untuk klen *satria* adalah *cokorda*, dan bagi warga klen *weisia* adalah *gusti* (Bagus, 1981: 293). Wangsa *sudra* atau *jaba*, yakni rakyat biasa memiliki sebutan nama *wayan*, *made nyoman*, dan

ketut. Pembagian klen dengan nama kasta dan kewajiban sehari-hari sesuai dengan profesi masing-masing yang disebut dengan *catur wangsa*. Masing-masing klen tersebut disatukan oleh pelaksanaan upacara adat dan agama serta kewajiban menyusung *pura klen*, seperti *pura panti*, *paibon*, dan *kawitan* sebagai identitas klen mereka.

Setelah menjalani perkawinan, keluarga akan menentukan pola menetap atau tempat tinggalnya. Dalam kaitan ini, ada tiga pola menetap, yaitu pola menetap di lingkungan keluarga laki-laki (*verilokal*), pola menetap di lingkungan keluarga perempuan (*uxorilokal*) atau *nyeburin*, pola menetap di tempat yang baru (*neolokal*). Dalam kehidupan masyarakat Sanur, keluarga baru biasanya menjalani pola menetap secara *verilokal* atau *neolokal* dengan hak waris mengikuti garis keturunan laki-laki (bapak/suami) atau *patrilineal*.

Kehidupan Sosial Ekonomi

Pariwisata merupakan sektor pembangunan yang memiliki pengaruh positif bagi masyarakat Bali. Pengaruh positif pariwisata antara lain adalah (a) memberi kesempatan usaha yang semakin luas; lapangan usaha dapat tumbuh guna menyediakan keperluan wisatawan seperti hotel, restoran, biro perjalanan, pramuwisata, tempat rekreasi, tempat penukaran uang, perusahaan angkutan, toko cendramata, pusat pembelanjaan dan pembentukan kelompok kesenian.

Sedangkan (b) semakin luasnya lapangan kerja untuk menjalankan usaha yang tumbuh diperlukan tenaga kerja karena makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh sehingga makin luas pula lapangan kerja yang tercipta; (c) meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah yang berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya, seperti biaya hotel, makan dan minum, cendramata, serta angkutan; (d) mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah seperti; tata cara, adat istiadat, kesenian, dan peninggalan sejarah, yang menjadi daya tarik pariwisata yang merupakan modal utama yang harus dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan.

Selanjutnya (e) mendorong terpeliharanya lingkungan hidup seperti: kebersihan dan kesejukan serta keindahan lingkungan menjadi syarat bagi pengembangan pariwisata ² melalui pengembangan pariwisata, keindahan, kekayaan alam dan kebersihan lingkungan didorong untuk dipelihara dan dilestarikan; (f) mengusahakan peningkatan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban; ² (g) mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lainnya, pariwisata berkembang dengan baik sehingga pariwisata akan mendorong pertumbuhan di bidang ² lainnya; (h) memperluas wawasan nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air (Karyono, 1997: 95-99).

Perkembangan aktivitas kepariwisataan di kawasan Sanur telah mendorong kreativitas seni budaya masyarakat setempat. *Sekaa-sekaa* kesenian, termasuk *sekaa gong, tari, seni lukis, patung*, seni kerajinan rakyat lainnya termotivasi untuk berkembang sejalan dengan permintaan pasar pariwisata. Denyut kehidupan ekonomi pariwisata sudah tumbuh di lingkungan kawasan Sanur pada khususnya dan Kota Denpasar pada umumnya sejak tahun 1960. Sebagaimana dipaparkan dalam buku Sanur Sepintas Kilas (1970), berbagai jenis seni budaya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kehidupan masyarakat Sanur. Semua *banjar* di lingkungan desa-desa yang berada di kawasan Sanur memiliki grup kesenian. Di antaranya adalah seni tari (baris), drama gong, wayang kulit, barong landung, angklung, jogged, arja, tari kecak, gong suling, gender wayang, dan musik modern band. Selain itu, berkembang seni kerajinan sebagai unit usaha keluarga atau home industri, diantaranya adalah seni merangkai karang-karang laut untuk souvenir, melukis, membuat patung, menganyam tikar, tenun cag-cag tradisional lainnya, anyam-anyaman lainnya (BPD Sanur, 1970).

Sarana dan prasarana fisik seperti gedung perkantoran, hotel, bar, dan restoran sebagai penunjang kepariwisataan yang terus berkembang. Fasilitas pendukung wisata yang berupa sarana penginapan berupa hotel, *cottage*, pemondokan telah berkembang sejak tahun 1950 dan 1960-an di antaranya adalah:

- 1) Sindhu Beach Hotel, Natour cabang Bali yang dibuka pada Tahun 1956
- 2) Hotel Narmada yang dibuka pada Tahun 1956

- 3) Tanjung Sari Cottage yang dibuka Tahun 1963
- 4) Hotel Bali Beach di bawah manajemen PT. Hotel Indonesia Natour (PTHIN) yang dibuka Tahun 1966 sekarang bernama Grand Inna Bali Beach berbintang lima.
- 5) Hotel Bali Hyaat di bawah manajemen PT. Hotel Internasional (PTHI) berbintang lima.
- 6) Hotel Sanur Beach di bawah manajemen PT. Hotel Internasional (PTHI) berbintang lima.
- 7) Hotel Paradiso di bawah manajemen PT. Hotel Internasional (PTHI).
- 8) Proyek Sea Side Cottage (Hotel Wisata Werdha Pura) dibuka Tahun 1966.
- 9) Hotel Canti yang dibuka Tahun 1970.

Di samping sarana akomodasi berupa hotel dan *cottage* di atas, juga berkembang *butique*, dan *art shop* di antaranya; 1) Pandi *Galery Art Shop*; 2) *Bar and Restaurant* (Hotel Mars); 3) Puri Bali (Hotel and Art Shop); 4) Art Shop; 5) Sanur Beach Market (Budaya sanggraha); 6) Batik Shop Populer; 7) Toko Kesenian; dan 8) Museum La Mayeur.

Gambaran Umum Perempuan Hindu Pekerja Hotel Bintang Lima di Kawasan Sanur

Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima

Sampai tahun 2009, jumlah hotel berbintang di kawasan Sanur adalah dua puluh satu buah, mempekerjakan karyawan lebih kurang 4.027 orang dan hotel non berbintang berjumlah 87 buah terdiri dari 53 Hotel Melati yang mempekerjakan karyawan sebanyak 961 orang dan 34 pondok wisata yang mempekerjakan sebanyak 233 orang seperti pada Tabel 4.9.a di bawah ini.

Tabel 4.9.a
Jenis dan Jumlah Hotel serta Tenaga Kerja
di Kawasan Sanur

Jenis Hotel	Sanur	Kelurahan	Sanur Kaja	Total
	Kauh	Sanur		

Berbintang III dan IV	Jumlah	2	14	5	21
	Tenaga	236	2.529	1.262	4.027
Melati	Jumlah	11	35	7	53
	Tenaga	144	734	83	961
Pondok Wisata	Jumlah	7	25	2	34
	Tenaga	50	171	12	233

Sumber : Kecamatan Denpasar Selatan Dalam Angka, 2012.

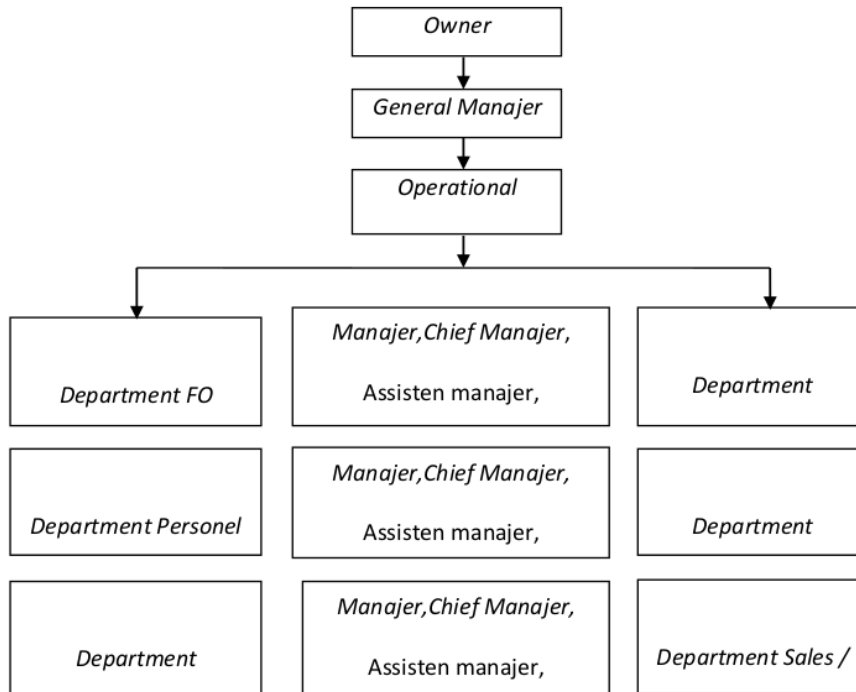
Tabel 4.9.a memperlihatkan bahwa jumlah hotel kelas melati dan pondok wisata lebih banyak dari pada jumlah hotel berbintang III dan IV. Sebagian besar pemilik hotel melati dan pondok wisata ini adalah penduduk lokal. Dilihat dari kepemilikan fasilitas akomodasi wisata ini, penduduk lokal turut menikmati hasil pembangunan pariwisata yang telah ada di kawasan Sanur. Pada tabel di atas menunjukkan hotel berbintang banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan hotel melati dan pondok wisata.

Besarnya jumlah pekerja perempuan Hindu sebagai pekerja di hotel berbintang lima tersebut tidak serta merta menjamin mendapatkan kedudukan dan posisi strata yang strategis. Secara logika dominasi pekerja hotel berbintang lima oleh perempuan Hindu, menjadi peluang kesempatan yang lebar bisa diraih dibanding dengan kaum laki-laki.

Adapun struktur hotel berbintang lima di kawasan sanur seperti hotel Inna Grand Bali Beach, Bali Hyaat dan Sanur Beach, dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.4

STRUKTUR HOTEL BINTANG LIMA
INA GRAND BALI BEACH, BALI HYATT, SANUR BEACH



Sumber: Data diolah dari tiga Hotel berbintang lima di Kawasan Sanur, 2012

Hal tersebut dapat dilihat seperti uraian berikut: (1) *Owner* yaitu Pemegang saham atau pemilik perusahaan (BUMN) di bawah PT. Natour Hotel Indonesia; (2) *General Manajer* (GM) yaitu Pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional hotel dan bertanggung jawab langsung pada pemegang saham (*owner*); (3) *Oprasional Manajer* yaitu pimpinan yang membawahi semua departemen dalam lingkungan hotel berbintang lima dan bertanggung jawab *General Manajer* (GM); (4) Manajer Departemen yaitu pimpinan oprasional yang membawahi bagian-bagian divisi, seperti divisi restaurant, room, garden, *engenering*, *front office*, *sales maketing* dan *security* (keamanan); (5) Staf atau karyawan pada masing-masing departemen.

Namun dari keseluruhan pekerja ⁵ perempuan Hindu di hotel berbintang lima di kawasan wisata Sanur tersebut satu orangpun tidak ada yang menduduki posisi sebagai *operasional manajer* dan hanya seorang perempuan Hindu yang mampu menduduki posisi *manajer departemen* di Hotel Inna Grand Bali Baech, tiga orang perempuan Non Hindu menduduki posisi *manajer departemen* yaitu di Hotel Bali Hyatt serta di Hotel Sanur Beach menduduki posisi *manajer departemen* sebanyak tiga orang perempuan Non Hindu. Dengan fenomena tersebut di atas menunjukkan perempuan Hindu termarjinalkan dalam posisi *manajer*.

Realitas dari struktur hotel berbintang lima tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 4.9.b di bawah ini.

Tabel 4.9. b

Pekerja Perempuan di Hotel Berbintang Lima Di Kawasan Sanur

NO	Hotel	Posisi / Jabatan								
		Perempuan		Top Manajer		Middle Manajer		Staff		Total
		Hindu	Non Hindu	Hindu	Non Hindu	Hindu	Non Hindu	Hindu	Non Hindu	
1	INNA Grand Bali Beach	69	12	0	0	1	0	68	12	81
2	Bali Hyatt	50	14	0	0	0	3	50	11	64
3	Sanur Beach	50	12	0	0	0	3	50	9	62
Total		169	38	0	0	1	6	168	32	207

Sumber : Diolah Dari Data Karyawan Hotel Berbintang Lima Kawasan Sanur, 2010.

Dari Tabel 4.9.b Pekerja Perempuan Hindu dapat digambarkan pada Tabel 4.10 seperti di bawah ini.

Tabel 4.10

1
Posisi Perempuan Hindu Pada Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur.

No	Posisi/Jabatan	Grand Inna Bali Beach	Bali Hyatt	Sanur Beach	Total
1	Top Manajer	-	-	-	-

2	Meddle Manajer	1 Orang	-	-	1 Orang
3	Low Manajer	68 Orang	36 Orang	38 Orang	142 Orang

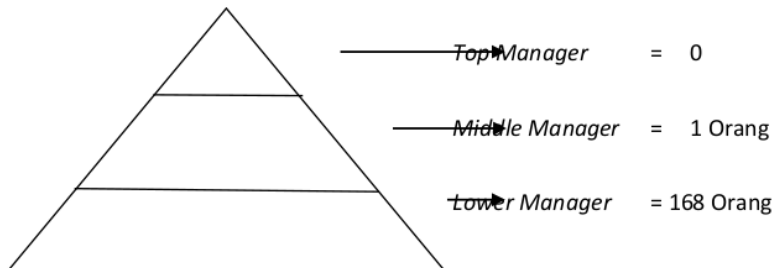
Sumber : Diolah Dari Data Karyawan Hotel Berbintang Lima Kawasan Sanur, 2010.

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa perempuan Hindu belum ada yang menduduki posisi *top manajer*. Sedangkan yang menduduki *meddle manajer* hanya satu orang, dan kecendrungan dari mereka menduduki posisi stap sebesar 168 pekerja.

Secara visual (grafik) posisi pekerja perempuan Hindu pada tiga Hotel berbintang lima di Kawasan Sanur sebagai berikut. Strata posisi pekerja ⁵ perempuan Hindu di tiga hotel berbintang lima, di kawasan Sanur tersebut dapat di gambar pada gambar 4.5 Grafik Piramida Strata Posisi Manajer Pekerja Perempuan Hindu, dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini.

Gambar 4.5

Grafik Piramida Strata Posisi Manajer Pekerja Perempuan Hindu.



Gambar 4.5 Grafik Piramida.

Sumber : <http://google.piramida.com>

Grafik piramida tersebut di atas menunjukkan bahwa pekerja perempuan Hindu pada hotel berbintang lima Grand Inna Bali Beach, Hotel Bali Hyatt, dan Hotel Sanur Beach secara strata posisi *top manajer* masih kosong atau belum mampu diraih perempuan Hindu, hanya strata posisi *middle manajer* diisi oleh satu orang perempuan Hindu enam orang perempuan Non Hindu, sisanya (seratus enam puluh delapan) perempuan Hindu berada di strata posisi *lower manajer* atau disebut dengan

staf pegawai biasa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persyaratan sebagai *top manager* seperti *GM manager* ataupun *operasional manager* adalah seperti persyaratan yang ditetapkan oleh manajemen di tiga hotel berbintang lima. Kriteria untuk menduduki posisi *top manager* adalah;

- 1) Memiliki pengetahuan global tentang kepariwisataan
- 2) Memiliki disiplin waktu
- 3) Mempunyai keterampilan bahasa asing
- 4) Penguasaan teknologi
- 5) Mampu dalam pengembangan kepribadian dan
- 6) Mempunyai relasi yang mengglobal

Karakteristik persyaratan untuk posisi "*top manager*" yang dimaksudkan tersebut sulit untuk bisa dipenuhi oleh pekerja perempuan Hindu, oleh karena keterikatan adat dan sosial.

Kawasan Sanur telah menjadi bagian dari Kota Denpasar, pusat kunjungan dan domisili berkembang mewarnai kehidupan masyarakat Sanur. Usaha-usaha salon kecantikan, pelayanan relaksasi/SPA berkembang. Perkembangan kawasan Sanur juga diwarnai dengan munculnya warung-warung dadakan, kafe-kafe di emper-emper toko di sepanjang jalan yang buka pada malam hari. Muncul pula tempat-tempat panti pijat, tempat-tempat karaoke, dan club-club malam, baik yang sudah mengantongi ijin operasi maupun yang yang masih terselubung. Di antara tempat-tempat hiburan ini, ada juga yang dijadikan ajang untuk transaksi bisnis seks, bahkan ada yang dijadikan lokalisasi prostitusi terselubung. Selain itu, beberapa sudut kawasan Sanur juga dijadikan tempat prostitusi jalanan. Para pekerja seksual (PSK)-nya umumnya adalah para *waria* dan *gay*. Konsumennya di antaranya adalah generasi muda/remaja (Rohman, 2000:82).

Selain bangunan sarana kepariwisataan di atas, berkembangnya penduduk di wilayah kawasan Sanur membutuhkan pemukiman atau tempat tinggal yang baru. Banyak urban yang mengadu nasib di sekitar kawasan Sanur sehingga membutuhkan peluang usaha bagi penduduk lokal yaitu penyediaan tempat-tempat kos atau pemonudukan. Tempat pemonudukan atau kontrakan ini

masih menjadi lahan bisnis yang cukup menjanjikan karena pendatang terus bertambah dan tidak musiman lagi.

Peluang usaha yang berupa pemondokan ini terus berkembang, dengan tarif sewa yang cukup murah/terjangkau sesuai kemampuan sang penyewa. Di samping kontrakan sistem bulanan ada yang menyediakan kontrakan rumah dengan sistem tahunan. Ada pula penduduk lokal yang menyewakan tanahnya dalam jangka waktu 5-10 tahun untuk dibangun sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Tidak seluruh bagian daerah Bali yang tersentuh oleh pariwisata.

Di antara desa-desa yang berhubungan dengan pariwisata dibedakan menjadi tiga tipe, (1) desa penunjang, (2) desa kunjungan, dan (3) desa domisili (Griya, 1996: 8). Dari ketiga tipe tersebut maka tipe ke-3 tergolong desa yang paling dalam tingkat intensitas hubungannya karena ke dalam kategori ini tergolong desa-desa yang memiliki sarana akomodasi hotel *homestay*. Di desa-desa ini merupakan tempat menetap wisatawan selama mereka berada di Bali, salah satu desa ini adalah kawasan Sanur. Sanur merupakan daerah wisata resort yang pertama di Bali yang sangat terkenal di dunia Internasional. Potensi wilayah selain didukung oleh aktivitas budaya masyarakat juga didukung oleh alam fisik yaitu bentangan pantai dari utara sampai kebagian selatan pantai, dan dilengkapi dengan matahari terbit di pagi hari (*sun rise*).

Seperti yang diungkapkan oleh Silvio Santoso (1981: 75-76) sebagai berikut:

“pantai yang berkarang dan berpasir putih ini, sepanjang 8 km terhampar di teluk Badung yang tenang, menghadap ke arah matahari terbit sehingga orangpun bisa datang bersama tukang perahu dan bersama sampan-sampan mereka untuk mengucapkan “selamat pagi” kepada keindahan. Ombak yang memanjang diluar karang merupakan sahabat terbaik para peluncur papan, sedangkan air tenang di bagian dalamnya merupakan tempat yang baik untuk bermain sky atau memancing. Suatu malam di pantai Sanur tak akan terlupakan terutama bila bulan purnama sedang bersinar, dan gadis-gadis bermain air ditemani pemuda-pemudanya. Orang-orang tua dahulu mengatakan bahwa bila bulan purnama tiba mereka harus pergi ke pantai untuk memohon kepada Tuhan agar memberkahi mereka

wajah cantik secantik bulan. Namun ternyata anggapan itu hanyalah alasan orang-orang tua saja, agar anak-anak remaja mendapat kesempatan bersantai sekali sebulan. Tempat lain yang perlu dikunjungi adalah museum La Mayeur, rumah seorang pelukis Belgia, yang kini didiami oleh keluarganya Ni Polok” (almarhum).

Adanya obyek wisata di Sanur dapat membuat wisatawan merasa nyaman, senang dan hampir saban hari dikunjungi oleh turis-turis mancanegara maupun nusantara.

Sejarah Pariwisata di Kawasan Sanur

Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia dewasa ini berkembang dengan pesat sejalan dengan globalisasi yang melanda dunia. Hal ini membawa dampak dan konsekwensi pembangunan infrastruktur untuk menunjang industri pariwisata dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di dalamnya. Keuntungan dari perkembangan pariwisata cukup luas dan bervariasi sehingga dapat mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosio-ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidup. Bali juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama (pusat pariwisata Indonesia Bagian Tengah) dikenal memiliki potensi budaya dan adat istiadat yang unik serta keindahan alam yang mempesona.

Adanya peningkatan kunjungan wisatawan manca negara setiap tahunnya maka pemerintah daerah Bali beserta dinas instansi terkait berupaya membenahi dan menata obyek-obyek wisata yang ada serta mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi pariwisata di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Agar pariwisata Bali tetap *ajeg* dan lestari, maka peninggalan sejarah, kesucian pura serta kelestarian adat istiadatnya yang telah berakar dalam kehidupan di desa *pakraman*, perlu dipertahankan dan dijaga. Dengan demikian pembangunan suatu kawasan untuk mengembangkan obyek wisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan warisan budaya bangsa (Manuaba 1998 : 3).

Pembangunan pariwisata Bali berlandaskan pariwisata budaya yang merupakan strategi dasar meliputi aspek kebudayaan dan Agama Hindu. Prioritas pembangunan di Bali yang menerapkan strategi sektoral diletakkan pada bidang ekonomi dengan penekanan pada sektor pertanian, pariwisata, industri kecil dan rumah tangga, Oka dan Bagus (1997: 135). Perkembangan sektor pariwisata ini diarahkan agar dapat membuka berbagai peluang untuk kemajuan, baik dari segi ekonomi maupun kebudayaan. Peluang-peluang yang diharapkan dalam bidang ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan berwirausaha. Dalam dimensi daerah Bali, upaya perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat memacu secara berkelanjutan peningkatan pembangunan ekonomi, budaya dan lingkungan hidup secara seimbang.

Salah satu kawasan pariwisata yang terletak di wilayah Kota Denpasar adalah kawasan wisata di Desa Sanur, yang sejak dahulu sudah dikenal sebagai obyek wisata pantai berpasir putih bersih dan dewasa ini banyak dibangun fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel. Juga adanya peninggalan sejarah yang merupakan warisan budaya terkenal adalah Prasasti Blanjong di Pura Blanjong yang sekarang dilestarikan sebagai Cagar Budaya di Kota Denpasar seperti yang telah di jelaskan di atas. Di samping itu ditemukan pura suci seperti Pura Merta Sari, Pura Tirta Empul, Pura Dalem Pengembak, Pura Suka Merta, ke semua pura ini memiliki nilai religius yang tinggi.

Banyak fasilitas yang tersedia bagi wisatawan yang datang ke kawasan wisata desa Adat Intaran Sanur Kauh, misalnya hotel dan restoran. Hotel yang tersedia mulai dari hotel yang berkelas melati sampai yang berbintang. Demikian juga dengan restoran yang tersedia mulai dari yang bertaraf daerah, nasional dan internasional. Selain faktor alam yang indah dan mempesona, faktor lain yang tak kalah menarik adalah kebudayaan yang bernafaskan Agama Hindu. Faktor budaya sudah menjadi warisan sejak jaman dahulu di teruskan dari generasi ke generasi selanjutnya dan terus dipertahankan oleh masyarakat setempat. Sejalan dengan perkembangan pariwisata, masyarakat di daerah penelitian mulai meningkatkan kewaspadaannya untuk menyaring budaya luar yang secara spontan masuk dan berpengaruh kedalam budaya lokal daerah Bali. Untuk hal ini masyarakat desa

Adat Sanur berusaha untuk menumbuh kembangkan kreativitas budaya setempat yang berlandaskan Agama Hindu.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah tetap memelihara semangat gotong royong dalam kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *banjar adat* di desa, seperti dalam upacara keagamaan *piodalan*, *ngaben*, *mapendes* dan lain-lainnya. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut di atas di samping untuk mempertahankan budaya Bali dari pengaruh budaya luar, juga berfungsi sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Bali umumnya dan ke kawasan Sanur khususnya.

Unsur kesenian sebagai salah satu unsur dalam kebudayaan memegang peranan penting dalam upaya menarik minat wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk datang ke Desa Adat Sanur. Kesenian yang dimiliki oleh desa ini adalah kesenian tradisional dan modern. Seni tradisional antara lain seni tabuh, seni tari, wayang kulit. Kesenian tradisional ini sudah sejak lama dimiliki oleh masyarakat setempat.

Jenis-jenis kesenian ini pada intinya dipakai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dengan mengadakan sedikit modifikasi sebagai seni pertunjukan contohnya tari kecak yang tadinya dipertunjukkan pada upacara keagamaan sekarang ini banyak dipertontonkan untuk wisatawan. Kesenian modern yang berkembang terutama seni lukis dengan berbagai alirannya, mulai dari yang aliran naturalis sampai aliran abstrak banyak diminati oleh para wisatawan.

Begitu juga seni lukispun berkembang pesat dalam industri kerajinan rumah tangga dan cendramata serta pakaian khas daerah. Seperti halnya seni sablon yang banyak muncul akibat kebutuhan wisatawan terhadap pakaian yang bercirikan khas Bali atau Pantai Sanur serta kegiatan adat istiadat Bali, upacara keagamaan seperti gambar *bade* dalam upacara *ngaben*. Di sepanjang jalan daerah kawasan wisata Desa Sanur banyak ditemukan toko-toko cendramata yang menjual barang-barang kerajinan tangan, juga banyak dijumpai restoran yang menyediakan panggung pertunjukan kesenian dan hiburan secara terjadwal seperti yang di temukan di hotel-hotel. Secara historis perkembangan pariwisata di kawasan Sanur seperti sekarang ini tidak terlepas dari cikal bakal perkembangan pariwisata Bali.

Keterpautan perkembangan kawasan pariwisata Sanur yang dikenal dengan keindahan panorama pantainya memiliki catatan sejarah sebagai pintu gerbang masuknya penjajahan Belanda ke daerah Bali Selatan. Kawasan pariwisata Sanur yang lebih dikenal dengan sebutan pantai matahari terbit, berpasir putih serta ditumbuhi dengan pohon kelapa sehingga penampakan panorama keindahan yang alami. Keindahan alam pantai yang berpasir putih menghadap matahari terbit tersebut kadang kala lebih menampakan suasana keindahan yang berbau magis.

Kemagisan suasana alam Pantai Sanur ketika kawasan ini ada aktivitas prosesi pembakaran mayat (*ngaben*), "*melasti*" dan kegiatan upacara *yadnya* lainnya. Oleh Picard (2008: 38) semua peristiwa tersebut ditulis dan diceriterakan, bagaimana kawasan Pantai Sanur yang menampakan keindahan pantai menjadi kawasan wisata yang menarik dan menjadikan salah satu ikon pariwisata Bali yang dikenal seluruh dunia. Lebih mendalam Picard juga menyinggung selain keindahan pantai pasir yang berpasir halus tersebut, juga ketertarikan masyarakat internasional terhadap keunikan budaya Bali. Antara keindahan Pantai Sanur dengan keunikan budaya Bali, melengkapi keterkenalan kawasan objek wisata Sanur di dunia Internasional.

Secara melembaga perkembangan pariwisata Bali dengan dimulai dengan perusahaan pelayaran Belanda, *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) pada awal tahun 1920-an yang mempropagandakan Bali sebagai daerah tujuan wisata, termasuk kawasan wisata Sanur ikut tercover dalam propaganda perusahaan pelayaran tersebut. Selain itu pula perkembangan kawasan pariwisata Sanur begitu melaju dengan cepat dan menjadikan objek yang menarik, tidak terlepas dari peran pelukis Lemayur yang banyak mengabadikan keindahan alam pantai Sanur ke media kanvas. Kemampuan seniman lukis kelahiran Belgia yang memperistri Nyi Polok, gadis Bali yang sering di jadikan model lukisannya, menjadikan media propanganda dan mampu menarik orang untuk datang ingin melihat secara langsung keindahan Pantai Sanur.

Pada tahun 1971, lembaga SCETO, berhasil membuat perencanaan atau menyusun Master Plan Pariwisata Bali, dengan menetapkan tiga kawasan wisata yakni, Kuta Sanur dan Nusa Dua. Dari lembaga tersebut juga merekomendasikan Pemda Bali, untuk pengembangan daerah wisata

membutuhkan *Tourist Resort* yang terpisah dari masyarakatnya, tanahnya tidak produktif dan ekseibilitas. Ditetapkan kawasan wisata, mendorong laju perkembangan wisata termasuk kawasan wisata Sanur.

Kawasan wisata Sanur, awalnya banyak tumbuh hotel-hotel melati dan *home stay*, atau sejenis *bungalaow*, kemudian dalam perkembangannya ada hotel berbintang seperti Bali Beach. Pada tahun 1980-an merupakan tahun masa keemasan pariwisata Bali, ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata begitu besar, yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang cukup memadai pada waktu itu (*supply* dan *demand* sangat seimbang), seperti hotel Santrian, Sanur Beach, Merrtha Sari, Gasebo hotel dan yang lainnya.

Distribusi dari hasil kegiatan pariwisata di kawasan Sanur bisa dinikmati oleh banyak pihak. Dengan turunnya perda No.3 Tahun 1974 tentang pariwisata budaya yang kemudian diperbaharui dalam perda No.3 Tahun 1991 tentang pariwisata budaya, yang intinya untuk menjadi daerah tujuan wisata secara tegas seluruh pengembangan pariwisatanya tetap menghidupkan dan mengembangkan peran kebudayaan. Dengan perda tersebut memobilisasi lebih kencang pengembangan kawasan wisata Sanur, dengan banyak keterlibatan lingkungan adat masyarakat. Kemajuan pariwisata di kawasan Sanur mengundang banyak pihak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan wisata Sanur Bali.

Kedatangan para investor dalam membangun industri pariwisata mulai tidak terkontrol sehingga kelebihan tempat hunian yang menyebabkan banyak hotel-hotel yang tidak maksimal huniannya, karena jumlah ketersediaan hotel jauh lebih besar dibanding dengan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Sanur. Oleh masyarakat Sanur peranan industri pariwisata semakin dirasakan dalam membangun perekonomian masyarakat dan menjadikan aktivitas ekonomi yang utama.

Secara sosiologi pola kehidupan masyarakat Sanur mulai bergeser dari agraris masuk ke jasa industri pariwisata. Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari lima pilar pembangunan yakni, masyarakat, industri, pemerintah, akademisi dan pers. Kelima pilar pembangunan ini menjadikan

perkembangan kawasan pariwisata Sanur seperti sekarang ini. Masyarakat sebagai pelaku budaya memegang peranan penting dalam membangun dan mengembangkan pariwisata Bali baik secara individual maupun kolektif.

Untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna dirumuskan visi pembangunan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan mempunyai daya saing menuju Bali mandara berdasarkan pada konsep *"Tri Hita Karane"*. Konsep ini tercermin dalam aplikasi Perda Nomor 3 Tahun 1974 jo perda tahun 1991 tentang pariwisata budaya. Yakni pembangunan pariwisata Bali dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya Bali. Serta berkelanjutan dalam pengembangan pada sisi budaya, ekonomi, serta berpayungkan pada nilai-nilai budaya Bali.

Menurut Swellengrebel (1960) dan Mc Kean (1973) dalam Geriya (1995:47) pariwisata dalam pengembangan masyarakat Bali merupakan bagian dari tradisi modern. Perkembangan pariwisata begitu terasa setelah dibangunnya pengembangan Bandara Ngurah Rai dan fasilitas hotel restaurant dan promosi lainnya. Juga dibarengi dengan pariwisata yang berkualitas yang mengarah pada standart internasional menyangkut fasilitas, sarana dan prasarana, pelayanan, produk yang variatif sehingga memenuhi kepuasan wisatawan.

Perkembangan kawasan pariwisata Sanur, merupakan sektor pembangunan yang memiliki pengaruh positif bagi masyarakat Sanur dan sekitarnya. Pengaruh positif pariwisata antara lain adalah (a) memberi kesempatan usaha yang semakin luas, lapangan usaha dapat tumbuh guna menyediakan keperluan wisatawan seperti hotel, restoran, biro perjalanan, pramuwisata, tempat rekreasi, tempat penukaran uang, perusahaan angkutan, toko cendramata, pusat pembelanjaan, pembentukan kelompok kesenian, dan sebagainya.

Selanjutnya (b) semakin luasnya lapangan kerja; untuk menjalankan usaha yang tumbuh diperlukan tenaga kerja, karena makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh sehingga makin luas pula lapangan kerja yang tercipta; (c) meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah yang berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya, seperti biaya untuk hotel,

makan dan minum, cendramata, serta angkutan; (d) mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; tata cara, adat istiadat, kesenian, dan peninggalan sejarah.

Fenomena yang menjadi daya tarik pariwisata yang merupakan modal utama yang harus dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan; (e) mendorong terpeliharanya lingkungan hidup; kebersihan dan kesejukan serta keindahan lingkungan menjadi syarat bagi pengembangan pariwisata melalui pengembangan pariwisata, keindahan, kekayaan alam dan kebersihan lingkungan didorong untuk dipelihara dan dilestarikan; (f) mengusahakan peningkatan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban; (g) mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lainnya, pariwisata berkembang dengan baik sehingga pariwisata akan mendorong pertumbuhan di bidang lainnya; (h) memperluas wawasan nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air (Karyono, 1997: 95-99).

Perkembangan aktivitas kepariwisataan di kawasan Sanur telah mendorong kreativitas seni-budaya masyarakat setempat. Dengan bermunculan kelompok atau *sekaa-sekaa* kesenian, termasuk *sekaa gong, tari, seni lukis, patung*, seni kerajinan rakyat lainnya termotivasi untuk berkembang sejalan dengan permintaan pasar pariwisata. Denyut kehidupan ekonomi pariwisata sudah tumbuh di lingkungan kawasan Sanur pada khususnya dan Kota Denpasar pada umumnya sejak tahun 1960-an.

Sebagaimana dipaparkan dalam buku Sanur sepintas kilas (1970), berbagai jenis seni-budaya yang tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan masyarakat Sanur. Semua *banjar* di lingkungan desa-desa yang berada di kawasan Sanur memiliki group kesenian. Di antaranya adalah seni tari (baris), drama gong, wayang kulit, barong landung, angklung, jogged, arja, tari kecak, gong suling, gender wayang, dan musik modern band. Selain itu, berkembang seni kerajinan yang unit usaha keluarga atau *home industry*. Diantaranya adalah seni merangkai karang-karang untuk souvenir, melukis, membuat patung, menganyam tikar, anyam-anyaman lainnya, tenun cag-cag tradisional lainnya, dan sebagainya (BPD Sanur, 1970).

Sarana dan prasarana fisik seperti gedung perkantoran, hotel, bar, dan restoran penunjang kepariwisataan terus berkembang. Fasilitas pendukung wisata yang berupa sarana penginapan berupa hotel, *cottage*, pemondokan telah berkembang sejak tahun 1950 dan 1960-an diantaranya adalah Sindhu Beach Hotel, Natour cabang Bali yang dibuka pada Tahun 1956, Hotel Narmada yang dibuka pada Tahun 1956, Tanjung Sari Cottage yang dibuka Tahun 1963, Hotel Bali Beach di bawah manajemen PT. Hotel Internasional (PTHI) yang dibuka Tahun 1966, Proyek Sea Side Cottage (Hotel Wisata Werdha Pura) dibuka Tahun 1966 dan Hotel Canti yang dibuka Tahun 1970.

Disamping sarana akomodasi berupa hotel dan *cottage* di atas, juga berkembang *butique*, dan *art shop* diantaranya, Pandi Galery Art Shop, Bar and Restaurant (Hotel Mars), Puri Bali (Hotel and Art Shop), Sanur Beach Market (Budaya Sanggraha), Batik Shop Populer, Toko Kesenian dan Museum La Mayeur. Sampai tahun 2009, jumlah hotel berbintang di kawasan Sanur adalah 21 buah, yang mempekerjakan karyawan lebih kurang 4.027 orang dan hotel non berbintang berjumlah 87 buah terdiri dari 53 hotel melati yang mempekerjakan karyawan sebanyak 961 orang dan 34 pondok wisata yang mempekerjakan sebanyak 233 orang (lihat tabel 4.9).

Berkembangnya sektor industri pariwisata telah merubah mata pencaharian penduduk lokal dari sektor pertanian ke sektor jasa pariwisata. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an penduduk desa Sanur mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan maka sekarang mereka sebagian besar sudah memasuki sektor-sektor pekerjaan lain, termasuk di bidang pariwisata, seperti yang tergambar pada Tabel 4.9 pada halaman di atas. Bersamaan dengan perkembangan kawasan wisata di Bali, di kawasan wisata di Sanur, wisatawan yang tinggal di hotel-hotel Internasional dengan gaya hidup relatif terpisah dengan penduduk setempat, sehingga muncul tingkat intraksi dan jarak sosial antara wisatawan dengan penduduk di kawasan Sanur, sangat berbeda dengan wisatawan yang ada di kawasan Kuta. Dengan demikian sejarah perkembangan kawasan wisata Sanur tidak terlepas dari keindahan alam Pantai Sanur, aktivitas budaya, terpaut bersamaan dengan pengembangan konsep pembangunan pariwisata dengan rujukan perda-perda.

BAB IV
BENTUK KETERPINGGIRAN PEREMPUAN HINDU PEKERJA
HOTEL BERBINTANG LIMA

² Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan pariwisata adalah 1) mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional, 2) berbasis pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya seni lainnya termasuk tradisional dan kelestariannya, 3) mengembangkan dan memperluas pariwisata terutama pasar luar negeri (Depbudpar, dalam Anom, 2010: 2). Prioritas pengembangan pariwisata budaya yang utama dan pertama adalah membangun manusianya sebagai subjek pelaku yang berkreasi kreatif yang menciptakan bentuk keragaman budaya yang dibutuhkan dalam industri pariwisata. Selain itu diharapkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat lokal dapat dikembangkan dari hasil kegiatan kepariwisataan.

Masyarakat sebagai pelaku budaya dalam usaha pengembangan industri pariwisata atau sarana lainnya berinteraksi langsung dengan wisatawan sehingga terwujud kesejahteraan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan kawasan wisata Sanur. Dalam kehidupan pariwisata terjalin kerjasama antara penduduk lokal dengan pelaku industri pariwisata sehingga mampu menciptakan ruang kerja yang lebih luas.

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi siapa saja, termasuk perempuan Hindu Bali. Hal semacam ini dapat mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan pendapatan secara langsung serta dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat (Baiquni, 2010: 15).

Mengacu Perda No.3, Tahun 1974 Jo Perda No.3 Tahun 1999, pembangunan kepariwisataan di daerah Bali dilaksanakan dengan berorientasi pada nilai-nilai budaya (Bagus 1995: 36). Hal tersebut bisa dilakukan oleh karena ada dalam suatu kesatuan ekologi

dan tata ruang dengan populasi masyarakat yang relatif homogen. Oleh Pitana (2004: 64) sektor pariwisata ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak serta memacu pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Pembangunan merupakan bagian dari implementasi dari konsep pembangunan pariwisata seperti yang dimaksudkan di atas, dan suatu upaya penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas, Pitana (1992:62) mengatakan bahwa pariwisata budaya yang telah berdampak pada pembangunan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Bali. Dalam perkembangannya sekarang, secara umum sektor pariwisata menjadi tumpuan harapan masyarakat di Bali. Dari teks tersebut di atas tersirat pentingnya peranan pembangunan sektor pariwisata yang memberdayakan sumber daya tradisional. Triguna (2008:34) mengatakan sebagai *capital psiko-kultural* melalui proses sosial termasuk keterlibatan perempuan Hindu sebagai objek dalam pengelolaan budaya dan berakses pada kesejahteraan hidup masyarakat. Demikian pula Aderhold (1998:32) mengatakannya sebagai industri pariwisata seperti keindahan alam, keunikan budaya. Di dalam kehidupan beragama, perempuan Hindu memiliki peran sebagai pelaku aktif sehingga keberlangsungannya tetap terjaga. Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Swellengrebel (2002:2), bahwa perkembangan kebudayaan Bali sejak masa lalu mengungkapkan adanya tradisi-tradisi, mulai dari yang kecil sampai yang besar dan yang modern, seperti yang dikutip sebagai berikut.

"Tradisi yang kecil berorientasi pada kebudayaan lokal, tradisi yang besar berorientasi pada agama dan kebudayaan Hindu, serta tradisi modern memperlihatkan karakteristik dominannya ciri-ciri kekuasaan, ekonomi, individualisme, dan materialistik. Hasil adaptasi antara tradisi kecil dan besar inilah yang disebut kebudayaan Bali tradisional, yang oleh Picard dipandang sebagai kunci utama pariwisata Bali".

Ungkapan tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam pembangunan pariwisata di Bali tidak terlepas dari eksistensi dari nilai-nilai tradisional. Sejalan dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 2009 mengamankan sumber daya dan modal secara optimal (Depbudpar,

dalam Anom, 2010:10). Keterlibatan nilai-nilai tradisional, dalam pembangunan pariwisata seperti tradisi kecil, besar, dan modern, perempuan berperan dalam menjaga dan mengembangkannya. Dengan demikian, hal tersebut terkait dengan jelas bahwa industri pariwisata secara langsung melibatkan kaum perempuan Hindu Bali, sebagai objek yang berperan dalam aktivitas yang menjadikan keunikan budaya.

Sejalan dengan kebangkitan pariwisata Indonesia umumnya, pemerintah Bali mulai menata kembali kepariwisataannya dengan mengefektifkan beberapa hotel yang dimilikinya, termasuk hotel-hotel yang ada di kawasan Sanur Denpasar. Sejalan dengan perbaikan sarana-prasarana transportasi, baik perhubungan darat, udara maupun laut, pada tahun 1960-an Pemerintah Provinsi Bali membangun Bandara Ngurah Rai Denpasar dan membangun sarana akomodasi di daerah Sanur seperti berdirinya Hotel Bali Beach yang sekarang dinamai Inna Grand Bali Beach.

Bertolak dari perkembangan pariwisata Bali tersebut, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepariwisataan antara lain akomodasi, atraksi, konsumsi, informasi dan transportasi. Seperti yang diungkapkan oleh Jhon Pance (70 Tahun) pelaku pariwisata yang dikutip sebagai berikut.

“Perkembangan pariwisata di Bali, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlah akomodasi, pelayanan transportasi, udara, laut dan udara, serta penyediaan ruang-ruang atraksi pariwisata” (Wawancara, 23 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa perkembangan pariwisata di Bali telah mengalami peningkatan. Semua faktor itu dapat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan konsep globalisasi seperti yang dikatakan oleh Apadurai (1993:42) adanya lima pergerakan termasuk pergerakan uang,

budaya, dan manusia melalui pembangunan pariwisata. Pengaruh pariwisata pada aspek ekonomi masyarakat Bali tampak dalam kehidupan dan pendapatannya sehari-hari, sehingga kehidupan masyarakat Bali akibat pariwisata bertambah baik, seperti terlihat dalam pembangunan perumahan, kepemilikan alat transportasi, perabot rumah tangga, dan kemajuan pendidikan anak-anaknya.

Terkait dengan hal tersebut, perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima cukup memiliki peran dan kontribusi, baik sebagai penari, pelayan hotel sebagai *guide* maupun sebagai penjaga toko cendramata. Dengan demikian, peran perempuan Hindu di Bali dalam aktivitas budaya dan tradisi lainnya, menjadikan daya tarik pariwisata (Picard, 2006: 16). Misalnya pada waktu hari raya keagamaan atau kegiatan sehari-hari, perempuan Hindu berperan menyiapkan upacara dan upacara. Apa yang dipersiapkan dan dikerjakan oleh perempuan tersebut sebagai ranah pengembangan pariwisata budaya di Bali dan sebagai komoditas industri pariwisata yang cukup menarik dan disenangi. Hal ini dilakukan perempuan Hindu yang dihormati sesuai dengan “*dharma*nya” sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Menawa Dharmasastra* yang menyatakan bahwa kedudukan seorang perempuan sangat terhormat (*Menawa Dharmasastra* III.56).

Aktivitas dan segala kegiatan perempuan Hindu dapat menjadi daya tarik pariwisata sekaligus menjadikan mereka terpinggirkan sebagai pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali. Keterpinggiran perempuan Hindu yang dimaksud adalah nihilnya perempuan Hindu menjadi *general manager* (GM), minimnya keterwakilan dalam serikat pekerja, kesempatan pengembangan kapasitas yang terabaikan, dan gaji dan insentif yang tidak optimal.

Nihilnya Perempuan Hindu Menjadi *General Manager* (*Top Manager*)

Bentuk keterpinggiran pekerja perempuan Hindu Bali di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur menyebabkan nihilnya mereka yang menempati posisi sebagai *general*

manajer. Sebagaimana yang dipaparkan di bagian sebelumnya, pekerja di Hotel Inna Grand Bali Beach sebanyak 540 orang yang terdiri atas pekerja laki-laki 459 orang dan perempuan 81 orang. Dari 81 orang pekerja perempuan, 69 orang adalah perempuan Hindu, 12 orang Muslim dan Kristen. Dari jumlah perempuan Hindu tersebut hanya satu orang yang menduduki posisi *manajer departemen*, sedangkan perempuan non-Hindu 38 orang. Di tiga Hotel Berbintang Lima 6 orang yang menduduki posisi *manajer departemen*, yaitu 3 orang di Bali Hyat dan 3 orang di Sanur Beach.

Secara kuantitas jumlah perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima tersebut cukup besar dibandingkan dengan perempuan non-Hindu, namun hanya satu orang yang menduduki posisi *manajer departemen* kepegawaian. Pekerja perempuan Hindu yang lainnya hanya menempati posisi “*ring and file*” atau sebagai pekerja staf, yaitu pembersih ruangan, bar dan restoran, *front office*, *engineering*, *sales marketing*, *security* (satpam).

Terpinggirnya perempuan Hindu untuk menduduki posisi *manajer* dikatakan oleh Ruscitawati dalam petikan di bawah ini:

“Hal tersebut dikarenakan perempuan Hindu di Bali, sangat terikat pada urusan di ranah domestik, seperti urusan rumah tangga, adat, dan sosial masyarakat. Manajemen hotel sangat terbuka transparan dalam hal mempromosikan karyawan tidak membedakan laki-perempuan, strata pendidikan, etnis, agama, suku dan yang dipentingkan adalah ketrampilan, kedisiplinan, dan loyalitas. Lebih lanjut ditegaskan, selama ini perempuan Hindu yang menduduki posisi manajer hanya di departemen kepegawaian. Hal tersebut dikarenakan oleh alasan klasik seperti faktor tidak mendapat dukungan keluarga, *menyamebraye*, dan urusan adat” (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Ungkapan tersebut di atas menggambarkan bahwa pihak hotel memberikan peluang kepada karyawan perempuan Hindu, tetapi di sisi lain, perempuan Hindu terikat oleh adat, seperti yang tergambar dalam struktur manajemen di Inna Grand Bali Beach. Pekerja di Hotel Inna Grand Bali Beach 540 orang, pekerja laki-laki 459 orang dan perempuan 81 orang. Dari 81 orang jumlah pekerja perempuan, 69 orang adalah perempuan Hindu, 12 orang Muslim dan Kristen. Dari jumlah perempuan Hindu tersebut hanya satu orang yang menduduki posisi *manajer departemen*.

Hal tersebut dapat dilihat seperti uraian berikut: (1) *Owner*, yaitu pemegang saham atau pemilik perusahaan (BUMN) di bawah PT. Natour Hotel Indonesia, (2) *General Manajer (GM)*, yaitu pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional hotel dan bertanggung jawab langsung pada pemegang saham (*owner*), (3) *Operasional Manajer* yaitu pimpinan yang membawahi semua departemen dalam lingkungan Hotel Berbintang Lima dan bertanggung jawab kepada *General Manajer (GM)*, (4) *Manajer Departemen*, yaitu pimpinan operasional yang membawahi bagian-bagian divisi, seperti divisi restaurant, room, garden, *engineering, front office, sales marketing, dan security* (keamanan), (5) Staf atau karyawan di tiap-tiap departemen. Bahwa struktur manajemen di Inna Grand Bali Beach tersebut di atas, seorang perempuan dari etnis Hindu Bali menempati posisi manajer departemen kepegawaian.

Begitu juga pekerja perempuan Hindu yang ada di Hotel Bali Hyatt, di bawah PT. Wintor (PMA) memperkerjakan 387 orang pekerja, 64 orang perempuan, terdiri dari 50 orang pekerja perempuan Hindu Bali, 14 orang dari Muslim dan Kristen. Besarnya sebaran pekerja perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima dalam bentuk pengelolaan "*joint*" (*cain*) (Jepang, Australia, Indonesia). Tidak ada seorang pun perempuan Hindu yang menduduki posisi *General Manajer (GM)*, sementara masih didominasi oleh pekerja asing. Di bawah ini dicantumkan penuturan Komang Widiadnyani (38 tahun), Asisten Departemen Manajer Kepegawaian Hotel Bali Hyat Sanur.

"Perlakuan dalam mempromosikan karir jabatan sangat terbuka, transparan dan berdasarkan pada rujukan prestasi yang dievaluasi setiap tahun dari tiap-tiap individu pekerja. Kebanyakan ketidakmampuan perempuan, khususnya Hindu adalah dalam membangun relasi global, oleh karena hal tersebut terkait erat dengan pemasaran hotel (market). Secara jujur Komang mengakui kita perempuan masih kurang mampu dalam membangun relasi atau jaringan, karena di samping relasi juga harus tersedia kedisiplinan waktu. Memang manajemen hotel menerapkan waktu yang fleksible di level *ring and file*, artinya ada ketersediaan waktu-waktu libur, seperti ada upacara *ngaben*, kematian dan diperbolehkan untuk mengatur di tiap-tiap bidang. Lebih ditegaskan lagi kelangkaan pekerja perempuan Hindu yang menduduki posisi GM, itu bukan dikarenakan oleh strata pendidikan, faktor penyebabnya kurang relasi, dan kedisiplinan waktu" (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Mencermati penuturan tersebut di atas bahwa untuk menduduki jabatan sebagai manajer dalam perlakuan mempromosikan karir jabatan sangat terbuka, transparan dan berdasarkan rujukan prestasi yang dievaluasi setiap tahun dari tiap-tiap individu pekerja, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang di katakan (Ann Brook, 2008:36).

Selanjutnya seperti dalam struktur manajemen Hotel Sanur Baech Hotel Berbintang Lima tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan, khususnya perempuan Hindu belum ada menempati posisi *Grand Manajer* ataupun *Operasional Manajer*. Hal tersebut menggambarkan posisinya terpinggirkan dalam kedudukan *General Manajer (GM)*.

Begitu juga yang terjadi di Sanur Beach, yang dikelola oleh sebuah PT. Aerowisata International Group. Pengelolaannya masih memakai sistem manajemen BUMN, yang memperkerjakan 316 orang tenaga kerja, *General Manajer (GM)* orang asing (Jerman), 62 pekerja perempuan, 50 perempuan Hindu, 12 orang Muslim dan Kristen, seperti yang dituturkan oleh Ida Bagus Kompyang, Asisten Manajer Kepegawaian, yang dikutip di bawah ini.

“Untuk posisi GM di Hotel Berbintang Lima ini, rasanya sulit diduduki oleh perempuan Hindu, walaupun *owner* sangat terbuka dan transparan. Hal tersebut terkait dengan jaringan dengan orang-orang asing. Perempuan Hindu pada saat sekarang masih kesulitan dalam membangun relasi global, ketidak disiplin waktu, masih banyak terikat pada urusan di ranah domestik, seperti urusan rumah tangga, adat, dan sosial masyarakat” (Wawancara, 13 Agustus 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan besarnya jumlah pekerja perempuan Hindu, belum menjamin bisa menduduki posisi GM, oleh karena kurangnya faktor-faktor potensi yang disebutkan di atas. Manajemen hotel sangat terbuka transparan dalam hal mempromosikan karyawan dan tidak membeda-bedakan. Belum pernah perempuan Hindu

menduduki posisi GM, yang didudukinya hanya posisi manajer departemen dan *ring and file*. Misalnya struktur manajemen di Hayatt Hotel, menunjukkan bahwa perempuan Hindu belum ada menempati posisi General Manajer (GM) hal tersebut menggambarkan posisinya masih terpinggirkan dalam kedudukan *General Manajer* atau pun *Operasional Manajer*. Hotel ini tidak membedakan strata pendidikan, etnis, agama, dan suku tetapi yang dipentingkan adalah ketrampilan, kedisiplinan waktu, dan loyalitas.

Kajian ketiga Hotel Berbintang Lima di kawasan wisata Sanur, mengindikasikan bahwa perempuan Hindu tidak ada yang menduduki posisi *General Manajer (GM)*. Mereka hanya sampai menduduki *manajer* menengah dan hanya sebagai staf biasa. Nihilnya perempuan Hindu sebagai Top Manajer Hotel Berbintang Lima ini, bukan karena tidak adanya kesempatan bagi mereka, tetapi karena mereka kurang memenuhi faktor-faktor potensi atau syarat yang terkait dengan kompetensi sebagai seorang General Manajer. Di tiga manajemen Hotel Berbintang Lima yang dikaji sangat terbuka dan transparan dalam hal mempromosikan karyawannya untuk menduduki *General Manajer* tanpa membedakan jenis kelamin laki-perempuan, strata pendidikan, etnis, agama, dan suku bangsa tertentu. Syarat utamanya adalah yang bersangkutan memiliki ketrampilan (*skill*), relasi global dan kedisiplinan.

Mayoritas pekerja perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima hanya mampu menduduki posisi *manajer departement* dan *ring and file*. Mereka pada umumnya, bekerja di hotel rata-rata adalah 8 jam untuk setiap hari. Pembagian waktu kerja di Hotel Berbintang Lima, mulai pukul 08.00 Wita sampai 16.00 Wita (pagi), pukul 15.00 Wita sampai 23.00 Wita (siang), pukul 23.00 Wita sampai 08.00 Wita (malam).

Dengan sistem pengaturan waktu kerja selang seling dalam arti tiga hari bekerja kemudian libur sehari, kemudian kerja lagi tiga hari, libur lagi sehari dan seterusnya dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini dituturkan oleh Ni Nyoman Matrini (35 tahun) staf

karyawan bagian personalia di hotel Sanur Beach Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, yang dikutip di bawah ini.

“Saya sudah bekerja di Hotel berbintang ini hampir 7 tahun , dan secara rutinitas mulai kerja pukul 08.00 Wita dan biasa pulang 16.00 Wita, sampai dirumah mandi sebentar sudah capek langsung tidur. Waktu untuk yang lain-lainnya sudah sangat terbatas dan itu dijalani selama bertahun-tahun. Untuk urusan adat dan sosial, seperti ngayah di pura, *ngowopin*, dan kegiatan sosial tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti teman-teman yang lain yang tidak bekerja di Hotel Berbintang Lima” (Wawancara, 19 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa bekerja di hotel sangat disiplin waktu dan aktivitas dalam kegiatan sosial dan adat sangat terbatas. Karena pekerjaan tersebut telah masuk dalam kekuasaan pemilik modal, kerja keras tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Samekto dan David Harvey (2009) bahwa sebagai kapitalis pemilik modal mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keterpinggiran perempuan Bali yang tidak memperoleh jabatan sebagai *Top Manajer* di tempat kerjanya karena mereka kurang loyal dalam pemanfaatan waktu kerja. Mereka justru sering memanfaatkan waktu kerja secara *rolling* atau *selang-seling*. Sistem waktu kerja *selang-seling* dalam arti tiga hari bekerja kemudian libur sehari, kemudian kerja lagi tiga hari, libur lagi sehari dan seterusnya dilakukan secara berulang-ulang. Akan tetapi posisi jabatan *manajer* yang bertanggung jawab penuh dan menentukan maju atau mundurnya institusi hotel, waktu dan eksistensinya tidak bisa di-rolling atau digantikan oleh pegawai yang lain. Dengan sistem kerja seperti ini mereka tidak ada libur pada hari minggu

atau hari libur resmi lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sugeng Pujiono (46 tahun), GM Inna Grand Bali Beach di Sanur, berikut ini.

“Posisi manajer di Hotel Berbintang Lima tidak bisa diatur seperti di staf lainnya, karena jabatan ini memiliki konsekwensi yang tinggi terhadap maju-mundurnya hotel. Maka posisi manajer sepertinya tidak ada kesempatan libur, dituntut waktu yang sangat ketat. Maka posisi manajer hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki dedikasi tinggi dan berdisiplin waktu serta loyalitas memadai” (Wawancara, 19 Juni 2010).

Fenomena di atas menandakan bahwa posisi *manajer* bisa diduduki hanya oleh orang-orang yang memiliki waktu, ketrampilan dan wawasan yang luas dalam bidangnya serta loyalitas. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Suwena (2010:271), bahwa pariwisata merupakan bagian dari kehidupan global, yang selalu berurusan dengan teknologi, informasi serta kondisi lingkungan global. Begitu juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Appadurai (dalam *Featherstone*, 1993:204), bahwa globalisasi sedikitnya ada lima pergerakan, yaitu manusia (*ethnoscape*), media (*mediascape*), ideologi (*ideoscape*), teknologi (*tekno**scape*), dan pergerakan uang (*finanscape*) yang melanda dunia termasuk Bali.

¹ Perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima akan sulit menduduki jabatan puncak (*manajer*) walaupun yang bersangkutan sudah mengantongi pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Pemanfaatan waktu sistem *selang-seling* hanya diterapkan oleh karyawan atau staf biasa, sedangkan bagi *manager* hal itu akan sulit diterapkan karena harus mengatur perusahaan secara penuh waktu dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Semestinya semua pekerja di hotel bekerja dengan mengacu pada KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) yang mereka tandatangani dalam kontrak kerja. Kesepakatan Kerja Bersama ini mengatur hak dan kewajiban karyawan, mengatur hari libur, termasuk: cuti tahunan

selama 12 hari, cuti hamil dan melahirkan 3 bulan, cuti orang tua sakit dan orang tua meninggal mendapat cuti 3 hari, sedangkan karyawan mendapat cuti 3 hari dan tidak ada istilah izin. Semua itu diberikan pada karyawan yang sudah bekerja selama lima tahun dan sebagai karyawan tetap.

Perempuan Hindu menduduki posisi *manajer*, akan bermasalah dalam keberadaannya di lingkungan masyarakat adat (*pakraman*). Karena waktu dan kehadiran tidak bisa dengan mudah digantikan oleh orang lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Konsekwensi perempuan Hindu, sudah tidak ada ketersediaan waktu untuk beraktifitas di lingkungan masyarakat desa *pakraman*. Sering ketidakhadiran kaum perempuan (*krama istri*) di desa *pakraman* menimbulkan kesenjangan sosial dalam bermasyarakat.

Di samping fenomena tersebut di atas ada pula fenomena dalam pekerjaan posisi *manajer* yang menurunkan intensitas hubungan antara suami istri dalam rumah tangga, karena waktu yang tersedia semakin sempit. Keterbatasan waktu ini akan berpengaruh pada komunikasi yang semakin jarang antara suami dan istri sehingga hubungan mereka dengan suami dan anak-anak menjadi kurang harmonis. Pada umumnya kultur keluarga masyarakat di Bali yang menganut paham patrilineal, jika kedudukan perempuan pada ranah publik secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan pada ranah domestik. Persoalan posisi jabatan yang tinggi seperti menjadi *manajer* di Hotel Berbintang Lima, secara psikologis akan membuat ketegangan sosial dalam rumah tangga yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya dis-integrasi sosial dalam keluarga.

Fenomena yang tampak dalam perkembangan terakhir ini, perempuan Hindu sudah mulai mengejar penghargaan yang setara dengan kaum pria. Sebelumnya selalu pasrah menerima nilai-nilai tradisional tentang keluarga yaitu istri mengerjakan tugas-tugas domestik, menjaga, mengasuh dan mendidik anak, sedangkan suami sebagai kepala keluarga mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah (pekerjaan publik). Kenyataan dewasa ini

menunjukkan bahwa perempuan Hindu yang ada di desa kawasan Sanur, bekerja di Hotel Berbintang Lima dan mereka juga dituntut untuk tetap menjalankan tugas-tugas domestiknya sehingga mereka harus berperan ganda, baik peran domestik maupun peran publik, termasuk terlibat dalam upacara adat.

Pelaksanaan ajaran agama Hindu yang disebut dengan *panca yadnya. manusa yadnya*, yakni upacara yang menyangkut siklus hidup manusia dari masa anak-anak sampai dewasa; yakni, *dewa yadnya, pitra yadnya, resi yadnya, manusa yadnya*, dan *bhuta yadnya* (Bagus, 1999). Selain itu, ada pula ranah untuk pelaksanaan nilai ajaran agama dengan melaksanakan bermacam-macam kewajiban, seperti upacara adat yang dijalankan oleh setiap kepala keluarga (*bhakti marga yoga*).

Desa di kawasan Sanur secara umum dalam menjalankan nilai ajaran Agama Hindu, seperti tampak dalam kegiatan-kegiatan *panca yadnya*. Di samping itu pula pelaksanaan *bhakti marga yoga* seperti dalam penyiapan tempat-tempat persembahyangan di pura kawitan, pura kahyangan dan pura swagina (pakaryan), yakni pura yang berkaitan dengan mata pencaharian hidup pengusungnya, termasuk pura *subak*, dan pura melanting.

Kegiatan upacara *dewa yadnya, resi yadnya, bhuta yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya*, sebagai kegiatan ritual dalam *panca yadnya* yang dilaksanakan secara siklus serta kontinyu, sehingga beban kaum perempuan Hindu tidak pernah bisa terlepas. Dalam rentang setahun, masyarakat merayakan hari-hari besar dan pelaksanaannya didominasi oleh kaum perempuan, dengan waktu yang panjang. Setiap tahun, masyarakat Hindu di Bali merayakan tiga kali hari besar Galungan, dua kali Kuningan dan Penyepian. Jika dihitung kegiatan aktivitas secara keseluruhan akan ditemukan, banyak hari raya Hindu. Fenomena tersebut di atas, menyebabkan kaum perempuan Hindu di Bali betul-betul disibukkan oleh kegiatan rutinitas sosial ritual, seperti yang dituturkan oleh Ni Putu Sudeni (30 tahun), Staf Karyawan Hotel Sanur Beach Berbintang Lima, di bawah ini.

“Dalam hitungan waktu satu tahun, 9 kali perempuan Hindu disibukkan oleh kegiatan ritual besar, seperti hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi, odalan pura kayangan tiga dan ritual kecil lainnya. Jika itu dipikirkan saya kewalahan sulit mengatur waktu, terlalu sering izin kita malu sendiri” (Wawancara, 23 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan Hindu disibukkan secara rutinitas yang menyebabkan mereka tidak bisa disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan Hotel Berbintang Lima. Fenomena aktivitas perempuan Hindu tersebut sebagai sikap spritualitas yang diterima secara turun–temurun yang oleh Bourdieu dikatakan sebagai *doxa* (dalam Takwin, 2008:15).

Dalam pelaksanaan ajaran Agama Hindu seperti telah diuraikan di atas, dijalankan secara rutinitas, kontinyu tanpa ada putus, sesuai dengan yang tersurat dalam kalender hari-hari raya besar Umat Hindu. Dalam pelaksanaan hari besar Umat Hindu, seperti yang teruraikan di atas, kaum perempuan memegang peranan penting mulai dari persiapan sampai penyelesaian upacara. Dalam menyukseskan pekerjaan sosial religius tersebut, perempuan Hindu membutuhkan waktu sehari-hari dan itu berjalan secara siklus sesuai dengan *desa kala patra (dresta)*. Seperti mulai dari hari raya Galungan, Kuningan, “odalan di pura “kayangan tiga” (puseh, desa, dan dalem), serta pura banjar, melanting dan pura *dadiya*. Dari kegiatan hari-hari raya tersebut sudah bisa digambarkan bagaimana sibuk dan sulitnya perempuan Hindu di desa kawasan Sanur dalam mengatur waktu.

Industri pariwisata, lebih mengutamakan servis pelayanan yang prima jika tidak mau ditinggalkan oleh wisatawan. Dengan demikian kunci utama adalah disiplin waktu menjadi pertimbangan utama selain ke profesionalan dan loyalitas. Manajer di Hotel Berbintang Lima, memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memobilisasi kemajuan hotel, karena itu dibutuhkan disiplin waktu yang maksimal serta kehadiran yang tepat waktu.

Fenomena persoalan posisi *manajer* seperti tersebut perlu diketahui secara mendalam dengan cara melakukan pembedahan atau pembongkaran pada karakteristik manajemen Hotel Berbintang Lima, yang menyebabkan perempuan Hindu terpinggirkan, seperti yang dilakukan oleh Derrida dengan teori dekonstruksi (Lubis, 2004:111). Dekonstruksi yang dimaksudkan dalam hal ini terkait dengan perempuan Hindu untuk menjadi *manajer* Hotel Berbintang Lima, dengan cara menguraikan faktor-faktor yang menjadikan mereka terpinggirkan. Dengan cara demikian, akan diketahui penyebab mereka keterpinggirkan dalam posisi *manajer*. Terkait dengan hal tersebut diketahui tidak memungkinkan kesempatan akan bisa didapat oleh perempuan Hindu yang penuh dengan kesibukan di ranah domestik. Problematikanya adalah pekerjaan yang sehari-hari dominan dikerjakan oleh kaum perempuan Hindu. Misalnya dalam kegiatan ritual Agama Hindu di desa kawasan Sanur dan dalam *panca yadnya* dibutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu (Wiana, 2000).

Minimnya Keterwakilan Perempuan Dalam Unit Serikat Pekerja

Keterpinggiran kaum perempuan Hindu Bali juga tercermin dalam partisipasi mereka sebagai pengurus dan anggota unit serikat pekerja setempat. Setiap hotel memiliki Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja (PUKFSP) Pariwisata untuk mengurus anggotanya. PUKFSP Pariwisata ini mempunyai kedudukan sejajar dengan pihak manajemen hotel. Apabila ada permasalahan pekerja, maka pihak PUK dan manajemen akan melaksanakan Hubungan Industrial (HI) yakni hubungan pekerja dan pengusaha adalah partner kerja dan segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Tiga pihak pelaksana Hubungan Industrial (HI) adalah organisasi pekerja, perusahaan dan pemerintah. Pertama, Organisasi Pekerja (yakni serikat pekerja pariwisata) memiliki peran memperjuangkan aspirasi dan hak pekerja untuk berorganisasi, memperjuangkan hak

kolektif mereka untuk mengekspresikan perasaan-perasaan, kondisi kerja, tawar-menawar secara kolektif, dan hak-hak normatif lainnya. Selain itu, Organisasi Pekerja harus bertanggung jawab terhadap partisipasi aktif para buruh/pekerja dalam kewajiban-kewajiban mereka dalam pekerjaan. Kedua, pihak perusahaan memiliki hak untuk mengembangkan bisnis sehingga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, termasuk hak untuk mengatur modal. Perusahaan harus pula memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap kesejahteraan para buruh dan mengembangkan praktek-praktek manajemen yang baik dalam perusahaan. Ketiga, pihak pemerintah wajib memerankan tiga fungsi yaitu fungsi pelindung (*protector*), pembimbing (*guide*), dan penengah (*arbitrator*). Dalam hal ini pemerintah merupakan pelindung komunitas serta mitra dalam proses produksi. Memang seharusnya hubungan kemitraan terbangun secara internal antara perusahaan dengan (organisasi) pekerja. Ini lebih mencerminkan keguyuban rumah tangga perusahaan. Namun, kehadiran pihak III (pemerintah) penting untuk menjadi katalisator bila terjadi kebekuan hubungan keduanya.

Hubungan antara perusahaan (majikan), (organisasi) para pekerja, dan pemerintah pada umumnya disebut dengan istilah 'hubungan industrial'. Hubungan tersebut meliputi seluruh isu, termasuk kondisi-kondisi kerja, gaji, jam kerja, kesehatan pekerja, serikat-serikat pekerja, tunjangan kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), cuti, dan lain-lain.

Dalam masyarakat Indonesia yang menegakkan prinsip demokratis, serikat pekerja berfungsi sebagai instrumen tawar-menawar secara kolektif, yang memberi keuntungan timbal balik antara pengusaha dan pekerja. Hubungan industrial di Indonesia memiliki kualitas yang spesifik dan berbeda dengan negara lain. Pola hubungan industrial model liberal kapitalis, sosialis, dan semacamnya harus ditolak. Pola hubungan industrial yang diharapkan tumbuh berkembang di Negara Indonesia adalah yang memegang teguh nilai dan

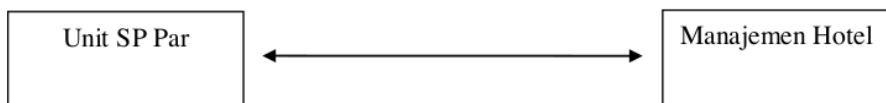
cara pandang orang Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila, terciptanya situasi kerja yang harmonis dan seimbang.

Fungsi para pihak, yakni pihak pekerja, pihak manajemen, dan pihak pemerintah terjalin dalam prinsip kemitraan. Implikasinya adalah: (1) hubungan antara pekerja dan perusahaan harus disesuaikan dengan prinsip gotong-royong, tolong-menolong, dan kekeluargaan; (2) problem-problem harus dipecahkan melalui sebuah proses konsensus atau permufakatan bulat antara perusahaan dan (organisasi) pekerja.

Apabila ada perselisihan antara pekerja dan pihak *manajemen* hotel maka dapat diselesaikan melalui pola penyelesaian masalah tahapan I, yakni pola *bipartet*. Pola *bipartet* yakni penyelesaian masalah pekerja dengan melibatkan dua pihak, yakni unit SP Pariwisata dan pihak *manajemen* (Bagan 5.1). Lembaga Kerjasama *Bipartet* adalah forum komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri atas unsur pengusaha dan unsur pekerja.

Bagan 5.1

Pola Hubungan dalam Lembaga Kerja Bipartit (LKB)



Tugas dari Lembaga Kerja Bipartit (LKB) adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. Dalam upaya memecahkan masalah pekerja dan pengusaha ini, pihak LKB perlu melakukan antisipasi sebagai berikut:

- a. mengetahui secara pasti apa-apa yang berkembang di kalangan pekerja.
- b. melakukan antisipasi dan mencegah timbulnya masalah.
- c. meningkatkan produktivitas kerja; dan

d. meningkatkan partisipasi aktif pekerja dalam memajukan perusahaan.

Lembaga Kerjasama Bipartet (LKS-Bipartet) merupakan salah satu lembaga yang didirikan dalam lingkup intern perusahaan sebagai salah satu wadah bagi pelaksanaan Sistem Hubungan Industrial Pancasila sekaligus sebagai sarana bagi penciptaan hubungan kemitraan yang sejajar antara pengusaha dan pekerja. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, LKS-Bipartet adalah lembaga yang ada di suatu perusahaan yang merupakan wadah konsultasi, komunikasi, dan musyawarah untuk memecahkan masalah bersama yang anggotanya terdiri atas unsur pekerja dan pengusaha.

Pembentukan LKS-Bipartet adalah untuk menjalankan fungsi: (1) menjamin kelancaran dan keharmonisan dalam proses produksi, menghindari sedini mungkin kesalahpahaman dan pertentangan; (2) memantapkan, meningkatkan dan memperhatikan harkat dan martabat pekerja sebagaimana manusia seutuhnya; (3) mengajak pekerja berpartisipasi secara positif dalam membina dan mengembangkan eksistensi perusahaan.

Melalui serikat pekerja, staf atau karyawan bisa mendialogkan bersama pihak manajemen yang menyangkut permasalahan intern perusahaan yang meliputi: (1) saran, merupakan hasil kesepakatan LKS-Bipartet yang ditujukan kepada pengusaha, pekerja atau lembaga lain dalam lingkup intern perusahaan yang pelaksanaannya tidak mengikat; (2) rekomendasi, merupakan hasil kesepakatan LKS-Bipartet yang ditujukan kepada pengusaha, pekerja atau lembaga lain dalam lingkup intern perusahaan yang memiliki bobot atau arti penting untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan atau kebijakan; (3) memorandum, merupakan hasil kesepakatan LKS-Bipartet yang pernah disampaikan kepada pengusaha, pekerja atau lembaga lain dalam lingkup *intern* perusahaan tetapi belum terealisasi atau dilaksanakan sehingga perlu untuk disampaikan dan diingatkan kembali agar dapat menjadi perhatian sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan atau kebijakan (Yayuk Hestiyanti, Minggu, 21 Maret 2010).

Walaupun sudah ada unit organisasi serikat pekerja dan lembaga *bipartet* di setiap hotel tempat kerjanya, pekerja perempuan Hindu belum terlibat secara aktif, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Dari sumber *manajemen* ketiga Hotel Berbintang Lima yang dikaji, hanya 7 orang yang terlibat menjadi pengurus serikat pekerja dari 169 pekerja perempuan Hindu. Karena minimnya keterwakilan perempuan Hindu dalam organisasi serikat pekerja ini, maka aspirasi yang menyangkut kepentingan pekerja perempuan belum dapat diperjuangkan secara optimal.

Minimnya keterwakilan perempuan Hindu dalam organisasi serikat pekerja tersebut karena mereka cenderung tidak mau serius untuk berkompetisi dan bersikap pasrah, mereka kalah dan terpinggirkan. Kekalahan ini mengakibatkan perempuan Hindu di desa kawasan Sanur dihipotesiskan kalah berkompetisi di tengah-tengah kaum perempuan urban lainnya, boleh dikatakan perempuan diposisikan sebagai orang yang paling bijak, suatu predikat mulia, dan semua orang menghendaki. Dalam artian, perempuan juga disebut dengan "perempuan" yang berarti 'ia yang berpendidikan'. Artinya, perempuan disebut perempuan jika telah memiliki kemampuan intelektual yang diperoleh melalui proses atau jenjang pendidikan formal dan nonformal di akademis (Wiana, 2000: 19).

Triguna, (2002: 16) menyatakan bahwa perempuan Hindu menginginkan keadilan dan persamaan peran dalam segala dimensi kesehariannya, seperti keadilan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Tuntutan ini adalah wajar, mengingat di dimensi sosial dan posisi jabatan *manajer* perempuan sering kali ter subordinasi padahal secara normatif negara telah menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan di segala bidang (Suriani, 2003:41)

Secara umum, pelaksanaan ajaran Agama Hindu merupakan kewajiban dalam kehidupan masyarakat Bali, seperti yang diungkapkan Oleh I Gst Ketut Kamajaya (42 tahun), Sekertaris *Bendesa Adat Pakraman* Intaran Sanur, di bawah ini.

“Dalam agama Hindu *yadnya* sebagai kewajiban dan oleh kerama masyarakat secara kolektif dilaksanakan secara rutinitas dan berulang-ulang bagaikan sebuah lingkaran yang tidak berujung dan berpangkal. Semasih ada dalam bingkai agama Hindu dan ada di ranah desa pakraman kegiatan *Yadnya* terus dilaksanakan” (Wawancara, 4 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak pernah berhenti dengan kegiatan *yadnya*, sehingga menyebabkan mereka keterbatasan waktu dan terpinggirkan dalam menduduki posisi *manajer* di Hotel Berbintang Lima. Fenomena tersebut dikatakan sebagai praktik sosial karena keterlibatan masyarakat sebagai pelaku (Takwin, 2009).

Kegiatan perempuan yang tidak pernah berhenti seperti dalam pelaksanaan *panca yadnya* yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Agama Hindu dilakukan dengan konsisten seperti yang dilakukan oleh perempuan di Desa Sanur. *Panca yadnya* dalam teks Agama Hindu dibagi menjadi beberapa bagian antara lain, (a) *dewa yadnya*, yakni pelaksanaan upacara di lingkungan pura umum dan pura keluarga; (b) *resi yadnya*, yakni upacara yang berkenaan dengan pentasbihan pendeta Hindu; (c) *pitra yadnya*, yaitu upacara yang ditujukan kepada roh-roh leluhur. (d) *manusa yadnya*, yakni upacara yang menyangkut siklus hidup manusia dari masa anak-anak sampai dewasa; (e) *bhuta yadnya*, yakni upacara yang ditujukan kepada buta kala atau roh-roh pengganggu kehidupan umat manusia (Bagus, 1999).

Desa di kawasan Sanur secara umum dijalankan nilai ajaran Agama Hindu, seperti tampak dalam upacara *panca yadnya*, dengan menempuh *bhakti marga yoga*. Tempat persembahyangan, untuk umat Hindu, ada Pura Kawitan, Pura Kahyangan dan Pura Swagina (Pakaryan), Pura *Subak*, Pura *Melaning*. tempat pemujaan terhadap sang Hyang Widhi Wasa

yang ada di tempat kerja atau kantor-kantor, ada juga Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, dan Pelinggih Penyawangan (Titib, 2000: 202, Wiana, 2001: 19).

Upacara *Bhuta Yadnya* yakni upacara yang dilakukan umat Hindu di ketiga desa *pakraman* adalah rangkaian upacara *tumpek*, yaitu *tumpek wariga* (saniscara kliwon, wuku wariga), *tumpek kandang/uye* (saniscara kliwon, wuku uye), *tumpek landep* (saniscara kliwon, wuku landep), *upacara tumpek wayang* (wuku wayang). Selain itu, sebagaimana umat Hindu Bali pada umumnya, setiap tahun *krama* setempat juga melaksanakan tawur kesanga yang merupakan rangkaian dari upacara Hari Raya Nyepi (Wiana, 2000 : 42).

Upacara *Manusa Yadnya*, yakni upacara yang menyangkut siklus hidup manusia (manusa *yadya*) dari masa sebelum lahir, masa kanak-kanak sampai dewasa. Rangkaian upacara *manusa yadnya* ini adalah: (1) upacara *magedong-gedongan* (ketika janin masih berumur 3-4 bulan dalam kandungan ibunya); (2) upacara *Duk Sangkamareka/rare wumedal* (sebelum anak dilahirkan); (3) upacara *kepus pungsed*, yakni ketika lepasnya tali puser; (4) upacara *ngelepas haon*, yakni ketika bayi baru berumur 12 hari; (5) upacara *kambuhan*, yakni ketika bayi masih berumur 42 hari; (6) upacara *nyabutin* yang diadakan ketika bayi berumur 3 bulan; (7) upacara *otonan/pawetuan*, yakni ketika bayi sudah berumur 6 bulan; (8) upacara *ngempugin* yang diadakan ketika seorang sudah mulai keluar gigi; (9) upacara *makupag/maketus*; (10) upacara *matatah/masangih* yang dilakukan sebagai tanda seorang anak sudah dewasa dan harus belajar mandiri; upacara *matatah* ini juga merupakan simbol bahwa sang anak sudah dibebaskan dari kekuatan negatif yang disimbolkan dengan pemotongan gigi; (11) upacara *pawiwahan*, yakni upacara perkawinan; (12) upacara *mawinten* yang memohon anugrah dari Sang Hyang Aji Saraswati agar diberikan kecakapan dan kebijaksanaan. Oleh Gramsci (1971: 349) hal tersebut di atas dikatakan sebagai ideologi dari masyarakat Hindu di Bali.

Upacara *pitra yadnya*, yaitu upacara yang diselenggarakan sebagai penghormatan kepada *guru rupaka*, yakni orang tua yang telah membesarkan dan mendidik. Dengan *pitra yadnya* umat Hindu menyadari bahwa mereka memiliki hutang budi kepada orang tua dan para leluhur yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Inti upacara *Pitra Yadnya* ini adalah penghormatan kepada *guru rupaka* (orang tua). Pelaksanaan nilai-nilai ajaran Agama Hindu seperti telah diuraikan di atas, berjalan secara rutinitas, tanpa ada putusnya, dan perempuan Hindu memegang peranan dalam menyukkseskan pekerjaan sosial religius tersebut. Oleh Saussure dan Dhurkheim (Chris Barker, 2008:17) disebut sebagai strukturalisme dalam membangun makna sebagai struktur, deregulasi berada di luar diri individu. Kegiatan ritual dalam *panca yadnya* membutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu, yang hanya bisa dikerjakan oleh kaum perempuan Hindu. Sudah bisa digambarkan bagaimana sulitnya perempuan Hindu di kawasan Sanur untuk mengatur waktu. Untuk menduduki jabatan *manajer* di Hotel Berbintang Lima sudah tidak memungkinkan apabila kegiatan ritual masih belum bisa disiasati oleh kaum perempuan Hindu di desa kawasan Sanur.

Fenomena berbeda, lain halnya dengan keterlibatan perempuan yang bekerja sebagai pekerja lepas, mereka secara langsung dapat *ngayahang* di upacara di tingkat *Desa Adat* dan *Banjar Adat*. Sumbangan waktu dan tenaga pada saat upacara sangat tinggi keterlibatannya mulai dari persiapan upacara yaitu *mejeahatan* dan *metanding* sampai pada puncak upacara dan akhir upacara (*nyurud banten*). Bagi perempuan yang bekerja lepas, seperti penjaga toko cendramata akan selalu berusaha mencari alternatif waktu agar dapat *ngayahang* secara langsung, walaupun sering kali harus menutup warung atau tokonya.

Selanjutnya, *ngayahang* dalam upacara suci dan sakral diselenggarakan oleh individu tetapi diserahkan pekerjaannya kepada *Banjar Suka Duka* yang disebut dengan *meserah ka banjar*. Kegiatan ini sering terjadi mengingat jenis upacara cukup banyak sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang mengenal lima jenis upacara *yadnya* yang disebut dengan *panca*

yadnya. Upacara yang diselenggarakan oleh individu secara umum ada yang bersifat suka dan duka.

Fenomena di desa kawasan Sanur, dalam upacara kematian (*duka*) pekerjaannya selalu merupakan tanggung jawab seluruh warga dan anggota *Banjar Suka Duka*. Jika ada kematian pihak keluarga wajib melapor kepada *Kelian Suka Duka*. Melalui pertemuan antara wakil keluarga duka, *Kelian Suka Duka*, *Kelian Banjar Adat*, *Bendesa Adat* dan *Siwa* ditentukan kapan waktu membunyikan kentongan (*nepak kulkul*). Sejak kentongan dibunyikan bertanda ada kematian, secara formal seluruh anggota *banjar suka duka* datang ke rumah duka mengucapkan rasa bela sungkawa sambil membawa beras, kain kafan, gula pasir, dupa, buah-buahan, dan sebagainya untuk persiapan upacara kematian. Fenomena tersebut oleh Bourdieu disebut jejaringan atau dikatakan sebagai *field* (Takwin, 2009: 114).

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa struktur masyarakat desa adat, perempuan dan pria (suami istri) memiliki berbagai identitas sosial. Mereka adalah sebagai *Krama Desa/Banjar Adat juga Krama Banjar Suka Duka*. Maka sesuai dengan identitas tersebut mereka diberikan sejumlah kewajiban dan hak tertentu. Adapun salah satu kewajiban tersebut adalah melaksanakan upacara keagamaan secara bersama. Kedudukan dan peran perempuan menjadi sangat berarti karena sebagian besar upacara tersebut memerlukan *banten* yang nantinya akan disiapkan dan dikerjakan oleh para perempuan. Kegiatan membuat dan menyiapkan *banten* ini dikerjakan secara gotong-royong (*ngayahang*) dan tolong menolong (*nguopi*). Semua kewajiban ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan-aturan yang disebut *awig-awig Desa Adat*. Hal ini untuk menjaga dan merawat kelestarian desa adat, ini berarti perempuan dan laki-laki merupakan unsur-unsur yang fungsional di dalam sistem sosial *Desa Adat* (Bagus 1999 : 22).

Melalui kegiatan *ngayahang* dan *ngopin* dalam setiap upacara keagamaan tercermin adanya pandangan hidup masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Bali dan

Agama Hindu. Masyarakat menilai kehidupan yang didasari atas kebersamaan dan berbakti terhadap Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya yang tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana*. Bekerja bagi perempuan di desa penelitian dipandang sebagai suatu kewajiban. Pekerjaan di sektor domestik, seperti memasak, mencuci, merawat anak-anak, membuat *banten*, dan sebagainya secara ideal menjadi tugas dan kewajiban perempuan. Bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga juga dipandang sebagai kewajiban oleh perempuan (istri).

Dewasa ini jarang ditemukan perempuan yang diam berpangku tangan sekalipun pada jam istirahat. Ketika ada waktu luang sering kali dimanfaatkan untuk mengerjakan sesuatu yang berguna seperti *mejejahitan* membuat *ceper*, *taledan*, *celemik*, *tangkih*. *Mejejahitan* dilakukan oleh kaum perempuan untuk persiapan upacara ritual yang bersifat rutin sesuai hari-hari suci keagamaan. Hari-hari suci biasanya diperingati di lingkungan rumah tangga atau lingkungan komunitas desa atau *Banjar Adat* dengan cara menghaturkan *sesajen* (*banten*), di sini peran perempuan sangat penting karena *mejejahitan* untuk membuat *banten* tersebut dilakukan sendiri di rumah masing-masing.

Banten upacara di tingkat desa/*banjar adat* dikerjakan bersama-sama oleh anggota adat perempuan di *Bale Banjar* atau *Bale Wantilan*. Jika ada salah satu warga melangsungkan suatu upacara yang pekerjaannya diserahkan ke *banjar*, maka tugas menyiapkan *banten* dikerjakan bersama oleh anggota *banjar* “*krama istri*” di rumah orang yang melangsungkan upacara tersebut. Keterampilan *mejejahitan* yang dimiliki oleh kaum perempuan biasanya didapatkan sejak kecil di rumah orang tuanya. Seorang ibu sering kali menekankan pada anak perempuannya agar belajar *mejejahitan* atau membuat *banten* untuk bekal kelak jika sudah berkeluarga. Keterjalinan hubungan persaudaraan dalam masyarakat sosial melalui “*mejejahitan*” dalam persiapan upacara *manusa yadnya*. Aktivitas tersebut dapat dilihat dalam Gambar 5.1 di bawah ini.



Gambar 5.1.a

Aktivitas Perempuan Hindu dalam Persiapan Upacara Adat

Dokumen : Karmini, Tahun 2012

Fenomena dalam gambar di atas merupakan kegiatan kaum perempuan Hindu dalam *mejahitan* untuk persiapan ritual *panca yadnya*, salah satu dari upacara *Dewa Yadnya*, yakni dilakukan oleh kaum perempuan Hindu di Desa Pakraman Sanur. Hal ini sebagai bentuk korban suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan para Dewa Dewi dengan sarana berupa banten atau upakara, dapat juga berupa punia atau persembahan yang tulus kepada Tuhan.

Dari fenomena gambaran tentang kegiatan dan aktivitas dalam pelaksanaan ajaran Agama Hindu, kedudukan perempuan Hindu adalah sangat besar, tenaga, pikiran, dan waktu terfokus pada pekerjaan tersebut. Dengan kungkungan kegiatan-kegiatan ritual Agama Hindu yang sifatnya rutinitas dan bersiklus seperti tersebut menjadikan waktu untuk mendapatkan pekerjaan formal seperti kedudukan dan posisi dalam Hotel Berbintang Lima tidak memungkinkan. Pekerjaan di Hotel Berbintang Lima, kedudukan dengan posisi manajer membutuhkan waktu dan konsentrasi penuh. Jika hal ini dikaitkan dengan peranan perempuan dalam ritual agama seperti yang telah disebutkan yang penuh kesibukan, dan

sifatnya rutinitas, bersiklus dengan posisi manajer yang penuh waktu, perempuan Hindu sangat mustahil bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Di posisi lain, karakteristik manajemen Hotel Berbintang membuat kondisi biner pekerja perempuan Hindu. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan adat, budaya, ritual sebagai kegiatan domestik. Siapa pun termasuk perempuan Hindu mempunyai tujuan untuk menuju “*moksahjagaditha*” atau kesempurnaan hidup lahir – batin.

Pengembangan Kapasitas Diri yang Terabaikan

Pengembangan Kapasitas dan kepribadian bagi pekerja merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Hotel Berbintang Lima. Peningkatan kapasitas SDM merupakan bagian dari strategi *manajemen* pemasaran Hotel Berbintang Lima, yakni dengan memberikan kesempatan kepada staf atau karyawan untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal.

Kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kepribadian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pelatihan atau pendidikan nonformal, seperti pelatihan dalam merias wajah, estetika dalam berpakaian, etika kesopanan berkomunikasi. Peluang untuk pengembangan kepribadian seperti tersebut kurang direspon positif oleh pekerja perempuan Hindu. Mereka umumnya tidak mengambil kesempatan ini secara baik, tetapi justru mengabaikannya.

Ada sejumlah persyaratan untuk menjadi *Top Manajer* di Hotel Berbintang Lima. Beberapa diantaranya yaitu memiliki *skill* atau keterampilan di bidangnya, profesional, memiliki komitmen, dan disiplin waktu. Selain itu, mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan serta kepribadian yang menarik serta mampu mengelola pekerjaannya sesuai dengan “*jobdis*” kerjanya. Seorang *General Manajer* dituntut dapat berpenampilan “press segar”, mampu menerapkan prinsip estetika dalam berpakaian dan berhias wajah agar

menarik dan tidak ‘norak’, bersikap santun dalam berbicara yang bisa diperoleh melalui pelatihan pengembangan kepribadian. Namun, seperti yang dijelaskan di atas perempuan Hindu kurang merespon kesempatan tersebut dengan pemikiran positif. Hal-hal yang terkait dengan pelatihan pengembangan kepribadian tersebut selalu dihantui oleh ada rasa setreotip penilaian dari lingkungan masyarakat seperti yang dituturkan oleh Ni Putu Sudeni (30 tahun), Staf Karyawan Hotel Sanur Beach di bawah ini.

“Manajemen hotel tempat saya bekerja pernah menawarkan untuk mengikuti pelatihan kepribadian, khususnya dalam estetika berpakaian, penampilan visual, berhias wajah, dengan harapan penampilan saya menjadi lebih menarik, oleh karena, manajemen melihat potensi karir saya bisa menempati posisi manajer. Akan tetapi, tawaran untuk meningkatkan kepribadian melalui pendidikan informal tersebut saya tolak, dengan alasan masih ada kesibukan di adat. Sebenarnya penolakan saya bukan karena ada rasa takut ada kecurigaan yang bukan-bukan terkait dengan pelatihan, seperti bersolek untuk bisa menarik atasan, dan sebagainya” (Wawancara, 23 Juni 2010).

Hal senada diungkapkan oleh Komang Wiadmyani (38 tahun), Asisten Kepegawaian Hotel Bali Hyatt Sanur, di bawah ini.

“Kami di hotel ini sering mengadakan pelatihan tentang pendidikan informal yaitu beauty klas dengan mendatangkan ahli-ahli kecantikan. Akan tetapi, yang datang hanya beberapa orang yaitu perempuan-perempuan yang masih bujangan atau belum berkeluarga, hal ini ada saja alasan ibu-ibu tidak datang, seperti anaknya sakit, kesibukan di adat, suami tugas keluar kota. Ibu-ibu pekerja hotel yang diberikan pelatihan kecantikan klas jarang yang bisa hadir” (Wawancara, 13 September 2010).

Kedua ungkapan perempuan yang bekerja di Hotel Berbintang Lima tersebut di atas mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepribadian untuk menjadi perempuan yang lebih berpenampilan menarik, tetapi perempuan yang sudah berkeluarga jarang mau mengikutinya. Hal ini bertentangan dengan pendapat Brooks (2006: 82) bahwa pengembangan kapasitas dan kepribadian diri perlu dilakukan bagi karyawan atau staf hotel yang ingin berprestasi dan profesional.

Kesempatan untuk pengembangan diri belum dimanfaatkan secara optimal oleh pekerja perempuan Hindu ⁵ di Hotel Berbintang di kawasan Sanur. Hal ini terjadi karena mereka masih terikat oleh pekerjaan rumah tangga (domestik) dan kegiatan adat di tempat tinggalnya. Gambar 5.2 menunjukkan kegiatan adat perempuan Hindu di Desa Sanur.



Gambar 5.2

Gambar Aktivitas Kaum Perempuan Hindu di Desa Sanur

Dokumen : Karmini, Tahun 2012

Gambar tersebut di atas menunjukkan aktivitas perempuan Hindu dalam kegiatan adat. Pengaruh positif perkembangan pariwisata budaya Bali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perempuan Hindu di Bali. Hal ini terbukti karena posisi *manajer* dalam Hotel

Berbintang Lima kebanyakan diisi oleh perempuan non-Hindu dari luar Bali. Adapun perkembangan pariwisata budaya di Bali, seperti yang diuraikan di atas memberikan peluang yang sama pada semua posisi manajemen Hotel Berbintang Lima. Semua dijalankan secara proporsional dan keprofesional sesuai dengan pengembangan kepribadian tiap-tiap individu dan tidak ada perlakuan diskriminatif.

Penerimaan Gaji dan Insentif yang Kurang Optimal

Sektor pariwisata memberikan pengaruh positif kepada masyarakat (a) Memberi kesempatan usaha yang semakin luas; lapangan usaha dapat tumbuh guna menyediakan keperluan wisatawan seperti hotel, restoran, biro perjalanan, pramuwisata, tempat rekreasi, tempat penukaran uang, perusahaan angkutan, toko cendramata, pusat pembelanjaan, pembentukan kelompok kesenian, dan sebagainya. (b) Semakin luasnya lapangan kerja untuk menjalankan usaha yang tumbuh diperlukan tenaga kerja, karena makin banyak jenis usaha yang tumbuh maka makin luas pula lapangan kerja yang tercipta. (c) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat yang berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya, seperti biaya untuk hotel, makan dan minum, cendramata, serta angkutan. (d) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; tata cara, adat istiadat dan kesenian yang menjadi daya tarik pariwisata yang merupakan modal utama yang harus dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan. (e) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup; kebersihan dan kesejukan serta keindahan lingkungan menjadi syarat bagi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata, keindahan, kekayaan alam dan kebersihan lingkungan didorong untuk dipelihara dan dilestarikan. (f) Mengusahakan peningkatan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban. (g) Mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lainnya, sehingga pariwisata

berkembang dengan baik dan akan mendorong ² pertumbuhan di bidang lainnya. (h) Memperluas wawasan daerahnya dan nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air (Karyono, 1997: 95).

Penduduk setempat, termasuk kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan penduduk lainnya untuk terjun bekerja di sektor pariwisata tersebut. Namun, perempuan Hindu Bali belum bisa memanfaatkan peluang tersebut secara optimal dan cenderung terpinggirkan. Keterpinggiran perempuan Hindu Bali terkait dengan penerimaan gaji dan insentif yang mereka terima. Secara umum dapat dinyatakan bahwa gaji dan insentif yang mereka terima relatif terbatas karena jabatan mereka hanya sebatas staf atau karyawan biasa. Hal ini berbeda dengan *reward* yang diterima oleh seorang General Manager. Selain gaji dan insentif dengan persentasi yang lebih besar, sebagian mereka juga diberikan berbagai fasilitas penunjang, termasuk mobil dinas dan tempat tinggal.

Bekerja di Hotel Berbintang dan menjadi *Top Manajer* bukan orientasi utama bagi perempuan Hindu Bali di kawasan Sanur. Dari pengamatan mendalam diketahui bahwa kaum perempuan Hindu yang berada di kawasan Sanur, cukup selektif dalam memilih jenis pekerjaan di sektor pariwisata agar tidak menyebabkan ketegangan dalam hidup bermasyarakat dan dis-harmonisasi hubungan antaranggota keluarga. ¹ Perempuan Hindu yang bekerja dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima, akan terjadi kesenjangan hubungan sosial dalam keluarga dan akan berimplikasi pada terganggunya peran sektor domestik, seperti yang diungkapkan oleh Ni Made Ratmini (35 tahun), Staf Front Office Hotel Bali Hyatt berikut ini.

“Dengan keterbatasan waktu bagi perempuan Hindu yang bekerja menyebabkan sistem pola asuh anak berubah, begitu juga sebagai istri yang melayani suami sehari-hari menjadi terganggu. Kaum perempuan Hindu sendiri tentunya akan merasa terganggu pikirannya saat bekerja di posisi menjabat manajer, karena merasa beban pekerjaan di dalam rumah masih belum selesai” (Wawancara, 12 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa bagi keluarga Hindu di Bali secara kultur telah terbentuk difrensiasi peran berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kaum perempuan (istri) biasanya berperan dalam bidang domestik (pekerjaan rumah tangga), sedangkan kaum pria (ayah) berperan di sektor publik (mencari nafkah keluarga). Fenomena dalam perkembangan pariwisata di desa kawasan Sanur, terjadi pengalihan peran perempuan Hindu, mereka banyak terlibat dalam pekerjaan di industri pariwisata seperti di hotel, restoran (rumah makan) dan toko cendramata. Keterlibatan perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima menimbulkan fenomena terhadap keluarganya sendiri, baik secara sosial maupun budaya. Fenomena yang terjadi tersebut dapat dipandang sebagai suatu nilai positif dan negatif. Nilai positif perempuan Hindu yang bekerja dalam Hotel Berbintang Lima bisa membantu menambah nafkah, sehingga taraf hidup keluarga menjadi meningkat.

Bertambah pendapatan (*income*) tentunya menyebabkan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga di samping meningkatnya kemampuan daya beli keluarga terhadap barang-barang berharga, hal tersebut oleh Piliang di katakan sebagai hasrat (Piliang, 2008: 12). Perlengkapan rumah tangga seperti barang-barang berharga menjadi simbol prestise atau kebanggaan keluarga sehingga bisa meningkatkan status sosial di masyarakat. Sebaliknya, nilai negatif perempuan Hindu akan bisa menimbulkan persoalan yang menyangkut keterkaitan peran dalam rumah tangga dan kehidupan sosial bermasyarakat.

Penerimaan gaji dan insentif yang relative rendah sebagai bentuk dari keterpinggiran tersebut terjadi karena perempuan Hindu hanya sebagai staf atau karyawan biasa. Padahal perkembangan pariwisata di Bali, banyak memberi ruang yang luas dan menjanjikan kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi semua orang yang terlibat dalam bisnis pariwisata, termasuk kaum perempuan Hindu dan non-Hindu.

Berdasarkan hasil pengamatan, pengkajian penulis di beberapa manajemen Hotel Berbintang Lima tidak banyak perempuan Hindu yang mendapatkan kedudukan sebagai manajer, yang merupakan kedudukan dan posisi yang diidam-idamkan oleh semua orang termasuk perempuan Hindu. Kaum perempuan yang mendapatkan posisi tersebut hanya perempuan non-Hindu. Hal ini membuat kesenjangan posisi dalam manajemen dan oleh peneliti dikatakan sebagai bentuk keterpinggiran perempuan Hindu di “rumah”nya sendiri. Terkait dengan posisi untuk menjadi manajer di Hotel Berbintang Lima diungkapkan oleh Pujiono (42 tahun) GM Inna Grand Bali Beach di Sanur, di bawah ini.

“Menjadi seorang manajer di Hotel Berbintang Lima merupakan posisi yang strategis dan kedudukan terhormat wajar menjadi idaman para pekerja di hotel, termasuk kaum perempuan, karena tidak ada perlakuan diskriminatif, yang penting mereka mampu. Posisi manajer banyak menjadi rebutan karena selain posisi strategis, terhormat, dan juga kesejahteraan lebih terjamin. Namun untuk kedudukan tersebut di Hotel Berbintang dituntut disiplin waktu, profesional, jaringan relasi vertikal, horizontal, berwawasan luas dan memiliki kemampuan manajerial” (Wawancara, 15 Juni 2010).

Ungkapan Pujiono, GM Inna Grand Bali Beach tersebut menyiratkan ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang manajer lebih mengarah pada profesional. Fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Joe Holland (2008). Sejalan dengan keprofesionalan tersebut oleh Agastia (60 tahun) Tokoh Agama dan Budayawan, dikatakan di bawah ini.

“Sulit untuk bisa dipenuhi oleh perempuan Hindu, memang dari sikapnya perempuan itu sendiri bisa juga, tetapi sebagian besar perempuan Hindu disibukkan dengan upacara adat dan sosial kemasyarakatan. Biasanya di adat kalau sudah menjadi krama istri merasa tidak mampu bekerja secara optimal di sektor formal dan perempuan Hindu biasanya pasrah biarkan begini saja bekerja di sektor industri pariwisata tidak terlalu ketat meminta izinnya, biasanya dia membuka usaha berupa cendramata di pasar tradisional” (Wawancara, 17 juni 2010).

Mencermati ungkapan Agastia, seperti yang dipaparkan di atas bahwa perempuan Hindu waktunya lebih banyak disita oleh urusan domestik, urusan rumah tangga, sosial budaya dan adat. Ungkapan tersebut di atas lebih ditegaskan lagi dengan pendapat Pitana (56 tahun) seorang pemerhati pariwisata, berikut ini.

“Kemajuan dan perkembangan hotel, termasuk Hotel Berbintang Lima tergantung pada “tangan dingin” dari seorang manajer. Jika manajernya lembek, tidak disiplin, kurang kreatif tidak berwawasan luas, maka jangan harap hotel tersebut bisa berkembang dan bersaing di tengah persaingan global. Untuk menduduki posisi itu di antaranya harus, mempunyai waktu penuh, memiliki jiwa patnership, dan mempunyai kemampuan manajerial. Jika melihat hanya ketrampilan saja, perempuan Hindu mampu untuk itu, tetapi terkait dengan persoalan disiplin waktu tidak mampu untuk dipenuhi, oleh karena kesibukan dalam kegiatan terkait dengan persoalan adat dan budaya” (Wawancara, 22 Juni 2010).

Ungkapan-ungkapan dari tokoh pariwisata seperti tersebut di atas, menunjukkan rasa pesimistis perempuan Hindu untuk bisa menempati posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Seperti yang dituturkan oleh Mr. Jakcs (50 tahun), GM Hotel Bali Hyat di Sanur, di bawah ini.

“Melihat modal yang dimiliki oleh perempuan Hindu, seperti ketrampilan, keuletan dan kesabaran, berpeluang untuk menduduki posisi manajer Hotel Berbintang Lima. Lebih-lebih perempuan Hindu paham dengan seni budaya, terpaut dengan konsep pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian perempuan Hindu selaku pelaku dalam budaya memahami secara mendalam tentang hal tersebut. Namun untuk posisi tersebut dibutuhkan disiplin waktu dan mampu bekerja sepenuh waktu, yang sulit dijalankan oleh perempuan Hindu” (Wawancara, 15 Juni 2010).

Ungkapan Mr. Jakcs, Pujiono dan Pitana tersebut di atas menyiratkan ketentuan-ketentuan untuk menjadi manajer di Hotel Berbintang Lima sulit untuk bisa dipenuhi oleh perempuan Hindu, karena perempuan Hindu pada umumnya disibukkan oleh aktivitas adat dan budaya, serta kegiatan sosial.

Dalam konteks permasalahan terkait dengan peluang perempuan Hindu untuk posisi *manajer* Hotel Berbintang Lima seperti yang diungkapkan oleh Wayan Rasminiati (35 tahun), Karyawan Hotel Sanur Beach di bawah ini.

“Menjadi seorang manajer di Hotel Berbintang Lima, menjadi sebuah obsesi, siapa pun tidak mau terus-menerus menjadi karyawan biasa. Untuk menjadi manajer harus bertanggung jawab penuh dan berdisiplin waktu. Perempuan Hindu sulit untuk meraihnya karena terikat oleh adat dengan kerja sosial. Kita perempuan Hindu Bali hanya bisa “*mebalih*’ bengong dengan apa yang didapatkan dinikmati oleh perempuan dari luar yang menduduki posisi enak di Hotel Berbintang Lima. Perempuan luar bisa hidup sejahtera karena mendapatkan kedudukan posisi yang bagus dalam hotel. Kita ini hanya sebagian “*kripisan*” menjadi pegawai bagian bawahan, itupun didapat dengan susah payah (Wawancara, 23 Juli 2010)”.

Ungkapan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perempuan Hindu memiliki kemampuan, tetapi lebih banyak terikat oleh waktu di adat dan sosial serta membenarkan ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa perempuan Hindu sulit menempati posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Perempuan Hindu tidak memiliki disiplin waktu dan terlalu tenggelam dalam urusan adat dan budaya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Nyoman Sumiati (36 tahun), Staf Karyawan Hotel Sanur Beach, yang berpendidikan Diploma (D3), berikut ini.

“Saya bekerja di hotel Sanur Beach, sebagai karyawan biasa bagian office, dengan tuntutan disiplin waktu. Sebelum mulai pekerjaan kita sudah siap lima menit

sebelumnya. Dukanya yang dialami agak sulit untuk mengatur kegiatan bermasyarakat, “*mekrame istri*” dan ikut dalam kegiatan organisasi sosial lainnya. Seperti ada odalan, upacara perkawinan, kita sulit untuk mengatur waktu dan merasa malu meminta izin karena terlalu keseringan. Dengan kesibukan seperti tersebut bagaimana perempuan Hindu bisa menang bersaing untuk kedudukan posisi manajer” (Wawancara, 23 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengalaman dan kemampuan akademis saja tidak cukup untuk bisa menduduki *manajer* di Hotel Berbintang Lima. Perempuan Hindu harus mempunyai disiplin waktu, tetapi karena terikat oleh adat sosial kemasyarakatan, sehingga peran perempuan Hindu terhegemoni. Fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Gramsci (dalam Chris Barker, 2008:62). Ungkapan tersebut juga menggambarkan fenomena keluh-kesah perempuan Hindu, yaitu kepasrahan dalam menerima kealahannya dengan perempuan urban dari luar dalam merebut kedudukan *manajemen* hotel. Hal tersebut sebagai gambaran umum perempuan Hindu yang mengais rezeki untuk kesejahteraan hidup dalam industri pariwisata di kawasan Sanur.

Seperti yang dijelaskan di atas fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja. Disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1). Selanjutnya dalam Pasal 2, disebutkan bahwa dalam menjalankan Undang-Undang ini tidak boleh ada diskriminasi. Walaupun demikian, pada kenyataannya masih ada perbedaan atau diskriminasi dalam pekerjaan antara kaum perempuan dengan laki-laki.

Gambaran undang-undang tenaga kerja memberikan peluang yang sama tidak ada diskriminatif, baik perempuan Hindu maupun non-Hindu. Perkembangan industri pariwisata di Bali, di manajemen Hotel Berbintang Lima memberikan peluang kepada perempuan, yang memiliki kemampuan standarisasi yang dibutuhkan untuk posisi *manajer*, oleh Spencer dan

Webber (2007: 83). dikatakan sebagai dikotomi, dalam peranan perempuan Hindu dalam posisi tradisional dan modern. Namun, kesempatan atau peluang tersebut jarang bisa dimanfaatkan oleh perempuan Hindu.

Secara empiris posisi dan kedudukan di industri pariwisata, khususnya pada posisi *manajer* di Hotel Berbintang Lima, sulit untuk bisa ditempati oleh perempuan Hindu. Perempuan Hindu di Bali, sebagian besar waktunya dibutuhkan oleh keluarga yaitu urusan adat, aktivitas budaya, seperti pekerjaan tersebut sebagai kodrat yang harus diembannya. Di bawah ini dipetik pendapat Wiana (2001:14) tentang keterpinggiran perempuan Hindu.

“Suatu aktivitas, kegiatan kelompok, yang tidak mendapatkan posisi yang penting (sentral) bahkan ada kecenderungan terabaikan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan peran dalam bidang organisasi atau dalam bidang pekerjaan, di hotel dalam posisi manajer boleh dikatakan perempuan Hindu sebagai ketermarginalan” (Wawancara, 19 Agustus 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan keberadaan peran atau posisi pekerjaan perempuan Hindu cenderung diposisikan tidak begitu penting. Dalam konteks ini berdasarkan ungkapan *manajer* Bali Hyatt John Hanlan (37 tahun), tentang keterpinggiran perempuan dikatakan sebagai berikut.

“Pada hari tertentu ada pelatihan (*workshop*) diberikan kesempatan perempuan Hindu untuk workshop di luar negeri selama tiga bulan, ada saja alasan yang diungkapkan seperti “lain kali saja berikan kepada yang lebih muda atau junior, karena pada bulan ke dua terdapat upacara yang tidak bisa ditinggalkan” (Wawancara, 12 juni 2010).

Ungkapan tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Manajer Hotel Sanur Beach I Gede Pariana M,Par (40 tahun) berikut ini.

“Perempuan Hindu banyak berpendidikan sarjana tetapi untuk ketrampilan yang khusus untuk menjadi manajer tidak sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan, walaupun sudah diberikan *workshop* yang jangka waktunya tiga sampai enam bulan apalagi *workshop* yang ke luar negeri, akan ditolak dengan halus” (Wawancara, 12 Juni 2010).

Penuturan kedua manajer tersebut menggambarkan bahwa walaupun perempuan Hindu berpendidikan sarjana tetapi tidak sesuai dengan pekerjaan sebagai manajer di hotel. Hal itu karena ketentuan menjadi manajer, pendidikan yang khusus pariwisata dan kriteria tersebut sesuai dengan aturan-aturan Hotel Berbintang Lima. Fenomena tersebut “Keterpinggiran”, seolah-olah ada ungkapan yang tersembunyi, terutama yang terkait dengan perempuan Hindu. (Touraine dan Melucci dalam Chris Barker, 2008: 132).

Dalam konteks industri pariwisata di Bali, di posisi manajer “ia” atau “mereka” yang terpinggirkan adalah orang yang dianggap kalah dalam merebut posisi *manajer*. Berkompetisi bukan semata-mata disebabkan oleh kemampuan yang kurang dimiliki, tetapi oleh sebuah kondisi atau situasi harus sebagai sebuah kepasrahan (Triguna, 2002: 32).

Seperti dijelaskan di atas perempuan Hindu Bali terikat oleh kegiatan sosial dan adat, keterikatan itu dapat dilihat sebagai berikut. Secara umum karakteristik kehidupan masyarakat di Bali terpolarisasi dari tata cara kehidupan desa pakraman, yang mengatur urusan keluarga, bermasyarakat mulai dari persoalan adat, “*pesuka-dukaan*” dan kegiatan lainnya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil (*nuclear family*) yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anaknya. ² Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan adopsi. Hubungan antara anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Sebagai bagian dari masyarakat, pada dasarnya keluarga memiliki fungsi utama, yaitu keluarga merupakan institusi yang menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi merupakan fungsi biologis/reproduksi, (Bagus, 1981:291).

Kesatuan keluarga yang berdasarkan kesatuan tempat pemujaan nenek moyang disebut kelompok masyarakat *tunggal kawitan*, *tunggal pemrajan*, *tunggal dadia* (Bagus, 1981: 289). Dalam aktivitas individu dan kelompok di dalam keluarga, di masyarakat ada kesepakatan dalam bentuk peraturan atau rambu-rambu agar bisa terjamin kenyamanan dan keamanan. Bentuk peraturan-peraturan yang mengatur hidup dan kehidupan individu, kelompok dalam komunitas masyarakat desa sebagai patron dan dipakai acuan atau landasan dalam berinteraksi sosial. Patron atau peraturan yang dibuat melalui proses musyawarah dan mufakat dihormati, dituruti yang dijiwai oleh nilai ajaran agama Hindu sangat dihormati oleh masyarakat pendukungnya. Patron atau pandangan (*sesuluh*) hidup dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat yang dimaksudkan juga secara langsung pengkonkretan dari nilai-nilai Ajaran Agama Hindu. Oleh masyarakat Hindu di Bali, peraturan-peraturan dimaksudkan tersebut disebut "*awig-awig*" (Surpha, 1998:29).

Bila dalam penjabaran dan penerapan pada "*awig-awig*" ada yang belum lengkap atau ada kekurangan, maka dalam musyawarah dan mufakat ditambahkan dan dilengkapi yang disebutkan sebagai "*perareman*". *Awig-awig* atau *perareman* dalam desa pakraman diaplikasikan untuk mobilisasi segala aktivitas masyarakat, terkait dengan pengaturan dalam kepercayaan agama, kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjaga kelestarian alam lingkungan.

Awig-awig atau *perareman* juga mengatur persoalan sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Inti sari dari isi *awig-awig* adalah pengatur hidup dalam masyarakat sosial yang dijiwai oleh konsep "*Tri Hita Karana*". *Tri Hita Karana* merupakan penjabaran dari nilai-nilai Agama Hindu, yang mempolakan agar tujuan untuk menemukan kehidupan manusia yang "*jaghatdhita*". Dalam implementasi dari ajaran *Tri Hita Karana*, menjadikan kehidupan manusia yang "*jaghatdhita*" menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia, dengan lingkungan.

Fenomena dari keseimbangan dan keharmonisan dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan hidup jasmani dan rohani. Falsafah “*Tri Hita Karana*” yang berintikan nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan yang integral antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungan. “*Tri Hita Karana*” merupakan sumbu dalam mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, berbudaya dan mencintai hidup yang harmonis, merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Agama Hindu (Ardana, dkk,1983:26). Secara aplikatif falsafah tri hita karana menjadi landasan kehidupan bermasyarakat di Bali, seperti “Desa Pakraman” Desa Adat dan “banjar”di kawasan Sanur.

Dalam kehidupan bermasyarakat, posisi perempuan Hindu dalam ritual “*mepeed*” selalu ada dalam genggamannya kekuasaan kaum laki-laki. Bagaimana perempuan melaksanakan ritual “*mepeed*” sebagai perwujudan pelaksanaan awig-awig yang dibuat oleh kaum laki-laki (budaya patriarkhi) , dapat dilihat dalam Gambar 5.3 di bawah ini.



Gambar 5.3

Upacara Ritual “Mepeed” yang Dilaksanakan oleh Perempuan Hindu Desa

Pakraman Sanur

Dokumen: Karmini, 2012

Gambar tersebut di atas menunjukkan aktivitas dan keterlibatan kaum perempuan dalam pelaksanaan “*mepeed*” di Desa Pakraman Sanur. Pelaksanaan pemegang *awig-awig* oleh seorang pemimpin adat, sesuai dengan yang diamanatkan oleh hasil paruman Desa Pakraman. Termasuk mengatur kehidupan perempuan Hindu dalam peranannya mengorganisasikan kaumnya agar segala pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan amanah umat dan bisa berjalan dengan lancar, termasuk di dalamnya pengatur kehidupan perempuan dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan bunyi teks yang tertulis dalam *awig-awig* di bagian *pawongan sargah 6*, berikut ini.

“Untuk kegiatan terkait dengan kegiatan di “pawongan” (manusia) dalam pelaksanaan kegiatan adat, upacara agama dan budaya krame ”istri” (perempuan) ada di posisi terdepan, tidak boleh absen. Konsep dalam pengaturan perempuan yang terjabarkan dalam *awig* atau perareman merupakan buah pemikiran kaum laki-laki melalui keputusan paruman adat. Bagaimana yang kita lihat kaum perempuan memposisikan diri menjadi orang dinomorduakan, misalnya dalam mengambil segala keputusan, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat, ada di tangan laki-laki karena semua telah terpolarisasi dalam *awig* (Dokumen *Awig-Awig Adat Sanur*).

Ungkapan dari teks *awig-awig* tersebut di atas, menunjukkan fenomena ketidakberdayaan perempuan Hindu terhadap aplikasi *awig-awig*. Sejalan dengan yang

dikatakan oleh Hoggat dan Thompson (Chris Barker 2008:16) sebagai kulturalisme. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh perempuan Hindu mereka dikenakan sanksi dalam bentuk uang. Hal tersebut ditegaskan oleh *Bedesas Adat* Sanur, dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Adat diungkapkan oleh I Gusti Kama Jaya (42 tahun) yang dikutip sebagai berikut.

“Memang teks yang tertulis dalam *awig-awig*, khususnya dalam sargah yang terkait dengan masalah pawongan, sepenuhnya dibuat oleh kaum laki-laki, tetapi dalam penjabaran dan pelaksanaannya dikerjakan sepenuhnya oleh kaum perempuan. Contohnya dalam kegiatan *ayah-ayahan* pada saat odalan di pura, kaum perempuan berada paling depan. Jika ada yang tidak hadir dikenakan *dosan* atau sanksi dalam bentuk uang. Namun, selama saya menjabat sebagai Sekretaris *Bendesas Adat* belum pernah krama istri memprotes” (Wawancara, 13 April 2010).

Ungkapan dari Sekretaris *Bendesas Adat* tersebut di atas menunjukkan bahwa ketidakberdayaan perempuan Hindu, yang terhegemoni oleh *awig-awig*, dan dirancang oleh kaum laki-laki melalui penerapan *awig-awig*. (Antonio Gramsci dalam Baker, 1991: 32)

Pengaturan kewenangan kaum perempuan dalam rumah tangga, yakni laki-laki memiliki peran superior. Pola kehidupan rumah tangga masyarakat adat di Bali bukan tidak ada dasarnya. Hal ini mengacu pada sistem yang dianut oleh kekerabatan di Bali, yaitu “*Patriarkhi*”. Artinya, kaum laki-lakilah yang berperan mengambil segala keputusan dalam segala kehidupan. Kelompok kekerabatan adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh paling sedikit enam unsur yaitu (a) sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok; (b) suatu kepribadian kelompok yang didasari semua warganya; (c) ada aktivitas berkumpul dari warga-warga kelompok secara berulang-ulang; (d) ada sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok; (e) ada pimpinan atau pengurus yang mengorganisir segala aktivitas; (f) dalam kekerabatan ada hak dan kewajiban terhadap

sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu (Koentjaraningrat, 1992: 13).

Kelompok kekerabatan tercipta melalui suatu proses perkawinan dengan memasuki kehidupan rumah tangga. Setelah kawin, barulah seseorang memperoleh hak dan kewajiban komunitas *pakraman* dan kekerabatannya (Bagus, 1981: 286). Oleh karena itu dalam sejumlah *awig-awig banjar* adat/peraturan *banjar* yang ada selalu disebutkan bahwa persyaratan seorang laki-laki yang sudah menikah wajib menjadi anggota *banjar*, belum ada kaum perempuan yang diperbolehkan mencatumkan nama dalam “cacakan desa pakraman” (Windia, 2008: 23).

Oleh karena itu seorang perempuan dalam status perwakilan juga menjadi penentu atas status suaminya terkait dengan anggota *Banjar Adat* dan *Desa Adat* dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali, status dan peran kaum perempuan Hindu ditentukan oleh pihak laki-laki. Di samping sebagai istri dalam rumah tangga, perempuan Hindu Bali juga sekaligus sebagai anggota *Banjar/Desa Pakraman*, yaitu perempuan dibutuhkan baik dalam kegiatan adat maupun dalam peranan keanggotaan *Desa Pakraman*. Perempuan Hindu dibutuhkan dalam penyambutan pejabat yang berkunjung ke *Desa Pakraman*, seperti yang terlihat dalam Gambar 5.4 di bawah ini.



Gambar 5.4

Aktivitas Perempuan dalam Penyambutan Pejabat di Desa Sanur

Dokumen: Karmini, Tahun 2012

Gambar tersebut di atas menunjukkan aktivitas kaum perempuan dalam acara penyambutan kunjungan pejabat pemerintah kabupaten ke Desa *Pakraman* Sanur. Fenomena yang tampak, yaitu sistem *banjar pakraman* seperti yang telah diuraikan di atas berperan membentuk dan mewarnai pola dan sikap berpikir kaum perempuan Hindu di perkotaan. Jika dibandingkan pola keterikatan masyarakat Bali di *Banjar* dan Desa *Pakraman* dengan masyarakat di perkotaan, ternyata masyarakat di perkotaan lebih kuat, daripada masyarakat di desa bahkan muncul sifat-sifat primordial, seperti yang tercermin dengan nama-nama klien yang dipakai warga masyarakat di kawasan Sanur. Hal ini dikarenakan adanya sikap seteriotif dengan masyarakat pendatang yang merupakan fenomena dalam peranan dan partisipasi perempuan Hindu yang lebih aktif jika dibandingkan dengan laki-laki dalam aktivitas adat dan budaya tersebut (Bagus, 1979: 42).

Dalam dunia kehidupan masa kini penuh dengan ketidakadilan, yakni terdapat begitu banyak korban dan posisi yang harus diterima oleh kaum perempuan Hindu Bali. Hanya saja

dalam paradigma keilmuan lainnya, keterpinggiran dianggap penyakit atau penyimpangan (*patologi*). Dalam hal ini, keterpinggiran disebut dengan berbagai penamaan dalam kajian budaya. Ia sering disebut *the other (sang liyan)*, mengalami proses marginalisasi. Di samping itu, juga disebut *subordinal* atau *hegemoni*, yaitu konsep yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci dalam Chakrovorty Spivak. (1971)

Dari sudut pandang kajian budaya, keterpinggiran harus dibela, diubah sehingga keterpinggiran menjadi pusat, dan akhirnya terdapat banyak pusat. Oleh karena itu tidak ada perempuan yang mau terpinggirkan, termasuk dalam komunitas perempuan Hindu di kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Dengan demikian posisi dan fungsi kaum perempuan Hindu Bali, khususnya perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur seperti yang telah dijabarkan di atas ada dalam bayang-bayang kekuasaan kaum laki-laki (ideologi patriarki) dan ini sebagai salah satu penyebab keterpinggiran dalam posisi pekerjaan sebagai manajer di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Karakteristik posisi pekerjaan sebagai Manajer Hotel Berbintang Lima tidak mudah digantikan oleh orang lain.

Keterpinggiran perempuan Hindu pekerja di Hotel Berbintang Lima tercermin dengan penerimaan gaji dan insentif yang relatif rendah jika dibandingkan dengan staf yang menduduki posisi *manajer*. Kenyataan itu terjadi akibat kaum perempuan Hindu terlampau disibukkan dengan urusan domestik dan adatnya. Selain itu, mereka juga belum mampu menunjukkan kinerja mereka secara optimal dan mereka kurang disiplin.

BAB V
FAKTOR PENYEBAB¹ KETERPINGGIRAN PEREMPUAN
HINDU PEKERJA HOTEL BERBINTANG LIMA

Sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 4.8 dalam BAB IV di atas bahwa jumlah tenaga kerja di tiga Hotel Berbintang Lima yang ada di kawasan Desa Sanur, sebanyak 1.243 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 1.036 orang atau 83% dan tenaga perempuan sebanyak 207 orang atau sekitar 16,65%. Dari 207 orang tenaga perempuan, yaitu perempuan Hindu sebanyak 169 orang atau sekitar 81,64%, dan non Hindu sebanyak 38 orang atau sekitar 18,36%. Posisi jabatan perempuan Hindu, yaitu 1 orang sebagai manajer departemen kepegawaian dan 184 orang menjadi staf biasa. Adapun perempuan urban atau non-Hindu sejumlah 38 orang dan hanya 6 orang menjadi manajer departemen. Namun dari keseluruhan pekerja perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima tersebut tidak satu orang pun yang menduduki posisi sebagai *general manager* atau-pun operasional manajer. Nihilnya perempuan Hindu yang menduduki jabatan *general manager* ini merupakan fakta bahwa mereka terpinggirkan. Keterpinggiran¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

5.1 Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan keterpinggiran perempuan Hindu meliputi *skill* dan profesionalitas, keterikatan keluarga, dan keterikatan *adat*, sedangkan faktor eksternalnya meliputi keterbatasan relasi, dukungan kebijakan tertulis, dan pembinaan/pelatihan yang minim.

5.1.1 Kurangnya Skill dan Profesionalitas

Menjadi seorang general manager di Hotel Berbintang Lima dibutuhkan skill dan profesionalitas tersendiri. Skill dan profesionalitas ini dapat ditempuh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman. Tingkat pendidikan ¹ perempuan Hindu Bali yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur telah dipaparkan dalam Tabel 4.4 (Bab IV). Dalam Tabel 4.4 tersebut diungkapkan bahwa tingkat pendidikan penduduk desa kawasan Sanur, yaitu tingkat Diploma 1,62% dan Sarjana 3,99% seharusnya ada kaum perempuan yang menempati posisi *manajer*. (Sumber Data Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2009). Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa perempuan yang bekerja di Hotel Berbintang Lima hanya menduduki posisi staf atau karyawan biasa. Tidak ada satu pun yang menempati posisi *manajer* (Sumber Data: Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2009). Fenomena tersebut menunjukkan dalam perebutan posisi manajer di hotel berbintang lima dibutuhkan kemampuan "*skill*" selain pendidikan formal yang cukup.

Upaya peningkatan *skill* dan profesionalitas perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima dapat ditempuh melalui pelatihan. Namun, kegiatan pelatihan untuk meningkatkan "*skill*" tidak bisa diikuti oleh karena kesibukan mereka dalam kegiatan di desa pakraman dalam aktivitas adat. Kehidupan perempuan Hindu di kawasan Desa Sanur memang diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial religius yang secara kelembagaan telah terpolakan melalui aturan adat atau *awig* serta *perareman*. Berkaitan dengan fenomena tersebut, Windia (2008: 60) mengatakan bahwa secara terstruktur karakteristik warga perempuan tertanam dalam jiwa, yaitu suka saling membantu, seperti tampak dalam aktivitas upacara keagamaan yang dilakukan secara gotong-royong, tolong-menolong yang disebut *ngayahang* dan *ngopin*.

Dengan demikian, korelasi antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan di industri pariwisata khususnya di Hotel Berbintang Lima tampaknya tidak menjadi pertimbangan untuk menduduki posisi *manajer*. Jika dilihat dari strata pendidikan kaum perempuan Hindu

ada yang diploma dan sarjana, secara akademisi semestinya perempuan Hindu ada di level atau posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Terkait dengan fenomena tersebut, Ibu Ruscitawati (34 tahun) staf manajer kepegawaian Inna Grand Bali Beach menuturkan sebagai berikut.

“Untuk meniti karir di Hotel Berbintang Lima, pendidikan tinggi bukan menjadikan pertimbangan utama, tetapi yang dibutuhkan adalah skill dan keprofesionalan. Dari pengalaman bekerja di Hotel Berbintang Lima, sepanjang pengamatan saya untuk peningkatan jenjang karir staf atau karyawan yang dinilai dan dipertimbangkan oleh atasan adalah ketrampilan dan komitmen kerja serta keprofesionalan. Karena di hotel yang dibutuhkan adalah orang yang trampil dalam pekerjaan, berbeda dengan di instansi atau di lembaga lain, untuk jabatan biasanya yang menjadikan pertimbangan jika tidak keliru, pertama adalah tingginya pendidikan, sedangkan di hotel keprofesionalan, wawasan dan komitmen kerja” (Wawancara, 15 September 2010).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa untuk jenjang karir seperti untuk menduduki posisi *manajer*, tampaknya pendidikan tidak menjadi pertimbangan utama, tetapi yang dituntut adalah ketrampilan, keprofesionalan dan komitmen. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sugeng Pramono (46 tahun) *General Manajer* di Grand Inna Bali Beach, untuk menempati posisi *manajer*, tidak harus pendidikan tinggi tetapi yang dituntut adalah ketrampilan dan keprofesionalan dalam bidangnya.

Keprofesionalan didapat melalui pendidikan, sejalan dengan konsep Driyakara (1980) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda ke taraf insani di dalam seluruh proses atau upaya pendidikan (2007:13). Senada dengan pendapat Thompson pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan pemikiran dan sikap (2007:14). Hal

tersebut oleh Ann Brooks dikatakan sebagai posfeminisme (2009:69). Oleh karena itu terkait dengan posisi jabatan *manajer* yang dibutuhkan adalah pendidikan untuk mengasah *skill* perempuan seperti *workshop*, pelatihan yang relevan dengan kepariwisataan.

Pekerja di Hotel Berbintang Lima dituntut profesional sesuai dengan pembedangannya. Dalam posisi *manajer* hotel, keprofesionalan mencerminkan karakteristik sebuah hotel dengan predikat bintang lima. Pekerja hotel termasuk manajer dituntut profesional baik dalam kemampuan, *skill* maupun dalam disiplin waktu. Bagi pekerja Hotel Berbintang Lima tidak ada istilah/kata terlambat, karena dalam manajemen hotel dikenal moto “*On Time*” atau tepat waktu. Menyikapi hal tersebut, para pekerja hotel sudah ada di tempat lima belas menit sebelum pekerjaan dimulai. Ibu Ruscitawati (34 tahun) staf *manajer* kepegawaian Inna Grand Bali Beach menuturkan di bawah ini.

“Untuk posisi *manajer* di hotel berbintang lima, tidak cukup memiliki ketrampilan dan pendidikan tinggi yang menjadikan pertimbangan adalah keprofesionalan dalam memanfaatkan waktu. Dalam hal ini terkait dengan waktu, oleh karena tidak ada istilah kata terlambat dalam memberi pelayanan wisatawan. Memang sepanjang pengamatan saya para staf atau karyawan hotel jarang yang terlambat, mereka sangat disiplin dengan waktu. Oleh karena dari awal kerja sudah ada komitmen terkait dengan keprofesionalan” (Wawancara, 17 September 2010)

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan waktu merupakan sikap keprofesionalan pekerja Hotel Berbintang Lima. Kebijakan manajemen Hotel Berbintang Lima tersebut, menjadi kendala bagi perempuan Hindu. Mereka tidak bisa fokus untuk melakukan pekerjaan di hotel karena mereka juga terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan urusan domestik dan adat. Banyak waktu tersita dalam kegiatan adat sehingga perempuan Hindu menjadi kurang profesional. Selanjutnya, faktor kurangnya profesional ini

menjadikan mereka sulit untuk meningkatkan jenjang karir mereka ke posisi *manajer* puncak. Dari pengamatan dan kajian mendalam di lapangan, ternyata bahwa seseorang bisa menduduki posisi *general manager* di Hotel Berbintang Lima, tampaknya bukan hanya pendidikan menjadi pertimbangan utama, tetapi juga faktor ketrampilan, profesionalitas, komitmen, dan disiplin waktu.

Ketekunan, disiplin waktu dalam bekerja termasuk dalam aspek profesionalitas seorang pekerja. Namun, perempuan Hindu akan sulit melaksanakan disiplin waktu tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Nyoman Rasmini (30 tahun) yang bekerja di Hotel Berbintang Lima, Hotel Sanur Beach sebagai berikut.

”Meminta izin untuk menukar atau pergantian shif kerja dengan teman lain, dengan alasan untuk *ngayahang* di adat pada saat pagi hari masih bisa diatur, namun jika malam hari untuk menukar jam kerja, agaknya susah” (Wawancara, 20 Juni 2010).

Ungkapan pekerja Hotel Berbintang Lima tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada keprofesional dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu perempuan Hindu sulit menempati posisi *manajer* sesuai dengan keprofesionalan dalam karakteristik Hotel Berbintang Lima. Bagi Marx masalah tersebut sebagai penguasaan kapitalis yang menginginkan upah semurah-murahnya, dan bertindak menurut cara-cara yang sengaja dirancang untuk menekan biaya tenaga kerja (dalam Dwipayana, 2007:20). Hal yang dilakukan oleh kaum kapitalis tersebut oleh Gramsci dikatakan sebagai hegemoni di atas segala kesepakatan bersama antara pekerja dengan manajemen Hotel Berbintang Lima. Dan dalam pelaksanaannya, pekerja di Hotel Berbintang Lima kehidupan perempuan pada masa kini dengan cara pembagian kelas pekerjaan, sehingga perempuan Hindu pekerja di Hotel Berbintang Lima dituntut agar profesional.

Fenomena yang terjadi dalam keterpinggiran ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima adalah perubahan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam konteks pengambilan keputusan keluarga, perempuan Hindu tidak termasuk dalam pengambilan keputusan secara langsung. Mereka tidak bisa memutuskan sendiri secara

langsung apabila ingin menjadi seorang *general manager*. Mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan suami. Hal ini menjadi kebiasaan perempuan atau keluarga mereka di rumah. Dalam hukum adat Bali, laki-laki dan perempuan tidak terpisahkan dan disebut sebagai keluarga *batih* yang lazim disebut dengan istilah *pekurenan*. Akan tetapi, dalam hal pengambilan keputusan, perempuan tetap tidak termasuk dalam pengambilan keputusan langsung.

Perempuan Hindu dalam mengambil keputusan tidak secara langsung dalam kepemimpinan keluarga. Dalam “*paruman*” tingkat desa pakraman kaum perempuan tidak diikutsertakan rapat. Hanya laki-laki yang hadir dalam rapat-rapat tersebut yang menetapkan keputusan-keputusan. Beberapa keputusan rapat tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kaum perempuan. Sebenarnya secara ideal isi dari keputusan yang diambil dan yang berhak mengambil keputusan terakhir sebaiknya laki-laki dan perempuan. Misalnya menentukan pekerjaan untuk ranah publik seperti yang ditulis oleh Riniti, perempuan Bali dalam berpartisipasi dalam dunia politik sebaiknya diputuskan bersama (Partisipasi Perempuan Bali: 2010).

Adanya pola hubungan antara pola pengambilan keputusan oleh laki-laki dalam keluarga *bhatih*, memperlihatkan adanya struktur kekuasaan dalam keluarga. Hal ini menyatakan bahwa pola pengambilan keputusan dalam suatu keluarga menggambarkan bagaimana struktur/pola kekuasaan suatu keluarga tersebut. Menurut Zoni (1990 :44), istilah ini disebut sebagai material *power* dan *family* yang digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam perkawinan/keluarga.

Menurut Cromwel dan Olson (1994: 5) ada beberapa konsep lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kekuasaan dalam keluarga termasuk juga konsep pengambilan keputusan antara lain: adanya pengaruh, kontrol, wewenang dan dominasi dalam keluarga itu sendiri. Begitu juga konsep pemikiran Cromwel dan Olson,

sosiolog Sfilios-Rotshild, mengatakan bahwa struktur kekuasaan dalam keluarga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan, yaitu siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga, bagaimana frekwensinya dan siapa yang berhak menentukan dalam pembelian barang-barang. Pengambilan keputusan yang terkait dengan urusan dalam komunitas *banjar* dan desa *adat* masih tetap berada di tangan laki-laki (suami). Namun belakangan ini tidak jarang di Desa Sanur, kaum perempuan (istri) diberikan hak untuk mengambil keputusan tetapi masih terbatas pada masalah-masalah tertentu saja. Sikap pasif perempuan Hindu dalam mengambil keputusan ini terbawa ke ranah pekerja di Hotel Berbintang Lima. Sikap perempuan Hindu yang terbiasa dengan budaya *patriarkhi* selalu mempunyai ketergantungan dalam mengambil keputusan.

¹ Perempuan Hindu Bali yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur juga dinilai sebagai pekerja yang kurang profesional karena mereka tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena mereka tidak bisa meninggalkan kegiatan adat dan upacara keagamaan di desanya. Fenomena kehidupan perempuan Hindu di kawasan Desa Sanur tampak menonjol. Di setiap warganya tertanam jiwa suka saling membantu, seperti tampak dalam aktivitas upacara keagamaan yang dilakukan secara gotong-royong, tolong menolong yang disebut *ngayahang* dan *ngopin*, Bagus (1997:2001). *Ngayahang* dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan menyumbangkan tenaga untuk suatu kegiatan upacara yang bersifat suci dan sakral di tingkat komunal desa *adat/banjar adat*. Di tingkat suka duka, individu penyelenggara upacara menyerahkan pekerjaannya atau kegiatannya ke *banjar* dan individu untuk golongan tertentu (*Brahmana dan Ksatria*).

Windia (2008:90), mengatakan bahwa *ngayahang* dalam suatu upacara yang bersifat suci dan sakral di tingkat komunal *desa adat*, tampak dalam upacara ritual *piodalan* di *tri kahyangan*, upacara *tawur kesanga*, dan upacara lainnya. Upacara ritual ini merupakan tugas

dan tanggung jawab anggota desa/*banjar adat*. Para perempuan Hindu yang bekerja jarang terlibat langsung, baik dalam puncak upacara maupun pada waktu *nyurud banten*, karena mereka terikat waktu di tempat kerjanya. Walaupun demikian, mereka akan tetap berusaha untuk dapat *ngayahang* bila memungkinkan mendapat izin dari tempat kerjanya. Keterpinggiran perempuan dikatakan oleh John Hanlan sebagai berikut.

“Manajemen mengadakan pelatihan terkait dengan karir kerja di hotel yang diselenggarakan di luar daerah. Pelatihan tersebut sangat penting bagi karyawan yang mau untuk meningkatkan karirnya. Terkait dengan pelatihan (*workshop*) diberikan kesempatan yang kebetulan beragama Hindu untuk mengikuti selama beberapa hari, tetapi kesempatan yang jarang didapatkan oleh orang lain justru ditolak dengan alasan “lain kali saja, untuk sementara ini diberikan pada yang lebih muda atau senior, oleh karena pada bulan-bulan tersebut ada upacara yang tidak bisa ditinggalkan” (Wawancara, 12 Juni 2010).

Ungkapan manajer hotel tersebut di atas menunjukkan fenomena perempuan Hindu sulit untuk meninggalkan kegiatan upacara yang merupakan salah satu ajaran dalam bentuk *bhakti marga* yang dilaksanakan di desa. Oleh Raymond (Chris Barker, 2008:16) hal tersebut sesuai dengan konsep kulturalisme. Ni Nyoman Sukraningsih (35 tahun) *staf office* Bali Hyatt di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur mengungkapkan seperti berikut.

“Saya selama menjadi staf karyawan hotel berbintang ini pernah ditawarkan oleh manajemen hotel untuk pelatihan tentang perhotelan terkait dengan peningkatan karir diadakan di luar daerah selama seminggu. Kesempatan yang baik untuk meningkatkan karir tidak diambil, oleh karena pada waktu itu ada kegiatan upacara di desa, rasanya jika ditinggal tidak nyaman, maka saya urung berangkat dan digantikan oleh orang lain” (Wawancara, 4 Juli 2010).

Ungkapan staf karyawan hotel tersebut di atas menunjukkan fenomena bahwa perempuan Hindu sulit untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan upacara, walaupun mereka tahu pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan karirnya.

Permasalahan tersebut diungkapkan pula oleh Sri Indah Lestari umur (37 tahun), karyawan Hotel Bali Hyatt sebagai berikut.

”Saya bekerja di Hotel Bali Hyatt, agar bisa *ngayahang* di banjar adat kalau bisa tukar jam kerja dengan teman, tapi kadang-kadang teman juga tidak bisa untuk ditukar jam kerjanya. Otomatis di banjar adat tidak bisa hadir sehingga saya kena denda secara moral yang disebabkan susahnya meminta izin apabila bekerja di Hotel Berbintang Lima” (Wawancara, 20 Juni 2010).

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Nyoman Rasmini (30 tahun) yang bekerja di Hotel Berbintang Lima, Hotel Sanur Beach. Ungkapannya dicantumkan dibawah ini

”Apabila saya meminta izin untuk tidak masuk di bagian *waitress*, kalau seandainya malam bekerja, untuk *ngayahang* pagi masih bisa tetapi apabila *ngayahang* pada waktu malam, agak susah untuk menukar jam kerja, dikarenakan saya bertugas sebagai kasir di bagaian restoran Hotel Sanur Beach. Dan pulangnya kira-kira jam setengah tiga pagi” (Wawancara, 20 Juni 2010).

Ungkapan dan keterangan perempuan-perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima tersebut di atas menggambarkan keluh kesahnya karena ketatnya bekerja di Hotel Berbintang Lima, yang memang tidak bisa minta izin begitu juga jam kerja yang susah untuk mengatur shif kerja atau digantikan oleh orang lain. Hal tersebut, oleh Marx disebut sebagai penguasaan kapitalis dalam kehidupan perempuan pada masa kekinian dengan terjadi pembagian kelas dalam pekerjaan, sehingga perempuan Hindu pekerja di Hotel Berbintang Lima dituntut disiplin, loyalitas, dan profesionalan. (Chris Barker, 2008: 14)

5.1.2 Keterikatan Keluarga

Keterpinggiran perempuan Hindu Bali secara internal juga dipengaruhi oleh faktor keterikatan mereka dengan keluarganya yang didasari oleh budaya *patriarkhi*. *Patriarkhi* merupakan budaya dalam pengelolaan keluarga di Bali yang telah berkembang sejak beratus-ratus tahun silam dan sampai sekarang masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Budaya *patriarkhi* merupakan sistem yang dalam hal ini kekuasaan mengendalikan persoalan keluarga ada di kaum laki-laki, termasuk menentukan masalah pekerjaan dan karir istri, apalagi terkait dengan ranah publik. Warisan nilai-nilai budaya tersebut merupakan sikap keteladanan yang sepatutnya menjadi panutan keluarga kecil di Bali (Parimartha, 2006:6).

Fenomena sistem pengelolaan keluarga seperti tersebut merupakan cerminan kekuasaan, peranan, dan tanggung jawab kaum laki-laki terhadap kelangsungan hidup keluarga. Cerminan dan perilaku yang menunjukkan budaya yang dimaksudkan di atas, diharapkan sekali anak yang pertama lahir adalah laki-laki dan untuk kelahiran anak kedua dan seterusnya laki perempuan sama saja. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa anak laki-laki sebagai "*pancer*" keluarga (*garis puruse*) dan memegang tanggungjawab untuk kelangsungan keturunan keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Pitana (1994: 28) bahwa sikap dan perilaku budaya patriarkhi tidak saja dalam konteks pengelolaan di ranah domestik tetapi juga dalam ruang publik, seperti persoalan karir atau pekerjaan kaum perempuan di lembaga tempat mereka bekerja, seperti yang dituturkan oleh Ni Wayan Ruscitawati (34 tahun) *staf training office* di Inna Grand Bali Beach di bawah ini.

"Untuk mengejar posisi manajer di Hotel Berbintang Lima perempuan Hindu mendapatkan kesempatan sama dengan laki-laki atau pun dengan perempuan lainnya. Begitu juga dilihat dari kemampuan atau skill juga perempuan Hindu tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Jelasnya terkait dengan profesional ketrampilan sebagai manajer perempuan hindu cukup mampu. Namun seperti yang pernah

diungkapkan persoalan waktu dan yang lebih penting kurang mendapatkan dukungan dari keluarga. Bagaimanapun adat di Bali, jika perempuan mau memulai sesuatu atau meningkatkan karir pekerjaan, terlebih dahulu "*metari teken kuranan*" (dibicarakan dengan suami). Jika tidak diizinkan apapun yang dijanjikan di pekerjaan tersebut pasti diurungkan, termasuk untuk menduduki posisi manajer. Jika minta izin pada suami, yang menjadi pertimbangan adalah masalah anak tidak terurus dengan baik, selain pertimbangan adat dan sosial lainnya. Seperti contohnya saya sendiri sebelum menduduki posisi *Training Offecer*, sempat berkarir sebagai karyawan hotel biasa, jika mau ada kesempatan meniti karir di posisi yang lebih tinggi tetapi disarankan oleh suami, lebih baik fokus pada perhatian pada anak dan keluarga" (Wawancara, 2 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk meniti karir di Hotel Berbintang Lima, yang menjadikan pertimbangan pertama adanya masukan atau saran dari keluarga. Jika suami tidak memberikan dukungan dengan pertimbangan yang rasional serta masuk akal, maka mereka akan mengurungkan niatnya. Kaum perempuan Hindu tersebut tidak mau mengejar jabatan tinggi jika keluarga mereka terabaikan. Mereka berpikir bahwa bekerja adalah untuk keluarga, bukan sekedar untuk mengejar karir semata. Seperti yang di alami oleh ibu Ruscitawati tersebut kurang mendapatkan dukungan keluarga dalam meniti karir di jenjang yang lebih tinggi. Hal yang senada juga dituturkan oleh Ni Wayan Rositawati (36 tahun) asisten personalia di Hotel Bali Hyatt yang dikutip sebagai berikut.

"Bekerja di Hotel Berbintang Lima sudah hampir 15 tahun dan tahun terakhir berkarir dengan menempati posisi sebagai asisten manajer kepegawaian. Berbekal penguasaan bahasa inggris, karir saya di hotel ini terus menanjak. Namun untuk meniti kejenjang yang lebih tinggi masih mikir-mikir oleh karena pertimbangan keluarga" (wawancara, 12 Agustus 2010).

Ungkapan kedua perempuan Hindu yang sudah bertahun-tahun bekerja di Hotel Berbintang Lima tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk meniti karir pertimbangan pertama adalah keluarga. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Wiana (67 tahun) seorang tokoh agama dan pendidik spritual, ungapannya sebagai berikut :

“Untuk menjadikan keluarga yang damai, rukun sesuai *dharmaning agama*, perempuan memang seharusnya patuh pada suami dalam keluarga di Bali perempuan yang sudah menjadi *krama istri* harus patuh dengan suami” (Wawancara, 15 Juni 2010).

Pola prilaku dua perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima tersebut di atas merupakan gambaran ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan wisata di Desa Sanur, yang masih menghormati budaya *patriarkhi* dan oleh Edward disebutkan sebagai kultural (Chris Barker, 2008: 16).

Dengan demikian, dalam meniti karir di Hotel Berbintang Lima perempuan Hindu di kawasan wisata Sanur kurang mendapatkan dukungan keluarga, khususnya dari suami. Di samping itu, juga fenomena tersebut di atas terkait dengan keprofesionalan dalam industri pariwisata, seperti menduduki jabatan menjadi manajer kaum perempuan Hindu bisa bersaing dengan perempuan Non-Hindu. Namun, kembali bermuara pada budaya *patriarkhi* yang telah mengikat kehidupan keluarga di Bali, apapun yang menjadikan keputusan suami adalah menjadi pertimbangan utama, termasuk tidak diizinkan untuk meniti karir yang lebih tinggi dengan alasan sudah ada anak dan kegiatan sosial di masyarakat.

5.1.3 Keterikatan Adat

Keterpinggiran kaum perempuan Hindu Bali yang nihil menjadi *general manager* Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur juga dipengaruhi oleh faktor keterikatan adat, termasuk ikatan griya (kasta *brahmana*) dengan *sesya*-nya (masyarakat pengikutnya). Fenomena desa adat yang ada di Bali umumnya di kawasan wisata tidak jauh berbeda satu

sama lainnya, khususnya desa kawasan Sanur. Hal ini karena adanya struktur prosedur tertentu oleh pengurus dan keanggotaan *desa adat* atau *banjar*. Desa adat mempunyai kewenangan dalam mekanisme kontrol sosial untuk menanggulangi segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Jadi, keberadaan *desa adat* sebagai suatu organisasi sosioreligius bersifat otonom, sehingga bebas mengatur diri sendiri dalam rangka mencapai tujuannya, (Windia, 2008:92).

Parimartha (2006:32) mengatakan bahwa kelembagaan *desa adat* mempunyai fungsi dalam bidang spiritual dalam upacara keagamaan di Pura Desa. Desa *Adat* mengkoordinir pekerjaan dalam pengumpulan bahan-bahan upacara baik untuk upacara perkawinan/perceraian, upacara penguburan maupun *pengabenan* yang dilaksanakan oleh warga Desa *Adat*. Fungsi lain Desa *Adat* adalah melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Geertz (1976:51) mengatakan bahwa orang Bali selalu terikat pada kesatuan atau pengelompokan sosial tertentu, di antaranya adalah kesatuan sosial yang didasarkan pada tempat tinggal bersama dan kesatuan sosial atas dasar administratif.

Pengelompokan sosial yang berdasarkan ikatan tempat tinggal bersama melahirkan Desa *Adat*, atau oleh Haar (1958:42) disebut pula masyarakat teritorial. Sebutan untuk anggota Desa *Adat* laki-laki adalah *krama desalbanjar lanang* sedangkan untuk perempuan *krama desalbanjar istri*. Keduanya sama-sama berperan dan saling mengisi dalam menunaikan berbagai kewajiban dan tugas-tugas sosial di masyarakat.

Windia (2008:16) mengatakan bahwa *krama lanang* dan *krama istri* sama-sama berperan untuk menunaikan kewajiban. Nilai kerjasama dengan saling membutuhkan sangat tampak pada saat ada kematian di desanya. Begitu mereka tahu ada kematian dari salah seorang warga desa setempat, maka mereka akan segera melayat (*mejenukan*). Seluruh warga desa ikut membantu menyiapkan upacara penguburannya dengan pembagian, *krama lanang* bertanggung jawab membuat tandu (*tegenan*), memandikan mayat, membuat lubang kuburan

dan menguburkan mayatnya, sedangkan *krama istri* bertanggung jawab terhadap *banten* yang diperlukan untuk ritual kematian tersebut. Kerja sama kaum laki-laki dan perempuan dengan tugasnya masing-masing dapat dilihat dalam berbagai aktivitas lainnya.

Fenomena aktivitas kerja sama yang tampak di Desa Adat Sanur terutama dalam menyiapkan *upakara/banten* antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar. Kerja sama yang saling melengkapi telah mencerminkan adanya interaksi yang menuntut rasa solidaritas setiap warga, yang dapat menjadikan Desa *Adat* di lokasi penelitian sebagai sistem sosial yang berfungsi secara efektif sebagai satu kesatuan.

Selain itu, masyarakat Desa *Adat* di lokasi penelitian menunjukkan bahwa mereka sering mengikuti kegiatan bersama. Koentjaraningrat (1977:154-155) mengatakan bahwa Desa *Adat* mempunyai wilayah, cinta wilayah dan kepribadian kelompok. Desa *Adat* merupakan suatu kelompok yakni manusia dapat menghayati sebagian besar dari bidang-bidang kehidupannya secara bulat karena dalam Desa *Adat* terdapat nilai-nilai yang dianut bersama yang sangat erat hubungannya dengan Agama Hindu (Wiana, 2001:204).

Dengan adanya ciri-ciri dan sifat tersebut, maka warga Desa *Adat* Sanur dengan mudah memunculkan ikatan emosional yang dapat menghasilkan solidaritas untuk mewujudkan integrasi sosial. Integrasi merujuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup akan menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama agar tetap dipertahankan dan dikembangkan. Demikian pula Persons dan Johson (1990:130) berpendapat bahwa *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka* merupakan kesatuan sosial yang lebih kecil sifat dan lingkungannya serta merupakan bagian dari sebuah Desa *Adat*. Fungsi penting *Banjar Adat* lebih dititikberatkan pada tugas-tugas kemasyarakatan antara lain saling membantu dalam penyelenggaraan upacara *panca yadnya*, baik di lingkungan keluarga maupun warga banjar. Dilihat dari keanggotaannya, Desa *Adat* bukan dari individu

melainkan keluarga yaitu suami istri, Parimatha (2006:21). Dengan demikian seseorang mulai menjadi anggota *Krama Banjar* atau *Banjar Adat* setelah menikah.

Lain halnya dengan pendapat Pitana (1994 : 152), di desa kawasan Sanur dikenal adanya perbedaan anggota desa adat yang disebut dengan *krama pengayah (pengarep)*, yaitu anggota desa yang secara penuh bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan berbagai kekayaan Desa Adat. Adapun anggota yang tidak mempunyai kewajiban terhadap berbagai kegiatan di Desa Adat disebut *krama pengele (roban)*.

Menurut Agung (1984:9) dapat dijabarkan warga Desa Adat Sanur secara garis besar. (1) Wajib melaksanakan *ayahan* desa (tugas-tugas *krama desa*) seperti kerja bakti perbaikan pura milik Desa Adat, menyelenggarakan upacara *Bhuta Yadnya (mecaru)* dan *melasti/mekiyis* setiap tahun sekali (*Tilem Kesanga*), membangun untuk kepentingan Desa Adat dan melaksanakan tugas lain-lainnya, (2) Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi Desa Adat baik yang tertulis dalam *awig-awig* maupun yang tidak tertulis yang disebut *pasuara* dan *sima*. Selain itu asas *tatwamasi* yang melekat dalam kehidupan *adat* telah mengajarkan kepada orang Bali (Hindu) untuk dapat memahami sesama manusia, baik pada saat duka maupun suka.

Di dalam kehidupan masyarakat kawasan Sanur sehari-hari sering dijumpai aktivitas *adat nguwopin*. Menurut Bagus (1971:292) *nguwopin* adalah tolong menolong yang meliputi kegiatan kerja sama dalam lapangan pertanian, pekerjaan sekitar rumah tangga dan dalam perayaan-perayaan atau upacara-upacara yang diadakan oleh keluarga. Dewasa ini *ngoupin* masih sering diterapkan dalam kegiatan upacara keagamaan atau dalam peristiwa kematian dan kecelakaan. Selain itu masih ada bentuk kerjasama yang lain yaitu *ngayahang*. Kata *ngayahang* berarti melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan seseorang atau kelompok yang lebih tinggi derajatnya. Jadi, *ngayahang* berarti suatu kegiatan sosial yang bertujuan untuk

menyumbangkan tenaga dalam kegiatan yang bersifat suci atau sakral yang kadang-kadang juga bersifat kemeriahan. Semua aktivitas ini masih berlaku di desa kawasan Sanur.

Aktivitas kegiatan-kegiatan *nguopin* dan *ngayahang*, dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Dalam setiap Desa *Adat* terdapat struktur kepemimpinan yang hampir sama antara desa yang satu dengan yang lainnya, yakni terdiri atas *kelian adat* atau *bendesa*, *penyarikan* atau *juru arah*, yang semuanya adalah kaum laki-laki. Berdasarkan uraian tentang kehidupan dalam keluarga *bhatih* dan kegiatan dalam *adat* seperti yang disebutkan di atas, tampaknya laki-laki memegang kekuasaan dan perempuan menjadi “pelayan” dalam istilah budaya disebut dengan “*patriarkhi*”. Dalam budaya tersebut kekuasaan laki-laki sangat dominan, termasuk penguasaan terhadap kaum perempuan Hindu, dalam industri pariwisata. Dalam hal-hal tertentu yang menyangkut *adat*, seperti harta kekayaan, bangunan *adat*, kedudukan adat, seorang istri tidak boleh melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami atau kerabat.

Keterpinggiran perempuan Hindu, pekerja Hotel Berbintang Lima khususnya untuk posisi manajer di Hotel Berbintang Lima disebabkan oleh masih kuatnya budaya “*patriarkhi*” yang mempolakan sikap perempuan dengan keterikatan Desa *Adat* yang harus menjadi orang nomor dua dari kaum laki-laki. Sikap perempuan yang demikian jelas-jelas sangat merugikan diri perempuan sendiri karena dianggap terus menjadi orang dinomorduakan.

Kaum perempuan Hindu Bali di kawasan Sanur memang tidak terlepas dari kehidupan adatnya. *Adat* merupakan organisasi sosial masyarakat yang di dalamnya terkandung aturan-aturan, norma, nilai religius yang memiliki *awig* serta *perareman* sebagai payung pengaturannya dan dijiwai oleh Agama Hindu. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, dalam adatnya tertata dan bertumpu pada konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu yang menjadi landasan sikap serta pelaksanaan “*dharma*” dalam menjalankan kehidupan menuju dunia

akhirat. Agastia (65 tahun) Tokoh Agama Hindu dan budayawan mengungkapkan sebagai berikut.

“Dalam nilai-nilai ajaran Agama Hindu, seperti hukum *karmaphala*, *punarbawa*, *renkarnasi*, dunia nyata dan dunia akhirat, alam surga, dan alam duniawi merupakan gambaran sebuah bentuk implisit dari sebuah keyakinan yang meyakini manusia hidup dalam “dua dunia” (Wawancara, 28 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas, menyatakan bahwa bahwa untuk memperjuangkan hidup, manusia membutuhkan alat dan peralatan (kebudayaan). Manusia meyakini setelah kematian akan masuk dalam kehidupan dunia yang tidak lagi membutuhkan bekal dalam bentuk kebudayaan. Yang dibutuhkan untuk menuju alam tersebut adalah “*dharma*” yang pernah diperbuat pada saat menjalankan kehidupan di dunia realitas. Joe Holland (David Ray Graffin, 2008:1) menyebutnya sebagai masyarakat spiritualitas. Keyakinan dengan adanya kehidupan di dua dunia seperti yang dimaksudkan tersebut di atas, menjadikan manusia berbuat baik, “*dharma*” seperti yang tertuliskan dalam ajaran Agama Hindu (Ngurah, 1998:29).

Pola yang digariskan manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Agama Hindu, untuk mencapai “*mokshajagadhita*” kedamaian lahir batin, dengan aktivitas kehidupan yang terbingkai dalam *Tri Hita Karana*. Konsep ajaran Agama Hindu tersebut menjadi panutan dan mampu memotivasi umatnya untuk berkreaitivitas yang lebih mengedepankan keharmonisan, yaitu keharmonisan hubungan kehidupan manusia dengan pencipta alam semesta ini, Tuhan Yang Maha Esa (*parahyangan*). Membangun keharmonisan hidup dengan sesama manusia yang dilandasi oleh ajaran “*tat twam asi*” sehingga tercipta kehidupan yang damai (*pawongan*). Membangun kehidupan yang sejahtera,

damai dengan menata alam lingkungan dengan baik dan benar, sehingga terhindar dari bencana dan musibah (*palemahan*).

Perempuan Hindu Bali dalam keharmonisan hidup dengan sesama manusia yang dilandasi oleh ajaran "*tat twam asi*", dapat dilihat dalam uraian berikut. Landasan filosofis *Tri Hita Karana*, yaitu *parhyangan, palemahan dan pawongan*. *Parhyangan* mengacu pada hubungan manusia dengan Tuhan. Artinya, hubungan ini diwujudkan dengan melibatkan para warga masyarakat Desa *Adat* dan pura *kahyangan tiga* yang terdiri atas *pura dalem, pura* , dan *pura Desa/Bale Agung*. *Palemahan* mengacu pada hubungan manusia dengan alam sekitar. Hal ini dapat dilihat dalam keterlibatan warga desa di wilayah Desa *Adat*. *Pawongan* menunjukkan keterlibatan antar warga desa adat, artinya dalam kehidupan antara warga dengan Desa *Adat*. Fenomena landasan inilah yang menyebabkan ajaran-ajaran Agama Hindu melembaga dalam Desa *Adat* yang ada di Bali dan menyebabkan adat-istiadat masyarakat dijiwai serta mendapat kekuatan dari pemahaman ajaran Agama Hindu (Surpha 1991; 7).

Ajaran Agama Hindu yang dimaksudkan tersebut merupakan ajaran yang fleksibel, dan tidak memaksakan kehidupan manusia. Nilai-nilai ajaran Agama Hindu, dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi serta kemampuan manusia. Manusia mampu menjalankan pengetahuan agama dengan baik dijalankan dengan memperdalam ajaran "*tatwa*", mampu berbuat dengan cara pemujaan dengan mantra-matra suci. Manusia mampu melaksanakan memperdalam etika kesusilaan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan menajamkan arti "*tat twam asi*".

Manusia menjalankan hidup dengan *bhakti marga yoga*, menempuh kedamaian hidup dengan cara memperdalam "upacara" *yadnya* (pengorbanan suci). Oleh masyarakat Hindu di Bali, nilai-nilai ajaran tersebut ditulis untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan hidup bermasyarakat yang digariskan secara turun-temurun atau mentradisi.

Acuan pelaksanaan kehidupan dalam bermasyarakat di Bali ini disebut dengan “*awig-awig*”. Pelaksanaan *awig-awig* memunculkan keanekaragaman bentuk kebudayaan, yang mengikat kehidupan termasuk dalam kehidupan sehari-hari kaum perempuan Hindu, seperti tampak dalam gambar di bawah ini.



Gambar 6.1

Kegiatan Kaum Perempuan “ngayah”
dalam Persiapan *yadnya* di Pura
Dokumen : Karmini, Tahun 2012

Gambar 6.1 tersebut di atas menunjukkan aktivitas kegiatan perempuan Hindu yang sedang “ngayah” dalam mempersiapkan upacara *dewa yadnya* pada saat akan “odalan” di salah satu pura. Kegiatan “ngayah” tersebut adalah wujud *bhakti marga* dalam pelaksanaan konkrit nilai-nilai ajaran Agama Hindu, *adat* (agama, *dresta*, tradisi) menjadi ranah kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Oleh Bourdieu (Takwin, 2009: 18) disebut sebagai *habitus* sebagai praktik sosial yang diterima secara turun-menurun. Artinya kehidupan masyarakat sulit dipisahkan yang mana ajaran agama, *dresta* (budaya) dan tradisi, semuanya tercampur aduk dalam suatu aktivitas.

Fenomena-fenomena untuk mengatasi semua persoalan dan permasalahan ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima dalam mensiasati masalah adat dan sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam uraian berikut. Kegiatan adat, kehidupan perempuan Hindu berkuat dalam hidup keseharian sehingga menyebabkan mereka terpinggirkan dalam ranah publik, seperti menjadi manajer pada Hotel Berbintang Lima. Fenomena untuk mengatasi semua persoalan dan permasalahan ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di desa kawasan Sanur, muncul budaya “*mapuankid*”. Senada dengan pendapat Windia (2008:21) “*Mapuankid* “ tersebut dapat diberikan jika ada anggota keluarga yang sakit keras, dalam menyelenggarakan suatu upacara agama, sedang bepergian ke luar desa untuk suatu alasan yang sangat mendesak, termasuk jika ada kesibukan dalam pekerjaan di Hotel Berbintang Lima. Jika terlalu sering meminta izin *mapuankid* dapat dipandang tidak baik oleh masyarakat karena akan dianggap *apreori* terhadap kegiatan adat. Mereka ini dianggap hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau berkorban waktu dan tenaga serta materi untuk kepentingan bersama warga masyarakatnya seperti apa yang diungkapkan oleh I Gusti Kamajaya (42tahun) sekretaris bendesa adat Intaran dapat dikutip sebagai berikut.

”Bagi *krama istri* yang sering tidak ngayah atau sama sekali tidak pernah hadir dalam kegiatan *ngayahang* di banjar adat/atau desa adat dikenakan sanksi berupa uang atau disebut *penanjung batu* bagi krama-krama yang jauh bertempat tinggal karena bekerja atau tugas dinas pemerintah/ikut suami dinas” (Wawancara, 28 September 2010).

Ungkapan tersebut di atas menyatakan bahwa perempuan yang bekerja di Hotel Berbintang Lima yang tidak bisa *ngayahang* dikenakan denda berupa uang. Secara moral dia merasa malu. Dengan demikian ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima merasa tidak bisa mengaktualisasikan diri di *adat* hal ini sesuai dengan masyarakat kulturalisme sebagai dekonstruksi dari *awig-awig* atau *perareman dalam* (Baker, 2000:59).

Perempuan Hindu bekerja menggunakan haknya ini karena mereka biasa menyuruh anggota keluarga lainnya untuk mewakili *ngayahang* jika memang tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya. “*Nyusukin*” adalah bentuk toleransi adat yang berarti mewakilkan *ngayahang* kepada orang lain. Secara adat pada hakekatnya setiap anggota *krama* termasuk perempuan yang bekerja dapat mewakilkan tugas dan kewajibannya untuk *ngayahang* kepada orang lain.

Fenomena jenis dan tempat bekerja orang yang mewakilkan *ngayahang* tetap menjadi bahan pertimbangan, karena orang yang ditunjuk mewakilinya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya persyaratan umur. Salah satu keputusan adat (*pararem*) disebutkan bahwa: *sane kedadosing nyumunin ngayahang sane lanang sampun mayusa palekutus tiban, sane istri mayusa limolas tiban* artinya (yang diperbolehkan atau diizinkan untuk mulai *ngayahang* adalah laki-laki yang sudah berumur delapan belas tahun, wanita berumur lima belas tahun). Selain persyaratan usia, ada perkecualian bahwa tidak setiap wanita Hindu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengganti dalam mengemban tugas *ngayahang* tersebut. Perempuan Hindu yang dapat diterima dan dipandang pantas mengemban tugas dan kewajiban *adat* adalah orang yang masih ada hubungan kekerabatan.

“*Meli ayahan*” adalah suatu bentuk yang bisa dikompensasi dengan tugas dan kewajiban *ngayahang* dengan membayar sejumlah uang. Di desa kawasan Sanur pranata ini cukup banyak dimanfaatkan oleh para anggota masyarakat karena alasan tertentu, misalnya karena bekerja dan menetap tinggal di luar desa. *Meli ayahan/majegin* biasanya dihitung tiap enam bulan sekali harus mengkompensasi dengan tugas dan kewajiban ke dalam bentuk uang. Uang ini disebut uang kehormatan yang secara umum jumlahnya disepakati bersama oleh para anggotanya. Hal tersebut di atas oleh Hoovelt (Sajogyo, 1990:60) dikatakan sebagai suatu perubahan baik di tingkat Banjar *Adat*, maupun di tingkat *Banjar Suka Duka*.

Pada umumnya mereka yang *ayahan/majegin* itu adalah perempuan dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban *adat* dalam sistem kekerabatan di *Desa Adat* dan *Banjar Adat*. Walaupun sebenarnya perempuan yang membeli *ayahan* untuk tanggung jawab bebas dari kegiatan *ngayahang*, tetapi dalam kegiatan-kegiatan tertentu, terutama dalam upacara yang bersifat duka (kematian), kehadiran mereka masih tetap diharapkan oleh anggota lainnya. Upacara yang bersifat suka atau duka seringkali berlangsung pada hari kerja, sehingga mereka yang bekerja, baik sebagai pekerja tetap maupun tidak tetap akan berusaha untuk dapat hadir terutama dalam upacara yang bersifat duka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga *pranata* tersebut yang merupakan bentuk toleransi adat terhadap anggotanya lebih banyak dimanfaatkan dan ditujukan kepada mereka yang bekerja di luar rumah, baik di sektor formal maupun di sektor informal. Namun *pranata-pranata* tersebut juga tidak sepenuhnya membuat nyaman perempuan Hindu yang berkerja di Hotel Berbintang Lima termasuk posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Selain ketiga *pranata* di atas di desa penelitian masih ada unsur pranata upacara yang baru berkembang dalam kehidupan masyarakat *modern* sekarang, yaitu membeli *banten*. Membeli *banten* maksudnya membeli sebagian atau seluruhnya *banten* (*banten* dalam bentuk jadi) untuk keperluan suatu upacara keagamaan.

Unsur-unsur pranata upacara yang baru berkembang dalam kehidupan masyarakat modern diadakan dengan membeli banten sebagai cara untuk mengurangi waktu di domestik dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut. Sejak dahulu *banten* merupakan sarana upacara agama dan secara turun temurun dikerjakan sendiri atau dengan gotong-royong oleh para kaum perempuan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat *banten* biasanya disiapkan oleh kaum laki-laki. Pada masa sekarang banyak kaum perempuan Hindu yang membeli *banten* berupa *banten* kecil seperti *canang* dan *segehan* yang banyak dijual di pasar untuk keperluan sehari-hari. Adapun, untuk keperluan upacara besar, seperti upacara perkawinan,

potong gigi, *ngaben*, mereka memilih untuk membeli *banten* seluruhnya berupa banten yang sudah jadi, tetapi jika mereka hanya membeli sebagian saja *banten* jadi, sisanya dikerjakan secara gotong-royong oleh *krama banjar* atau keluarga dekat. Perempuan pekerja membeli *banten* karena beberapa alasan, yaitu (1) untuk mengirit biaya dan waktu, (2) mereka dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk warga lainnya dalam rangka *ngayah/ngopin*, (3) membuat *banten* sendiri dibandingkan dengan membeli *banten* hampir sama biayanya. Demikian rumit dan banyak waktu yang dihabiskan dalam aktivitas adat, seperti yang teruraikan di atas menjadikan perempuan Hindu terpinggirkan dalam merebut posisi manajer di Hotel Berbintang Lima di kawasan wisata Sanur. Bisa dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab keterpinggiran perempuan Hindu dalam memenangkan posisi manajer adalah faktor adat seperti “*ngayah, nguopin, membuat banten*”, dan sejenisnya.

Keterikatan hubungan antara *griya* dan *sesya* juga berpengaruh dalam kondisi ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang di kawasan Sanur. *Griya* (rumah) adalah sebutan rumah yang ditempati oleh seorang pendeta, *sulinggih* atau orang yang telah *medwijati* dan karena kemampuan dalam bidang agama. (Wiana, 2000: 92) atau oleh umat Hindu beliau disebut sebagai “*Brahmana*”. Dan tempat tinggal (rumah) dari *Brahmana* disebut dengan “*Griya*”. Hubungan *griya* dengan masyarakat lingkungan sekitarnya sangat dekat dan ada ikatan terkait dengan kegiatan dan aktivitas yang bersifat religius (keagamaan). Hubungan yang sifatnya sosial simbolis antara “*griya*” dengan lingkungan masyarakat digambarkan sebagai “*Siwa*” dan “*Sisya*”. *Sisya* akan selalu hormat dan tunduk kepada wejangan, perintah dari *siwa*, seperti seorang abdi dengan majikannya. Gambaran sikap antara *siwa* dengan *sisya* mencerminkan budaya kerajaan yang dikenali sebagai sikap feodal. (Parimatha, 2006:24).

Sikap-sikap kepatuhan masyarakat lingkungan terhadap *griya*, masih mewarnai kehidupan mereka di ranah publik, termasuk kaum ⁵ perempuan Hindu pekerja di Hotel

Berbintang Lima. Misalnya dalam kehidupan di Desa **Sanur** tampak adanya ciri yang menonjol, yaitu warganya suka saling membantu dan gotong-royong dalam aktivitas upacara keagamaan. Aktivitas sosial ritual tersebut disebut *ngayahang* atau *nguopin*. *Ngayahang* atau *nguopin* dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan menyumbangkan tenaga untuk suatu kegiatan upacara yang bersifat sosial dan sakral (Surpha,1999:21). Hal ini dilakukan ketika penyelenggaraan upacara *yadnya* dalam pekerjaannya atau kegiatannya diserahkan ke *banjar* dan di tingkat individu untuk golongan tertentu. Hal tersebut oleh Hoggart dan Thompson disebut sebagai bentuk kulturalisme (Chris barker, 2008:16).

Selanjutnya *ngayahang* dalam upacara sakral yang diselenggarakan oleh individu tetapi diserahkan pekerjaannya kepada *Banjar Suka Duka* yang disebut *meserah ka banjar*. Kegiatan ini sering terjadi mengingat jenis upacara cukup banyak sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang mengenal lima jenis upacara *yadnya* yang disebut *panca yadnya* (Ngurah, 1998:147). Jika dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan adat, sosial ritual seperti yang diuraikan di atas, secara struktural nafas feodal masih tampak dengan jelas. I Nyoman Kariawan (48 tahun) Kelian Banjar Adat Pekandelan, menuturkan seperti yang dikutip berikut ini.

“Jika ada kematian wajib melapor atau “*mesadok*” kepada *kelian suka duka* yang melaporkan bahwa ada kematian pihak keluarganya. Melalui pertemuan antara wakil keluarga duka, *kelian suka duka*, *kelian banjar adat*, *bendesa adat* dan keputusan ada di griya (*siwa*) dengan ditentukan waktu kapan akan membunyikan kentongan (*nepak kulkul*), hari baik penguburan atau pembakaran, jenis *banten* dan lain-lainnya. Jika kentongan dibunyikan pertanda ada kematian, secara formal seluruh anggota *banjar suka duka* datang ke rumah duka mengucapkan rasa bela sungkawa sambil membawa beras, kain kafan, gula pasir dupa, buah-buahan dan sebagainya untuk persiapan upacara kematian” (Wawancara, 19 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa tatanan masyarakat *Pakraman* Sanur masih menunjukkan karakteristik feodal, adanya budaya *griya (siwa)* dengan *sisya*. Di dalam masyarakat *Pakraman Sanur* tertanam sikap kolektivitas yang dilandasi dengan fanatisme adat yang dipayungi oleh *awig-awig* yang menandakan sikap primordialisme yang mengarah pada pola masyarakat endosentris (<http://id.wikipedia.org/wiki/Primordialisme>).

Contohnya dalam upacara yang bersifat sakral, seperti upacara potong gigi, perkawinan, dan peresmian tempat suci (*melaspas sanggah*). Sikap feodal dari *sang pemuput (siwa)* sangat tampak dari sikap dan prilaku dalam penyambutan (*sisya*), termasuk kaum perempuan yang lebih banyak berperan. Kaum perempuan dalam kegiatan upacara suka duka tersebut lebih banyak terlibat dalam menyiapkan *banten* upacara dan persiapan konsumsi di dapur. Dikatakan oleh Geertz (1976) bahwa orang Bali selalu terikat pada kesatuan sosial tertentu, yang didasarkan pada tempat tinggal bersama atas dasar administratif.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam struktur masyarakat Desa *Adat*, kedudukan perempuan menjadi sangat berarti karena sebagian besar upacara tersebut memerlukan *banten* atau perlengkapan *yadnya* yang hanya bisa dikerjakan oleh kaum perempuan. (Wiana, 2000:80). Semua kewajiban ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan-aturan yang disebut *awig-awig desa adat*. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ni Nyoman Kasniasih (45 tahun) Staf Operasional Manajer Sanur Beach. Istri *Kelian Adat Banjar* Pekandelan yang dikutip di bawah ini.

“Apa yang dilakukan oleh warga *Pakraman* Sanur selain menunjukkan rasa solidaritas antar warga juga untuk menjaga dan merawat kelestarian desa adat, termasuk keberadaan perempuan merupakan unsur-unsur yang fungsional di dalam sistem sosial Desa *Adat*. Melalui kegiatan *ngayah* dan *nguwopin* dalam setiap upacara

keagamaan tercermin adanya pandangan hidup masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Agama Hindu. Masyarakat menilai kehidupan yang didasari atas kebersamaan dan berbakti terhadap Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya yang tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana* bagi perempuan di Desa Sanur dipandang sebagai suatu kewajiban, karena bekerja untuk menghidupkan dan memenuhi kesejahteraan hidup” (Wawancara, 15 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas merupakan konsep dalam ikatan bermasyarakat dalam ajaran Agama Hindu merupakan *dharma* (Ngurah, 1998:139). Ikatan pekerjaan perempuan yang diungkapkan di atas tersebut di luar domestik, seperti membuat *banten* dan sebagainya secara ideal menjadi tugas dan kewajiban perempuan Hindu dan mengakar pada sikap feodal yang selalu menganggap *griya* (*Siwa*) sentral segala keputusan.

Kesibukan perempuan-perempuan Hindu yang bekerja di industri pariwisata sehingga tidak ada waktu lagi untuk membuat persiapan upacara, oleh karena itu, mereka membeli banten atau peralatan lainnya dan selalu akan ada kaitan dengan *griya* (*siwa*). McNeil (dalam Ann Brooks (2009:41) mengatakan bahwa perempuan yang dianggap melahirkan feminisme dan mereka dipandang mewariskan beberapa asumsi pencerahan.

Perempuan Hindu dalam hal ini seperti berlomba dengan waktu, hari-hari suci dalam lingkungan komunitas keluarga, desa, memperingati dengan cara menghaturkan persembahan atau *yadnya* berupa *sesajen* (*banten*). Persiapan persembahan di lingkungan komunitas Desa/*Banjar Adat* dikerjakan bersama-sama oleh krama banjar perempuan di *bale banjar* atau *bale wantilan*.

Bentuk kegiatan dalam persiapan-persiapan persembahyangan seperti yang diuraikan di atas dilakukan oleh perempuan Hindu. Selain itu mereka harus mengerjakan pekerjaan domestik, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan memelihara babi. Oleh

masyarakat tradisional, mereka dikatakan sebagai perempuan yang ideal. Ni Luh Sukerti (43 tahun) krama istri staf di bagian Kesra Kelurahan Sanur menuturkan sebagai berikut.

“Ada pandangan masyarakat di Bali, yang memotivasi munculnya sikap primordial terhadap perempuan Hindu. Jika seorang perempuan tidak bisa *mejejahitan* atau membuat *banten* maka merasa sangat malu dalam berintraksi di desanya. Apalagi mempunyai sifat malas dalam kegiatan adat atau *ngayahang* maka posisi perempuan di desa adat akan semakin tidak terpuji di mata keluarga dan direndahkan dalam masyarakat. Oleh masyarakat dikatakan “*dadi nak luh sing meguna*” artinya dipandang sebagai perempuan tidak berguna” (Wawancara, 16 Juni 2010).

Kutipan dari penuturan seperti tersebut di atas bermakna kuatnya adanya tali ikatan adat, budaya masyarakat pakraman, yang mendorong munculnya sikap primordial di kalangan perempuan Hindu. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Naroll dan Thomas Sowell (2005: 8) bahwa kelompok orang yang ditentukan oleh ras, adat, nilai, norma, dan ideologi disebut sebagai *etnik*.

Pandangan lain juga mengatakan bahwa dengan bekerja kita dapat mencapai suatu kehormatan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Sikap dan pandangan masyarakat tersebut sangatlah rasional dan wajar, karena perempuan bisa membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, tetapi hal tersebut *kontradiktif* dengan perlakuan adat-istiadat di Desa Kawasan Sanur. Lebih-lebih adanya aktivitas dan kegiatan-kegiatan adat yang disertai dengan sanksi-sanksi, menjadikan perempuan Hindu sangat terikat dan tidak ada waktu yang cukup untuk pekerjaan di sektor publik (Windia, 2008:102).

Perempuan Hindu yang bekerja di sektor publik menuntut waktu penuh dan disiplin, sedangkan di adat juga menuntut kehadiran perempuan dalam persiapan domestik, seperti yang diuraikan di atas. Jika perempuan mampu mengkolaborasikan antara kepentingan publik

dengan domestik sehingga kebutuhan keluarga secara ekonomi bisa terpenuhi, maka perempuan akan dianggap sebagai *luh luwih* (baik dan mulia).

Perempuan Hindu yang bekerja di sektor publik dan kompleksnya peran perempuan Hindu dalam masyarakat menjadikan mereka bersikap fanatik terhadap apa yang telah dikerjakan selama ini. Mereka memandang orang lain yang tidak mengerjakan pekerjaan seperti mereka dianggapnya asing, aneh yang mengarah pada sikap *primordial*. Kaum perempuan Non-Hindu mengatakan bahwa sangat sulit menjadi perempuan Hindu karena banyaknya pekerjaan yang menyangkut *adat* dan upacara keagamaan yang harus mereka laksanakan.

Di sisi yang lain, predikat *luh luwih* untuk perempuan sangat didambakan oleh semua perempuan Hindu, karena prestise keperempuanan mereka akan lebih baik. Kondisi inilah yang menjadi delema bagi seorang perempuan untuk siap-siap memasuki dunia kerja khususnya di sektor pariwisata. Bila dilihat dari faktor ekonomi bahwa dengan bekerja dapat menambah penghasilan atau nafkah keluarga sehingga dari sisi ekonomis taraf hidup keluarga tersebut akan meningkat. Sejalan dengan pendapat An Brook (2006:82) bahwa hal ini akan mempunyai nilai, yaitu adanya penghargaan di mata suami dan keluarga karena dengan bekerja, kaum perempuan mendapatkan upah sehingga bisa mandiri untuk mengambil keputusan dalam penggunaan uang tanpa harus bermusyawarah dengan suami. Dalam tataran urusan dalam rumah tangga sikap kefeodalan masih tampak walaupun itu merupakan keputusan bersama-sama.

Demikian pula Yudha (2001:40) mengatakan perempuan Hindu dalam struktur masyarakat desa mempunyai berbagai identitas sosial, karena di samping sebagai istri, ia juga menjadi *krama istri* (anggota masyarakat perempuan) dalam *banjar/desa pakraman*. Dengan demikian, perempuan Hindu pada saat bersamaan dituntut mampu memerankan tiga peran sekaligus, sesuai dengan identitasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai *krama istri*, dan

sebagai karyawan/pekerja. Dengan demikian di sektor publik, mereka kurang disiplin, sedangkan di *adat* dituntut kehadiran mereka.

Semakin kompleks peran perempuan Hindu maka semakin besar peluang eksisnya untuk menjadi *role strain* dan di sisi lain, dituntut dalam konteks penilaian ideal "*luh luwih*" dan merasa "*jengah*" kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini berarti perempuan dapat secara sempurna melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan peran lain dalam lingkup komunitas, yakni sebagai *krama istri* di desa serta peran sebagai karyawan/pekerja pencari nafkah. Jadi, semua peran tersebut tidak bisa terlepas dari sistem budaya yang berlaku (Bagus, 1997:22).

Mengingat kondisi tersebut di atas, perempuan Hindu dituntut untuk dapat melakukan alternatif pilihan dengan resiko sosial seminimal-minimalnya atau menentukan bentuk-bentuk adaptasi sosiokultural di tingkat keluarga dan masyarakat serta dapat juga memanfaatkan bentuk-bentuk pranata yang telah ada di masyarakat. Masalah perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima merupakan eksis yang berkaitan dengan masyarakat di kawasan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Perempuan Hindu dituntut untuk dapat melakukan alternatif pilihan dengan resiko sosial seminimal-minimalnya.

Perempuan selalu menggunakan kesempatan kerja ⁵ di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur sebagai daerah wisata yang bertaraf internasional. Kegiatan di bidang pariwisata ditemukan setiap hari dan setiap waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau realita budaya bahwa masyarakat Sanur sudah secara turun temurun beraktivitas di bidang pariwisata. Selain itu lahan serta potensi daerah memungkinkan untuk bergerak di bidang pariwisata.

Selanjutnya, dikatakan bahwa kebudayaan sangat menentukan kehidupan kita dan tanpa sadar menerima kebudayaan tersebut. Fenomena ini berarti bahwa pengaruh kebudayaan lain sangat berarti bagi kehidupan, walaupun tidak disadari bahwa kebudayaan

kita sudah terpengaruh. Dengan demikian teori realita budaya ini dikaji dengan maksud agar perempuan Hindu di dalam Hotel Berbintang Lima tetap berperan penting. Perubahan seperti yang dikatakan Hoovit (dalam Sojogyo, 1990:60) kebudayaan yang terjadi di Sanur yakni awalnya masyarakat sebagai nelayan atau petani setelah ada pengaruh luar berubah sebagai masyarakat pekerja hotel dan restoran, termasuk perempuan yang bermukim di Desa Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Realita budaya terlihat di Kawasan Sanur juga tersirat dalam teori realita budaya bahwa kenyataannya masyarakat di Desa Kawasan Sanur sudah membudaya dari dahulu bekerja di industri pariwisata, selain sebagai petani dan nelayan. Dengan demikian, terjadi perubahan kedudukan, yakni perempuan Hindu setara dengan keluarga atau suami setelah bekerja di Hotel Berbintang Lima. Secara ideal masyarakat memandang bahwa perempuan mempunyai tugas atau bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Walaupun sebagai ibu rumah tangga, bukan berarti mereka berhak mengurus rumah tangga saja sehingga akan berakibat terisolasi dan merasa jenuh serta membosankan. Untuk itu mereka merasa perlu bekerja di sektor publik di sektor pariwisata, karena dengan bekerja mereka akan dapat menghilangkan kejenuhan dari rutinitas di rumah tangga.

Dengan adanya keterlibatan perempuan pekerja Hotel Berbintang Lima maka akan dapat terbentuk hubungan sosial yang baru dan semakin luas sehingga kebutuhan-kebutuhan sosial akan semakin terpenuhi. Mereka dapat mengembangkan hubungan sosial dengan pembeli, pemakai jasa atau majikan dan sesama teman kerja tukar jam shif jaga. Hubungan ini memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh imbalan sosial seperti persahabatan. Hal ini tidak kalah penting karena di samping memerlukan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial.

Uraian seperti tersebut di atas, menunjukkan betapa berperannya perempuan dalam adat, agama dan tradisi. Seolah-olah tanpa perempuan kegiatan dan aktivitas tidak akan

berjalan dengan baik. Begitu pentingnya peran perempuan dalam ranah domestik seperti di atas, telah banyak mencekoki atau mempolarisasi sikap dan cara pandang perempuan Hindu terhadap lingkungan di luar komunitasnya. Sikap perempuan tersebut sama dengan yang dituturkan oleh Suardiana (50 Tahun), Asisten Manajer Departemen Personalia Hotel Inna Grand Bali Beach, Kelian *Adat* Banjar Pekandelan, yang dikutip berikut ini.

“Faktor penyebab perempuan Hindu tidak ada menempati posisi strategis dalam manajemen hotel, seperti posisi manajer, di sekitar wilayah Desa Sanur, oleh sikap yang merasa ada di wilayahnya sendiri, merasa ada di lingkungan adatnya sendiri sehingga ambisi untuk memperjuangkan kedudukan tersebut terabaikan. di samping itu pula karena kesibukan dan keterikatan di desa *adat*, cara pandang yang lebih untuk melihat keetnisan, kepanatiran pada adat menjadikan mereka tertinggal” (Wawancara, 9 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan pola dan cara pandang kaum perempuan Hindu terhadap lingkungan di luar kehidupannya menjadikan mereka fanatisme pada etnisitas, kesukuan, dan pada saat yang bersamaan tumbuh dan berkembang pula sikap etnisitas di luar dirinya. Begitu menonjol sikap fanatisme perempuan, baik pada adat maupun etnisitas kelokalan mengarah ke ekosentris bila berhadapan dengan dunia global yang disebut sebagai sikap *primordialisme*.

Primordialisme berasal dari kata bahasa Latin “*primus*” yang artinya “pertama” dan “*ordiri*” yang artinya tenunan atau ikatan dalam sebuah kehidupan. Arti “*primordialisme*” kurang lebih adalah rasa cinta atau bangga terhadap daerah kelahiran atau asal. Secara singkatnya “*primordialisme*” disebut sebagai semangat kedaerahan atau kesukuan. Setiap manusia mungkin tidak akan terlepas dari *primordialisme*. Orang Jawa bangga dengan ke-Jawa-annya, orang Batak bangga dengan ke-Batak-annya, orang Sunda bangga dengan ke-

Sunda-annya, orang Bali bangga dengan ke-Bali-annya, dan orang Desa Sanur bangga dengan ke-Sanur-annya, dst. Memiliki jiwa *primordialisme* merupakan adanya rasa tanggung jawab, bangga, rasa cinta pada etnisitas. Sikap *primordialisme* itu bagus semasih dalam batas yang wajar berguna untuk motivasi semangat dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Ikatan seseorang dengan kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap *primordialisme* memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun di sisi lain, sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap *etnosentrisme*, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain.

Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budaya mereka. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Akan tetapi yang bisa menjadi masalah ketika sikap *primordialisme* fanatik, ada di tengah-tengah ranah global sehingga menjadikan komunitas kelompok yang hanya berpikir di ranah domestik.

Hal itulah yang akan menyebabkan mereka menjadi terpinggirkan. Sebab sikap primordial tumbuh dari sikap feodalisme yang terlalu mengagung-agungkan keberadaan *griya* (*siwa-sisya*) menyuburkan pada sikap kental pada ke-daerahan, kesukuan, etnisitas hingga memandang rendah terhadap keberadaan orang lain, daerah, suku, bangsa, lain dan merasakan apa yang mereka miliki adalah paling baik. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Primordialisme>).

Tingginya aktivitas kegiatan-kegiatan sosial religius yang terkait dengan keterikatan “*griya*” (*siwa-sisya*) dalam ketergantungan untuk persiapan upacara *yadnya* membias pada sikap-sikap perempuan Hindu yang berkarakteristik *feodal* (*siwa-sisya*) termasuk sebagai pekerja di Hotel Berbintang Lima. Boleh dikatakan adanya fenomena dan adanya sikap

feodal (siswa-sisya) yang tumbuh pada individu perempuan Hindu di Desa Sanur tidak terlepas dari kontribusi dari pengaruh “*griya*” (*siwa*). Sikap feodal tumbuh dan berkembang menjadi sikap primordialisme perempuan Hindu yang menjadi salah satu bentuk yang menyebabkan keterpinggiran dalam merebut posisi manajer di Hotel Berbintang Lima.

5.2 Faktor Eksternal

5.2.1 Keterbatasan Relasi

Relasi merupakan bagian terpenting dalam manajemen, maju dan mundurnya Hotel Berbintang Lima, sangatlah tergantung pada bangunan jaringan relasi. Untuk itu relasi menjadi bagian terpenting yang dimiliki oleh seorang manajer Hotel Berbintang Lima. Perempuan Hindu, jaringan relasinya sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh waktunya banyak tersita untuk kepentingan domestik dan kekerabatan. Dalam kenyataan dewasa ini, pola kekerabatan di Desa Kawasan Sanur walaupun sudah banyak beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman, perempuan Hindu masih sangat disibukkan oleh urusan rumah tangga dan adat. Jika ada yang sudah menyikapi dengan bebas itu hanya perkecualian. Seorang istri boleh ke luar rumah mencari pekerjaan yang sifatnya informal, belanja ke pasar, menjaga toko, dan bekerja sebagai karyawan kantor di sektor pariwisata. Dengan demikian, kewajiban istri seperti yang tampak di Desa Kawasan Sanur tersebut dalam rangka mengadakan urusan rumah tangga (domestik) dengan sebaik-baiknya, tidak terlepas kaitannya dengan rumah tangga saudara-saudaranya yang lain. Hal ini tidak mengherankan jika sistem kekerabatan masih kental. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang sakit, maka mereka berbondong-bondong menjenguknya.

Fenomena dalam masyarakat yang menganut Agama Hindu di Bali kekuasaan orang tua dan perwalian dipengaruhi oleh hukum *patrilineal*. Demikian pula Windia (2008:90) mengatakan bahwa yang lebih berperan dalam menjalankan kekuasaan dan perwalian adalah mereka yang memelihara dan mendidik anak dalam kenyataan dan berdasarkan garis laki-laki

(*purusa*). Konsekuensi lain dari perkawinan adalah keluarga inti atau *kuren* yang baru terbentuk, karena perkawinan anak laki-laki mereka tidak selamanya mau membentuk keluarga luas, melainkan cepat atau lambat mereka akan berpisah dengan mendirikan tempat tinggal sendiri.

Sejalan dengan ini, Atmadja (1992) menyatakan bahwa mereka yang membangun rumah baru tidak boleh keluar dari kapling yang dikuasai oleh orang tua atau leluhurnya. Oleh Geertz (1984:261) dikatakan bahwa dari sistem kekerabatan orang Bali yang bersifat patrilineal dan adat menetap mereka sesudah menikah adalah patrilokal, kapling yang dahulunya diperuntukkan bagi satu keluarga *batih*, sebagai mana yang tampak di Desa Sanur, semakin lama ditempati oleh beberapa keluarga *batih*, yang di dalamnya terhadap kaum kerabat menurut angkatan yang berbeda dan mereka tetap terikat menjadi satu kesatuan berdasarkan satu *merajan*.

Artadi (1987:16) mengatakan bahwa *merajan* termasuk harta warisan yang bernilai magis religius, sehingga menurut ketentuan hukum adat di Bali bahwa *merajan* harus diwariskan secara utuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Geertz (1984:262) mengatakan bahwa *merajan* sebagai tali pengikat kesatuan mereka membentuk pura keluarga yang disebut *Sanggha Gede*, *Pura Dadia*, *Panti* atau *Paibon*. Oleh karena itu dari Desa Sanur ada beberapa unit sosial atau kesatuan keluarga yang bersifat tunggal *dadia* atau *tunggal Panti* yang berdasarkan satu golongan *kepurusa*. Mereka bisa pula disebut kelompok kekerabatan besar yang bersifat *patrilineal*. Menurut Bagus (1983:84) mereka yang tunggal *dadia* satu sama lainnya mereka acap kali bekerja sama misalnya dalam menangani kegiatan upacara keagamaan di *Pura Panti*. Kerjasama tersebut tidak saja berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, agama bahkan bisa pula bersifat politik. Fenomena tersebut di atas senada dengan pendapat Surpha (2009:30) bahwa dalam kehidupan masyarakat Bali, yang diungkapkan oleh Agastia (56 tahun) sebagai berikut.

“Kebudayaan Bali dijiwai oleh Agama Hindu secara substansi pada tatanan nilai, kelembagaan, fisik dan simbol. Begitu pula kebudayaan menunjuk kepada sederetan sistem pengetahuan yang dimiliki bersama, perangai-perangai, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, peraturan-peraturan, simbol-simbol yang berkaitan dengan tujuan seluruh anggota masyarakat yang berorientasi dengan lingkungan sosial dan fisik” (Wawancara, 15 Juni 2010).

Mencermati ungkapan tersebut di atas bahwa ada dua sloka lain yang mengatakan swadarma seorang ibu dalam keluarga seperti yang terdapat dalam pustaka suci

Bhagawadgita III tentang *Karmayoga* yang artinya sebagai berikut:

“Bukan dengan jalan tidak bekerja orang mencapai kebebasan dari perbuatan. Walaupun hanya melepaskan diri dari pekerjaan, orang akan mencapai kesempurnaan. Artinya; lakukanlah pekerjaan yang diberikan padamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa, sehingga juga untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Inti dari kedua arti isi *Bhagawadgita* III tentang *Karmayoga* tersebut mengihilhami, relasi atau hubungan dengan pihak-pihak yang lain itu perlu dan dijalankan dengan kondisi apa adanya. Sedangkan untuk mendapatkan suatu posisi yang bagus dan baik perlu strategi pendekatan pada kekuasaan”.

Kehidupan perempuan Hindu dalam masyarakat di Kawasan Sanur, terkungkung oleh persoalan aktivitas adat dan rumah tangga, relasi yang bisa dibangun dalam interaksi tersebut hanya sebatas lokal. Hal tersebut sudah terpolarisasi dalam penjabaran dan implementasi dari “awig-awig”. Relasi perempuan Hindu yang dibangun hanya pada putaran bagaikan siklus dalam ranah adat. Untuk memenangkan sebuah jabatan terhormat, seperti menjadi seorang manajer dibutuhkan relasi yang lebih luas yang relevan dengan dunia industri pariwisata. Konsep membangun jalinan dengan para *owner* Hotel Berbintang Lima, apa lagi perempuan Hindu dijejali oleh kultur malu dan diam, jika diberikan diterima, tidak diberi tidak akan dikejar (Wiana, 2000:90).

Sikap perempuan yang tertutup dan pasrah sulit untuk membangun relasi dengan para penguasa (*owner*) Hotel Berbintang Lima. Sikap tersebut merupakan faktor yang menyebabkan keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima, khususnya dalam posisi jabatan manajer di Hotel Berbintang Lima.

Hasil penelitian Karmini (2006) menyebutkan di desa Sanur ada langkah-langkah yang diambil oleh wanita yang bekerja di luar rumah untuk mengantisipasi, untuk memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif, untuk menambahkan penghasilan keluarga, dengan memakai jasa pembantu atau anggota keluarga luas (kakek, nenek, paman, kemenakan, bibi). Penggunaan jasa tersebut dibantu dengan memakai *pranata modern* untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam keluarga seperti pemakaian mesin cuci dan alat-alat dapur yang memakai listrik dengan teknologi *modern* sehingga dapat menghemat waktu. Anggota keluarga yang masih kecil, misalnya anak atau bayi ditiptikan di tempat penitipan anak, bahkan menyekolahkan anaknya di kelompok bermain (*Play Group*).

Sikap perempuan seperti tersebut di atas menunjukkan adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam keluarga sebagai pekerja Hotel Berbintang Lima. Secara substansial perubahan sikap bisa dilihat, seperti (1) perubahan pola kerja dalam keluarga, menggunakan jasa pembantu serta memanfaatkan alat-alat modern sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien; (2) perubahan pola pengambilan keputusan dalam keluarga, dalam menentukan perangkat kebutuhan dalam rumah tangga; dan (3) perubahan pola pengelolaan keuangan atau penghasilan keluarga, dalam pengadaan perangkat rumah tangga, dan benda-benda ekonomis lainnya. Di sisi yang lain tampaknya keluarga *batih* (laki) sudah mulai ikut mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

Dalam hasil penelitian Karmini (2006) ditemukan perempuan (istri) yang bekerja di industri pariwisata pulang jam 17.00 Wita masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya (13,33%). Hal ini mendorong toleransi suami untuk mengambil pekerjaan rumah

tangganya. Ada persoalan terkait dengan sikap perempuan dalam peran dalam keluarga, pengambilan keputusan dalam hal pengolahan keuangan keluarga. Siapa yang menjadi pengelola keuangan dalam rumah tangga, maka dialah yang mempunyai wewenang untuk menentukan penggunaan penghasilan keluarga tersebut. Contohnya menentukan barang-barang koleksi seperti mebel air dan barang elektronik apa saja yang dibutuhkan. Bisa saja dikatakan peran perempuan berposisi sebagai bendahara maka dengan peran tersebut, model pengelola keuangan keluarga ini dianggap penting. Oleh karena dianggap lebih teliti dan selektif dalam mengambil keputusan sejalan dengan konsep Hoovelt (dalam Sojogyo, 1990:60).

Penuturan Ni Wayan Suarni (35 Tahun) seorang staf karyawan Hotel Sanur Beach di kawasan Desa Sanur, yang dikutip sebagai berikut.

“Dengan kesibukan suaminya bekerja di Hotel Berbintang Lima, untuk mengurus keperluan rumah tangga termasuk kebutuhan-kebutuhan sekunder ditentukan sendiri, walaupun masih “*metari*” (dibicarakan) untuk menjaga supaya tidak dibilang “*nggangguang kite*” (berbuat seenaknya), hal itu dilakukan karena menunggu suami, untuk semua pembelian kebutuhan harus menunggu waktu liburnya di kantor tempat kerjanya” (Wawancara, 2 Juli 2010).

Model pengelolaan dengan memberikan pelimpahan tanggung jawab seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa perempuan, berperan penting dalam menentukan arah hidup rumah tangga. Hal yang demikian merupakan gambaran perempuan Hindu di kawasan Sanur, mendapatkan hak otonomi untuk mengelola keuangan keluarganya, khususnya dalam bidang konsumsi, biaya pendidikan anak-anak, biaya kesehatan, dan lain-lainnya. Hal ini berarti pengambilan keputusan dalam keluarga Hindu (Bali) sebagian besar melibatkan kaum perempuan Hindu.

Begitu juga dalam Hotel Berbintang Lima, tampaknya kaum perempuan tidak terabaikan, mereka mulai ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan walaupun masih terbatas pada hal-hal tertentu saja. Sikap perempuan yang proaktif dalam Hotel Berbintang Lima, menentukan laju perkembangan dan berakses pada semua bagian tanggung jawab terkecuali posisi menjadi manajer. Posisi manajer selain membutuhkan disiplin waktu juga sangat dibutuhkan kehadiran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain.

Perempuan Hindu juga termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tetapi harus berinteraksi dengan yang lainnya, mengadakan hubungan dengan sesamanya. Wadah interaksi sosial perempuan terkait dengan kelompoknya dalam organisasi sosial adat seperti PKK adalah sebagai wujud wadah yang memiliki pola-pola interaksi di antara kaumnya. Dalam kelompok-kelompok sosial seperti PKK tersebut di desa *adat* kawasan Sanur Denpasar, berakses penuh dalam memobilisasi organisasi komunitas, seperti "*banjar*" "*subak*", "*sekehe*," dan lain-lainnya terkait dengan upacara *adat*.

Senada dengan pendapat Edward (Chris Barker, 2008: 16), sebagai kultural dalam Agama Hindu di Bali bahwa sepanjang kaum perempuan yang bekerja tersebut tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara langsung dalam kegiatan di organisasi sosial di *adat*, akan berdampak buruk bagi hubungan komunitas sosial. Dengan demikian langkah yang paling bijaksana adalah perempuan berusaha semaksimal-maksimalnya untuk tetap bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kultural tersebut. Aktivitas adat yang terkait dengan upacara ritual seperti dalam menyiapkan *banten* masih tetap dilakukan secara gotong-royong dan tolong-menolong (*ngayahang* dan *ngopin*).

Bagi perempuan Hindu yang bekerja, maka kegiatan ritual tersebut tentu akan mengalami hambatan, terutama bagi mereka yang bekerja di Hotel Berbintang Lima. Oleh karena itu, toleransi adat menjadi penting untuk dipahami bersama oleh sesama warga *Krama Banjar* dan *Krama Adat*. Kehidupan adat di kawasan Sanur sejak dahulu sudah ada *pranata-*

pranata adat sebagai bentuk toleransi adat pada anggotanya, seperti "*mepuangkid*," adalah minta izin karena tidak bisa hadir dalam suatu kegiatan *ayahan*.

Permohonan izin ini oleh Saussure dan Durkheim (Chris Barker, 2008:17) dikatakan sebagai pola strukturalisme yang disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan kepada *keliannya*. "*Mogpog*" untuk menggantikan *ayahan* dengan sejumlah uang dengan demikian mereka tidak perlu hadir dalam kegiatan sosial ritual. "*Meli banten*" oleh karena kesibukan dalam Hotel Berbintang Lima tidak sempat untuk membuat sarana upacara, maka mereka membeli dari orang lain. Sikap kaum perempuan tersebut telah terobsesi dengan nilai-nilai "kapitalisme". Hal tersebut terjadi oleh karena didorong oleh keterdesakan waktu kaum perempuan Hindu yang ikut terlibat dalam Hotel Berbintang Lima. *Pranata-pranata* dimanfaatkan tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi semakin banyaknya perempuan Hindu yang tidak sempat hadir dalam aktivitas sosial ritual karena kesibukan mereka.

Terkait dengan hal di atas, Surpha (2009:91) mengatakan bahwa adaptasi sosiokultural tersebut sebagai pemecahannya, dengan membayar tenaga orang lain untuk menggantikan kedudukannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Di samping itu, mereka berusaha untuk minta izin dari tempat kerjanya sesuai dengan waktu yang diperlukan. Untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial di warga lainnya, mereka dapat memberikan sumbangan dalam bentuk barang atau uang untuk kebutuhan ritual atau pembangunan fisik. Adaptasi tersebut di atas tentunya merupakan alternatif penyelesaian atau jalan keluar dari masalah waktu yang dihadapi oleh ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima. Adaptasi dan alternatif penyelesaian untuk mencari jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan Hindu yang bekerja di sektor formal dijelaskan oleh Bagus (1997:57) di bawah ini.

Adanya bentuk atau pola-pola kekerabatan seperti adat dan sosial kemasyarakatan membuat kaum perempuan Hindu, secara terus menerus ada dalam cengkraman kesibukan

sosial di adat. Di samping itu mereka juga harus tetap menjalankan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Dengan sikap perempuan Hindu di lingkungan sosial di desa adat kawasan Sanur tersebut, dominan waktunya dihabiskan dalam kegiatan sosial dan tidak ada waktu yang banyak untuk yang lain.

Sikap dan kondisi perempuan Hindu yang demikian tidak memungkinkan mereka dapat bersaing dengan perempuan Non-Hindu dalam menduduki posisi sebagai manajer di Hotel Berbintang Lima. Sejalan dengan pendapat Windia (2000:62), bahwa kuat dan mengakarnya ikatan nilai-nilai etika dalam bermasyarakat dan pergaulan menjadi budaya keseharian seperti "*de ngaden awak bisa, depang anake ngadanin*" menjadikan perempuan Hindu Bali, kurang dalam membangun relasi dalam pergaulan. Lebih-lebih perempuan Hindu di Bali, dalam kehidupan kesehariannya dengan filosofi kehidupan tanaman "padi", seperti yang telah dijelaskan di halaman di atas, menjadikan kehidupan perempuan Hindu, kesulitan dalam membangun relasi global.

Berkaitan dengan konteks di atas, fenomena nilai budaya tersebut membuat keterbatasan perempuan Hindu, dalam membangun relasi global dan menjauhkan mereka dari penguasa kekuasaan pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Sikap perempuan Hindu dalam mengambil peran di organisasi sosial atau dalam sikap dan perilaku perempuan Hindu itu sendiri yang ada di kawasan Sanur menjadikan mereka terpinggirkan dalam menduduki posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Adapun pengaruh positif pariwisata dijelaskan berikut ini. (a) Pariwisata memberikan kesempatan usaha yang semakin luas; lapangan usaha dapat tumbuh guna menyediakan keperluan wisatawan seperti hotel, restoran, biro perjalanan, pramuwisata, tempat rekreasi, tempat penukaran uang, perusahaan angkutan, toko cendramata, pusat pembelanjaan, pembentukan kelompok kesenian, dan sebagainya. (b) Pariwisata menyebabkan semakin luasnya lapangan kerja; untuk menjalankan usaha yang tumbuh diperlukan tenaga kerja, karena makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh

sehingga makin luas pula lapangan kerja yang tercipta. (c) Pariwisata meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah meningkatkan yang berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya, seperti biaya untuk hotel, makan dan minum, cendramata, serta angkutan. (d) Pariwisata mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; tata cara, adat istiadat, kesenian, dan peninggalan sejarah, yang menjadi daya tarik pariwisata yang merupakan modal utama yang harus dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan. (e) Pariwisata mendorong terpeliharanya lingkungan hidup; kebersihan dan kesejukan serta keindahan lingkungan menjadi syarat bagi pengembangan pariwisata melalui pengembangan pariwisata, keindahan, kekayaan alam dan kebersihan lingkungan didorong untuk dipelihara dan dilestarikan. (f) Pariwisata mengusahakan peningkatan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban. (g) Pariwisata mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lainnya, pariwisata berkembang dengan baik sehingga pariwisata akan mendorong pertumbuhan bidang lainnya. (h) Pariwisata memperluas wawasan nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air (Karyono, 1997: 95). Lihat Gambar 6.2 di bawah ini.



Gambar 6.2
Gambar Aktivitas Kaum Perempuan Hindu di Desa Sanur
Dokumen : Karmini, Tahun 2012

Gambar tersebut di atas menunjukkan kaum perempuan Hindu dalam kegiatan persiapan upacara ritual. Pengaruh positif perkembangan pariwisata budaya Bali, tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perempuan Hindu di Bali. Hal ini terbukti karena posisi manajer di Hotel Berbintang Lima kebanyakan diisi oleh perempuan Non-Hindu dari luar Bali. Perkembangan pariwisata budaya di Bali, seperti yang diuraikan di atas memberikan peluang sama pada semua posisi manajemen Hotel Berbintang Lima. Semua dijalankan secara proporsional dan profesional dan tidak ada perlakuan diskriminatif. Tampaknya fenomena peluang yang terbuka untuk kedudukan posisi manajer, tidak terlepas juga adanya keterbukaan dan relasi yang memudahkan orang untuk mengakses atau mengetahui kemampuan tiap-tiap individu.

Di samping fenomena tersebut ikatan nilai-nilai etika dalam bermasyarakat dan pergaulan menjadi budaya keseharian. Keterbatasan relasi disebabkan oleh filosofi yang

menjadi pegangan hidup masyarakat Bali, seperti yang diungkapkan oleh Rukmiati (36 tahun), staf karyawan Hotel Sanur Beach di kawasan Sanur sebagai berikut.

“De ngaden awak bisa, depang anake ngadanin” arti pemaknaanya “jangan mengaku pintar biarkan orang lainnya yang menilai, hal ini yang menyebabkan orang tidak akan bisa mengetahui kemampuan yang mereka dimiliki. Di samping itu pula perempuan Hindu di Bali dijiwai dan menjadi roh dalam pergaulan oleh filosofi tanaman “padi”, jika padi telah berisi dan matang, tanaman padi tersebut akan merunduk, bila gagal atau “puyung” tanaman padi akan posisinya tegak. Hal ini menyebabkan orang tidak akan bisa mengetahui kemampuan yang mereka miliki dan membatasi jaringan relasi” (Wawancara, 15 Juni 2010).

Ungkapan tersebut di atas dalam artian filosofi padi tersebut diibaratkan dalam kehidupan perempuan Hindu, dalam membangun relasi, baik vertikal maupun horizontal sangat tertutup atau pemalu untuk menunjukkan eksistensi kemampuannya pada publik sehingga aktualisasi dirinya tidak tampak. Oleh Joe Holland (2008:1) kegiatan dan arti filosofi hidup perempuan Hindu tersebut dikatakan sebagai spiritualitas dalam budaya dan *adat*.

Fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang pintar sedikit bicara dan ada kecenderungan menyembunyikan kemampuannya, sedangkan orang yang tidak mempunyai kemampuan cenderung terbuka dan banyak bicara. Nilai budaya tersebut justru membuat perempuan Hindu menjadi terbatas dalam membangun relasi, baik vertikal maupun horizontal sangat tertutup atau pemalu untuk menunjukkan eksistensi kemampuannya pada publik, sehingga aktualisasi dirinya tidak tampak. Oleh Antonio Gramsci (1891-1932), dikatakan sebagai hegemoni yang disebabkan oleh sebuah arti filosofi teks-teks yang berkembang di masyarakat Bali. Nilai budaya tersebut justru membuat perempuan Hindu

tidak leluasa dan tidak terbuka. Sifat inilah yang mempengaruhi hubungan mereka dengan pihak-pihak luar.

5.2.2 Ketiadaan Dukungan Kebijakan Tertulis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang ketentuan pokok tenaga kerja disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1). Selanjutnya, dalam pasal 2 disebutkan bahwa dalam menjalankan undang-undang ini tidak boleh ada diskriminasi.

Dalam penjelasan peraturan perundangan-undangan ini, kaum perempuan Hindu Bali terutama dalam penyetaraan peran dibenarkan karena tidak menyalahi aturan yang ada. Oleh karena dalam kenyataannya, terutama dalam pembagian hasil pembangunan pariwisata, perempuan masih diberlakukan diskriminatif dalam hal pekerjaan antara kaum perempuan dan laki-laki, terutama dalam posisi sebagai manajer. Belum ada kebijakan tertulis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tersebut yang secara eksplisit mendukung bahwa kaum perempuan Hindu berhak memperoleh jabatan puncak sebagai manajer utama di perusahaan hotelnya tempat mereka bekerja. Mengingat posisi pekerjaan dalam bidang ini dapat menjanjikan peningkatan status sosial, politik, dan ekonomi (Triguna, 2000:23).

Dalam Perda No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Bali, dinyatakan bahwa pariwisata yang dikembangkan berorientasi pada nilai-nilai normatif kebudayaan serta sangat menghormati lingkungan alam dan sosial. Dalam upaya mendukung program pariwisata selalu terkait usaha-usaha industri kepariwisataan, seperti kerajinan, cenderamata, jasa boga, jasa perjalanan wisata, jasa perhotelan, dan jasa restoran. Fenomena tersebut akan membawa

konsekuensi terbukanya peluang kerja bagi perempuan Hindu, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum.

Pekerjaan bidang industri pariwisata sangat diminati oleh perempuan Hindu karena bidang tersebut menjanjikan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Walaupun perempuan mendapat keuntungan ekonomi dalam industri pariwisata, keuntungan itu sering lebih kecil apabila dibandingkan dengan laki-laki. Di samping itu, sebagian besar partisipasi perempuan dalam bidang ini adalah di sektor informal (March & Taque, 1986:18).

Tjok Istri Pemayun (45 Tahun) Kepala Bagian SDM Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali mengatakan sebagai berikut.

“Dari lembaga perempuan Provinsi Bali, terkait dengan pemberdayaan kaum perempuan yang ada di wilayah industri pariwisata, dengan cara memberikan pemahaman bagaimana sikap dan perilaku agar industri pariwisata bisa dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Terkait dengan hal ini khususnya untuk kaum perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, hanya beberapa kali diberikan pelatihan dalam bentuk loka karya melalui kerja sama dengan LKMD Desa di kawasan Sanur”(Wawancara, 22 Juni 2010).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih kurang volume pelatihan bagi kaum perempuan Hindu. Dalam artian perlakuan pihak hotel tidak merasa jera memberikan pelatihan, karena pihak perempuan Hindu itu sendiri sering menolak kalau diberdayakan seperti tersebut di atas dalam hal ini bertentangan dengan teori Ann Brooks (2009: XVI). Peran kaum perempuan Hindu dalam industri pariwisata dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal (Nurhayati, 1992:32). Faktor tersebut merupakan karakteristik usaha dan jasa pariwisata, seperti mengutamakan cipta, rasa, dan karsa sehingga dapat menghasilkan produk pariwisata yang berkualitas. Ketiga sifat tersebut merupakan potensi dasar yang ditawarkan

oleh industri pariwisata dalam membantu menciptakan peluang kerja bagi kaum perempuan Hindu. Sifat-sifat ini sangat sesuai dengan naluri perempuan yang secara umum memiliki ketelitian dan ketelatenan. Lihat Gambar 6.3 di bawah ini.



Gambar 6.3

Wawancara dengan salah satu bagian SDM

Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali

Dokumen : Karmini, Tahun 2012

Gambar 6.3 di atas memperlihatkan dialog dengan seorang pejabat di pemberdayaan perempuan provinsi Bali, terkait dengan pembinaan terhadap kaum perempuan di kawasan Sanur. Fenomena dengan modal ketelatenan, keuletan, pekerja keras, dibutuhkan kecerdasan, dan pengetahuan diperlukan dalam bidang pariwisata. Tidak sedikit kaum perempuan Hindu memiliki pendidikan menengah dan tinggi, tetapi ini tidak cukup tanpa memiliki skill atau kemampuan dalam bidang pariwisata. Jika dari lembaga terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan jeli melihat modal dasar yang dimiliki oleh kaum perempuan Hindu, dan potensi

lingkungan industri pariwisata di kawasan Sanur, mereka harus melakukan pembinaan atau pelatihan. Dengan demikian, apabila fenomena tersebut dilakukan, maka pembinaan bisa mengubah paradigma kaum perempuan Hindu terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Selama ini, paradigma kaum perempuan Hindu, seperti "*kesepekang*" di lingkungan sosial masyarakat atau sejenisnya adalah bentuk hukuman yang sangat merugikan.

Di bawah ini, dikutip ungkapan Ida Ayu Rupini (40 Tahun), mantan Manajer Operasional Hotel Sanur Beach, sekarang Pengusaha di Sektor Industri Pariwisata.

"Semestinya lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali, bisa menangkap sinyal yang terjadi di masyarakat bawah, terkait dengan peluang kaum perempuan Hindu untuk menempati posisi strategis di Hotel Berbintang Lima. Hal ini mengacu pada modal dasar yang sudah melekat dibawa oleh perempuan Hindu, seperti pekerja keras, ulet, rajin, telaten tetapi terbentur pada persoalan disiplin terhadap waktu. Karena perempuan Bali hampir 75%, waktunya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan sosial bermasyarakat. Contohnya Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali, melakukan pembinaan, pelatihan dengan menggandeng Desa Adat Pakraman di desa kawasan Sanur. Dengan program pembinaan secara kontinyu, secara pelan akan terjadi perubahan paradigma" (Wawancara, 7 Juli 2010).

Tuturan yang dikutip melalui keterangan tersebut di atas dikonfrontir dengan kepala Bidang SDM Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali, Tjokorde Raka Suweni (44 Tahun) berikut ini.

"Sangat positif ide pembinaan lewat lintas sektorat, karena kunci persoalan adalah pada budaya masyarakat. Program pembinaan yang dilakukan dengan lembaga terkait masih sebatas pada sebab akibat yang dimunculkan dari perkembangan industri pariwisata. Namun untuk pelatihan dan pembinaan secara khusus bagi kaum perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima untuk posisi jabatan manajer, belum pernah dilakukan" (Wawancara, 12 Mei 2010).

Fenomena dari kedua ungkapan yang diterangkan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya latihan dan pembinaan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dari kota dan provinsi sehingga ¹ keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima dalam posisi jabatan manajer di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, tidak terlepas dari kurangnya pembinaan dari Badan Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, faktor mendasar lainnya, yaitu belum adanya kebijakan tertulis yang jelas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang ketentuan pokok tenaga kerja yang menegaskan bahwa perempuan berhak memperoleh posisi jabatan sebagai *Top Manager* di Hotel Berbintang Lima. Walaupun sudah ada upaya pembinaan melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan *skill*, hak kaum perempuan Hindu Bali untuk menduduki *Top Manager* menjadi sulit terlaksana karena tidak didukung oleh kebijakan tertulis dari dinas berwenang.

Keterpinggiran perempuan Hindu yang nihil menduduki posisi *general manager* karena belum adanya kebijakan tertulis Dinas Pariwisata Kota dan Provinsi sebagai bagian dari tuntutan perkembangan profesionalitas di sektor jasa pariwisata. Berkembangnya pariwisata di Pulau Bali seperti sekarang ini tidak terlepas dari lima pilar pembangunan pariwisata yang terdiri atas masyarakat, industri, pemerintah akademisi, dan pers (Naria, 2010:48). Kelima pilar yang dimaksudkan di atas saling terkait dan secara simultan menjadi lokomotif percepatan perkembangan pariwisata. Pilar masyarakat Bali yang beragama Hindu memegang peranan sangat penting dalam membangun pariwisata budaya yang berkelanjutan. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Bali, sebagai tindakan yang didasarkan pada nilai ajaran-ajaran Agama Hindu, menjadikan sebuah ikatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sikap dan tindakan dilakukan bukan dalam bentuk rekayasa, tetapi berjalan mengalir tenang seperti air, tanpa ada intervensi. Keutuhan budaya tampilan budaya yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Hindu menjadi ketertarikan bagi wisatawan.

Aktivitas masyarakat sebagai salah satu pilar dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Bali ini, tanpa sentuhan pihak lain termasuk pemerintah atau stikholder prosesi tersebut akan tetap berjalan, karena terkait dengan kepentingan masyarakat sendiri. Walaupun fenomena itu pada akhirnya menjadikan objek wisata menarik itu semata-mata karena kegiatan dan aktivitas pelaksanaan ajaran Agama Hindu. Terkait dengan hal tersebut di atas Pitana (1988:51) mengatakan jika mengupas dan melihat sisi yang ada dalam pilar pembangunan pariwisata tersebut, maka pencipta dan pelaku kebanyakan kaum perempuan Hindu. Dengan demikian, terkait dengan keberlangsungan pembangunan pariwisata, kaum perempuan seharusnya menjadikan subjek sekaligus objek.

Desa di kawasan Sanur merupakan wilayah kawasan pariwisata, yang di dalamnya berkiprah kaum perempuan Hindu seperti yang dimaksudkan di atas. Namun peranan perempuan Hindu tidak begitu besar di posisi yang didapatkannya bahkan terpinggirkan. Persoalan menjadi seteriotif yang mengarah pada ketidakadilan, asumsi didasarkan pada faktual perempuan Non-Hindu mendapatkan posisi yang bagus di Hotel Berbintang Lima. Dari beberapa Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, hanya ada beberapa orang perempuan Bali yang menempati posisi di bawah operasional manajer, yaitu posisi *middle manager*, sisanya menjadi staf. Luh Suci (30 Tahun) staf Hotel Inna Grand Bali Beach Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, menuturkan sebagai berikut.

“Untuk menjadi karyawan seperti ini sudah syukur, untuk memegang jabatan lebih tinggi itu merupakan hal yang tidak mungkin, mengingat ketrampilan, waktu, dan kegiatan di adat sangat membelengu. Secara jujur manajemen hotel tidak pernah memberlakukan diskriminatif dalam merekrut karyawan dan untuk jenjang posisi yang lebih tinggi, misalnya menjadi manajer itu sangat tergantung pada individu masing-masing” (Wawancara, 23 Mei 2010).

Lain halnya dengan ungkapan I Wayan Dana (57 Tahun), mantan operasional manajer Hotel Sanur Beach yang sekarang sebagai Kepala Desa Sanur Kauh, yang dikutip di bawah ini.

“Terkait dengan pemberdayaan kaum perempuan Hindu di Sanur dalam konteksualnya dengan perkembangan pembangunan pariwisata, perlu didukung dengan kebijakan tertulis yang jelas. Kebijakan yang bisa dipakai oleh pihak manajemen untuk mengangkat mereka ke posisi manajer puncak di perusahaannya. Selain itu, perlu ditingkatkan volume pembinaan dari Dinas Pariwisata atau lembaga terkait. Pembinaan tidak bisa sifatnya insidental harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menggandeng lembaga adat di sekitarnya. Karena kunci persoalan kenapa kaum perempuan Hindu, sulit mendapatkan posisi menjadi manajer di Hotel Berbintang Lima. Bukannya perlakuan diskriminatif, tetapi kembali pada eksistensi perempuan yang terpendam dalam kehidupan sosial budaya. Jika mau sedikit melonggarkan diri dari ikatan sosial budaya, maka perempuan Hindu di kawasan Sanur tidak kalah berkompetisi dalam merebut posisi manajer, karena modal ketelatenan, keuletan, kejujuran dan bekerja keras sudah dimiliki” (Wawancara, 22 Juni 2010).

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya mengangkat posisi perempuan Hindu Bali ke posisi *Top Manager* perlu ditunjang dengan kebijakan tertulis dari Dinas Pariwisata. Kaum perempuan Hindu di kawasan Sanur aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari industri pariwisata, termasuk bekerja di hotel, wiraswasta, dan sebagai pedagang barang kerajinan di pantai dan di pasar-pasar tradisional Sanur (Monografi, 2009).

Melihat peta sejarah perkembangan pariwisata di Provinsi Bali, desa di kawasan Sanur merupakan bagian dari wilayah Desa *Adat* Intaran, *Adat* Sanur, *Adat* Penyaringan yang sejak dahulu mengembangkan pariwisata. Konsep pengembangan pariwisata yang memberdayakan seluruh potensi yang ada, seperti kesenian dipadukan dengan keindahan alam dan keramahtamahan penduduk.

Berbeda dengan ungkapan Wayan Sarga (54 Tahun) kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, menceritakan perkembangan pariwisata di kawasan Sanur, sebagai berikut.

“Masalah pembinaan terkait dengan peluang untuk posisi manajer di hotel berbintang. Pembinaan dari dinas pariwisata dengan menggandeng lembaga terkait, pernah dilakukan walaupun tidak terlalu sering, namun terkait dengan “*Job*” di posisi manajer tidak cukup dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, karena manajemen hotel berbintang sudah memiliki kriteria untuk menduduki posisi jabatan sebagai

manajer. Jika melihat potensi atau kemampuan perempuan Hindu, untuk menduduki posisi manajer cukup bisa diterima. Namun hal itu lebih banyak terbentur dengan ikatan premodial atau ikatan budaya sosial kehidupan dalam masyarakat. Hal ini sulit bagi perempuan Hindu, jika tidak mau dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena jabatan manajer tidak bisa separuh waktu, dan hal ini akan terlihat dalam aktivitas sosial masyarakat” (Wawancara, 19 Juni 2010).

Ungkapan tersebut menandakan pembinaan dan pelatihan terkait dengan pariwisata untuk perempuan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, bisa meningkatkan pemahaman kaum perempuan tentang pariwisata. Ida Ayu Sri Parwati (45 tahun), staf SDM Hotel Inna Bali Grand Beach mengatakan pembinaan pada perempuan Hindu terkait dengan pembangunan pariwisata di kawasan Sanur sebagai berikut.

“Saya menilai lebih jauh untuk perempuan Hindu yang masih produktif (masih muda) dan potensi perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan formal dengan demikian mereka ada bekal untuk bisa bersaing meraih posisi manajer. Namun, saya juga memahami tidak cukup dengan ketrampilan saja tetapi dibutuhkan disiplin waktu untuk menduduki posisi manajer dan itu tidak dimiliki oleh perempuan Hindu” (Wawancara, 3 Juli 2010).

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa perempuan Hindu perlu dilatih dan dibina secara formal agar berguna bagi mereka untuk merebut posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Perlakuan pihak adat terhadap perempuan Hindu senada dengan konsep Picard (2006: 251) bahwa prasarat perempuan menjadi manajer Hotel Berbintang Lima, selayaknya diberdayakan. Akan tetapi pihak desa adat mengikat perempuan Hindu dalam Desa *Adat*. Hal ini terkait dengan pengembangan pariwisata dan pembinaan kesadaran nasional.

Pada prinsipnya sangat penting, adanya kesadaran dari berbagai pihak terutama pihak hotel seharusnya memberikan kesempatan dan tidak jemu-jemu memberikan pelatihan dan di sisi lain Desa *Adat* menyadari pula untuk memberikan peluang perempuan Hindu secara maksimal bekerja di sektor formal. Dengan demikian perempuan Hindu mencapai karier atau kedudukan manajer di Hotel Berbintang Lima, tetapi kenyataan sebaliknya (Brooks, 2008:86).

5.2.3 Pembinaan dan Pelatihan yang Minim

Kurangnya kesempatan kaum perempuan Hindu Bali menjadi *Top Manager* di Hotel Berbintang Lima juga terkait dengan pembinaan dan pelatihan yang mereka ikuti. Posisi sebagai seorang manajer apalagi di **Hotel Berbintang Lima** seperti **yang ada di kawasan Sanur** adalah suatu kedudukan **yang** sangat dimimpikan oleh semua orang termasuk kaum perempuan Hindu.

Semua bayang-bayang tersebut bisa menjadi kenyataan jika memiliki kemampuan dan kecerdasan, selain ketersediaan waktu penuh sesuai dengan peraturan yang diatur oleh kebijakan manajemen hotel. Cara berpikir primordial untuk meraih kedudukan dan posisi tidak berlaku karena yang dikedepankan ialah proporsional dan profesional. Hal ini mengacu pada kebutuhan yang diperlukan dalam manajemen Hotel Berbintang Lima.

I Wayan Dana (56 tahun) yang telah lama berkecimpung dalam dunia pariwisata mantan manajer operasional Sanur Beach dan sekarang menjadi Kepala Desa Sanur Kauh mengatakan seperti di bawah ini.

“Sebenarnya, ada kegiatan yang bisa meningkatkan skill dan profesionalitas tenaga kerja perempuan. Namun, rupanya belum dapat dioptimalkan kesempatan itu oleh pekerja perempuan, khususnya yang beraga Hindu. Terkait dengan posisi perempuan Hindu untuk kedudukan manajer hal itu tergantung pada kemampuan individu,

misalnya pendidikan formal, eksistensi dalam pergaulan. Pelatihan dan pembinaan hanya sebatas gambaran umum terkait dengan bagaimana sikap dalam memanfaatkan peluang yang ada” (Wawancara, 20 Mei 2010).

Penuturan di atas menunjukkan bahwa lemahnya posisi tawar dan terbatasnya kesempatan kaum perempuan menjadi *top manager* Hotel Berbintang Lima dikarenakan belum dimanfaatkannya secara optimal kesempatan mereka dalam mengasah keterampilan dan profesionalitas mereka berkaitan dengan tugas di Hotel Berbintang Lima. Selain itu, materi pelatihan yang diberikan kepada pekerja Hotel Berbintang Lima tersebut cenderung bersifat umum, yakni pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan Hindu Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

Jika modelnya dengan cara memberikan pemahaman melalui pelatihan, *workshop* atau sejenis lokakarya, dengan kegiatan sejenis tersebut ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur akan dapat mengerti dan mengetahui manajemen Hotel Berbintang Lima dalam rekrutmen untuk kedudukan posisi manajer (Friedan, 1963).

Lembaga Pemerintah terkait seharusnya mempedulikan persoalan kaum perempuan Hindu yang ada di wilayah industri pariwisata seperti di kawasan Sanur dengan memberikan pemahaman melalui pelatihan, *workshop* atau sejenis lokakarya. Fenomena dalam kegiatan sejenis tersebut, perempuan Hindu di desa kawasan Sanur akan dapat mengerti dan mengetahui bagaimana manajemen Hotel Berbintang Lima dalam perekrutan untuk kedudukan atau posisi manajer. Dengan cara demikian kaum perempuan Hindu akan berusaha untuk memenuhi persyaratan untuk posisi manajer. Lihat gambar 6.4 di bawah ini.



Gambar 6.4

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sanur Kauh

Dokumen : Karmini, tahun 2012

Gambar 6.4 tersebut di atas memperlihatkan, peneliti merekam hasil wawancara dengan seorang Pejabat Desa yang sedang memberikan penjelasan terkait dengan masalah pembinaan terhadap kaum perempuan yang ada di kawasan Sanur.

Ni Wayan Rasmini (33 Tahun), staf pegawai Hotel Sanur Beach mengatakan seperti di bawah ini.

“Untuk pembinaan terkait dengan kepariwisataan oleh lembaga pemerintah pernah diikuti, dan sebatas pada bagaimana etika dalam memberikan pelayanan pada wisatawan, misalnya dalam sikap dan komunikasi. Pembinaan dan pelatihan menurutnya sangat penting, tetapi itu sangat jarang”. Kemampuan dalam komunikasi dan ketrampilan dalam usaha didapatkan hanya mengandalkan feeling dan mengikuti yang sudah ada di lingkungan saya bekerja (Wawancara, 2 Juni 2010).

Luh Rami (35 tahun), Staf Pegawai Hotel Inna Grand Bali Beach, mengungkapkan seperti di bawah ini.

“Program-program pembinaan dan pelatihan yang menyentuh kaum perempuan Hindu, selama ini belum pernah dilakukan. Walaupun itu dilakukan tidak akan mengubah nasib perempuan Hindu untuk bisa menempati posisi jabatan manajer di Hotel Berbintang Lima. Selama ini pembinaan dari lembaga terkait kesulitan untuk mengundang atau mendatangkan kaum perempuan, Hal itu pun dimaklumi, karena banyak kesibukan di urusan adat” (Wawancara, 2 juni 2010).

Keterangan yang diberikan oleh kedua perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima seperti tersebut di atas menggambarkan bahwa pembinaan terhadap kaum perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur masih sangat kurang. Hal tersebut oleh Lyotard dan Rorty (Chris Barker, 20008:27) disebut pola peminan yang lebih melihat pada jenis atau kelompok dan dikatakan sebagai etnisitas.

Fenomena kurangnya pembinaan tidak saja disebabkan oleh jaranganya program dari lembaga terkait, tetapi juga disebabkan oleh eksistensi perempuan Hindu itu sendiri di kawasan Sanur dalam merespon kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga terkait. Persoalan kurangnya pembinaan terlihat pada kurangnya pemahaman dan keterbukaan wawasan kaum perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Sikap primordial perempuan Hindu semakin menguat dan mendalam. Hal ini terbukti dengan tertutupnya peluang untuk mendapatkan kedudukan menjadi seorang manajer di Hotel Berbintang Lima. Keterkaitan fenomena dengan pembinaan terhadap kaum perempuan Hindu, di kawasan Sanur diungkapkan oleh Resmanu (57 tahun) Kepala Bagian SDM dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar, di bawah ini.

“Pembinaan secara khusus memang belum pernah diberikan, tetapi pembinaan yang sifatnya umum untuk mengais rezeki dalam sektor pariwisata, sudah dilakukan

dengan menggandeng lembaga terkait. Untuk lebih lanjut diperlukan program-program yang lebih menyentuh pada kepentingan kaum perempuan Hindu dalam menyikapi manajemen Hotel Berbintang Lima” (Wawancara, 30 Juni 2010).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Bagian SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Nyoman Sudana yang mengatakan seperti berikut ini.

“Selama ini belum pernah diadakan pembinaan atau pelatihan masalah pariwisata bagi perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, tetapi pembinaan dan pelatihan secara umum dengan menggandeng lembaga terkait pernah beberapa kali dilakukan. Keterkaitan dengan posisi manajer, tidak begitu tergantung dari keluaran pembinaan atau pelatihan, sebab kedudukan manajemen hotel memiliki kriteria terkait dengan kemampuan *skill*, wawasan, etos kerja dan kedisiplinan waktu” (Wawancara, 12 Juni 2010).

Lihat Gambar No 6.5 di bawah ini.



Gambar 6.5

Wawancara dengan Kepala SDM Bagian Pengembangan

Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Gambar 6.5 tersebut di atas memperlihatkan salah seorang pejabat sedang menjelaskan pembinaan dan pelatihan di kawasan Sanur. Sedikitnya jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan kepariwisataan bagi perempuan Hindu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wawasan mengenai kepariwisataan.

Fenomena keterbatasan wawasan, terhadap perkembangan sektor pariwisata dan ditambah sikap primordial, menjadi elemen yang mendasar yang menyebabkan ¹ keterpinggiran perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima kawasan Sanur, untuk menduduki posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegagalan posisi mereka di tingkat pemerintahan desa terkait dengan kaum perempuan Hindu setempat. Posisi ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima ini menyebabkan mereka dianggap tidak berperan, baik secara sosial (kemasyarakatan), ekonomi (pekerjaan/posisi pekerjaan), maupun politik (pergaulan).

BAB VI

DAMPAK DAN MAKNA KETERPINGGIRAN PEREMPUAN HINDU

PEKERJA HOTEL BERBINTANG LIMA

Di bagian ini dipaparkan dampak dan makna keterpinggiran perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Dampak keterpinggiran perempuan Hindu ini mencakup dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak budaya. Selanjutnya, keterpinggiran perempuan Hindu yang bekerja pada Hotel Berbintang di kawasan Sanur memiliki makna, yakni makna keseimbangan peran domestik-publik, makna kemandirian ekonomi, dan makna prestise penguatan dari *luh luwih*.

6.1 Dampak Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima

6.1.1 Dampak Sosial

Dampak sosial keterpinggiran perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima tercermin dengan meluasnya hubungan sosial mereka. Mereka dapat mengembangkan diri mereka ke dalam jaringan sosial yang lebih luas. Mereka tidak hanya terkungkung dalam jaringan sosial keluarga dan adat di tempat tinggal mereka, tetapi juga terlibat dalam hubungan komunikasi global yang tersedia dalam lapangan kehidupan pariwisata, tetapi jaringan sosial perempuan Hindu tersebut belum optimal. Hal ini terjadi karena komunitas perempuan Hindu di kawasan Sanur hanya di tingkat level strata *middle* dan pegawai biasa di Hotel Berbintang Lima. Hal ini sudah terpolarisasi dalam pemaknaan implementasi *awig-awig*. Dengan demikian, perempuan Hindu di kawasan Desa Sanur hanya berkutat dalam ranah adat. Untuk dapat menduduki, posisi jabatan manajer di Hotel Berbintang Lima, dibutuhkan jaringan relasi yang sifatnya global, seperti yang dituturkan oleh Ni Wayan Ruscitawati (34 tahun), Staf *Training Officer* Inna Grand Bali Beach, di bawah ini.

“Menjadi manajer di Hotel Berbintang Lima sedikitnya harus memiliki jaringan relasi global dan pada saat persaingan bisnis hotel seperti sekarang boleh dikatakan modal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh pemegang posisi manajer. Jika jaringan relasi global tidak dibangun, mencakup mengakses internet, *sales marketing* tidak mampu, bagaimanapun bagusny komoditi yang dimiliki oleh hotel tetapi tidak akan banyak bisa diketahui oleh para pelanggan karena para pemakai jasa hotel pada saat sekarang kebanyakan mengakses melalui jasa informasi internet” (Wawancara, 22 Agustus 2010).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa untuk menempati posisi manajer pada saat persaingan seperti sekarang harus memiliki kemampuan membangun jaringan global. Fenomena tersebut sejalan dengan pendapat Appadurai (dalam Featherstone, 1993:204) sebagai globalisasi yang masuk melalui pintu pariwisata. Untuk hal itu, perempuan Hindu harus mampu melonggarkan atau membebaskan diri mereka dari belenggu adat, dan membangun jaringan global jika ingin memenangkan kompetisi posisi jabatan terhormat tersebut.

Fenomena untuk pencapaian semua hal tersebut sulit dicapai oleh perempuan Hindu yang lebih didominasi oleh kegiatan adat dan kultur malu, serta pasrah. Sikap perempuan Hindu yang terbelenggu oleh adat, tertutup, pasrah, kurang relasi merupakan hambatan untuk menempati posisi manajer di Hotel Berbintang Lima. Semua sikap perempuan Hindu yang telah disebutkan di atas, merupakan bentuk dan faktor penyebab keterpinggirannya dalam Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur.

Berkenaan dengan dampak keterpinggiran perempuan Hindu seperti yang diungkapkan di atas, secara lebih mendalam dan ideal berbeda dengan pokok pikiran postfemenisme yang dikembangkan oleh Ann Brooks (2009: 41) bahwa posisi perempuan dapat mencapai karir

secara maksimal. Hal ini sangat memungkinkan jika kaum perempuan yang bersangkutan sudah siap. Kaum perempuan yang selama ini termarginalkan akan kembali mendapatkan tempat terhormat, termasuk menjadi *General Manager*. Mereka dapat melakukan sebuah perubahan paradigma terhadap perempuan Hindu. Terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan Hindu untuk meraih posisi manajer di Hotel Berbintang Lima, gaung kesadaran *postfeminisme* perlu diwacanakan, seperti yang dikatakan oleh Ann Brooks. Lebih lanjut Ann Brooks berpendapat bahwa bukankah ketika ada keyakinan di situ ada harapan untuk memperbaiki nasib perempuan dalam dunia yang semakin "*egaliter*".

Keterpinggiran perempuan Hindu di kawasan industri pariwisata di Sanur, khususnya dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima berdampak pada kehidupan sosial. Fenomena ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima yang dipahami dalam aktivitas masyarakat global, secara sosial dinilai rendah dibandingkan dengan perempuan Non-Hindu. Oleh karena kelompok perempuan Non-Hindu, atau disebut sebagai kaum urban selalu menang dalam berkompetisi merebut posisi setrategis di industri pariwisata di kawasan Sanur. Hal ini cukup memprihatinkan, karena perempuan Hindu sebagai tuan rumah dipinggirkan oleh perempuan pendatang, seperti yang dituturkan oleh Windia (57 tahun) di bawah ini.

“Perempuan Hindu yang selalu disibukkan oleh urusan adat, persiapan upacara agama, yang bangga dengan segala pujian, oleh karena rajin di adat, *anteng nguwopin, bise menyamebraye* (rajin membantu-bantu, bisa bersosial masyarakat), sampai lupa pekerjaan-pekerjaan yang strategis di Hotel Berbintang Lima diisi oleh perempuan urban. Padahal jika dilihat kemampuan dan kecerdasan tidak kalah dengan kaum perempuan urban tersebut. “*Kenkenan luh-ruh Hindu di Bali, ungkulan ngurusan adat, nyiapan upacare, keluarga, laker nyidaang menang dadi manajer di hotel. Yan andiang care nasi tulene mebe guling sube ade di piringe jeg*

juange ben luh-luh ling di luar / bagaimana bisa menjabat sebagai manejer di Hotel Berbintang Lima karena banyak disibukan oleh adat”. (Wawancara, 23 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan telah terjadi kekalahan berkompetisi perempuan Hindu dalam perebutan posisi yang strategis, bukan disebabkan karena kalah cerdas atau kurangnya keterampilan, tetapi disebabkan oleh karena perempuan Hindu terbelenggu oleh kepentingan adat dan kegiatan sosial. Fenomena di atas oleh Touraine dan Melucci (dalam Chris Barker, 2008:132) disebut sebagai keterpinggiran kelas. Keterbelengguan kegiatan *adat* dapat dilihat dalam Gambar 7.1 di bawah ini.



Gambar 7.1

Perempuan Hindu dalam Persiapan Upacara Agama Hindu

Sanur di atas menunjukkan aktivitas perempuan Hindu dalam *mengajar sesajen*” di Pura dalam kegiatan “*odalan*”. Oleh Bourdeieu (dalam Takwin, 2003:114) aktivitas perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima seperti umumnya yang terjadi di desa *pakraman* di Bali, dikatakan sebagai konsep *habitus*, yang berurusan dengan ranah sosial.

Dalam hal ini perempuan Hindu akan tetap dan terus terpinggirkan dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Begitu juga dengan aturan-aturan yang

biasa berlaku di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang tidak tertulis yang disebut “*perareman*”. Di dalamnya perempuan sebagai objek dan subjek lebih terbelenggu.

Semua uraian dalam dampak sosial dari ¹ **keterpinggiran perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima kawasan Sanur**, di tingkat global menunjukkan sikap pasrah kehilangan kesempatan memperoleh posisi manajer karena terbelenggu adat sehingga menjadi “penonton dan pendengar yang baik” di rumah sendiri. Keterpinggiran perempuan Hindu berdampak terhadap persoalan gender, yang selama ini keberadaan haknya selalu menjadi dinomorduakan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam ranah publik, seperti di ranah politik, akademisi atau di lembaga-lembaga fomal lainnya. Menurut Luh Riniti dalam penelitiannya yang mempersoalkan perempuan Bali dalam eksistensi dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pemilu tahun 2004 mengatakan seperti di bawah ini.

“Ada kecendrungan sikap melakukan gerakan menuntut kesetaraan status pekerjaan agar dilihat secara profesional. Sikap perempuan Hindu Bali merupakan bentuk resistensi terhadap perlakuan perempuan sebelumnya, yang selalu dalam persoalan kekuasaan dilihat dari segi perempuan. Perempuan dijadikan alasan untuk melemahkan hak kekuasaannya. Lebih lanjut Luh Riniti juga menyebutkan, kelebihan yang ada pada perempuan Bali, seperti kelemahlembutan, kesabaran kadang kala menjadi penetralisir sebuah persoalan. Dalam lembaga perguruan tinggi, suara-suara perempuan dalam konsep-konsep pemikiran akademis masih banyak yang didengarkan atau dipakai bahan pertimbangan”.

Demikian pula Gung Rai dalam disertasinya (2009) berpendapat yang senada dengan pendapat Riniti di bawah ini.

“Gender dipahami sebagai usaha pengaktualisasian diri dalam sikap perempuan Bali, yang diperlakukan kurang kesetaraannya dengan laki-laki. Selama berabad-abad hak perempuan Bali terasingkan dalam ranah formal dan informal. Apapun yang menyangkut keputusan di kedua ranah tersebut selalu ada dalam kekuasaan kaum laki-laki. Ketidakadilan terhadap perlakuan serta keberadaan hak perempuan Bali, seolah-olah sudah menjadi kodrat. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, yang diatur dan dilegalitaskan oleh peraturan yang tertulis dalam *awig-awig*. Secara umum isi dari nilai ajaran agama Hindu berintikan ajaran dari *tri hita karana*. Di penjabaran *awig-awig* yang dipakai sebagai patron kehidupan bermasyarakat di Bali tidak mempunyai hak suara perempuan tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dikerjakan atau dilakukan oleh perempuan”.

Menurut kedua pendapat tersebut di atas, bahwa suara perempuan Hindu Bali dalam membuat perencanaan sering diabaikan. Di sisi lain, karakteristik kelemahlembutan perempuan sering juga menjadi peredam atau penetralisir persoalan. Hal ini dituturkan pula oleh Luh Riniti (mantan anggota KPU Bali, 2004) di bawah ini.

“Jika mengacu pada sejarah peradaban masyarakat Bali, perempuan Hindu telah berabad-abad keberadaannya menjadikan komunitas yang dinomorduakan dan termarjinalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh kultur (budaya), dan oleh sikap perempuan yang sangat bergantung pada kaum laki-laki dan juga tidak mau menjadi orang nomor satu di dalam mengelola rumah tangga. Begitu juga dalam menyelesaikan persoalan di rumah tangga atau di masyarakat, perempuan menyerahkan pada pihak laki-laki. “*Depang nak muani gen baang meragatang, de awake luh-luh milu-milu tuwung, paang sing care intanduk ngelewatin kuping*” artinya biarkan orang laki-laki saja menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keluarga besar (Wawancara, 23 Juli 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan Hindu yang terpinggirkan diakibatkan oleh faktor status sosial. Begitu juga dalam menyelesaikan persoalan di rumah tangga dan di masyarakat juga diserahkan sepenuhnya pada kaum laki-laki. Pengaturan kewenangan dalam rumahtangga, laki-laki memiliki peran superior, seolah-olah suara dan sikap laki-laki adalah harus dipatuhi oleh perempuan. Polarisasi pengaturan kehidupan rumah tangga masyarakat di Bali, bukan tidak ada dasarnya, semuanya telah diatur dan disepakati sehingga tidak menjadi persoalan. Perempuan dengan rasa senang hati menerima posisi sebagai orang yang diperintah dan tunduk kepada apa yang menjadi keputusan laki-laki. Hal ini mengacu pada sistem “*patriarkhi*”. “*Patriarkhi*” dipahami sebagai kultur yang sudah

berlangsung berabad-abad. Sejak dahulu kaum laki-lakilah yang berperan secara dominan dalam mengambil segala keputusan yang menyangkut segala kehidupan. Dengan demikian, keterpinggiran ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, berdampak terhadap status sosial perempuan persoalan ketidakadilan perlakuan gender.

Status perempuan di Desa *Adat* ditentukan oleh pihak laki-laki. Dan status perempuan dalam keluarga dalam perkembangan terakhir ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Hal ini sebagai dampak dari industri pariwisata yang memungkinkan perempuan bekerja untuk mencari tambahan pendapatan. Hal ini menunjukkan telah terjadi penggeseran peran yang tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Namun di sisi yang lain, masih ada peran yang kuat yang tidak bisa digantikan oleh perempuan. Sebagai istri dalam rumah tangga, perempuan Hindu Bali juga sekaligus sebagai anggota *Banjar/Desa Pakraman*. Status sebagai istri, di *banjar* sekaligus seorang perempuan juga mengangkat status suaminya dalam keanggotaan/*Desa Pakraman*. Status "*Krama Banjar Ngarep*" (anggota utama) adalah kaum laki-laki, sedangkan perempuan ada dalam posisi menerima sebagai *krama* istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan peran status sebagai akibat terjadinya keterpinggiran perempuan Hindu.

6.1.2 Dampak Ekonomi

¹Perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur adalah sebagai tuntutan hidup dalam membangun rumah tangga. Mereka turut membanting tulang, mencari rezeki demi menutupi kebutuhan rumah tangganya yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Oleh karena itu, ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima sesuai dengan *swadarma* sebagai seorang ibu yang turut menjalankan *karmayoga* agar dapat menunjang ekonomi keluarga. Bekerja dalam proses menyelesaikan pekerjaan domestik mendapatkan kemudahan misalnya ada mesin cuci, *majic jeer* sehingga

mendukung untuk bekerja di luar ranah domestik. Perubahan ini dialami oleh masyarakat secara lambat atau cepat. Fenomena ini sejalan dengan konsep Hoovelt (dalam Sojogyo, 1990: 60).

1 Alasan utama perempuan Hindu bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Desa Sanur adalah untuk menambah penghasilan keluarga, selain untuk menghilangkan kejenuhan di rumah tangga, dan untuk mengaktualisasikan diri. Hal itu juga didukung oleh tempat tinggal yang dekat dengan lokasi pekerjaan atau mendapat izin dari suami. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Ni Made Rukmini (33 tahun) *Staff Officer Training* di Hotel Inna Grand Bali Beach, di bawah ini.

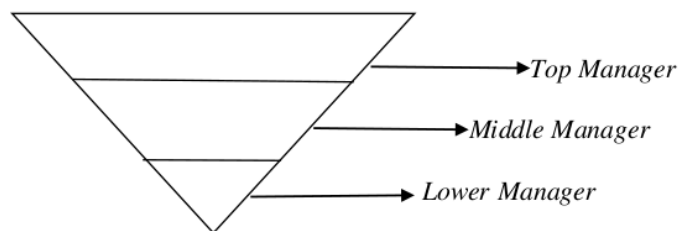
“*Tyang* (saya) bekerja di hotel untuk tidak selalu bergantung pada suami, minimal *tyang* (saya) bisa bantu meringankan beban rumah tangga di samping dapat bergaul tidak hanya di rumah, dengan cara demikian tidak merasa jenuh dengan pekerjaan rumah tangga. Sehingga saya dapat menambah kemampuan dan pengetahuan” (Wawancara, 22 Agustus 2010).

Penuturan di atas menggambarkan bahwa perempuan bekerja untuk ikut serta menambah pendapatan dan mengaktualisasikan diri secara maksimal di ranah publik. Fenomena ini telah dikatakan oleh Ann Brooks (2009), dalam menjalankan tugasnya, pekerja perempuan Hindu dapat mengatur waktu secara fleksibel dengan rekan sekerjanya. Dengan cara demikian kegiatan adat, sosial dalam kewajiban sebagai *krama istri* di desa adatnya seperti “*ngowopin*”/ “*ngayah*” tetap masih bisa dilakukan. Nilai perempuan yang demikian sebagai *reward* eksistensi perempuan Hindu dalam aktivitas kegiatan *adat/banjar* adalah mendapat julukan perempuan yang rajin “*bise*” (bisa) bermasyarakat.

Sebaliknya perempuan yang aktif untuk mengaktualisasikan atau secara maksimal sebagai manajer di hotel, mereka didomestik mengesampingkan adat sehingga terpinggirkan.

Sikap perempuan tersebut oleh Gramsci (1971:80) disebut sebagai hegemoni yang terbungkus secara halus melalui kegiatan adat. Selain itu, eksistensi perempuan Hindu perannya cukup dominan, seperti dalam upacara *Panca Yadnya* (*Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Resi Yadnya, Manusia Yadnya dan Bhuta Yadnya*). Tidak hanya itu, karakteristik kehidupan perempuan Hindu yang terpolarisasi dalam kehidupan Desa *Pakraman*, mulai dari mengatur urusan keluarga, bermasyarakat sampai urusan adat dan *pesuka-dukanan*. Keterpinggiran pekerja perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima berdampak di ranah sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Luasnya dampak keterpinggiran pekerja perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima pada masa mendatang diharapkan posisi bisa terbalik dari kondisi sebelumnya, seperti telah diuraikan dalam BAB IV. Pekerja perempuan Hindu bisa mendominasi posisi *Top Manager* yang sebelumnya hanya bisa menduduki *middle manager*. Di masa mendatang diharapkan banyak perempuan Hindu sebagai *Top Manager*, dengan demikian dampak sosial, ekonomi, budaya dan politik bisa terangkat serta lebih dihargai. Harapan ke depan posisi pekerja perempuan Hindu seperti tampak dalam Gambar 7.1a di bawah ini.



Gambar 7.1a Grafik Piramida Terbalik.

Sumber: <http://google.piramida.com>

Gambar 7.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa di masa mendatang pekerja perempuan Hindu mendominasi kedudukan jabatan *Top Manager*, dan hanya sedikit di posisi strata *lower manager*. Fenomena karakteristik kehidupan perempuan Hindu, yang terpolarisasi dalam kehidupan desa *pakraman* terlihat tidak perlu ² hubungan sosial di antara

anggota keluarga yang relatif tetap dan didasarkan atas keterikatan adat orang Bali (Geertz, 1981). Hubungan dalam bermasyarakat di bawah payung desa *pakraman* diatur dengan *awig-awig* supaya tercapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jalinan antara anggota keluarga dan masyarakat dijiwai oleh suasana kasih sayang, rasa tanggung jawab bersama yang dibingkai dalam ranah sosial. Hal tersebut dipahami oleh Bourdieu (dalam Takwin 2009:114) dengan menyebutnya *habitus*.

Walapun gagal menjadi *Top Manager* di Hotel Berbintang Lima tetapi perempuan Hindu telah berhasil berperan dalam upaya mencari penghasilan demi keluarga mereka. Di era modern sekarang, perempuan Hindu Bali telah terjun di berbagai profesi/pekerjaan. (1) Perempuan Hindu sebagai tenaga kasar, membantu tukang bangunan gedung atau jalan, termasuk mengangkat pasir yang diturunkan dari truk ke lokasi bangunan. Orang/suku lain boleh jadi melihat aneh atas "penampilan perempuan Hindu Bali yang sudi sebagai tenaga kasar", tetapi hal ini berbeda dengan pandangan mereka sendiri. Perempuan Bali rela menjadi buruh kasar karena mereka ingin membantu kebutuhan ekonomi keluarga yang kini terasa bertambah berat. (2) Perempuan Hindu bekerja di sektor kerajinan atau industri keluarga (*home industry*) yang terbuka lebar dalam dunia pariwisata Bali. Semakin banyak perempuan Bali yang menekuni sektor wirausaha kecil, yakni menjadi penjual minuman, souvenir, dan penyedia jasa pijat (*massage*) di pantai Kuta, Sanur, dan Lovina. (3) Perempuan Hindu memasuki dunia jasa pariwisata termasuk akomodasi (penginapan/hotel), travel, bar dan restoran. (4) Perempuan Hindu terjun ke berbagai bidang profesi, termasuk hukum, politik, pendidik, dokter, ahli teknik, dan sebagainya.

Kaum perempuan Hindu Bali dikenal sebagai pribadi yang ulet, memprotes ketidakadilan gender yang menimpa kaumnya, mendorong kaumnya untuk belajar meningkatkan kecerdasan diri sehingga tidak diremehkan dalam kehidupan sosial. Mereka berharap agar kaumnya tetap menjaga tradisi walaupun ia telah menjalani kehidupan modern

seperti generasi I Goesti A Joe Amba, seorang pejuang perempuan dari Bali Utara yang dikenal terpelajar, bisa menyetir mobil, bermain tenis, berpakaian modern, dan bisa berbahasa Belanda. Kendati ia menjalani hidup modern, perempuan terpelajar pada zaman Belanda ini dinilai sebagai sosok yang masih tetap menjalankan tradisi Hindu Bali (Darma Putra, 2007: 58).

6.1.3 Dampak Budaya

Keterpinggiran perempuan Hindu Bali yang gagal menduduki posisi *Top Manager* di Hotel Berbintang Lima berdampak pada penguatan budaya *patriarkhi*. Budaya *patriakhi* menjadikan kaum laki-laki superior atau dominan dalam mengatur rumah tangga dan itu tidak menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat Bali. Sementara ini, perempuan menjadi lebih nyaman dan aman jika ada dalam kehidupan budaya *patriakhi* karena terjaminnya masalah nafkah dan keamanan hidup. Selain itu, perempuan Hindu bebas dan aktif membantu usaha kemajuan rumah tangga. Menjadi perempuan Hindu yang ideal di mata masyarakat Bali, khususnya di desa kawasan Sanur, harus bisa aktif dan banyak terlibat dalam ranah *adat*. Namun keterlibatan perempuan secara penuh agar berperan yang ideal, mengorbankan kepentingan publik atau menutup sendiri peluang ⁵ untuk bisa kompetitif dalam merebut posisi penting di Hotel Berbintang Lima. Aktualisasi diri perempuan Hindu dalam aktivitas di ranah sosial tersebut membelenggu gerak, langkah, dan pandangan mereka terhadap lingkungan publik. Bagaimana perempuan-perempuan Hindu bisa menjadi seorang manajer di Hotel Berbintang Lima. Perempuan-perempuan Hindu terbuai oleh peran yang ideal di masyarakat adat.

Perempuan Hindu dalam usaha untuk mengaktualisasikan diri dalam bermasyarakat adalah dengan cara mengambil peran aktif dalam segala kegiatan yang terkait dengan adat. Di desa kawasan Sanur kegiatan adat yang terkait dengan peranan perempuan, seperti menjadi

“tukang”/juru *banten*, aktif dalam organisasi *krama istri* PKK dan aktivitas perempuan lainnya. Perempuan yang menjadi “tukang” atau juru *banten*, keberadaannya akan sangat dikenal oleh lingkungan masyarakat. Begitu juga menjadi pengurus PKK, semua kegiatan di adat yang terkait dengan pekerjaan perempuan akan dikoordinasi oleh pengurus PKK. Penuturan Kompyang Supadmi (45 Tahun) Karyawan Hotel Grand Bali Beach, dikutip di bawah ini.

“Dalam posisi sebagai pengurus PKK, betul-betul dibutuhkan loyalitas waktu, tenaga dan pikiran. Kegiatan organisasi sosial ini mengkoordinasikan segala aktivitas perempuan yang terkait dengan program-program yang telah digariskan membantu pembangunan desa baik dalam fisik maupun non fisik. Sedangkan kegiatan organisasi sosial terkait dengan program pemerintah, seperti kesehatan lingkungan masyarakat, dan program-program yang lainnya dibebankan pada kelompok PKK”. Namun di antara kesibukan yang sifatnya sosial tersebut menjadi pengurus PKK, namanya dikenal oleh banyak orang” (Wawancara, 22 Juni 2010).

Makna yang terungkap dalam penuturan itu adalah banyak waktu yang dihabiskan dan menampakkan rasa kebanggaan karena namanya banyak dikenal orang. Hoggart menyebutnya sebagai kulturalisme (Chris Barker, 2008:14), adanya alasan untuk mengaktualisasikan diri dan adanya keinginan untuk menunjukkan dirinya. Mereka juga mempunyai peran yang cukup penting dalam masyarakat seperti kaum laki-laki.

Di samping alasan tersebut di atas masih ada alasan lain perempuan Hindu dalam usaha mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu, berkembanglah bentuk atau pola organisasi sosial sebagai wujud pola-pola interaksi di antara warganya, dalam kelompok-kelompok sosial, seperti di Desa *Pakraman* Sanur – Denpasar, berkembanglah kelompok-kelompok organisasi komunitas yang berhubungan dengan kesatuan-kesatuan kekerabatan,

seperti keluarga inti, *dadia*, dan *panti* yang dijadikan media oleh kaum perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Dalam kelompok-kelompok kekerabatan, tiap-tiap warga mempunyai keterkaitan yaitu keterkaitan dengan upacara adat sehingga hubungan atau jalinan kekerabatan menjadi semakin erat, kuat, dan kompleks. Adanya bentuk atau pola-pola kekerabatan seperti itu membuat warga khususnya kaum perempuan harus senantiasa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota tiap-tiap komunitas tersebut.

Fenomena kesibukan dalam usaha mengaktualisasikan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, perempuan Hindu melupakan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh ⁵ Hotel Berbintang Lima yang ada di kawasan Sanur. Hal tersebut memberikan peluang besar kepada perempuan Non-Hindu atau pendatang untuk merebut posisi jabatan manajer di Hotel Berbintang Lima. Dengan demikian usaha untuk mengaktualisasikan diri di lingkungan adat menjadi faktor penyebab keterpinggiran perempuan Hindu di kawasan Sanur.

Terkait dengan fenomena di atas, Windia (2008:92) mengatakan bahwa pola kehidupan masyarakat di Bali diatur dalam bentuk tertulis atau nilai-nilai yang hidup masih tetap dihormati, dilindungi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai kehidupan tersebut sudah ada jauh sebelum masuknya peradaban Hindu. Hal ini terlihat dalam nilai-nilai kehidupan pada zaman Bali Kuno yang tetap hidup dan berkembang setelah masuk nilai-nilai ajaran Agama Hindu yang dibawa dari Jawa oleh Mpu Kuturan. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat di Bali, ada kepercayaan dan keyakinan pada roh-roh yang ada di alam benda atau di tempat lainnya. Tidak hanya sebatas nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan, pola kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Bali Kuno yang menempatkan posisi perempuan, juga mengikuti dan mewarnai kehidupan masyarakat sosial pada masa sekarang.

Sejalan dengan pendapat Parimartha (2006:42) bahwa perkembangan nilai-nilai budaya zaman Bali Kuno yakni kaum laki-laki bertindak sangat superior terhadap kehidupan kaum perempuan. Perempuan selalu menjadi korban untuk dinomorduakan oleh laki-laki,

baik dalam kehidupan domestik maupun dalam ranah publik. Budaya kekuasaan laki-laki terhadap kaum perempuan disebut sebagai budaya *patriarkhi*. Oleh Ardhana (2008) dikatakan budaya ini sudah ada sejak zaman Bali Kuno dan terus diterima secara turun-temurun serta tidak ada yang membantahnya.

Aditjondro (1993:2) dalam Agung Gede Rai (2009:297) mengatakan bahwa budaya *patriarkhi* adalah suatu paham yang menganggap dominasi laki-laki merupakan sesuatu yang alami yang memang harus demikian, menghegemoni dan membelenggu kehidupan perempuan untuk masuk ke ranah publik. Di Bali budaya *patriarkhi* tidak akan bisa hilang atau musnah semasih menganut paham *partriliniar* dalam masyarakat. Contohnya, perempuan Hindu setelah menikah, bekerja di luar rumah pada malam hari, masih sangat tabu dan menjadi persoalan. Begitu pula keluarga kecil (suami-istri) yang hanya memiliki anak-anak perempuan akan menemui kesulitan di kemudian hari, ini terkait erat dengan kekuasaan sebagai “*purusa*”.

Sejalan dengan konsep pemikiran I Nyoman Wijaya, patriarkhi merupakan sistem filsafat, sosial, dan politik yang memberikan hak dan kekuasaan istimewa kepada laki-laki untuk menentukan peran apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Pada prinsipnya budaya patriarkhi adalah kekuasaan laki-laki terhadap alam termasuk kaum perempuan dan masuknya ke Bali 2500 tahun yang lalu (Bali Post, 17 Desember 2005).

Fenomena tersebut jika dikorelasikan dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu, yang merupakan hasil adaptasi dengan nilai keyakinan dan kepercayaan masyarakat sebelumnya, yang diungkap oleh Ardana (2005), seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa budaya patriarkhi sudah hidup dan ada pada zaman Bali Kuno. Perkembangan budaya *partriarkhi* dalam masyarakat Bali, memberikan kesempatan, ruang dan peluang besar pada kaum laki-laki untuk lebih berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat industri pariwisata di kawasan Sanur, tampaknya budaya patriarkhi secara halus telah mendapatkan resistensi atau perlawanan dari kaum perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya kaum perempuan yang menuntut persamaan dan kesetaraan dalam menyikapi pembangunan. Hal tersebut senada dengan ungkapan Ni Wayan Karniasih (35 Tahun), karyawan di Hotel Bali Hyatt Berbintang Lima di Kawasan Sanur, yang dikutip di bawah ini.

“Secara jujur dalam kehidupan bermasyarakat di desa kawasan Sanur, dominasi kaum laki-laki masih sangat kuat. Kalau diperhatikan secara seksama, personal perempuan dalam organisasi sosial tidak ada yang perempuan, kecuali di lembaga PKK. Begitu juga dalam penyusunan awig-awig, tidak ada kaum perempuan yang berperan dalam penyusunan teksnya, semua menurut pemikiran laki-laki. Namun dalam aplikasi atau pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan“. Tidak sedikit juga perempuan di desa Sanur, yang sudah merasakan manisnya hidup di industri pariwisata, mempolakan konsep pemikiran yang lebih realistis, dengan mengkomunikasikan persoalan yang diperlukan dalam bekerja di Hotel Berbintang Lima jika ingin mendapatkan posisi dan kehidupan yang layak. Keperluan yang terkait dengan aktivitas di adat bisa disikapi dengan cara membayar atau membeli”. (Wawancara, 23 Juni 2010).

Kutipan tersebut di atas menunjukkan kegiatan yang ada di masyarakat di desa selalu dirancang oleh kaum laki-laki dan perempuan meskipun dalam posisi lemah tetapi wajib ikut melaksanakannya. Oleh Gidden, dikatakan arti ungkapan tersebut di atas sebagai konsep modernitas. Dalam konteks budaya ini mulai dari kehidupan keluarga, kelompok sampai masyarakat di Bali, laki-laki selalu menjadi panutan dan kaum perempuan menjadi yang kedua. Di bawah ini dikutip teks *Awig-awig Desa Pakraman Sanur, Sargah 8* di “*wewidangan pawongan*” yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut.

“Krama istri ring sejebagan Desa Adat Sanur, mangdene nyanggre ayahan sekadi odalan ring pura, paumahan lan nyangre sane lianan. Kerama istri sane dados menggalaning kekaryan sane kewentenan ring sejebagan pawidangan pawongan” Artinya kaum perempuan yang ada di kawasan Desa Adat Sanur, supaya kaum perempuan sebagai pemimpin dalam pekerjaan seperti dalam kemasyarakatan yang berurusan dengan odalan di Pura”.

Ungkapan tersebut merupakan terjemahan teks yang menjelaskan bahwa, segala kegiatan yang berurusan dengan masalah organisasi yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, seperti *ngayahang* di pura, dipahami yang aktif dan dominan adalah kaum perempuan, tetapi yang membuat semua yang tertulis dalam teks *awig* adalah kaum laki-laki. Hal ini oleh Jhon Cobb (2008:38) dikatakan sebagai sosial *postmodern*.

Ungkapan kutipan teks *awig* tersebut mengatakan bahwa dalam kehidupan di keluarga, laki-laki menjadi kepala keluarga yang sepenuhnya mengatur kehidupan rumah tangga. Begitu juga dalam persoalan perkawinan, kaum perempuan yang dipinang dalam posisi yang sangat lemah mereka harus menerima posisi yang dinomorduakan dan menerima keputusan. Fenomena tersebut merupakan ikatan perkawinan model masyarakat Bali yang menganut paham patrilineer lebih, meligitimasi kekuasaan laki-laki terhadap kaum perempuan. Lebih-lebih *awig-awig* dan *perareman* merupakan legalitas mengaktualisasi budaya *partriakhi*.

Dalam pengelolaan organisasi sosial masyarakat Bali yang menganut sistem banjar *pakraman* seperti yang telah diuraikan di atas, memberikan kekuasaan laki-laki semakin kuat terhadap perempuan dan membentuk pola dan sikap kaum perempuan Hindu dalam bentuk kepasrahan. Pola keterikatan masyarakat desa kawasan Sanur *banjar* dan desa *pakraman* yang diatur dalam *awig-awig* disertai dengan sanksi-sanksi dan terkucilkan secara sosial, menjadikan cekraman budaya patriarkhi terhadap perempuan Hindu lebih mendalam.

Terkait dengan hal di atas Ardana (2001:52) mengatakan bahwa ideologi patriarki, yang membelenggu dan mencengkram kehidupan perempuan Hindu tidak mudah untuk melakukan perubahan. Dalam persoalan tersebut perempuan hanya bisa mengharapkan agar laki-laki beremansipasi atau bertoleransi terhadap kaum perempuan Hindu. Dengan demikian budaya patriarki-lah yang menyebabkan ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur.

¹ Keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima, dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima di Desa Sanur, tidak terlepas dari faktor budaya *patriarki*. Budaya *patriarki* merupakan sebuah kultur yang dimulai dari perkawinan. Demikian pula Windia (2008:102) mengatakan bahwa perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat berlaku dalam pelaksanaan upacara adat, berperan dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dari kehidupan anak-anaknya. Hal ini dikatakan oleh Bagus (1996:36) sebagai konsep tradisional.

Dalam perkawinan adat Bali seperti yang terjadi di Desa Kawasan Sanur, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita selanjutnya setelah perkawinan, pihak istri tinggal di tempat kediaman suami. Perkawinan yang telah dilangsungkan akan membentuk suatu unit keluarga batih (*kuren*). Dalam keluarga *batih* seperti di Bali berlaku prinsip patrilineal (*purusa*) yaitu seorang istri berada dan mengikuti keluarga suami sehingga hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui pihak laki-laki.

Konsekuensi lainnya dari perkawinan menurut Bagus (1996:60) adalah memperluas ikatan-ikatan hubungan kekerabatan dengan melibatkan kerabat pihak suami-istri. Meluasnya hubungan kekerabatan ini membawa implikasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan kerabat bersangkutan. Adapun bentuk-bentuk aktivitas ini mencakup, bidang

sosial, ekonomi, upacara adat, dan agama. Aktivitas ekonomi dan sosial biasanya meliputi kerja sama dalam pembangunan dan perbaikan rumah atau tempat sembahyang (*Sanggah*, *Pura Dadia*, *Paibon*).

Adapun beberapa konsekuensi dari perkawinan yang memperluas ikatan hubungan kekerabatan di pihak suami dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Ikatan hubungan kekerabatan terlihat dalam beberapa aktivitas upacara adat dan keagamaan mulai dari upacara tiga bulanan (*nelubulanin*), potong gigi (*metatah*), perkawinan (*mesakapan*), dan pembakaran mayat (*ngaben*). Selain itu ikatan hubungan kekerabatan terlihat dalam upacara keagamaan di keluarga, seperti *Pura Dadia* dan *Pedharman*. Sebagai bukti menonjolnya ikatan kekerabatan di Bali, yaitu adanya wujud saling sembah jika ada upacara kematian di lingkungan *klen* masing-masing. Menurut Dhana (1994: 41), hal ini terjadi jika perkawinan warga *klen* atau anggota keluarga dianggap sederajat dalam kasta. Lebih lanjut, Dhana mengatakan (1994: 50) bahwa perkawinan itu di samping menjalin kekerabatan luas juga membentuk keluarga sebagai tumpuan ekonomi dengan saling memperhatikan keluarga *batih* (*kuren*) yang strukturnya terdiri atas orang tua dan anak-anaknya yang belum menikah.

Keluarga *batih* merupakan unit kesatuan sosial terkecil merupakan kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai satu kesatuan. Selain itu, urusan ekonomi ekonomi rumah tangga diusahakan secara otonomi dan mandiri dengan memisahkan diri dari orang tuanya yang ditandai dengan mendirikan rumah tempat tinggal baru dan membangun *Sanggah Kemulan Taksu* sebagai tempat pemujaan *Bhatara Hyang Guru*. Keluarga seperti ini lebih tampak dalam keluarga *batih* yang berada di luar lingkungan desa tempat kelahirannya.

Demikian pula Bagus mengatakan bahwa dalam masyarakat Bali, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga *batih* (*kuren*) dan keluarga besar atau *klen* (*dadia*). Yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga adalah keluarga *batih* (*kuren*) yang terdiri atas orang tua (ayah dan ibu) dan anak-anaknya yang memiliki aset penting dalam menambah penghasilan

keluarga. Di sisi lain, perempuan merasakan bahwa penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarga jika anggota keluarganya cukup banyak yang menjadi tanggungan.

Fenomena lain kaum perempuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan domestik dasar atau kebutuhan pokok keluarga saat ini adalah sangat tergantung dari keadaan pasar yang semakin tingginya harga-harga barang yang tak terkendali. Hal ini secara langsung berdampak pada tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Menurut Ida Ayu Made Metri (35 tahun), kenyataan inilah yang membuat kaum perempuan Hindu merasa terpanggil untuk mengakses ekonomi keluarga. Senada dengan penuturan Ni Nyoman Kurniasih (40 tahun), karyawan Hotel Bali Hyatt, yang dikutip berikut ini.

“Tiang megae anggon ngentugin isin paon, apang prasida paon tiange makedus. Taler apang nyidang melu mertinin keluarga, pang sing kadenene ngidih dogen”. Pedalem masih muanin tyang dogen megai, liu masih ye hitunge, nah yan be icine seger gen barengen ye megai”. (saya bekerja untuk tambahan isi dapur agar dapur saya tetap bisa mengepul, dan supaya tidak dikira hanya bisa minta pada suami saja, kasian hanya sendiri yang mencari nafkah, jika sudah sehat pasti sama-sama bekerja).

Lebih lanjut juga diceriterakan oleh IGA Inten Nuraini (37 tahun), staf karyawan Hotel Sanur Beach, seperti berikut.

“Tiang megae anggen menyama braya (artinya: saya bekerja untuk sosial kekrabatan di masyarakat), Tiang megae anggen ngentugin yen ade rerainan, megae apang nyidayang pianak tiyange mesekolah”(saya bekerja untuk tambahan penghasilan jika ada hari raya, agar anak saya bisa bersekolah (Wawancara, 23 Juni 2010).

Kedua ungkapan tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya kontribusi dari penghasilan menjadi staf Hotel Berbintang Lima untuk bisa menambah penghasilan. Ann Brook (2009:40) mengatakan bahwa keinginan untuk lebih mandiri walaupun sebagai salah satu alasan lain tentang 1 perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima adalah karena sudah mendapatkan izin dari suami. Ini berarti para suami sudah memberikan rasa

hormat kepada istrinya untuk membantu mengembangkan karier dan bakatnya sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Para suami mungkin sudah merasakan tuntutan ekonomi semakin tinggi untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, sehingga bantuan tambahan penghasilan dari para istri sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Malahan sekarang para suami sudah mulai ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan urusan rumah tangga yang belum sempat diselesaikan oleh sang istri karena mereka sedang bekerja di industri pariwisata.

6.2 Makna

Makna dikemukakan pertama kali oleh C.K. Ogden dan I.A. Richards (1923) dalam bukunya yang berjudul *The Meaning of Meaning* dengan mengintroduksi pendapat Hirsch, Juhl (1980:27) mengenai pengertian 'arti' dan 'makna'. Dalam hal ini, 'arti' direpresentasikan oleh teks sedangkan 'makna' merupakan hubungan antara arti, person, konsep, situasi, dan segala sesuatu yang diimajinasikan. Makna dapat berbeda-beda sesuai situasi pembaca.

Untuk memperjelas perbedaan antara 'arti' dan 'makna', Leech (1983:9) mengemukakan tujuh tipe makna, yaitu a) makna konseptual, makna denotatif atau kognitif, sebagai makna utama bahasa; b) makna konotatif, apa yang diacu melebihi maknanya secara konseptual, sebagai ciri-ciri umum bahasa sastra; c) makna stilistik, apa yang dikomunikasikan secara sosial; d) makna efektif, apa yang dikomunikasikan dari sikap penulis; e) makna replaktif, apa yang diasosiasikan dari refleksi yang sama; f) makna kualitatif, asosiasi yang diperoleh oleh kata-kata yang muncul dalam lingkungannya; dan g) makna tematik makna menurut cara penulis dalam menatap pesannya.

Makna yang dikaji dalam penelitian ini tidak terkait dengan makna-makna tersebut di atas, tetapi lebih terkait dengan persoalan-persoalan kajian budaya. Senada dengan yang dikatakan oleh Huda (1995:195) untuk menemukan makna dan pemikiran yang tertuang

dalam sebuah tekstual serta konteksnya dalam kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Artinya, budaya atau kehidupan sosial ditempatkan dalam sebuah teks yang dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan. Menurut Palmer (2005:14) ada tiga makna dasar tentang interpretasi yang diungkap, yaitu 1) mengedapankan atau mengungkapkan kata-kata; 2) menjelaskan atau mempertegas; dan 3) menerjemahkan, seperti dalam sebuah translasi bahasa. Mengungkapkan makna terhadap ¹ keterpinggiran perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur mengandung berbagi makna tergantung sudut pandang pembacanya, artinya tidak ada makna tunggal. Lain halnya menurut Derrida (dalam Lajar, 2005:172), ada beberapa kebebasan untuk mengeksplorasi realitas sehingga membawa keragaman makna yang menekankan cara berpikir terhadap realitas yang ada, hal ini jelas dapat digunakan untuk melihat makna ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur. Untuk lebih jelasnya diuraikan makna-makna tersebut diuraikan di bawah ini.

6.2.1 Makna Keseimbangan Peran Domestik-Publik

Adanya kemajuan dan perkembangan masyarakat di segala bidang sehingga memobilisasi terjadinya berbagai tuntutan dengan dasar keadilan dan kesetaraan hak (gender) antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya perempuan Hindu hanya mengurus anak dan dapur (domestik) karena adanya perkembangan di segala bidang, seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadikan mereka untuk mengaktualisasikan diri berperan dalam ranah publik. Terjadinya ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima dalam ⁵ posisi manajer di Hotel Berbintang Lima yang ada di kawasan Desa Sanur, mendorong mereka untuk menuntut dan menginginkan keadilan dan persamaan peran dalam segala dimensi kesehariannya.

Menyadari diri mereka terpinggirkan dalam Hotel Berbintang Lima diakibatkan oleh bentuk dan faktor yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Hak mereka sebagai

perempuan Hindu telah terabaikan dan sama sekali tidak dihargai. Kehilangan hak mereka disebabkan oleh ketidakdisiplinan perempuan Hindu dalam memanfaatkan waktu dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, dalam persaingan perebutan posisi strategis di Hotel Berbintang Lima sebelumnya telah terkalahkan oleh kesibukan perempuan Hindu di urusan adat dan bermasyarakat. Hal ini dinilai oleh perempuan Hindu telah terjadi ketidakadilan dalam menghargai hak-hak ⁵ perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima di kawasan Desa Sanur. Semua peristiwa tersebut berujung pada hak perempuan Hindu menjadi termarjinalkan.

Menurut Triguna (2002: 16) ketidakadilan hak-hak perempuan Hindu, terjadi di beberapa sektor seperti di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Hak perempuan di sektor-sektor tersebut di atas terampas oleh laki-laki karena bentuk kekerabatan yang menganut sistem patrilineal. Sistem patrilineal dipahami sebagai posisi perempuan tersubordinat oleh kaum laki-laki, apapun kebijakan dalam rumah tangga dan di masyarakat tergantung pada laki-laki. Implementasi dari sistem kekerabatan yang lazim diterapkan di Bali, secara tidak langsung juga merampas hak-hak mereka sehingga posisi menjadi termarjinal.

Akibat dari semua peristiwa tersebut terjadi keterpinggiran perempuan Hindu dalam perebutan posisi strategis dalam Hotel Berbintang Lima. Hal ini mencerminkan bahwa hak-hak perempuan telah diperlakukan secara tidak adil. Resistensi perempuan Hindu karena kehilangan hak-hak mereka adalah wajar, mengingat dimensi sosial dan ekonomi padahal posisi jabatan manajer merupakan hal yang sangat diimpi-impikan. Namun kenyataannya perempuan Hindu sebagai karyawan acapkali tidak disiplin waktu karena keterlibatan di desa *adat* untuk mengikuti upacara. Tampak dalam gambar di bawah ini kesibukan perempuan Hindu dalam kegiatan mempersiapkan upacara (*yadnya*) "*ngayah*" dalam Persiapan Perangkat Upacara Dewa Yadnya di salah satu Pura di Sanur. Lihat Gambar 7.2 di bawah ini.



Gambar 7.2

“Nguopin di Sanggah Keluarga”

Dalam Kamini tahun 2010

Gambar di atas menunjukkan aktivitas perempuan Hindu dalam mempersiapkan piranti-piranti upacara. Hal tersebut secara normatif negara telah menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan di segala bidang (Suriani, 2003:41). Boleh dikatakan posisi perempuan diposisikan yang memiliki predikat sebagai orang yang paling bijak, mulia dan semua orang menghendaknya. Perempuan Hindu diposisikan memiliki predikat sebagai orang paling bijak dan mulia. Pernyataan ini sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Riniti (2010) di bawah ini.

“Bahwa dalam kultur/budaya masyarakat di Bali, telah terjadi perampasan hak perempuan Hindu, seperti contohnya dalam “paruman” banjar/desa. Dalam “paruman” tingkat desa pakraman kaum perempuan termarginalkan dengan tidak mengikutsertakan mereka. Hal ini terbukti dari adanya kenyataan bahwa hanya laki-

laki yang bisa hadir dalam rapat-rapat yang membuat keputusan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh kaum perempuan. Sebenarnya secara ideal isi dari keputusan yang diambil, maupun yang berhak mengambil keputusan terakhir sebaiknya dilakukan bersama-sama”.

Adanya hubungan antara pola pengambilan keputusan oleh laki-laki dalam keluarga *bhatih*, memperlihatkan adanya struktur kekuasaan dalam keluarga. Hal ini menyatakan bahwa pola pengambilan keputusan dalam suatu keluarga menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan suatu keluarga tersebut. Menurut Zoni (1990:44), istilah ini disebut sebagai material *power* dan *family* yang digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam perkawinan/keluarga.

Begitu pula menurut Cromwel dan Olson (1994: 5), ada beberapa konsep lain yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kekuasaan dalam keluarga termasuk juga konsep pengambilan keputusan antara lain adanya pengaruh, kontrol, wewenang, dan dominasi dalam keluarga itu sendiri. Begitu juga pendapat Cromwel dan Olson, Sosiolog Sfilios-Rotshild, mengatakan bahwa struktur kekuasaan dalam keluarga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan, yaitu siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga, bagaimana frekwensinya, dan menentukan dalam pembelian barang-barang. Pengambilan keputusan yang terkait dengan urusan dalam komunitas *banjar* dan desa adat masih tetap berada di tangan laki-laki (suami). Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan Hindu.

Menurut Karmini (2006), di desa kawasan Sanur ada langkah-langkah yang diambil oleh perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan dan membantu untuk menopang ekonomi keluarga. Mereka mengantisipasi dengan memakai jasa pembantu atau anggota keluarga luas (kakek, nenek, paman, kemenakan, bibi). Penggunaan jasa tersebut dibantu dengan memakai *pranata modern* untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam keluarga seperti pemakaian mesin cuci dan alat-alat dapur yang memakai listrik dengan teknologi *modern* sehingga dapat menghemat waktu. Anggota keluarga yang masih kecil,

yaitu anak-anak dan bayi ditinggal di tempat penitipan anak dan disekolahkan di kelompok bermain (*Play Group*).

Sikap perempuan seperti tersebut menunjukkan adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam keluarga sebagai dampak industri pariwisata. Secara substansial perubahan sikap bisa dilihat dalam, pola kerja dalam keluarga, pola pengambilan keputusan dalam keluarga, pola pengelolaan keuangan dan dalam pengadaan perangkat rumah tangga. Persoalan terkait dengan sikap perempuan Hindu dalam peran keluarga, seperti dalam pengambilan keputusan, pengolahan keuangan keluarga, dan mempunyai wewenang untuk menentukan penggunaan penghasilan keluarga tersebut. Contohnya menentukan barang-barang koleksi, seperti mebel air dan barang elektronik apa saja yang dibutuhkan. Dengan demikian, hak-hak perempuan Hindu sudah mulai dihargai. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari keterpinggiran perempuan dalam posisi strategis di ⁵ **Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur**.

Perempuan Hindu yang ada di kawasan wisata Desa Sanur, pada masa sekarang ikut berpartisipasi dalam menyangga perekonomian rumah tangga dengan menggunakan sebagian waktu untuk bekerja di Hotel Berbintang Lima. Logis dan realita perempuan Hindu di kawasan pariwisata Sanur ikut turun tangan dalam membantu pembiayaan rumah tangga, karena tuntutan ekonomi semakin tinggi, seperti untuk keperluan rumah tangga dan biaya hidup sehari-hari. Berbeda dengan kondisi perempuan sebelum berkembangnya Hotel Berbintang Lima Sanur, perempuan hanya berperan dalam pengelolaan hasil jerih payah suami. Seolah-olah perempuan Hindu secara kodrati dilahirkan hanya sebagai pelayan rumah tangga yang hanya mengurus anak dan kegiatan adat. Dengan adanya paradigma baru, perempuan ikut aktif menambah pendapatan keluarga dan suaminya pun tidak melihat istrinya bekerja di ranah publik (industri pariwisata). Sikap terbuka para suami yang membebaskan perempuan untuk bekerja di sektor publik ini karena faktor ekonomi sebagai

tambahan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, juga untuk membuka wawasan perempuan terhadap kehidupan lingkungan di sekitarnya.

Salah satu alasan lainnya perempuan Hindu bekerja dalam industri pariwisata adalah karena sudah mendapatkan izin dari suami. Ini berarti para suami sudah memberikan rasa hormat kepada istrinya untuk membantu mengembangkan karier dan bakatnya sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Menurut penuturan I Wayan Sudiana (45 tahun) Asisten Manajer Departemen Personalia Hotel Inna Grand Bali Beach, bahwa pengembangan karir sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Ungkapannya dipetik di bawah ini.

“Hampir di semua bagian departemen di Hotel Berbintang Lima ini ada perempuan Hindu. Namun komunitas perempuan Hindu hanya bisa menempati posisi sebagai karyawan biasa, belum bisa menempati posisi strategis seperti menjadi manajer. Keterpinggiran perempuan Hindu pada posisi strategis tersebut berdampak pada makin mengecilkan arti komunitas perempuan Hindu.”(Wawancara, 23 Agustus 2010).

Ungkapan tersebut di atas berkaitan dengan konsep pariwisata budaya, Perda No.3 Tahun 1991, Konsep Pengembangan Pariwisata Budaya Bali. Artinya, arah pengembangan industri pariwisata dengan cara lebih mengoptimalkan budaya Bali yang berakarakan Agama Hindu. Salah satu potensi yang dikembangkan, aktivitas adat yang para pelaku dan pelaksananya adalah kaum perempuan. Dengan demikian fenomena perempuan Hindu berperan dalam pengembangan pariwisata di kawasan Desa Sanur. Di sisi yang lain mereka terpinggirkan karena alasan tidak disiplin waktu, kebanyakan waktunya dihabiskan dalam kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan.

Perempuan Hindu sebagai karyawan acapkali tidak disiplin waktu karena keterlibatan di Desa Adat untuk mengikuti upacara. Tampak dalam gambar di bawah ini kesibukan perempuan Hindu dalam kegiatan mempersiapkan upacara (*yadnya*) “*ngayah*” dalam

Persiapan Perangkat Upacara Dewa Yadnya di Salah satu Pura di Sanur. Lihat pada Gambar 7.3 seperti di bawah ini.



Gambar 7.3

“Ngayah” dalam Persiapan Perangkat Upacara Dewa Yadnya
di salah satu Pura di Sanur
Dokumen: Karmini, tahun 2012

Gambar 7.3 di atas menunjukkan aktivitas perempuan Hindu dalam mempersiapkan piranti-piranti upacara. Terlibatnya kaum perempuan dalam berbagai aktivitas upacara *adat* ini merupakan ekspresi sikap mereka yang mementingkan keseimbangan sebagai warga (*pawongan*) di desa adat-nya.

Alasan lain mengapa perempuan bekerja di sektor publik, seperti di Hotel Berbintang Lima karena ingin meningkatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dan tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Terkait dengan persoalan tersebut, menurut Ibu Ida Ayu Made Metri (35 tahun) bahwa kenyataan inilah yang membuat kaum perempuan Hindu di kawasan pariwisata Sanur merasa terpanggil untuk mengakses ekonomi keluarga. Senada dengan penuturan Ni Nyoman Kurniasih (40 tahun) yang dikutip di bawah ini.

*“Tyang megae anggon ngentugin isin paon, apang prasida paon tiange makedus.
Taler apang nyidang milu merteinin keluarga, apang sing kadenene ngidih dogen”*

artinya: saya bekerja untuk tambahan isi dapur agar dapur saya tetap bisa ngepul, dan supaya tidak dikira hanya bisa minta pada suami saja”. (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Lebih lanjut juga dituturkan oleh IGA Inten Nuraini (37 tahun), staf *cook* Hotel Bali Hyaat, yang dikutip di bawah ini.

”Tiang megae anggen menyama braya (artinya: saya bekerja untuk sosial kekrabatan di masyarakat), Tiang megae anggen ngentugin yen ade rerainan, megae apang nyidayang pianak tiyange mesekolah artinya saya bekerja untuk tambahan penghasilan jika ada hari raya, agar anak saya bisa sekolah”. (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Penuturan IGA Inten Nuraini dan Ni Nyoman Kurniasih menunjukkan perempuan Hindu sangat peduli pada ekonomi dan kebutuhan pokok rumah tangga. Menurut data potensi Desa Sanur, seperti yang telah terjabarkan di atas, menunjukkan perempuan Hindu sebagian besar bekerja di sektor industri pariwisata. Dengan demikian adanya keterpinggiran perempuan Hindu dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima dan adanya konsep pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan perda, perempuan berperan dalam pelaksanaan budaya dan adat, pada masa mendatang komunitas perempuan Hindu makin mengecil ada di ranah posisi manajer di Hotel Berbintang Lima.

Adanya kemajuan dan perkembangan masyarakat di segala bidang sehingga memobilisasi terjadinya berbagai tuntutan, dengan dasar keadilan dan kesetaraan hak (gender) antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya perempuan Hindu hanya mengurus anak dan dapur (domestik) karena adanya perkembangan di segala bidang seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadikan mereka untuk mengaktualisasikan diri untuk berperan dalam

ranah publik. Terjadinya keterpinggiran perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima dalam posisi manajer di ⁵ Hotel Berbintang Lima yang ada di kawasan wisata Sanur, mendorong mereka untuk menuntut dan menginginkan keadilan dan persamaan peran dalam segala dimensi kesehariannya. Hal tersebut oleh Friedam (Cris Baker, 2008:26) dikatakan sebagai femanisme dalam usaha menaikkan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Menyadari diri mereka terpinggirkan dalam Hotel Berbintang Lima disebabkan oleh faktor-faktor yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Hak mereka sebagai perempuan Hindu telah terabaikan dan sama sekali tidak dihargai. Kehilangan hak mereka disebabkan oleh ketidak disiplinian perempuan Hindu dalam memanfaatkan waktu dalam Hotel Berbintang Lima. Oleh karena itu, dalam persaingan perebutan posisi strategis di Hotel Berbintang Lima, perempuan Hindu terpinggirkan karena tuntutan desa *adat*. Dalam arti di Hotel Berbintang Lima dituntut keprofesionalannya sedangkan di urusan desa *adat* harus *mekrame* istri posisi tersebut sehingga menyebabkan perempuan Hindu mengaktualisasikan diri.

Senada dengan pendapat Triguna (2002:16) bahwa ketidakadilan hak-hak perempuan Hindu terjadi di beberapa sektor, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ketidakadilan dalam keluarga seperti hak perempuan di sektor-sektor tersebut di atas terampas oleh sistem patrilineal. Sistem patrilineal dipahami sebagai posisi perempuan ter subordinat oleh kaum laki-laki. Semua kebijakan dalam rumah tangga dan di masyarakat tergantung pada laki-laki. Implementasi dari sistem kekerabatan yang lazim diterapkan di Pulau Bali, secara tidak langsung juga merampas hak-hak mereka sehingga posisi perempuan Hindu menjadi termarginal.

Keterpinggiran perempuan Hindu dalam perebutan posisi strategis dalam Hotel Berbintang Lima mencerminkan bahwa hak-hak perempuan terjepit oleh dua kekuatan yaitu di Hotel Berbintang Lima dan di desa *adat*. Resistensi perempuan Hindu dengan

mempersoalkan kehilangan hak-hak mereka adalah wajar, mengingat dalam dimensi sosial dan ekonomi, posisi jabatan manajer merupakan hal yang sangat diimpi-impikan.

Resistensi perempuan Hindu dengan persoalan kehilangan hak dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Secara normatif, negara telah menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan di segala bidang (Suriani, 2003:41). Boleh dikatakan posisi perempuan diposisikan sebagai orang yang memiliki predikat sebagai orang yang paling bijak, mulia dan semua orang menghendaknya.

Dalam kultur/budaya masyarakat di Pulau Bali telah terjadi perampasan hak perempuan Hindu, misalnya dalam "*paruman*" banjar/desa dimana dalam "*paruman*" tingkat Desa Pakraman, kaum perempuan termarginalkan dengan tidak mengikutsertakan mereka. Hal ini terbukti dengan adanya kenyataan bahwa hanya laki-laki yang bisa hadir di rapat-rapat (*sangkepan*) yang membuat keputusan, walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh kaum perempuan. Sebenarnya secara ideal isi keputusan yang diambil dan yang berhak mengambil keputusan terakhir sebaiknya dilakukan bersama-sama. Misalnya untuk menentukan pekerjaan dalam ranah publik seperti yang ditulis oleh Luh Riniti, sebaiknya diputuskan bersama (Partisipasi Perempuan Bali: 2010).

Adanya pola hubungan dan pola pengambilan keputusan oleh laki-laki dalam keluarga *bhatih*, memperlihatkan adanya struktur kekuasaan dalam keluarga. Hal ini menyatakan bahwa pola pengambilan keputusan dalam suatu keluarga menggambarkan bagaimana struktur/pola kekuasaan suatu keluarga tersebut. Menurut Zoni (1990 :44), istilah ini disebut sebagai material *power* dan *family* yang digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam perkawinan/keluarga.

Berbeda dengan konsep berpikir Cromwel dan Olson (1994:5) ada beberapa konsep lain yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kekuasaan dalam keluarga termasuk juga konsep pengambilan keputusan, yaitu adanya pengaruh, kontrol, wewenang dan dominasi dalam keluarga itu sendiri. Lebih lanjut konsep pemikiran Cromwel dan Olson, sosiolog Sfilios-Rotshild (1994:6) mengatakan bahwa struktur kekuasaan dalam keluarga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga, bagaimana frekwensinya, dan bagaimana penentuan pembelian barang-barang. Pengambilan keputusan yang terkait dengan urusan dalam komunitas *Banjar* dan Desa *Adat* masih tetap berada di tangan laki-laki (suami). Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima.

Berbeda dengan yang dikatakan dalam hasil penelitian Karmini (2006). Dikatakannya di desa kawasan Sanur ada langkah-langkah yang diambil oleh perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan dan membantu menopang ekonomi keluarga. Mereka mengantisipasi dengan memakai jasa pembantu atau anggota keluarga luas (kakek, nenek, paman, kemenakan, bibi). Penggunaan jasa tersebut dibantu dengan memakai *pranata modern* untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam keluarga seperti pemakaian mesin cuci dan alat-alat dapur yang memakai listrik dengan teknologi *modern* sehingga dapat menghemat waktu. Untuk anggota keluarga yang masih kecil yaitu anak-anak dan bayi, mereka titip di tempat penitipan anak atau di kelompok bermain (*Play Group*).

Fenomena sikap perempuan seperti tersebut menunjukkan adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam keluarga sebagai dampak bekerja di Hotel Berbintang Lima. Secara substansial perubahan sikap bisa dilihat dalam pola kerja dalam keluarga, pola pengambilan keputusan dalam keluarga, pola pengelolaan keuangan, dan dalam pengadaan perangkat rumah tangga. Persoalan terkait dengan sikap perempuan dalam peran keluarga, seperti dalam pengambilan keputusan, pengolahan keuangan keluarga, dan mempunyai

wewenang untuk menentukan penggunaan penghasilan keluarga tersebut. Contohnya menentukan barang-barang koleksi seperti mebelair, dan barang elektronik apa saja yang dibutuhkan. Dengan demikian, hak-hak ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima sudah mulai dihargai hal tersebut merupakan dampak dari keterpinggiran perempuan dalam posisi strategis di industri pariwisata di kawasan Sanur.

Perempuan Hindu bekerja di kawasan industri pariwisata Sanur merupakan tuntutan hidup dalam membangun rumah tangga. Dalam pemahaman perempuan Hindu di desa pakraman Sanur, untuk membangun kehidupan rumah tangga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Untuk itulah perempuan Hindu bekerja di Hotel Berbintang Lima sesuai dengan *swadarma* sebagai seorang ibu dalam menjalankan *karmayoga* agar dapat menunjang ekonomi keluarga. Walaupun bekerja dalam usaha membantu ekonomi keluarga, pekerjaan domestik seperti mendidik anak, mendampingi suami, sebagai ibu rumah tangga dan penerus keturunan, tidak ditinggalkan. Dalam penelitian ditemukan fenomena-fenomena ¹perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan pariwisata Sanur, yaitu telah terjadi perubahan atau pergeseran pola kerja dalam rumah tangga. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Hoovelt (dalam Sojogyo, 19990:60) bahwa setiap masyarakat termasuk perempuan mengalami perubahan lambat atau cepat. ¹Perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan pariwisata Sanur mengungkapkan alasan utama mereka bekerja di Hotel Berbintang Lima adalah untuk menambah penghasilan keluarga, menghilangkan kejenuhan dari pekerjaan rumah tangga, dan untuk mengaktulisasi diri. Selain itu, mereka di dukung oleh tempat tinggal yang dekat dengan lokasi pekerjaan dan mendapat izin dari suami.

Eksistensi perempuan Hindu yang bekerja di industri pariwisata lebih banyak mereka lakukan di hotel, restoran dan toko cendramata, karena jenis pekerjaan ini dianggap tidak mengganggu integritas keluarga dan sebagai anggota komunitas *Banjar/Desa Adat*.

Contohnya, bekerja di toko cendramata, menjadi pegawai hotel, restoran mereka bisa mengatur waktu secara fleksibel dengan rekan kerjanya. Dengan demikian kegiatan adat dan kewajiban sebagai *krama istri* di *desa adatnya*, seperti “*ngowopin*” “*ngayah*” tetap masih bisa dilakukan. Nilai sebagai reward eksistensi perempuan Hindu dalam aktivitas kegiatan *adat/banjar* adalah julukan perempuan yang rajin “*bise*” bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep Hoggart dan Raymond (Chris Barker, 2008:16) yang mengatakan bahwa kelaziman mengkonstruksi praktik bermakna disebut sebagai kulturalisme.

Sebaliknya perempuan yang jarang beraktivitas dalam kegiatan adat, malas *ngayahang* serta *ngopin*, keberadaannya termarginalkan dalam bermasyarakat. Selain itu, eksistensi perempuan Hindu atau disebut sebagai *krama istri* di *Banjar/Desa Adat* identik dengan upacara-upacara keagamaan karena peran perempuan cukup dominan, seperti dalam upacara *panca yadnya*.

Tidak hanya itu tetapi juga karakteristik kehidupan perempuan Hindu terpolarisasi dalam kehidupan desa *pakraman*, mulai dari mengatur urusan keluarga, bermasyarakat sampai persoalan adat, dan “*pesuka-dukaan*”. Hubungan sosial antar ² anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Adapun hubungan dalam bermasyarakat di bawah payung desa *pakraman* di atur dengan *awig-awig* sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jalinan antara anggota keluarga, masyarakat dijiwai oleh suasana kasih sayang, rasa tanggung jawab bersama yang dibingkai dalam ranah sosial.

Perempuan Hindu dalam berhubungan adat dan sosial kemasyarakatan di bawah payung Desa *Pakraman* yang diatur dengan *awig-awig* sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Keterpinggiran ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan industri pariwisata di Sanur, khususnya dalam posisi manajer berdampak pada kehidupan sosial. Perempuan Hindu

masih dinilai lemah, tidak memiliki kemampuan dan tidak dipercaya untuk memegang jabatan strategis dalam Hotel Berbintang Lima. Hal ini menandakan belum ada kepercayaan terhadap perempuan Hindu dalam aktivitas masyarakat global. Ketidakpercayaan perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima yang dipahami sebagai aktivitas masyarakat global, secara sosial memberikan penilaian yang rendah dibandingkan dengan perempuan Non-Hindu. Oleh karena kelompok perempuan Non-Hindu, atau disebut sebagai kaum urban selalu menang berkompetisi dalam perebutan posisi strategis sebagai manajer di Hotel Berbintang Lima pada industri pariwisata di desa kawasan Sanur. Hal ini cukup memperhatikan, perempuan Hindu, sebagai tuan rumah bisa dipinggirkan oleh perempuan pendatang seperti yang dituturkan oleh Windia (57 tahun) di bawah ini.

“Perempuan Hindu yang selalu disibukkan oleh urusan adat, persiapan upacara agama, yang bangga dengan segala pujian, oleh karena rajin di adat, *anteng ngowopin, bise menyamebraye*, sampai lupa pekerjaan-pekerjaan yang strategis di Hotel Berbintang Lima diisi oleh perempuan urban. Pada hal jika dilihat kemampuan dan kecerdasannya tidak kalah dengan kaum perempuan urban tersebut.

“*Kenkenan luh-luh Hindu di Bali, ungkulan ngurusan adat, nyiapan upacara, keluarge, laker nyidang menang dadi manajer di hotel. Yan andiang care nasi tulene mebe guling sube ade di piringe jeg juange ben luh-luh ling di luar desa*” Artinya: ‘Perempuan Hindu di kawasan wisata sanur bekatat di adat dan sosial kemasyarakatan kalau diumpamakan kita sudah berbuat banyak sudah ada hasil orang lain akan menikmati, perempuan Hindu kawasan sanur bisa menari tetapi orang lain menikmati’ (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kekalahan berkompetisi perempuan Hindu dalam perebutan posisi yang strategis, bukan disebabkan karena kalah

cerdas, dan kurang keterampilan/skill, tetapi kekalahan itu disebabkan oleh karena perempuan Hindu terlalu terbelenggu oleh kepentingan adat dan kegiatan sosial. Oleh Bourdeieu (dalam Takwin, 2003:114) hal-hal semacam tersebut yang dilakukan oleh perempuan Hindu di Sanur, seperti umumnya yang terjadi di desa pakraman di Pulau Bali, dikatakan sebagai konsep *habitus*, yang berurusan dengan ranah sosial.

Dengan demikian keterpinggiran perempuan Hindu, berdampak sosial jika dikaitkan dengan konsep *habitus* tersebut. Dan hal itu akan tetap dan terus terpinggirkan dalam posisi strategis di industri pariwisata di desa Sanur. Lebih-lebih ditambahkan dengan aturan-aturan yang biasa berlaku di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, seperti aturan yang tidak tertulis atau yang disebut "*perareman*". Perempuan sebagai objek dan subjek lebih terbelenggu lagi karena adanya sikap primordial sebagai restensi budaya masyarakat global.

Keterpinggiran perempuan Hindu yang gagal menjadi *Top Manager* di Hotel Berbintang Lima memiliki makna untuk keseimbangan antara peran mereka dalam mencari penghasilan di luar rumah dengan peran mereka di desa *adat* yang menjunjung tinggi *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan penjabaran konkret dari implementasi nilai ajaran Agama Hindu di masyarakat. Pengamalan ajaran Agama Hindu di masyarakat untuk mengatur akhlak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, berbudaya, dan mencintai hidup yang harmonis adalah usaha mencapai kesejahteraan hidup (Ardana, dkk,1983:26). Falsafah dari keharmonisan tersebut di atas adalah untuk mencapai kesejahteraan, dengan menjaga keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Falsafah nilai-nilai ajaran *Tri Hita Karana* yang berintikan nilai keseimbangan keharmonisan dan hubungan yang integral antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam lingkungan. Oleh masyarakat di Bali falsafah dari *Tri Hita Karana* ini menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, seperti kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* di Sanur.

Falsafah nilai-nilai ajaran *Tri Hita Karana* berintikan ajaran nilai keseimbangan. Pelaksanaan ajaran Agama Hindu seperti telah diuraikan di atas, berjalan secara rutinitas tanpa ada putusnya, dan perempuan Hindu memegang peranan dalam menyukseskan pekerjaan sosial religius tersebut. Sudah bisa digambarkan bagaimana sulitnya ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur untuk mengatur waktu. Dengan demikian perempuan Hindu dalam merebut posisi untuk menduduki jabatan manajer di Hotel Berbintang Lima sudah tidak memungkinkan atau terpinggirkan.

Keterpinggiran perempuan Hindu seperti yang dimaksudkan di atas berdampak pada semaraknya kehidupan budaya, seperti tampak pada semakin intensifnya kegiatan dalam pelaksanaan upacara *panca yadnya*. Tanpa disadari pemerintah dalam kebijakan untuk mengembangkan pariwisata budaya, secara politis telah melakukan penekanan dan menghegemoni secara tidak langsung keberadaan perempuan Hindu.

Kesuksesan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata budaya di kawasan pariwisata di Sanur tampak dalam pembangunan fisik hotel, restoran, dan tempat-tempat lainnya yang ada dalam lingkungan kawasan pariwisata Sanur lebih mencerminkan budaya Bali. Begitu juga dalam jasa-jasa pelayanan pariwisata, tercermin sikap, etika yang sangat kental dengan nuansa Bali.

Di satu sisi peluang perempuan Hindu dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, seharusnya tidak menyurutkan peran perjuangan untuk mencapai kemajuan, oleh Brooks disebut sebagai kelompok postfemenisme (2009:43). Di sisi lain kenyataannya di desa *adat* dalam globalisasi tidak melonggarkan norma atau *adat*. Konsekwensinya, perempuan Hindu pada masa mendatang tetap dalam posisi terpinggirkan. Bilamana di desa *adat* tetap adanya budaya “*demen ajum*” (suka dipuji), jika tidak dikritisi, maka pada masa mendatang perempuan Hindu di desa kawasan Sanur lebih terpinggirkan di tengah-tengah kemajuan industri pariwisata yang semakin mengglobal.

Pendapat Brooks tentang perilaku perempuan Hindu Bali yang sudah punya strategi, supaya antara tugas domestik (adat sosial kemasyarakatan) dengan tugas (publik) di industri pariwisata dapat disinergikan. Ideologi postfeminisme menurut Brooks perempuan Hindu dapat menyiasati antara tugas domestik dan tugas publik disinergikan, tetapi kenyataannya perempuan Hindu belum dapat menjalankan ideologi tersebut. Fenomena ini bertolak belakang dengan pendapat Hoovelt (dalam Sayoga, 1990:60). Menurut Sayoga perempuan yang berhasil adalah (1) pada perubahan pola kerja dalam keluarga, (2) perubahan pola pengambilan keputusan dalam keluarga dan (3) perubahan pola pengelolaan keuangan/penghasilan keluarga. Idealnya perubahan pola kerja keluarga dalam hal pembagian tugas rumah tangga tempat peran suami dan anak-anak serta pembantu ikut bergotong royong membantu ibu untuk mengurus pekerjaan sehari-hari di rumah. Perubahan pola pengambilan keputusan dalam keluarga terjadi karena kaum pria sudah memberikan kesempatan pada kaum istri untuk terlibat dalam hal pengambilan keputusan keluarga terbatas pada masalah tertentu saja. Urusan komunitas *Banjar* dan *Desa Adat* yang masih tetap berada di tangan suami.

6.2.3 Makna Kemandirian/Kesejahteraan

Walaupun kaum perempuan Hindu terpinggirkan tidak menempati posisi sebagai *Top Manager*, peran mereka sebagai pekerja di Hotel Berbintang Lima telah memberikan makna bagi kemandirian dan kesejahteraan keluarganya. Kaum perempuan Hindu Bali ingin lebih mandiri, tidak terlalu tergantung dengan suami mereka. Menurut Karmini (2006) perempuan yang bekerja di luar rumah di desa kawasan Sanur bertujuan untuk menambah penghasilan dan membantu untuk menopang kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga.

Karena tidak bisa menangani sepenuhnya pekerjaan rumah tangga, mereka mengantisipasi dengan memakai jasa pembantu atau anggota keluarga luas (kakek, nenek, paman, kemenakan, bibi). Penggunaan jasa tersebut dibantu dengan memakai *pranata*

modern untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam keluarga seperti pemakaian mesin cuci dan alat-alat dapur yang memakai listrik dengan teknologi *modern* sehingga dapat menghemat waktu. Untuk anggota keluarga yang masih kecil yaitu anak-anak dan bayi mereka titip di tempat penitipan anak, atau bahkan menyekolahkan mereka di kelompok bermain (*Play Group*).

Sikap perempuan seperti tersebut menunjukkan adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam keluarga sebagai dampak industri pariwisata. Secara substansial perubahan sikap bisa dilihat dalam pola kerja dalam keluarga, pola pengambilan keputusan dalam keluarga, pola pengelolaan keuangan, dan dalam pengadaan perangkat rumah tangga. Persoalan terkait dengan sikap perempuan Hindu dalam peran keluarga, seperti dalam pengambilan keputusan, pengolahan keuangan keluarga dan mempunyai wewenang untuk menentukan penggunaan penghasilan keluarga tersebut. Contohnya menentukan barang-barang koleksi, seperti mebel air dan barang elektronik apa saja yang dibutuhkan. Dengan demikian, hak-hak perempuan Hindu sudah mulai dihargai hal tersebut diakibatkan oleh dampak keterpinggiran perempuan dalam posisi strategis di ⁵ Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur.

Perempuan Hindu yang ada di kawasan Desa Sanur, pada masa sekarang ikut berpartisipasi dalam menyangga perekonomian rumah tangga dengan memakai sebagian waktunya untuk bekerja di Hotel Berbintang Lima. Logis dan realita perempuan Hindu di kawasan Sanur ikut turun tangan dalam membantu pembiayaan rumah tangga, oleh karena tuntutan ekonomi semakin tinggi, seperti untuk keperluan rumah tangga dan biaya hidup sehari-hari.

Berbeda dengan kondisi sebelum berkembangnya Hotel Berbintang Lima di Sanur, perempuan hanya berperan dalam pengelolaan hasil jerih payah suami. Seolah-olah perempuan Hindu secara kodrati dilahirkan hanya sebagai pelayan rumah tangga yang hanya

mengurus anak dan kegiatan adat. Dengan adanya paradigma baru, perempuan ikut aktif menambah pendapatan keluarga dan suaminya pun tidak keberatan melihatnya bekerja di ranah publik (industri pariwisata). Sikap terbuka para suami yang membebaskan perempuan untuk bekerja di sektor publik ini karena faktor ekonomi sebagai tambahan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, juga untuk membuka wawasan perempuan terhadap kehidupan lingkungan di sekitarnya.

Salah satu alasan lainya perempuan Hindu bekerja dalam industri pariwisata adalah karena sudah mendapatkan izin dari suami. Ini berarti para suami sudah memberikan rasa hormat kepada istrinya untuk membantu mengembangkan karier dan bakatnya sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Dalam konteks tersebut di atas menurut penuturan I Wayan Sudiana (45 tahun) Asisten Manajer Departemen Personalia Hotel Inna Grand Bali Beach, dalam pengembangan karir sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan yang dimiliki ungapannya sebagai berikut.

“Hampir di semua bagian departemen di Hotel Berbintang Lima ini ada perempuan Hindu. Namun komunitas perempuan Hindu hanya bisa menempati posisi sebagai karyawan biasa, belum bisa menempati posisi strategis seperti menjadi manajer. Keterpinggiran perempuan Hindu dalam posisi strategis tersebut berdampak pada makin mengecilkan arti komunitas perempuan Hindu.”(Wawancara, 23 Agustus 2010).

Mencermati dari ungkapan tersebut di atas yaitu terkait dengan konsep pariwisata budaya. Perda No.3 Tahun 1991 yaitu tentang Konsep Pengembangan Pariwisata Budaya Bali yang artinya, arah pengembangan industri pariwisata dengan cara lebih mengoptimalkan budaya Bali yang berakarkan Agama Hindu. Salah satu potensi yang dikembangkan yaitu aktivitas *adat*, para pelaku dan pelaksananya kaum perempuan. Dengan demikian, fenomena perempuan Hindu berperan dalam pengembangan pariwisata di kawasan Desa Sanur. Di sisi

lain, mereka terpinggirkan karena alasan tidak disiplin waktu, kebanyakan waktunya dihabiskan dalam kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan.

Alasan lain perempuan bekerja di sektor publik seperti di Hotel Berbintang Lima karena ingin meningkatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dan tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Terkait dengan persoalan tersebut menurut Ibu Ida Ayu Made Metri (35 tahun) bahwa kenyataan inilah yang membuat kaum perempuan Hindu di kawasan desa Sanur merasa terpanggil untuk mengakses ekonomi keluarga. Senada dengan penuturan Ni Nyoman Kurniasih (40 tahun) yang dikutip berikut ini.

“Tiang megae anggon ngentugin isin paon, apang prasida paon tiange makedus. Taler apang nyidang milu merteinin keluarga, apang sing kadenene ngidih dogen” artinya: ‘Saya bekerja untuk tambahan isi dapur agar dapur saya tetap bisa ngepul, dan supaya tidak dikira hanya bisa minta pada suami saja’ (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Demikian juga IGA Inten Nuraini (37 tahun), Staf Cook Hotel Bali Hyaat mengatakan seperti di bawah ini.

“Tiang megae anggen menyama braya (artinya: saya bekerja untuk sosial kekrabatan di masyarakat), Tiang megae anggen ngentugin yen ade rerainan, megae apang nyidayang pianak tiyange mesekolah” artinya: ‘ Saya bekerja untuk tambahan penghasilan jika ada hari raya, agar anak saya bisa sekolah’ (Wawancara, 23 Agustus 2012)

Penuturan IGA Inten Nuraini dan Ni Nyoman Kurniasih menunjukkan perempuan Hindu sangat peduli pada ekonomi dan kebutuhan pokok rumah tangga. Data potensi Desa Sanur seperti yang telah terjabarkan di atas, menunjukkan perempuan Hindu sebagian besar bekerja di sektor industri pariwisata. Dengan demikian, adanya keterpinggiran perempuan

Hindu dalam posisi manajer di Hotel Berbintang Lima dan adanya konsep pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan Perda, perempuan berperan dalam pelaksanaan budaya dan adat, pada masa mendatang komunitas perempuan Hindu makin mengecil ada di ranah posisi manajer di Hotel Berbintang Lima.

Adanya kemajuan dan perkembangan masyarakat di segala bidang sehingga memobilisasi terjadinya berbagai tuntutan, dengan dasar keadilan dan kesetaraan hak (*gender*) antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, perempuan Hindu hanya mengurus anak dan dapur (*domestik*). Adanya perkembangan di segala bidang seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadikan mereka mengaktualisasikan diri untuk berperan dalam ranah publik. Terjadinya keterpinggiran ⁵ perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima yang ada di kawasan Desa Sanur, mendorong mereka untuk menuntut dan menginginkan keadilan dan persamaan peran dalam segala dimensi kesehariannya. Hal tersebut oleh Friedam (Cris Baker, 2008:26) dikatakan sebagai *femenisme* dalam usaha menaikkan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Industri pariwisata telah banyak memberikan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi perempuan Hindu. Dengan berkembangnya industri pariwisata perempuan Hindu mampu membantu keperluan rumah tangga dan membantu suami dalam menyangga kehidupan rumah tangga. Jika pariwisata tidak seperti sekarang tidak mungkin mereka bisa membeli barang-barang berharga. Pandangan seperti tersebut juga disyukuri oleh Ibu Ida Ayu Made Metri (35 tahun), seorang karyawan Hotel Berbintang Lima Hotel Sanur Beach di kawasan Sanur. Dengan bekerja di hotel mereka bisa membantu suami dalam menyangga kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya sampai di perguruan tinggi. Senada dengan penuturan Ni Nyoman Kurniasih (40 tahun) yang dikutip berikut ini.

“Titiang sing je tain ker ngelah keneh dadi manajer, nunas ice uling pidan bisa dadi pegawai di hotel tiang sube demen, pang ade ben tiang megae anggon ngentugin isin

paon, apang prasida paon tiange makedus. Taler apang nyidang milu mertenin keluarga, pang sing kadenange ngidih dogen” Artinya:“Saya bekerja tidak ambisi menjadi manajer dengan sebagai pegawai saja sudah cukup agar dalam kegiatan adat dan sosial masyarakat tidak terganggu juga keluarga saya agar tidak *kesepakang* oleh masyarakat, bisa bekerja di Hotel Berbintang Lima ini untuk bisa menutupi kebutuhan dapur, bisa ikut mengurus keluarga, agar tidak dibilang hanya bisa minta saja sama suami’ (Wawancara, 14 agustus 2010).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan Hindu tidak ada yang ambisi untuk merebut posisi manajer, yang penting bisa bekerja di hotel, untuk tambahan isi dapur agar dapur tetap bisa ngepul, dan supaya tidak dikira hanya bisa minta pada suami. Hal tersebut oleh Saussure (Chris Barker, 2008: 17) dikatakan sebagai *strukturalisme*, yakni membangun makna sebagai struktur, regulasi berada di luar individu. Pandangan lain juga mengatakan bahwa dengan bekerja kita dapat mencapai suatu kehormatan di dalam keluarga dan masyarakat.

6.2.4 Makna Penguatan Label Luh Luwih

Pekerja perempuan Hindu terpinggirkan dari struktur jabatan *top* manajer dan hanya menjadi karyawan atau staf biasa di Hotel Berbintang Lima. Namun perannya ini dinilai sebagai sebuah kemandirian kaumnya yang mengantarkannya meraih sebutan luh luwih (perempuan berguna). Peran publiknya, yakni bekerja di luar rumah dimotivasi dengan keinginan untuk menyempurnakan peran domestiknya di rumah tangganya serta peran adat di masyarakat banjarnya.

Secara filosofis perempuan Hindu mampu memahami sekaligus melakukan pekerjaan-pekerjaan publik karena termotivasi oleh obsesi menjadi perempuan yang ideal

(*Luh luwih*). Predikat *Luh luwih* ini merupakan idaman semua perempuan Hindu, Kondisi inilah yang menjadi suatu motivasi internal bagi seorang perempuan Hindu untuk siap-siap memasuki dunia kerja khususnya di sektor pariwisata.

Semakin kompleksnya peran perempuan Hindu maka semakin besar peluang eksisnya untuk menjadi *role strain* dan di sisi lain, dituntut dalam konteks penilaian ideal "*luh luwih* dan merasa "*Jengah*" kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini berarti perempuan yang dapat secara sempurna melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan peran lain dalam lingkup komunitas, yakni sebagai *krama istri* di desa serta peran sebagai karyawan/pekerja pencari nafkah. Jadi, semua peran tersebut tidak bisa terlepas dari sistem budaya yang berlaku.

Masalah ¹ perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima merupakan eksis yang terkait dengan masyarakat di desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Perempuan selalu menggunakan kesempatan kerja di Hotel Berbintang Lima hal ini karena desa Sanur sebagai daerah wisata yang bertaraf Internasional. Uraian terkait dengan aktivitas perempuan dalam kegiatan-kegiatan di desa kawasan Sanur, seperti tersebut di atas, makna secara filosofisnya menunjukkan betapa berperannya perempuan dalam adat, agama dan tradisi. Seolah-olah tanpa perempuan, kegiatan dan aktifitas adat akan tidak berjalan dengan baik, begitu pentingnya peran perempuan Hindu. Sikap perempuan tersebut sama dengan yang dituturkan oleh Suardiana (45 Tahun) Asisten di Bagian Personalia Hotel Inna Grand Bali Beach, di bawah ini.

"Faktor penyebab perempuan Hindu tidak ada menempati posisi strategis dalam manajemen hotel, oleh sikap kuatnya adat sendiri. Begitu menonjol sikap fanatisme perempuan pada adat, etnisitas, kelokalan yang mengarah ke ekosentris ketika berhadapan dengan dunia global, yang disebut sebagai sikap primordialisme" (Wawancara, 22 Agustus 2012).

Menurut penuturan tersebut di atas bahwa perempuan Hindu tidak ada yang menempati posisi strategis dalam manajemen hotel karena kuatnya rasa etnisitas, adat dan

tidak ada tuntutan karena mereka merasa ada di wilayahnya sendiri. Sikap primordialisme yang mengarah pada pola masyarakat dikelompokkan ke dalam dua etnosentris, (1) Etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain, (2) Etnosentris fleksibel yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga dari sudut budaya orang lain. Dengan demikian, tidak ada perlakuan subjektif, (<http://google.Primordialisme>).

Dengan bekerja sebagai karyawan Hotel Berbintang Lima, posisi tawar kaum perempuan Hindu di dalam keluarga menjadi semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mereka memiliki peranan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengaturan keuangan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan prinsip idealisme Hoovelt (dalam Sayoga, 1990: 62) bahwa perubahan pola pengambilan keputusan pengelolaan keuangan/penghasilan keluarga sudah sebagian besar melibatkan kaum perempuan seperti dalam bidang konsumsi, biaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Rosita (35 tahun), mantan Manajer Operasional Bali Hyatt Hotel yang sekarang pindah ke Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, mengatakan seperti di bawah ini.

“Saya bekerja sudah berpindah pindah dari satu hotel yang bisa menjanjikan penghasilan yang lebih besar saya ambil untuk bisa menutupi semua keperluan rumah tangga, biaya sekolah, kesehatan dengan demikian saya menggunakan pembantu atau keluarga besar untuk bisa melaksanakan pekerjaan di ranah domestik seperti *ngayahang* di banjar adat, suka duka di masyarakat” (Wawancara, 23 Agustus 2010).

Penuturan di atas menggambarkan bahwa dengan bekerja di Hotel Berbintang Lima bisa terpenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga tidak menggantungkan diri pada suami. Dengan demikian, dampaknya dalam keluarga luas/ *dadia* dan sistem kekerabatan bisa diatasi dengan menggunakan bentuk adaptasi sosiokultural yang bersifat sementara dan lokal (Geertz, 1981: 80).

7.3 Temuan Penelitian (*Novelty*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat dikemukakan yang dinyatakan sebagai temuan penelitian (novelty). Dalam hal ini yang dinyatakan sebagai temuan diuraikan sebagai berikut.

- 1) Dalam penelitian ini ditemukan keterpinggiran perempuan Hindu karena nihilnya perempuan Hindu menjadi *Top* Manajer akibat pengembangan kapasitas diri yang terabaikan, minimnya keterwakilan dalam serikat pekerja, penerimaan gaji dan insentif yang kurang optimal. Hegemoni perempuan Hindu dalam sektor pariwisata khususnya sebagai karyawan Hotel Berbintang Lima, secara kognitif perempuan Hindu bisa mempunyai strategi mengatasi di *adat* dengan melimpahkan pekerjaan kepada keluarga besar. Ditemukan pula keterpinggiran perempuan Hindu dalam bentuk keterpinggiran posisi jabatan manajer yang disebabkan oleh kuatnya cengkraman kegiatan *adat* dan budaya. Selain itu, juga ditemukan kurangnya pembinaan dari lembaga terkait yang menyebabkan bentuk keterpinggiran dikarenakan tidak adanya pemahaman yang mendalam tentang Hotel Berbintang Lima dan membangun jaringan relasi.
- 2) Ditemukan kuatnya hegemoni tingkat global, desa *adat* dan keluarga menyebabkan perempuan Hindu menyerah dalam keadaan pasrah, yang penting bisa bekerja yang dianggap sebagai *yadnya* dan *swadarmaning* sebagai umat manusia, kurangnya membangun jaringan relasi yang memicu sikap primordial.
- 3) Ditemukan keterpinggiran ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima sering merasakan tidak mampu memanfaatkan haknya secara maksimal, oleh karena adanya kekuatan yang tarik-menarik antara *adat* dan keluarga dengan status pekerjaan di Hotel Berbintang Lima.
- 4) Ditemukan makna keseimbangan di ranah domestik dengan publik, kemandirian ekonomi, dan prestise pencitraan. Ditemukan bahwa perempuan Hindu bekerja di Hotel Berbintang Lima dalam memaknai peran gandanya (domestik dan publik) tetap

memegang prinsip keseimbangan dengan memberi prioritas yang setara antara peranannya sebagai penyangga ekonomi keluarga sambil menjaga citranya ditempat kerja.

Perempuan Hindu disatu sisi di Hotel Berbintang Lima diperlukan perempuan karir yang selalu diberdayakan, tetapi di sisi lain, pihak Desa *Adat* mengikat perempuan Hindu sehingga perempuan Hindu tersubordinalkan. Selain itu, secara filosofis menunjukkan betapa berperannya perempuan Hindu dalam *adat*, agama, dan tradisi di desa kawasan Sanur. Tanpa perempuan Hindu, kegiatan dan aktivitas adat dan budaya tidak berjalan dengan baik.

Refleksi

Berdasarkan pengungkapan permasalahan keterpinggiran ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima di kawasan Desa Sanur, Denpasar, Provinsi Bali dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat direfleksikan. *Pertama*, keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima sebagai gambaran bentuk kegagalan Pemerintah Daerah dalam usaha mengembangkan pariwisata budaya khususnya di kawasan Sanur, Kota Denpasar. Keterkaitan dengan kegagalan tersebut, ke depannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah yang lebih substansial, melalui lokakarya, pelatihan, bagi kelompok komunitas pekerja perempuan Hindu, di lingkungan kawasan Sanur, terus menerus memberikan pelatihan dan mendorong kerjasama antara perempuan Hindu dengan industri wisata dalam usaha membangun relasi. Hal tersebut bertujuan: (1) meningkatkan pemahaman tentang pembangunan industri pariwisata agar tidak lagi terpinggirkan, atau kalah dalam perebutan posisi manajer, karena ada kelemahan dalam internal perempuan Hindu; (2) berbuat adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan Hindu; (3) membangun jaringan relasi industri pariwisata yang lebih mengglobal.

¹ *Kedua*, keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur merupakan posisi suatu entitas yang disebabkan oleh faktor internal, seperti adat dan

budaya masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlakuan adat dan budaya terhadap eksistensi perempuan Hindu lebih difleksibelkan. Dengan demikian mereka tidak lagi terpasung atau terbelenggu oleh rutinitas adat dan budaya serta ⁵ bisa bersaing dalam posisi manajemen Hotel Berbintang Lima. Selain itu perlu diberikan pemahaman pada perempuan Hindu, bahwa untuk menduduki posisi manajer, harus disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai waktu yang penuh. Selanjutnya untuk menyikapi hal itu pada masa mendatang perempuan Hindu perlu dibekali kedisiplinan waktu, tanggung jawab dan bisa mengatur kegiatan adat dan budayanya. Perkembangan pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Sanur, memberi ruang yang luas dan menjanjikan kesejahteraan hidup perempuan Hindu. Oleh karena itu, representasi jaringan relasi perempuan Hindu merupakan hal yang harus dibangun dan realistis.

Ketiga, komunitas perempuan Hindu sebagai kelompok mayoritas di lingkungan kawasan Sanur, yang berpotensi menumbuhkan sikap primordial yang dapat dijadikan kekuatan. Keterpinggiran perempuan Hindu dimungkinkan menjadi tunggangan sebuah gerakan dan sewaktu-waktu bisa memicu ketegangan yang bersifat SARA, khususnya dalam industri pariwisata di Bali. Untuk itu perlu adanya jalinan relasi yang terbuka, transparan antara manajemen atau pengelola hotel berbintang dengan komunitas perempuan Hindu di lingkungan desa di kawasan Sanur. Posisi keterpinggiran perempuan Hindu dalam industri pariwisata ini menyebabkan mereka dianggap tidak berperan, baik secara sosial (kemasyarakatan), ekonomi (pekerjaan/posisi pekerjaan), maupun politik (pergaulan). Hal ini merupakan salah satu bentuk kegagalan mereka di tingkat pemerintahan desa terkait dengan eksistensi perempuan Hindu di Sanur. Selanjutnya, ⁵ pihak-pihak terkait seperti pemerintah, manajemen hotel, praktisi pariwisata agar mampu dan bisa memfasilitasi, mendekonstruksi komunitas perempuan Hindu sehingga lebih berpeluang untuk bisa bersaing dalam posisi manajer Hotel Berbintang Lima. Dengan cara demikian pada masa mendatang perempuan

Hindu tidak lagi merasa diperlakukan diskriminatif dan terpinggirkan diposisi manajer Hotel Berbintang Lima di kawasan pariwisata Sanur.

Untuk memenangkan persaingan dalam merebut posisi manajer di Hotel Berbintang Lima, perempuan Hindu harus mampu menjauhkan nilai-nilai etika seperti "*de ngaden awak bisa, depang anake ngadanin*" dan filosofi tanaman "padi" arti pemaknaan yang menjadikan perempuan Hindu semakin lemah dan terpinggirkan. Nilai budaya tersebut di atas justru membuat perempuan Hindu mempunyai keterbatasan dalam membangun relasi.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

BAB VII ini terdiri atas dua subbab, yaitu Subbab 8.1 Simpulan dan Subbab 8.2 Saran. Di dalam Subbab 8.1 disajikan simpulan yang diperoleh dari uraian masalah-masalah pokok yang dipaparkan dalam bab-bab di depan, Di dalam Subbab 8.2 dicantumkan beberapa saran.

Simpulan

Berdasarkan analisis masalah-masalah pokok yang disajikan dalam bab-bab di depan dapat dibuat beberapa simpulan. Pertama, bentuk ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur adalah (a) nihilnya perempuan hindu menjadi general manager. Mayoritas mereka hanya sebagai staf biasa dan hanya sebagian kecil mereka (1 orang atau 0,59% dari 169 staf Hotel Berbintang Lima) hanya menduduki posisi manajer kelas menengah; (b) minimnya keterwakilan perempuan Hindu sebagai ⁵ pengurus serikat pekerja sehingga aspirasi mereka kurang tersalurkan; (c) adanya peluang untuk pengembangan kapasitas pekerja perempuan Hindu yang terabaikan, karena ⁵ mereka terlampaui disibukkan oleh urusan keluarga dan adat; dan (d) penerimaan gaji dan insentif yang kurang optimal, karena hanya sebagai staf biasa.

Kedua, faktor-faktor penyebab ¹ keterpinggiran perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan keterpinggiran perempuan Hindu meliputi: (a) skill dan profesionalitas yang belum optimal karena mereka kurang disiplin waktu dan tidak memanfaatkan kesempatan dalam pengembangan kepribadian kapasitas diri melalui pendidikan/pelatihan; (b) adanya keterikatan dengan keluarga, yakni terikat dalam pekerjaan domestik dalam mendampingi

suami dan mengasuh anak yang lebih diutamakan daripada tekun bekerja; dan (c) adanya keterikatan dengan *adat* di tempat tinggal mereka. Keterpinggiran perempuan Hindu yang tidak mendapatkan posisi sebagai Top Manager di Hotel Berbintang Lima juga disebabkan oleh faktor eksternal yang meliputi: (a) keterbatasan relasi sosial di tempat kerjanya; (b) ⁵ belum adanya dukungan kebijakan tertulis yang menegaskan peluang kaum perempuan Hindu menjadi Top Manajer Hotel Berbintang Lima; dan (c) adanya pembinaan/pelatihan yang diabaikan oleh pekerja perempuan Hindu yang bersangkutan.

¹ Ketiga, keterpinggiran perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima juga memiliki dampak dan makna. Dampak keterpinggiran perempuan Hindu ini mencakup dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak budaya. (a) Dampak sosial keterpinggiran ¹ perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima tercermin dengan meluasnya hubungan sosial mereka. Mereka tidak hanya terkungkung dalam jaringan sosial keluarga dan *adat* di tempat tinggal mereka, tetapi bisa terlibat dalam hubungan komunikasi global yang tersedia dalam lapangan kehidupan pariwisata. Namun, jaringan sosial perempuan Hindu tersebut belum difungsikan secara optimal oleh perempuan Hindu. (b) Dampak ekonomi, yakni pekerja perempuan Hindu dapat berkontribusi untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga walaupun mereka tidak menjabat sebagai Top Manager di Hotel Berbintang Lima. (c) Dampak budaya, yakni menguatnya budaya patriarki yang menempatkan kaum perempuan di posisi kedua setelah kaum laki-laki.

¹ Selanjutnya, keterpinggiran perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang di kawasan Sanur memiliki makna, yakni makna keseimbangan peran domestik-publik, makna kesejahteraan, dan makna penguatan label *luh luwih*. Keterpinggiran perempuan Hindu yang gagal menjadi Top Manager di Hotel Berbintang Lima memiliki makna: (a) dalam menjaga keseimbangan antara peran mereka dalam mencari penghasilan di luar rumah dengan peran mereka di desa *adat* yang menjunjung tinggi *Tri Hita Karana*; (b) menjadikan kaum

perempuan Hindu merasa mandiri untuk mendukung kesejahteraan keluarganya; dan (c) mengukuhkan lebel *luh luwih* (perempuan berguna) yang disandangnya. Peran publiknya, yakni bekerja di luar rumah dimotivasi dengan keinginan untuk menyempurnakan peran domestiknya di rumah tangganya serta peran *adat* di masyarakat banjarnya.

Saran

Sesuai dengan tujuan dan temuan penelitian ini serta adanya problematik empirik yang belum bisa terpecahkan secara mendalam terkait dengan keterpinggiran perempuan Hindu dalam Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, ada beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, sulitnya perempuan Hindu Bali menduduki jabatan Top Manajer dikarenakan belum adanya kebijakan (regulasi) tertulis pemerintah. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan akses perempuan Hindu untuk menjabat Top Manajer di Hotel Berbintang Lima, maka perlu ada kebijakan tertulis pemerintah tentang quota perempuan yang dapat menduduki jabatan Top Manajer dalam struktur organisasi manajemen Hotel Berbintang Lima.

Kedua, disarankan agar Desa Adat Pakraman, memperhatikan dan mencermati kembali isi *awig-awig* agar bisa lebih fleksibel, sehingga komunitas perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima bisa lebih nyaman dan ada waktu untuk merebut posisi strategis manajer. Hal tersebut bisa dikonkretkan dengan membangun kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, antara lembaga desa *adat* Sanur dengan pihak pengelola Hotel Berbintang Lima di kawasan wisata Sanur.

Ketiga, kepada Dinas Pariwisata perlu adanya perhatian terhadap perempuan Hindu yang ada di kawasan wisata Sanur, dengan menerbitkan kebijakan tertulis untuk mendukung karir perempuan Hindu yang ingin menjadi Top Manajer di Hotel Berbintang Lima. Dinas Pariwisata juga perlu lebih meningkatkan kuantitas pembinaan, penyuluhan dan pelatihan-

pelatihan skill dan ketrampilan kepariwisataan yang dibutuhkan oleh Hotel Berbintang Lima melalui lembaga terkait.

Keempat, disarankan agar perempuan Hindu ⁵ meningkatkan kualitas mereka dalam membangun jaringan secara vertikal dan horizontal. Dengan cara demikian, wawasan ¹ perempuan Hindu yang berada di Hotel Berbintang Lima di kawasan Sanur, akan bertambah luas sehingga relasi mereka akan lebih mengglobal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2001. *Seks Gender & kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang.
- _____ 2006a. *Studi Tubuh, Nalar dan Masyarakat: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Tici Press.
- _____ 2006b. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Agung, A.A. Gede. 1987. *Pokok-Pokok Materi Pembinaan Desa Adat di Bali*. Denpasar: Monograf, Majelis Pembinaan Lembaga Adat Daerah Tk. I Bali.
- Althusser, Louis, 2008. *Tentang Ideologi : Marxisme Strukturalis, Psikonalisis, Cultural studies* (Olsy Vinoli Arnof, penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra
- Arivia, Gadis, 2003. *Filsafat berspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- ² Ardika, I Gede. 2002. "Paradigma Baru Pariwisata Kerakyatan Berkesinambungan". Makalah yang Disampaikan dalam Seminar Nasional, Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
- Arwati Sri, Ni Made. 1993. *Swadarma Ibu dalam Keluarga Hindu*. Denpasar: Penerbit PT Upada Sastra.
- Atmadja, Nengah Bawa. 1992. *Pelestarian Kawasan Hutan Wisata Kera di Kawasan Sangeh Bali*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Atmaja, Nengah Bawa, 2004. "Pelabelan Seks dan Gender: Dekonstruksi Proses Menjadi Wanita melalui Pendidikan Keluarga pada Masyarakat Bali", dalam *Jurnal Kajian Budaya*. Volume 1 No.2 hal 63-82.
- Ardana, I Ketut. 1994 " Bali dalam Kilasan Sejarah ", dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali* (Pitana, ed).Hlm.17-42.Denpasar : Bali Post.
- Bagus Takwin, 2003. ⁸ *Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Kosep Ideologi dari Plato Hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jala Sutra. Halaman 163-175
- Baha Lajar, Aloysius, 2005. "Jacques Derrida dan 'perayaan'Kemajuan", dalam Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (Ed.) *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 163-176
- Bappeda Kota Denpasar, 2009. "Denpasar dalam Angka (Denpasar in Figures) 2009". Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.
- Barker, Chris, 2005. ³⁰⁴ *Cultural . Teori dan Praktik, terjemahan, Cultural Studies: Theory and Practice*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
- Beauvoir, Simone de, 1953, *The Second Sex*, London: The Alden Press

- Bagus, I Gst Ngr. 1977. *Masalah Budaya dan Pariwisata dalam Pembangunan*. Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana. Denpasar.
- _____. 1980. "Kebudayaan Bali" dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, 286-305. Koentjaraningrat (ed.). Cetakan V. Jakarta.
- _____. 2002. *Masalah Budaya dan Pariwisata dalam Pembangunan*. Suntingan. Cetakan 1. Denpasar.
- Berger, Peter L, dan Thomas Lucmann, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES
- Berger, Peter L, 1994. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Berger, Artur Asa, 2005. *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika* (M.Dwi Marianto Penerjemah). Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Bocock, Robert, t.t.,. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra
- Biro Humas dan Protokol Setwilda Tk. I Bali. 1998. *Pariwisata untuk Bali, Konsep dan Implementasi Pariwisata Berwawasan Budaya*. Denpasar.
- Brooks, Ann. 2008. *Posfeminisme & Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Coser, Lewis A.1975. "Structure and Conflict", dalam Peter M. Blau (ed) *Approach Study of Social Structure*. New York : the Free Press.
- Dahrendrof, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Suatu Analisis Kritik*. Jakarta :Rajawali.
- Data Monografi Desa Sanur Kauh Kota Denpasar. 2008.
- Dwipayana, A.A.G.N. Ari. 2001. *Kelas dan Kasta Pergaulan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Endarswara, Suwardi, 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yoyakarta: Gajah Mada University Press.
- Eriyanto, 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Fachizal A. Halim, 2002. *Beragama dalam Belenggu Kapitalisme*. Magelang: Indonesia Tera
- Fashri, Fausi, 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Featherstone, Mike, 2001. *Posmodernisme dan Budaya Konsumen* (Misbah Zulfa Elisabeth Penerjemah). Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel, 2000. *Seks dan Kekeuasaan (Sejarah Seksualitas)*. Bandung. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- _____2002 c. *Menggugat Sejarah Ide*. Yogyakarta: Ircisod.
- Elmirzanah Syafaatun, Limantina Sihaloho. dkk. *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian* (Studi Bersama Antar Umat). 2002. Cet.1. Diterbitkan atas Kerja sama Institut Dian *Interfidei* dan *The Asia Foundation*.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- _____2008. *Eka Likita Desa Pakraman Intaran Sanur Kauh Kota Denpasar*.
- Gardiner, Myling Oey, dkk, 1996. *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. (Zainudin Penterjemah) Jakarta :Penerbit Pulsar.
- Geriya, I W.1995. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global*. Denpasar :PT Upada Sastra.
- Geriya, I Wayan dan Si Luh Swarsi. 2002. "Profil Tenaga Kerja Wanita Indonesia". dalam *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Vol.2 No.2
- Giddens, Anthony, 2004. *Transformation of Intimacy: Seksualitas, Cinta dan Erotisme dalam Masyarakat Modern* (Riwan Nugroho Penerjemah). Jakarta : Fres Book.
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1996." Etika Hindu dan Perilaku Organisasi". Singaraja :Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma bekerja sama dengan PT Widya Kriya Gematama Denpasar.
- _____2003. *Membudayakan Kerja berdasarkan Dharma*. Singaraja :Pustaka Kajian Hindu, Budaya, dan Prilaku Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma.
- Hardiman, 2007."Tubuh Perempuan: representasi Gender Perempuan Perupa Bali". *Tesis S-2*, Kajian Budaya, Universitas Udayanan. Tidak diterbitkan
- Haryatmoko, 2002. "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekeuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekeuasaan Bersama Foucault". *Basis: Menembus Fakta*. edisi 01-02, Tahun ke -51, Januari-februari. Yogyakarta: Yayasan BP Basis. Halaman 8-12
- Hastuti, Endang Lestari. 1991. "Integrasi Wanita dalam Pembangunan Pedesaan". *Warta Studi Wanita Vol. 2*. No. 2.7-12.
- Hidajadi, Miranti,"Tubuh, Sejarah Perkembangan dan Berbagai Masalahnya",dalam *Jurnal Perempuan* No. 15. Halaman 7-15.

- Herkovits, Melville J. 1974. *Indonesia The Relativity of Culture* dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (ed.). Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jusuf Nus. E. Yirwan dan Th.Hardi Atmaka1995. *Ensiklopedi Nasional Indonesia.Kamus Besar Bahasa Indonesia*:Edisi Kedua. 1995.Jakarta:Balai Pustaka.
- Karmini, Ni Wayan. 2005. "Eksistensi Wanita Hindu dalam Industri Pariwisata di Desa Pakraman Intaran, Sanur Kauh, Denpasar Selatan". Tesis. Denpasar:Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
- Kasiyan, 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta: Ombak
- Kirtiningrat, Putu Adi, 2003."Rukmini Tatwa: kajian Struktur dan fungsi". Skripsi S1 Fak. Sastra Univesitas Udayana
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- _____ 1977. " Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu" dalam (Koentjaraningrat, ed) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:Gramedia.
- Kusuma Djaya, s, 1997. " *Natural beauty Inner Beauty: Maaajemen Diri meraih Kecantikan Sejati dari Khazanah Tradisional*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Kusujarti, S., 1997. "Antara Ideologi dan Transkip Tersembunyi: Dinamikan Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa", dalam Irwan Abdllah (ed.), *Sankan Paran Gender*. Yogyakarta: pustaka pelajar. Halaman 82-100
- Kuata Ratna, I nyoman, 2003. *Pemahaman Budaya di tengah Perubahan: Sebuah Cindramata untuk Prof. Dr. Igst Ngurah Bagus*, dalam I made Suastika dan I Gede Mudana (ed). Denpasar: Program S2 dan S# Kajian Budaya Univ. Udayana.
- _____2008. *Poskoloialisme ndonesia: Revalasi sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kroeber, A.L and Cylde Kluckhon, 1952. *Culture a critical Review of concept and Definition*. New York: Vintage Books A Division of random House.
- Kraeyendecker, Leonardus. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan*. Jakarta:PT Gramedia.
- Lie, Shirley, 2005. *Pembekalan Tubuh Perempuan*. Jakarta: Grasindo.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Semantics: The Study of Meaning*. Great Britain: pelican Books.
- Lubis, Akhyar Yusup. 2004. *Setelah Kebenaran dan Kematian dihancurkan Masih Adakah Tempat Bagi Ilmuwan*. Bogor. Akademia.

- Lury, C. 1998. *Budaya Konsumen* (Hasti T. Champin Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lyotard, Jean-Francois, 2004. *Posmodernisme: Krisi dan Masa Depan Penegetahuan*. Jakarta: Teraju
- Mantra, I B., 1993. *Bali Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: PT. Upada Sastra.
- Mariyah, Emiliana, 2004. *Hambatan budaya dalam Kesehatan Reproduksi: Studi Interaksi Bidan-ibu Hamil di Kalikoles, Jawa Tengah*. Denpasar: Program S2 dan S3 Kajian Budaya Univ. Udayana.
- Melliana, Annastasia, 2006. *Menjelajahi Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKIS
- _____. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern dari Postmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme, hingga Cultura-Studies*. Jakarta :Pustaka Indonesia Satu.
- Miles, Mattew B dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta:UI Press.
- Mantra, I.B.1990. *Bali:Masalah Sosial dan Modernisasi*. Denpasar:PT Upada Sastra.
- _____. 1993. *Bali: Tata Susila Hindu Dharma*. Cetakan I Denpasar:PT Upada Sastra.
- Mulyana, Deddy 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Cetakan III. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong I J, 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Nala, I Gusti Ngurah. 2004. "Psikologi Agama (Ringkasan Diklat)". *Program Studi Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan*. Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
- Noviranti, Dewi. "Negara dan tubuh Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan No. 15*. Halaman 85-94.
- Parimatha, I Gede 2006. " Sistem Industrial Kompleks: Sebuah Analisis Sosio Filosofis". Skripsi S1 Juusan Filsafat FIB UI.
- Parimatha, I Gede, 2006. Sistem Pemerintahan Desa di Daerah Bali", makalah disampaikan dalam seminar Bali Bangkit Bali Kembali, tanggal 12 agustus 2006 di Denpasar.
- Pilliang, Amir Yasraf, 199. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS
- _____. 2003. *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies atas Matinya Batas-batas Kebudayaan*. Yokyakata & Bandung: Jalsutra.
- _____. 2004. *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta & Bandung : jalsutra

- Pitana, I Gd. 1994. "Desa Adat dalam Arus Modernisasi". dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. I Gd. Pitana. (ed.):137-158. Denpasar:Bali Post.
- _____. 2002. "Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan". Denpasar :Makalah yang Disampaikan dalam *Seminar Nasional Dinas Pariwisata Provinsi Bali*.
- Profil Desa Sanur Kauh, Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. 2009.
- Pudja. Gede. 1999. *Bhagawad Gita*. Surabaya:Paramita.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta. 1978. *Manawa Dharmasastra atau Weda Smrti*. Cet. V. Compedium Hukum Hindu.
- Putra, I Nyoman Darma. 2003. *Wanita Bali Tempo Doeloe Perspektif Masa Kini*, Penerbit Yayasan Bali Jani, Gianyar. Cetakan I
- Purwadi dan Rahmad Fajri, 2005. *Mistik dan Kosmologi Serat Centhini*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Prasmoro, Aquarirni Priyatna, 2004. *Becoming White: repereentasi Ras, Klas, Feminitas dan globalitas dalam Iklan Sabun*. Bandung: Jala Sutra.
- Prasmoro, Aquarini Priyatna, 2006. *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, sastra dan Budaya Pop*. Yogyakarta: jalasutra
- Ratih, In Bone, 2005. " *Perempuan Dalam Teater*" dalam *Muji Sutrisno & Hendar Putranto (ed.) Teori- teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kasinius, Hal. 313-353
- Radhakrishnan. S. 2003. *Religion and Society*. Denpasar:Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Bekerja sama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Ritzer George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Terjemahan Alimandan.Ed.1.Cet.5).Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Robert, H Lauer. 2001. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta:Cet.III. PT Rineka Cipta.
- Sapainah, Sadli. 1988. *Wanita Dimensi Manusia dalam Proses Perubahan Sosial*. Depok:Universitas Indonesia.
- Saptari Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Wanita Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta:Grafiti.
- Said Rusli. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cetakan V PT.Delta Pamungkas, Jakarta.

Sarup, Madan. 2003. *Postrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis*. Yogyakarta: Jendela

Soejipto, Ani Widyani, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.

8 Spivak, Gayatri Chakravorty, 2003. *Membaca Pemikiran Jacques Derrida: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: AR-RUZZ.

Sparadley, James P., 1997. *Metode Etnografi* (misbah Zulfa Elisabeth Penerjemah) Yogyakarta: Tiara Wacana

Subali P., Ida Bagus, 2008. *Wanita Mulia Istana Dewa*. Surabaya: Paramitha.

Sudharta, Tjok.Rai dan Gede Pudja. 1978. *Manawa Dharma Sastra*. Departemen Agama RI. Jakarta: CV Junasco.

Sudarta Wayan. 2002. "Pola Pekerjaan Nafkah Wanita Rumah Tangga Petani Lapisan Bawah Di Pedesaan". Dalam Jurnal Studi Jender Srikandi, Vol.2 No.2

Sukarma, I Wayan. 2004. "Humanisme dalam Brahmanisme dan Tradisi Hindu di Bali" Tesis. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.

Sura, I Gede. 1985. *Pengendalian Diri dan Etika dalam Ajaran Agama Hindu*. Denpasar :Departemen Agama R I.

Suriasumantri, Jujun.S. 2003. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sullivan, N, 1991. "Gender and Politics in Indonesia", dalam Maila Stevens. *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Australia: Aristoc Press.

Suryani, Luh Ketut, 2003. *Perempuan Bali Kini*. Denpasar: Bali Post

8 Takwin, Bagus, 2006. "Habitus: perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup" dalam Alfari Adlin (ed.) *Resistensi Gaya Hidup: teori dan Realitas*. Yogyakarta: jalsura, Halaman 35-54.

Titib, I Made. 1998. *Citra Wanita dalam Kekawin Ramayana (Cermin Masyarakat Hindu tentang Wanita)*. Surabaya: Penerbit Paramita.

_____. 2001. *Teologi & Simbol-Simbol Agama Hindu*. Surabaya: Badan Litbang Parisadha Hindu Dharma Indonesia dengan Paramita.

Vondracek, Fred W., 2000. *Volcational and Career Development (Pilihan Kerja dan Pengembangan Karir)*", dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper (ed) *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wiasti, Ni Made, 1998. "Konstruksi gender pada Masyarakat Bali: Kasus wanita Pekerja Kerajinan Bambu di desa Blabatuh, Gianyar". tesis S2, Program studi Antropologi Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Yudha Triguna, Ida Bagus Gde. 2000. *Kedudukan Wanita menurut Hindu Dharma* (Perspektif Sosiologi dan Teologis). Denpasar.

Yudha Triguna, Ida Bagus Gde. 1993. "Pergesaran dalam Pelaksanaan Agama: Menuju Tatwa" dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. (Pitana, ed). Denpasar: Bali Post.

_____.2000. *Mengenal Teori-Teori Pembangunan*. Ed.1 Cet. 1. Denpasar:Penerbit Widya Dharma.

_____.2000. "Kedudukan Wanita menurut Hindu Dharma". Disampaikan pada Lembaga Advokasi Wanita-BKOW Daerah Bali.

_____.2002. "Perempuan: Antara Globalisasi dan Pelestarian Budaya". Disampaikan pada Pelatihan Forum Komunikasi Tokoh Wanita, Denpasar.

Wiana, I Ketut. 1993. *Bagaimana Umat Hindu Menghayati Tuhan*. Jakarta: Pustaka Manikgeni.

_____.1997. *Beragama Bukan Hanya di Pura: Agama Hindu sebagai Tuntunan Hidup*. Denpasar: Yayasan Dharma Narada.

_____.1998. *Berbakti Kepada Leluhur. Upacara Dewa Yadnya dan Upacara Nuntun dewa Hyang*. Surabaya: Paramita.

_____.2004a. *Makna Upacara Yadnya Dalam Agama Hindu*. Jilid II. Surabaya: Paramita.

_____.2004b. *Mengapa Bali Idsebut Bali?* Surabaya: Paramita.

_____.2006. *Berbisnis Menurut Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.

Wiana, Ketut dan Raka Santeri. 1993. *Kasta dalam hindu: Kesalahpaaman Berabad-abad*. Denpasar: Percetakan Bali Post.

Yoeti, Oka A. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

_____.1999. *Membangun Ekonomi Pedesaan Melalui Agro Pariwisata*. Makalah Pada Penataran Dosen PTS Tingkat Nasional. Cisarua Bogor 23-28 Agustus 1999.

Dokumen.

Kompas, 22 November 2008:14

<http://www.denpasarkota.go.id>

<http://www.sanurmaps.go.id>

<http://id.google/Primordialisme>).

<http://google.piramida.com>

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka pertanyaan akan berkembang pada saat wawancara dilakukan sehingga menghasilkan wawancara mendalam. Dalam penggalan data terkait dengan penelitian “Keterpinggiran Perempuan Hindu Dalam Hotel Berbintang Lima di desa kawasan Sanur” disiapkan pedoman untuk pegangan penulis dalam melakukan kegiatan dilapangan, dengan mengklasifikasikan mulai dari (A) gambaran Umum Penelitian, (B) Rumusan Masalah 1, (C) Terkait dengan Rumusan Masalah 2, dan (D) terkait dengan rumusan masalah yang 3. Sebagai pedoman wawancara daftar pertanyaan ini disusun menurut pokok-pokok pernyataan dan akan dikembangkan sesuai dengan konteksnya dilapangan dan penyampaiannya disesuaikan dengan situasi,

bahasa, dan latar belakang para informan yang dipilih. Dalam kegiatan dilapangan daftar pertanyaan dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan ⁸ dan latar belakang informan.

A. Gambaran Umum

1. Bagaimanakah letak sejarah geografis penduduk dan sosial masyarakat dikawasan Sanur?
2. Bagaimanakah adat dan istiadat di desa kawasan Sanur?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk organisasi sosial di desa kawasan Sanur?
4. Bagaimanakah sejarah pariwisata di desa kawasan Sanur?
5. Bagaimanakah asal usul disebut desa kawasan Sanur?

B. Rumusan Masalah 1 (pertanyaan tentang bentuk keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima)

1. Bagaimanakah proses keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima?
2. Identifikasi peran-peran apa saja yang menyebabkan keterpinggiran agar tidak tersubordinasi?
3. Apakah dalam praktek sehari-hari peran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima bekerja tepat waktu, disiplin, mempunyai etos kerja tinggi?
4. Bagaimanakah upaya agar perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima bisa menduduki posisi manager?
5. Apakah perempuan Hindu memiliki potensi untuk kemajuan industri pariwisata yang mendatang? Jelaskan.

C. Rumusan Masalah 2 (Pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan ¹ Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima)

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan keterpinggiran perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima dan sejak kapan?

2. Apakah karena adat yang begitu ketat dan Sanur sebagai tonggak berdirinya pariwisata pertama di Bali dapat dijadikan penyebab keterpinggiran perempuan Hindu pekerja posisi jabatan sebagai manager?
3. Apakah terhegemoni oleh adat dapat dijadikan penyebab terjadinya keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima? Kalau tidak jelaskan, kalau iya jelaskan.

D. Rumusan Masalah 3 (pertanyaan tentang dampak dan makna Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima)

1. Apakah dampak dari keterpinggiran peran perempuan Hindu dalam posisi manajer pada hotel berbintang lima saat ini dan mendatang?
2. Makna apakah yang ditimbulkan dari ¹ keterpinggiran perempuan Hindu pekerja hotel berbintang lima saat ini dan yang akan datang?
3. Apakah karena makna adat istiadat yang begitu ketat bagi perempuan Hindu menyebabkan keterpinggiran posisi strategis sebagai manajer?
4. Apakah makna keterpinggiran bagi perempuan Hindu didalam sosial budaya?
5. Apakah makna keterpinggiran perempuan Hindu mempunyai dampak terhadap peran perempuan urban lain yang bisa menduduki posisi manajer?
6. Usaha apakah yang dapat dilakukan perempuan Hindu dalam mempertahankan jabatan posisi manajer di Hotel Berbintang Lima bagi dirinya dan generasi perempuan Hindu mendatang?

Terima kasih, *Matur Suksma*

Lampiran 2

Daftar Nama Informan

No	Nama		Keterangan
8 1	Nama	: Jhon Pance	Pemerhati dan
	Umur	: 70thn	pelaksana pariwisata
	Jenis Kelamin	: laki-laki	
	Pendidikan	: S1 Pariwisata(Australia)	
	Pekerjaan	: Owner travel	
	Alamat	: Jln.Komodo no 21 Denpasar	
	Agama	: Kristen	
	Status	: Kawin	
2	Nama	: I Gusti Ketut Kamajaya	Sekretaris Bendesa
	Umur	: 45thn	Adat Intaran Sanur
	Jenis Kelamin	: Laki-laki	
	Pendidikan	: S2	
	Pekerjaan	: Dosen Unud	
	Alamat	: Banjar Delod Peken, Sanur	
	Agama	: Hindu	
	Status	: Kawin	

3 Nama : I.B Agastia Tokoh Agama Hindu
Umur : 60thn dan Budayawan
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Anggota Dewan Pusat
Alamat : Desa Sibang, Denpasar
Agama : Hindu
Status : Kawin

8
4 Nama : Gd Pitana Sekretaris Irjen
Umur : 52thn Industri Pemasaran
Jenis Kelamin : laki-laki Pariwisata dan
Pendidikan : S3 Pemerhati Pariwisata
Pekerjaan : PNS
Alamat : Nangka Permai C3, Denpasar
Agama : Hindu
Status : Kawin

No.	Nama	Keterangan
5	8 Nama : Pujiono	G.M Inna Grand Bali
	Umur : 42thn	Beach Hotel
	Jenis Kelamin : laki-laki	
	Pendidikan : D4 Pariwisata Luar Negeri	
	Pekerjaan : G.M Inna Grand Bali Beach	
	Alamat : Apartemen Inna Grand Bali	

Beach
Agama : Islam
Status : Kawin

6 Nama : Mr Jakcs G.M Hotel Bali
Umur : 50 thn Hyatt di Sanur
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : S1Pariwisata Di Amerika
Pekerjaan : G.M Hotel Bali Hyatt Di
Sanur
Alamat : Apartemen Hotel Bali Hyatt
Di Sanur

Agama : Kristen
Status : Kawin

7 Nama : Ni Wayan Rani Nilawati Krama Istri Br.Delod
Umur : 35thn Peken, Desa Sanur
Jenis Kelamin : Perempuan Kauh
Pendidikan : D3 BLP Nusa Dua
Pekerjaan : Karyawan Hotel
Sanur Beach
Alamat : Jln.Toya Ening Gang Durian
No2
Agama : Hindu

Status : Kawin

8
8

Nama : Ni Nyoman Sumiarti Krame Istri Banjar

Umur : 36thn Taman Kelurahan

Jenis Kelamin : Perempuan Sanur

Pendidikan : D3 Pariwisata Renon

Pekerjaan : Kariawan Sanur Baech

Alamat : Jln,Pantai Segare 1 Sanur

Agama : Hindu

Status : Kawin

No. Nama

Keterangan

8
9

Nama : I Wayan Wiana Tokoh Agama dan

Umur : 60thn Budayawan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kembang Merta, Denpasar

Agama : Hindu

Status : Kawin

- 10** Nama : I Gede Pariana Oprasional manajer
Umur : 40thn Sanur Beach Hotel
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S2 Pariwisata Canada
Pekerjaan : Operasional Manajer
Alamat : Jln, Hang Tuah I No 2 Sanur
Agama : Hindu
Status : Kawin
- 11** Nama : Prof. I Wayan Windia, SH, Tokoh Adat Hindu
MSi.
Umur : 55thn
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S3
Pekerjaan : PNS Dosen
Alamat : Gianyar, Br, Nyuhkuning
Agama : Hindu
Status : Kawin
- 12** Nama : Jhon Hanlan Oprasional Manajer
Umur : 37thn Hotel Bali Hyatt
Jenis Kelamin : Laki-laki Sanur
Pendidikan : S1 Pariwisata Selandia Baru
Pekerjaan : Oprasional Manajer
Alamat : Apartemen Bali Hyatt

Agama : Kristen

Status : Kawin

No. Nama

Keterangan

8

13 Nama : Komang Sri Lestari Karame Istri Br.
Umur : 37thn Puseh Kelurahan
Jenis Kelamin : Perempuan Sanur
Pendidikan : D2 Pariwisata
Pekerjaan : Karyawan Hotel Bali Hyatt
Alamat : Jln, Pantai Sanur II
Agama : Hindu
Status : Kawin

8

14 Nama : Ni Nyoman Rasmini Karame istri Br,
Umur : 30thn Medure
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : D3 Pariwisata
Pekerjaan : Karyawan Hotel
Sanur Beach
Alamat : Jln, Toye Ening III
Sanur Kauh
Agama : Hindu
Status : Kawin

8
15

Nama : I Wayan Dana Mantan Oprasional
Umur : 56thn Manajer Sanur
Jenis Kelamin : Laki-laki Beach, sekarang
Pendidikan : D3 Bahasa Jepang Kepala Desa Sanur
Pekerjaan : PNS Kota Denpasar kauh Pemerhati
Alamat : Jln, Tukad Yeh Aya I Pariwisata Dan
Agama : Hindu Lingkungan Hidup
Status : Kawin

16 **Nama** : Ni Wayan Rasmini Krame istri
Umur : 33thn Br,Pekandelan Sanur
Jenis Kelamin : Perempuan Kaja
Pendidikan : S1 Ekonomi
Pekerjaan : Setap Hotel Sanur Beach
Alamat : Jln, Hangtuah III
Agama : Hindu
Status : Kawin

No. Nama

Keterangan

- 17 Nama : Drs. I Nyoman Sudana, MSi. Kepala Bagian SDM
 Umur : 38thn Dinas Pariwisata
 Jenis Kelamin : Laki-laki Provinsi Bali
 Pendidikan : S1 Unud
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jln, Kembang Merta III
 Agama : Hindu
 Status : Kawin
- 18 Nama : Resmanu Kepala Bagian SDM
 Umur : 47thn Dinas Pariwisata
 Jenis Kelamin : Laki-laki Denpasar
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : jln, Pemuda I
 Agama : Hindu
 Status : Kawin
- 19 ⁸ Nama : I.A Rupini Pemerhati Pariwisata
 Umur : 40thn Mantan Manajer
 Jenis Kelamin : Perempuan Oprasional Sanur
 Pendidikan : S1 Luar Negeri Beach dan Krame
 Pekerjaan : Owner Biro Perjalanan Istri Br, Puseh Kauh
 Alamat : Jln,Pura Segara II
 Agama : Hindu
 Status : Kawin

20	Nama	: I Nyoman Suardiana	Asisten manajer
	Umur	: 50thn	Deperteman
	Jenis Kelamin	: Laki-laki	Personalia Inna
	Pendidikan	: D4 Pariwisata Luar Negeri	Grand Bali Beach
	Pekerjaan	: Asisten Personalia	Sanur dan Kepala
	Alamat	: Jln, Angtuh Sanur	Klian adat Br,
	Agama	: Hindu	Pekandelan Sanur
	Status	: Kawin	Kaja

No.	Nama	Keterangan
21	Nama	: NI Wayan Ruscita Wati
	Umur	: 37 thn
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Pendidikan	: S1 BHS Inggris
	Pekerjaan	: Setap SDM Hotel
	Alamat	: jln,Pura Segare I
	Agama	: Hindu
	Status	: Kawin
		Krama istri Br, Dajan
		Peken Desa Sanur
		Kauh dan Mantan
		manajer Depertemen
		Front Office dan
		Sekarang menjadi
		Asisten
		Demarteemen
		Kepegawaian
22	Nama	: Komang Widiatyani
	Umur	: 37thn
	Jenis Kelamin	: Perempuan
		Mantan Manajer
		Oprasional BNR
		Tanah Lot Sekarang

Pendidikan : D4 Pariwisata Asisten Manajer
Pekerjaan : Karyawan Hotel Bali Tranning
Hyatt Sanur Kepegawaiaan Bali
Alamat : jln, Hangtuah II Hyatt Sanur
Agama : Hindu
Status : Kawin

23 Nama : I Nyonam Kurniasih Krame istri Br. Adat
Umur : 40thn Blanjong Sanur Kauh
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : D2
Pekerjaan : Bali Hyatt Sanur
Alamat : jln, Toye Ening IV
Agama : Hindu
Status : Kawin

24 Nama : IGA Inten Nuraini Krame Istri Br.Puseh
Umur : 37thn Kauh Kelurahan
Jenis Kelamin : Perempuan Sanur
Pendidikan : D2 Pariwisata
Pekerjaan : Karyawan Hotel Bali Hyatt
Alamat : jln. Tukad Yeh Ayed II
Agama : Hindu
Status : Kawin

No.	Nama	Keterangan
25	Umur : Ida Ayu Metri	Krame Istri Br,
	Jenis : 35thn	Penopengan
	Kelamin : Perempuan	Kelurahan Sanur
	Pendidikan : S1	
	Pekerjaan : Karyawan Hotel Sanur Beach	
	Alamat : Jl. Segara 1, Sanur	
	Agama : Hindu	
	Status : Kawin	



TENTANG PENULIS



Dr. Dra. Ni Wayan Karmini, M.Si, lahir di Karangasem tahun 1961. Pendidikan SD No.1 Karangasem (1968-1974). SMPN 1 ulakan (1974-1977). SPGN Singaraja (1977-1980). S1 IKIP UNUD Singaraja Prodi Pendidikan Luar Sekolah (1980-1984). S2 UNHI Denpasar Prodi Ilmu Agama dan Kebudayaan (2004-2006). S3 UNUD Denpasar Prodi Kajian Budaya (2008-2011). Kini selain aktif sebagai dosen di Universitas Hindu Indonesia (UNHI Denpasar, juga aktif dalam kegiatan social di masyarakat.

Seorang Pengajar yang sukses , tentu memiliki seni mengajar yang membuat para mahasiswa mudah menerima serta memahami materi pelajaran yang disampaikan. Mengajar boleh jadi, juga sebagai seni atau teaching fundamentally is an art. Seorang Guru tidak dapat menghilangkan seni mrngajar, sesuai dengan kondisi lokalnya, artinya pada situasi dan kondisi tertentu, seni mengajar dapat menonjol, akan tettapi pada situasi lain mungkin teknologi lebih menonjol. Mengajar sebagai salah satu seni mutlak yang diperlukan di sekolah-sekolah tradisional, akan tetapi sekolah-sekolah modern aplikasi Teknologi barangkali lebih menonjol, Sehingga diperlukan kombinasi keduanya yang lebih efektif.

Secara filosofis perempuan Hindu mampu memahami sekaligus melakukan pekerjaan publik karena termotivasi oleh obsesi menjadi perempuan yang ideal (luh-luih). Predikat luh-luih ini merupakan idaman semua perempuan Hindu. Kondisi inilah yang menjadi suatu motivasi internal bagi Perempuan Hindu untuk siap-siap memasuki dunia kerja khususnya di sektor pariwisata.

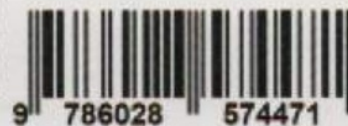


Buku ini membahas posisi perempuan Bali dalam berkarier di kawasan wisata. Beberapa hal yang menarik dari buku ini *Pertama*, bentuk keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur seperti, nihilnya perempuan Hindu menjadi top Manager, minimnya keterwakilan perempuan Hindu dalam Lembaga Serikat Pekerja, pengembangan kapasitas diri yang terabaikann dan penerimaan gaji dan insentif yang kurang optimal.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keterpinggiran perempuan Hindu pekerja Hotel berbintang lima disebabkan oleh faktor internal seperti terbatasnya skill dan profesionalitas, keterikatan keluarga, keterikatan adat, dan faktor eksternal yaitu keterbatasan relasi, ketiadaan dukungan kebijakan tertulis serta kurang pembinaan dan pelatihan dari badan Pemberdayaan Perempuan dari dinas Pariwisata kota dan Propinsi. *Ketiga*, dampak dan maknanya antara lain, dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Makna yang terkait dengan penjelasan hubungan dualisme peran ganda perempuan Hindu Bali yang bersifat domestik dan publik yaitu makna kemandirian ekonomi, makna prestise penguatana label *luh-luwih*.

Temuan dalam penelitian ini yaitu *pertama* berkaitan dengan hegemoni perempuan Hindu di Hotel Berbintang Lima, khususnya sebagai karyawan Hotel Berbintang Lima, secara kognitif perempuan Hindu mempunyai strategi mengatasi di adat dengan melimpahkan tugas kepada keluarga besar, sedangkan di Hotel Berbintang Lima tidak bisa digantikan karena dibutuhkan *skill*. Temuan *Kedua*, kuatnya hegemoni ditingkat global, desa adat, dan di keluarga maka perempuan Hindu menyerah dengan keadaan (pasrah) yang penting bisa bekerja yang dianggap sebagai *yadnya* dan *swadarmaning* sebagai umat manusia. Temuan *Ketiga*, perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima merasa tidak dapat bekerja secara maksimal karena adanya kekuatan dari tarik-menarik Antara adat dan keluarga, dengan status pekerjaan di Hotel berbintang Lima. Temuan *keempat*, ditemukan makna keseimbangan domestik dengan publik, kemandirian ekonomi dan prestise pencitraan. Bisa jadi Predikat *luh-luih* ini merupakan idaman semua perempuan Hindu. Kondisi inilah yang menjadi suatu motivasi internal bagi Perempuan Hindu untuk siap-siap memasuki dunia kerja khususnya di sektor pariwisata.

ISBN 978-602-8574-47-3



Perempuan Hindu Dalam Pasungan Tradisi

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mafiadoc.com Internet Source	1%
2	sahabatilmiah sosiologi.blogspot.com Internet Source	1%
3	www.sp-bni.or.id Internet Source	1%
4	nazula3ap123.blogspot.com Internet Source	1%
5	issuu.com Internet Source	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	anisanurdzakya3ap104.blogspot.com Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%